



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ttentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

(2) RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis Daerah Tahun 2025-2029; dan
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum daerah;
- c. visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
- d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. penutup.

(2) Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dapat diubah apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 11-15/2025 / TAHUN 2025).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 September 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007



RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	14
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	14
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	14
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	47
2.1.3 Aspek Daya Saing.....	67
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	80
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	159
2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Terakhir.....	159
2.2.2. Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	175
2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Ke Depan	177
2.3 PERMASALAHAN DAN SU STRATEGIS.....	189
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	189
2.3.2 Isu Strategis Daerah.....	206
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	226
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	226
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	257
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	303
4.1 Program Perangkat Daerah.....	303
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	328
BAB V PENUTUP.....	356

5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	356
5.2 Manajemen Resiko.....	357
5.3 Perubahan RPJMD.....	358
5.4 Pedoman Transisi.....	359



PENDAHULUAN

BAB

1

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sehingga RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar yang telah ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan Tahun 2025-2030 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Penyusunan RPJMD merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 65 dan Pasal 264 mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun pertama didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045. Pada tahapan atau periode ini, pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan,

pendidikan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, transformasi ekonomi diarahkan untuk hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset dan inovasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal. Transformasi tata kelola pada tahap ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi dan kolaboratif, meningkatkan kualitas ASN, penerapan regulasi secara efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam Pasal 10 mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Sehingga penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 harus selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029.

Penyelarasan antara RPJMD dengan RPJMN mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) asta cita, 17 (tujuh belas)

program prioritas, dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu meliputi antara lain : (1)persiapan penyusunan RPJMD; (2)penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD; (3)pelaksanaan forum konsultasi publik ranwal RPJMD; (4)pembahasan dan penyepakatan ranwal RPJMD dengan DPRD; (5)penyusunan rancangan RPJMD; (6) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (7)perumusan rancangan akhir RPJMD; (8)pembahasan Ranperda RPJMD, dan (9) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 20... Nomor ...);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor

12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

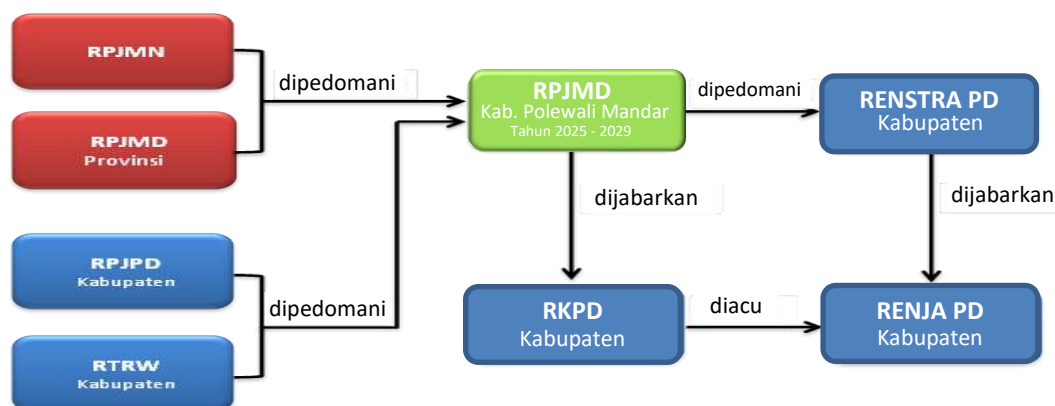
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 harus berpedoman dan selaras dengan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029.

Agar RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta harus selaras dan

sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025–2045.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032, telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata

ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

RPJMD menyajikan hasil evaluasi capaian kinerja keuangan dan pembangunan daerah yang dicapai selama satu periode sebelumnya untuk selanjutnya dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan ke depan. Capaian kinerja tersebut mencakup semua aspek, mulai dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, hingga aspek pelayanan umum. Aspek-aspek tersebut harus diintegrasikan dengan sejumlah perundangan terkait, antara lain terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan lain sebagainya. Pada saat yang sama harus mampu dikonsistenkan dengan sejumlah dokumen strategis lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal, antara lain : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dokumen-dokumen penting terkait lainnya.

RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategis dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. RKPD Kabupaten Polewali Mandar akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar.

Dokumen RPJMD ini juga berhubungan dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Saerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang tersaji dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah :

- Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar masa jabatan 2025-2030 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah :

- Menjadi arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029;
- Menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) selama tahun 2025 sampai 2029, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya;

- Memastikan terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- Menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025- 2029 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi : latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;

Bab II Gambaran Umum Daerah,

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya

saing daerah, serta menjelaskan gambaran keuangan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

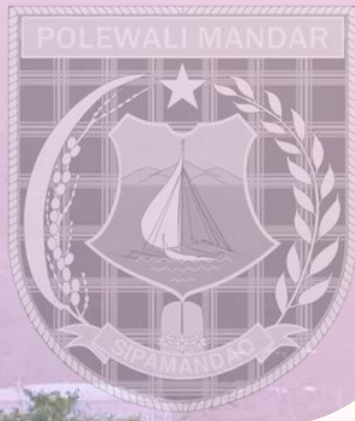
Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode tahun 2025 - 2029. Lebih daripada itu, juga berisikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kemudian dirumuskan program prioritas pembangunan daerah dari masing-masing strategi;

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pagu anggaran setiap tahunnya. Dalam bab ini juga dijelaskan dan ditetapkan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029;

Bab V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, menjelaskan kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB

2

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Polewali Mandar disusun untuk memberikan deskripsi awal mengenai karakteristik fisik, geografis, dan posisi strategis wilayah sebagai dasar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Aspek ini mencerminkan kondisi aktual dan tantangan ekologis maupun sosial yang dihadapi, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara adaptif, berbasis potensi wilayah dan risiko lingkungan yang teridentifikasi secara sistematis melalui kajian keberlanjutan.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Polewali Mandar berada di wilayah pesisir barat Pulau Sulawesi, yang secara administratif termasuk dalam Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi topografi Kabupaten Polewali Mandar sangat bervariasi, terdiri atas wilayah pantai, dataran rendah, hingga kawasan berbukit dan pegunungan. Keberadaan daerah aliran sungai (DAS) yang membelah kawasan daratan dari timur ke barat menjadi karakter penting wilayah ini, di mana daerah hulu umumnya berada di bagian timur dan tengah, sedangkan bagian hilir dan wilayah pesisir terletak di sisi barat yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Pola spasial Kabupaten Polewali Mandar membentuk struktur bentang alam yang berjenjang, dari dataran rendah di pesisir hingga ke perbukitan di bagian timur. Kondisi ini membentuk konfigurasi ruang yang unik, namun juga menimbulkan kerentanan ekologis, terutama di wilayah yang mengalami tekanan konversi lahan dan perubahan tutupan vegetasi. Di sisi lain, kawasan pesisir memiliki fungsi vital, baik secara ekologis sebagai wilayah penyangga dan tempat hidup biota laut (termasuk kawasan mangrove dan terumbu karang), maupun secara sosial-ekonomi sebagai wilayah pemukiman dan aktivitas utama masyarakat nelayan. Identifikasi tutupan lahan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tutupan hutan lahan kering sekunder dan semak belukar masih mendominasi kawasan hulu dan tengah, sedangkan kawasan hilir dan pesisir cenderung terkonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya pada wilayah DAS dan kawasan sempadan pantai yang

mengalami peningkatan intensitas penggunaan lahan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

Kabupaten Polewali Mandar memiliki posisi geografis yang penting karena berada pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Posisi pesisir ini menjadikan wilayah Polewali Mandar memiliki potensi sekaligus tantangan ekologis, terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan serta zonasi kawasan rawan bencana dan kawasan lindung, wilayah ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pada wilayah dataran rendah, pesisir, dan daerah tangkapan air di kawasan hulu. Peran strategis Kabupaten Polewali Mandar juga tercermin dari keberadaannya sebagai wilayah yang memiliki ekosistem penting seperti hutan lindung, mangrove, daerah aliran sungai, serta potensi kawasan konservasi lainnya yang menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan masyarakat. Konektivitas ekologis antara kawasan hulu–tengah–hilir menjadi aspek strategis dalam mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, integrasi pemanfaatan ruang dengan konservasi sumber daya alam menjadi kunci dalam penguatan posisi strategis Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks pembangunan berkelanjutan

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Polewali Mandar memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar di daratan, pegunungan, perairan darat, hingga wilayah pesisir dan laut. Keberagaman geografis dan ekosistemnya menjadikan Polewali Mandar sebagai salah satu wilayah strategis di Sulawesi Barat dalam konteks pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

2.1.1.2.1 Potensi Kawasan Hutan dan Konservasi

Berdasarkan data sebaran penggunaan lahan, Kabupaten Polewali Mandar memiliki total kawasan penggunaan lahan seluas 207.650,32 hektare, yang terdiri dari beberapa fungsi kawasan sebagai berikut:

- Hutan Lindung : 70.223,37 hektare
- Hutan Produksi Terbatas : 23.030,95 hektare

- Taman Hutan Raya (Tahura) : 778,98 hektare
- Areal Penggunaan Lain (APL) : 113.627,50 hektare

Distribusi kawasan hutan ini menunjukkan adanya potensi ekologis yang besar, terutama pada beberapa kecamatan yang memiliki dominasi hutan: Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kawasan dengan potensi hutan lindung tertinggi, yaitu 22.213,64 hektare, dan 4.865,28 hektare hutan produksi terbatas. Kecamatan Matangnga memiliki 13.847,38 hektare hutan lindung dan 2.502,48 hektare hutan produksi terbatas. Kecamatan Tapango menyumbang 4.736,15 hektare hutan lindung dan 833,97 hektare hutan produksi terbatas. Sementara kecamatan lainnya seperti Polewali, Tinambung, dan Wonomulyo memiliki luasan kawasan hutan yang relatif kecil. Meskipun lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 778,98 hektare tidak dijelaskan secara spesifik per kecamatan, keberadaannya tetap memberikan kontribusi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lokal.

Potensi kawasan hutan ini memberikan manfaat ekologis berupa konservasi keanekaragaman hayati, penopang sistem hidrologi, serta penyediaan jasa lingkungan seperti udara bersih, pengendali banjir, dan pelindung mata air. Namun, tingginya proporsi APL menandakan adanya tekanan pemanfaatan ruang yang perlu dikendalikan melalui perencanaan ruang yang Lestari.

2.1.1.2.2 Potensi Topografi dan Sumber Daya Lahan

Secara topografi, Polewali Mandar didominasi oleh bentang berbukit hingga bergunung, mencakup 69,50% dari luas kabupaten, sedangkan lahan datar hanya mencakup sekitar 2% wilayah. Komposisi ini menunjukkan tantangan sekaligus potensi dalam pengembangan komoditas pertanian lereng, kehutanan rakyat, dan konservasi tanah serta air.

Tingkat kemiringan lahan mempengaruhi arah penggunaan ruang dan teknologi budidaya yang tepat. Kawasan pegunungan sangat potensial untuk pengembangan agroforestri, pertanian organik, dan konservasi tanah air.

2.1.1.2.3 Potensi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sumber Daya Air

Kabupaten Polewali Mandar memiliki total luas Daerah Aliran Sungai (DAS)

sebesar 397.214,08 hektare, dengan DAS terbesar adalah DAS Mapilli seluas 235.677,47 hektare, dan DAS terkecil adalah DAS Malunda dengan luas 67.692,30 hektare. DAS ini menjadi sumber daya vital dalam mendukung sistem irigasi pertanian, pasokan air bersih, dan konservasi ekosistem air.

Potensi air ini sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian, budidaya perikanan air tawar, serta kebutuhan rumah tangga dan industri. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi DAS harus dijaga dengan perlindungan vegetasi penyangga dan pengendalian konversi lahan.

2.1.1.2.4 Potensi Kelautan dan Perikanan

Polewali Mandar memiliki garis pantai sepanjang 101,99 km yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, serta wilayah laut seluas 460 km². Hal ini memberikan potensi besar dalam sektor perikanan tangkap, budidaya laut, dan pariwisata pesisir.

Perairan laut dan pesisir ini menjadi lokasi penting untuk pengembangan tambak rakyat, rumput laut, ekowisata bahari, dan penguatan sentra produksi perikanan. Wilayah pesisir juga berperan penting sebagai zona perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang.

2.1.1.2.5 Potensi Wilayah Budidaya dan Kawasan Peruntukan

Pemerintah daerah telah mengarahkan kawasan budidaya ke dalam beberapa kategori strategis, yaitu:

- A. Kawasan peruntukan pertanian: menyasar lahan produktif di dataran rendah dan lereng.
- B. Kawasan peruntukan kehutanan: terutama hutan produksi terbatas dan hutan rakyat.
- C. Kawasan peruntukan perikanan: di pesisir dan DAS dengan potensi air yang mencukupi.
- D. Kawasan pertambangan dan industri: diarahkan secara selektif pada wilayah yang memiliki potensi mineral tertentu.
- E. Kawasan pariwisata dan permukiman: dikembangkan secara terpadu agar tidak mengganggu ekosistem sensitif.

Keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Polewali Mandar.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan daya dukung lingkungan hidup sebagai kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan di antara keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menimbulkan kerusakan.

Secara prinsip, konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan mencerminkan ketidakseimbangan antara sisi pasokan (supply) yang bersifat terbatas—yakni kapasitas ekosistem menyediakan jasa lingkungan dan sisi permintaan (demand) yang cenderung tidak terbatas, yaitu kebutuhan manusia. Daya dukung lingkungan menunjukkan batas kemampuan suatu wilayah dalam menopang aktivitas manusia berdasarkan kondisi alam dan kapasitas ekosistemnya. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan akan menghasilkan keputusan yang lebih ramah lingkungan dan mampu meminimalkan kerusakan ekosistem.

Untuk menjaga fungsi dan stabilitas ekosistem, pemanfaatan lingkungan tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung yang dimilikinya. Status daya dukung suatu wilayah dapat dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Jika supply lebih kecil dari demand, maka status daya dukung dinyatakan "terlampau". Sebaliknya, bila supply lebih besar, maka daya dukung masih dalam batas aman.

Dalam laporan ini, penghitungan daya dukung lingkungan dilakukan dengan pendekatan berbasis jasa lingkungan. Berdasarkan ketersediaan data, analisis dilakukan terhadap dua komponen utama, yaitu daya dukung penyediaan air dan daya dukung penyediaan pangan. Penjabaran lengkap untuk masing-masing komponen disampaikan pada bagian berikut.

2.1.1.3.1 Daya Dukung Penyediaan Air

Daya dukung penyediaan air mengacu pada kemampuan sistem atau infrastruktur sumber daya air dalam menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas untuk berbagai kebutuhan, baik domestik, pertanian, industri, maupun kegiatan lainnya. Analisis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah ketersediaan air di Kabupaten Polewali Mandar mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah.

Penghitungan status daya dukung air dilakukan dengan membandingkan antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan air. Data ketersediaan dihimpun berdasarkan potensi wilayah sungai yang dimodelkan dalam sistem grid serta menggunakan indeks jasa lingkungan untuk memetakan distribusi air. Sementara itu, kebutuhan air dihitung berdasarkan jumlah penduduk per wilayah grid, menggunakan standar konsumsi air sebesar 800 m³/kapita/tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009.

Selanjutnya, kebutuhan air untuk sektor pertanian juga diperhitungkan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait total kebutuhan air per wilayah. Hasil analisis ini menghasilkan peta spasial yang menggambarkan distribusi kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Polewali Mandar.

Di samping itu, dilakukan pula estimasi jumlah maksimum penduduk yang masih dapat dilayani oleh ketersediaan air di masing-masing wilayah (*carrying capacity*). Informasi ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mitigasi risiko kekurangan air di masa mendatang.

Tabel 2.1 menyajikan data rinci mengenai jumlah ketersediaan dan kebutuhan air di setiap kecamatan, baik untuk tahun 2024 maupun proyeksi tahun 2030. Pemetaan spasial lebih lanjut disajikan melalui Tabel 2.1 hingga Gambar 3.22.

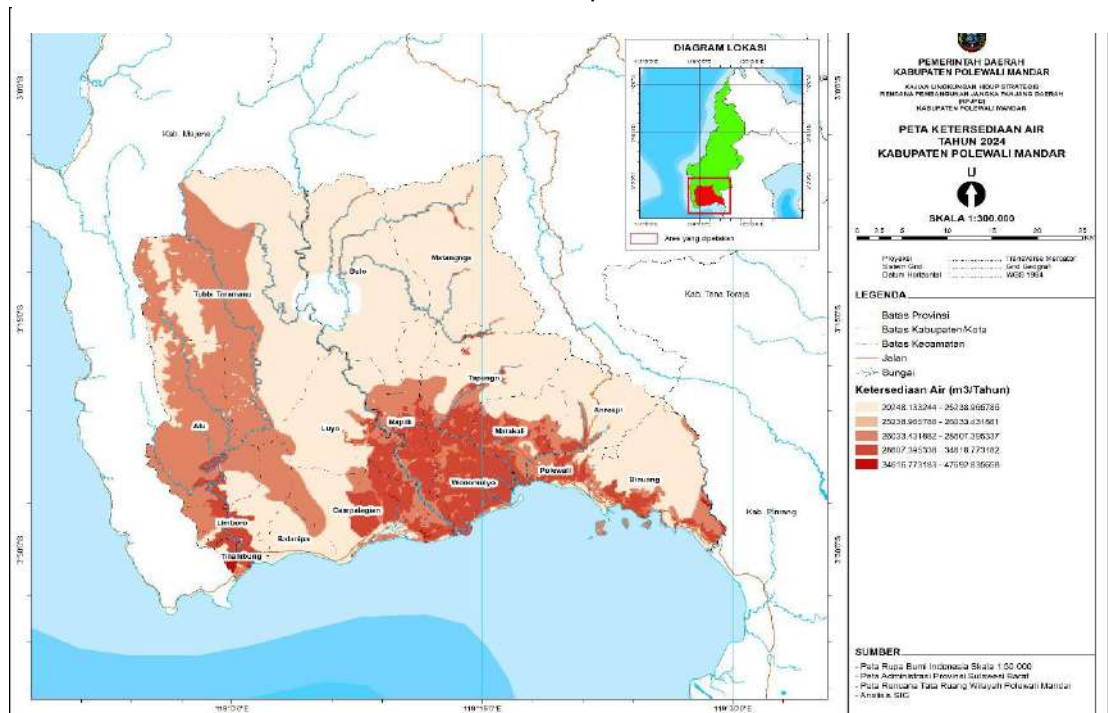
Tabel 2. 1
Jumlah Ketersediaan dan kebutuhan Air di Kabupaten Polewali Mandar

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa tahun)		KETERSEDIAAN (m3 tahun)		KEBUTUHAN (m3 tahun)		SELISIH KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN (m3 tahun)	
	2024	2030	2024	2030	2024	2030	2024	2030
Alu	15.787,00	17,573	214.709.955,33	214.709.955,33	24,882,489.63	26,767,289.63	189.371.465,70	30,695,645,092
Anreapi	11.921,00	13,132	104.607.035,90	104.607.035,90	20,085,362.59	21,330,162.59	84.245.673,31	14,038,077,755
Balanipa	31.219,00	34,398	39.451.155,00	39.451.155,00	35,986,341.24	39,398,341.24	2.596.013,76	-18,076,478,287
Binuang	43.573,00	49,465	176.658.475,01	176.658.475,01	65,465,435.30	71,884,635.30	109.487.439,71	2,919,538,024
Bulo	11.248,00	12,506	260.122.424,30	260.122.424,30	9,744,904.81	11,210,504.81	249.918.319,49	54,539,679,866
Campalagian	69.125,00	75,747	148.810.752,97	148.810.752,97	126,072,053.44	133,844,853.44	20.263.499,52	-25,750,612,591
Limboro	20.214,00	21,563	84.179.732,29	84.179.732,29	34,987,607.42	36,468,407.42	48.790.524,86	693,956,998
Luyo	35.393,00	39,026	154.119.164,45	154.119.164,45	82,614,231.09	86,457,431.09	70.568.133,36	2,559,056,235
Mapilli	36.416,00	40,267	142.423.795,72	142.423.795,72	95,760,941.98	100,200,141.98	45.304.453,74	1,523,014,437
Matakali	30.271,00	34,326	98.037.343,20	98.037.343,20	75,605,045.10	79,989,045.10	21.292.298,10	-4,312,308,454
Matangnga	6.165,00	6,789	275.999.007,16	275.999.007,16	8,107,899.61	8,684,699.61	267.813.507,55	63,142,154,872
Polewali	70.310,00	76,773	41.501.244,62	41.501.244,62	74,825,554.23	81,892,754.23	-35.221.109,61	-50,287,244,680
Tapango	27.278,00	29,979	156.945.890,95	156.945.890,95	57,377,187.58	60,027,587.58	99.079.103,37	14,642,320,113
Tinambung	25.568,00	26,903	31.715.811,25	31.715.811,25	36,164,856.39	37,645,656.39	-4.861.845,14	-14,114,618,042
Tubbi Taramanu	25.155,00	28,218	509.607.849,26	509.607.849,26	26,989,212.53	30,307,612.53	481.750.636,73	87,368,478,179
Wonomulyo	53.510,00	56,498	116.503.978,60	116.503.978,60	116,761,747.88	119,843,347.88	-948.969,29	-17,002,173,837
Grand Total	513.153,00	563,163	2.555.393.616,00	2.555.393.616,00	891,430,870.83	945,952,470.83	1.649.449.145,17	142,578,485,680

Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023

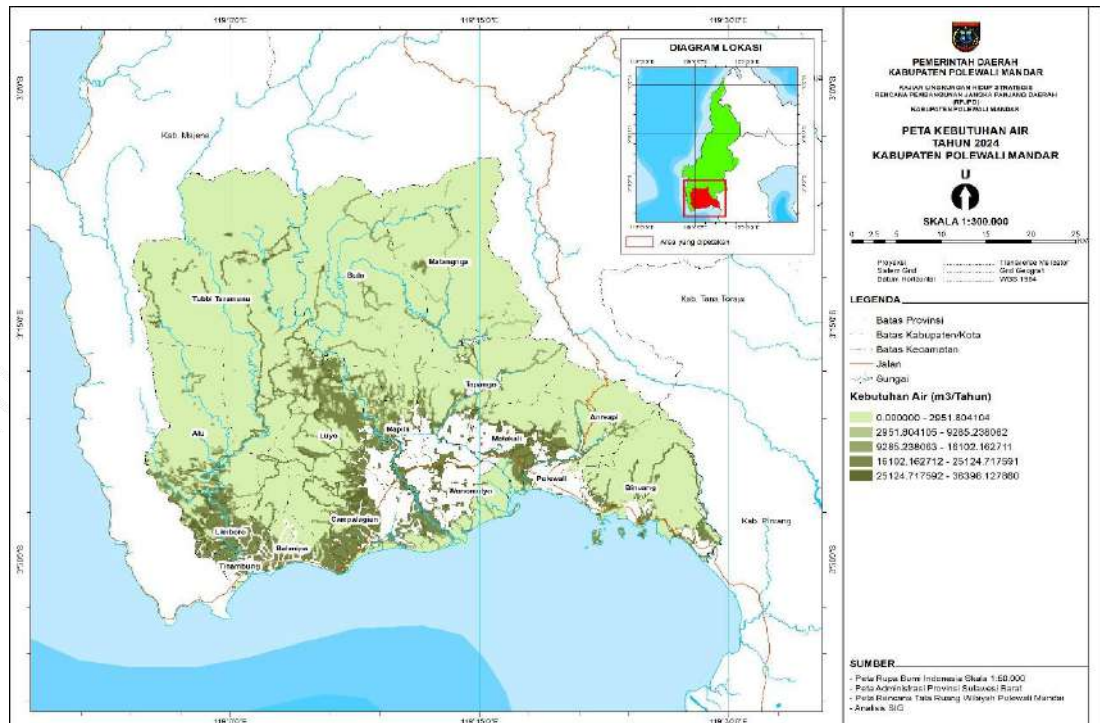
Secara umum, hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan air pada seluruh kecamatan hingga tahun 2030. Hal ini menjadi indikasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk merumuskan strategi antisipatif, terutama dalam menghadapi potensi krisis air bersih sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Gambar 2. 1
Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Polewali Mandar



Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023

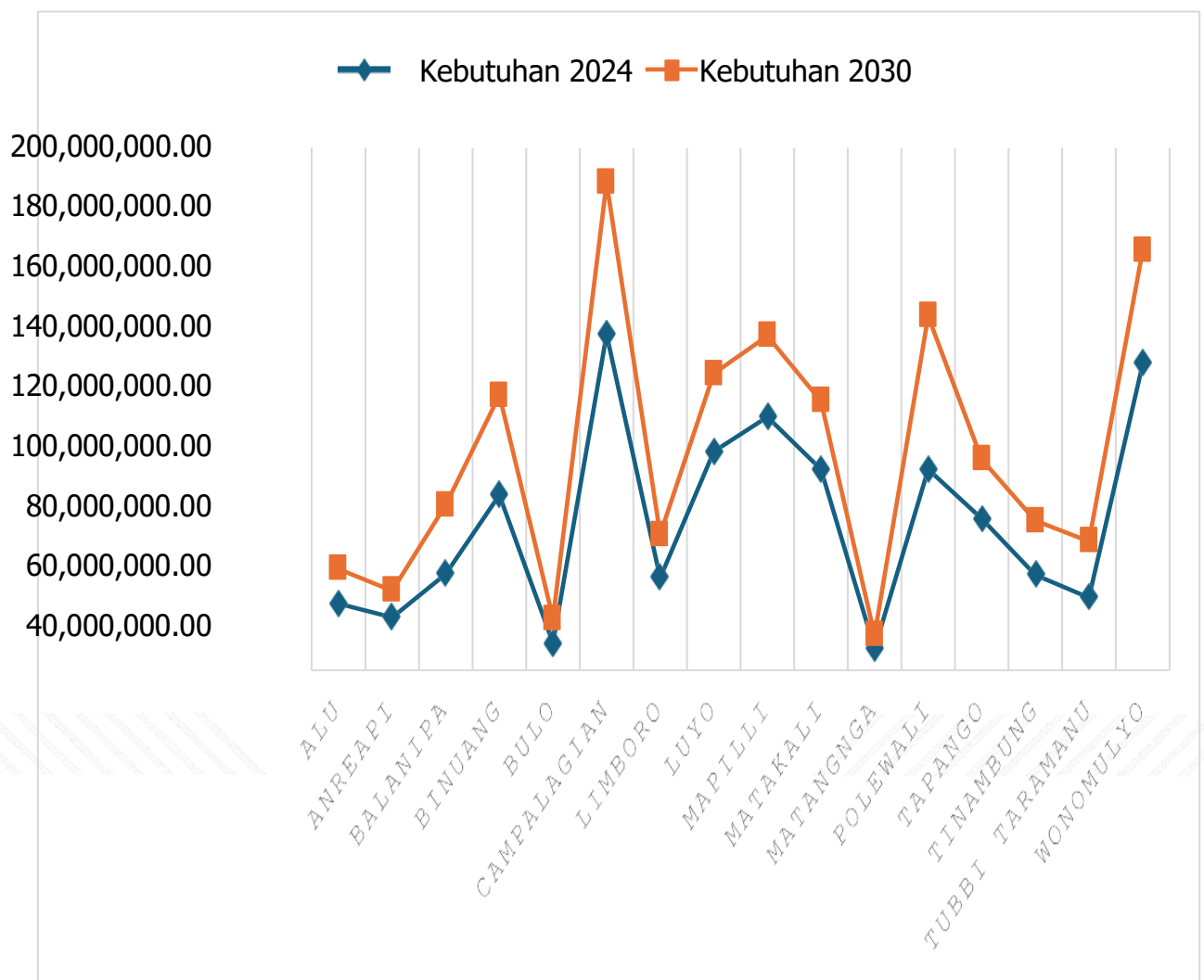
Gambar 2. 2
Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Polewali Mandar



Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2.2, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung penyediaan air terlampaui atau tidak terlampaui. Adapun perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 dan tahun Proyeksi 2045 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2. 1
Daya Dukung Daya Tampung Tahun 2024 dan Tahun 2030
di Kabupaten Polewali Mandar dirinci menurut Kecamatan



Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023

Grafik 2.1 menggambarkan sebuah tren yang perlu menjadi perhatian serius bagi

wilayah tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan air di setiap kecamatan hingga tahun 2045, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan krisis air bersih di masa depan. Fenomena ini mencerminkan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang dapat memicu peningkatan kebutuhan akan sumber daya air. Sebagai contoh, peningkatan aktivitas industri dan urbanisasi dapat mengakibatkan peningkatan permintaan akan air bersih untuk keperluan domestik, industri, dan komersial.

Untuk menghadapi tantangan ini, langkah-langkah pencegahan dan mitigasi harus segera diambil. Pertama, diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan air melalui edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan air. Selain itu, pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk pengelolaan air yang lebih efisien juga diperlukan. Investasi dalam sistem penyediaan air bersih, seperti pengembangan sumber air alternatif, pengolahan air limbah, dan rehabilitasi sumber air alami, perlu diprioritaskan. Perlu diingat bahwa analisis daya dukung ini bersifat lokal, sedangkan manusia memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya dari wilayah lain.

Selain itu, langkah-langkah konservasi lingkungan dan pemeliharaan ekosistem harus diperkuat untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air. Perlindungan terhadap kawasan hutan, sungai, dan daerah resapan air menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan air yang berkelanjutan. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran air, juga harus dilakukan secara ketat.

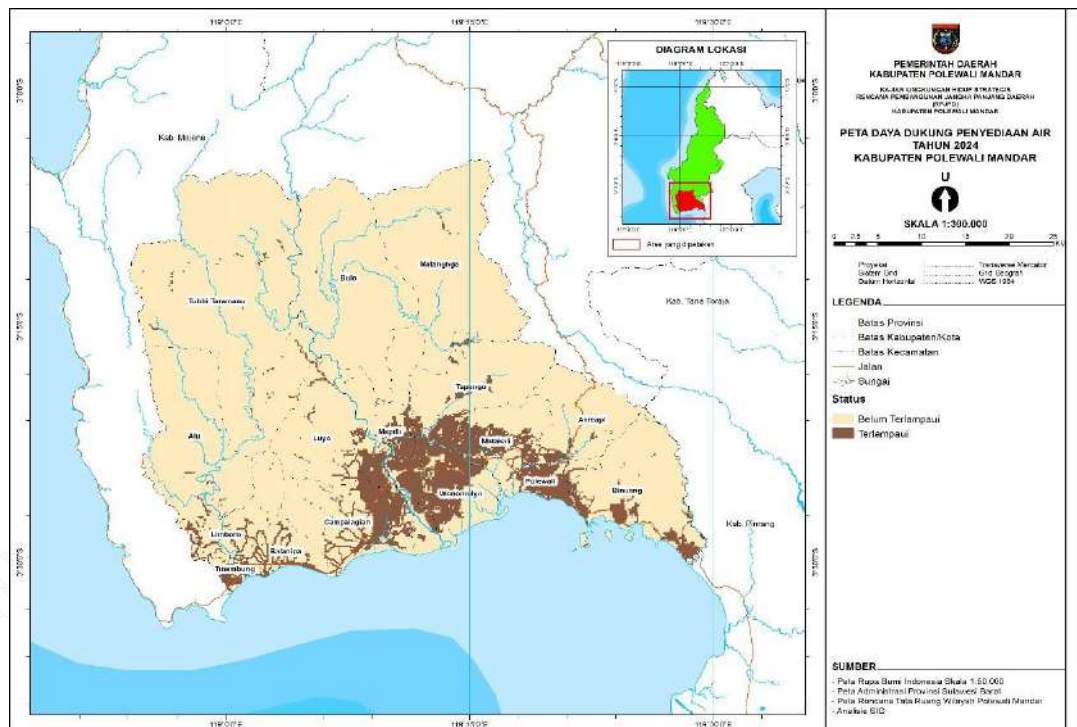
Tabel 2. 2
Luasan (ha) Status Daya Dukung Penyediaan Air
di Kabupaten Polewali Mandar Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun 2024				Tahun 2030			
	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%
Alu	17.237,34	9.41	125,17	0.51	17,172.8	9.46	189.7	0.73
Anreapi	8.593,99	4.69	515,45	2.10	8,564.5	4.72	545.0	2.09
Balanipa	2.438,41	1.33	865,21	3.52	2,425.0	1.34	878.6	3.37
Binuang	12.642,54	6.90	1.946,86	7.93	12,535.4	6.90	2,054.0	7.89
Bulo	22.813,83	12.46	24,61	0.10	22,793.7	12.55	44.8	0.17
Campalagian	7.868,91	4.30	3.728,38	15.19	7,560.8	4.16	4,036.5	15.50
Limboro	5.809,41	3.17	696,85	2.84	5,631.9	3.10	874.4	3.36
Luyo	10.568,12	5.77	1.802,43	7.34	10,385.7	5.72	1,984.8	7.62

Kecamatan	Tahun 2024				Tahun 2030			
	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%
Mapilli	7.356,35	4.02	2.926,04	11.92	7,238.5	3.99	3,043.9	11.69
Matakali	4.623,79	2.53	2.644,47	10.77	4,534.2	2.50	2,734.1	10.50
Matangnga	23.617,23	12.90	62,67	0.26	23,606.0	13.00	73.9	0.28
Polewali	1.013,83	0.55	2.031,88	8.28	1,000.3	0.55	2,045.4	7.85
Tapango	10.922,00	5.96	1.828,31	7.45	10,843.0	5.97	1,907.3	7.32
Tinambung	1.332,44	0.73	874,13	3.56	1,319.0	0.73	887.6	3.41
Tubbi Taramanu	42.703,79	23.32	352,35	1.44	42,511.4	23.41	544.8	2.09
Wonomulyo	3.570,29	1.95	4.123,72	16.80	3,495.4	1.92	4,198.6	16.12
Grand Total	183.112,26	100	24.548,54	100	181,617.6	100	26,043.2	100

Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023

Gambar 2. 1
Peta Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Polewali Mandar



Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023

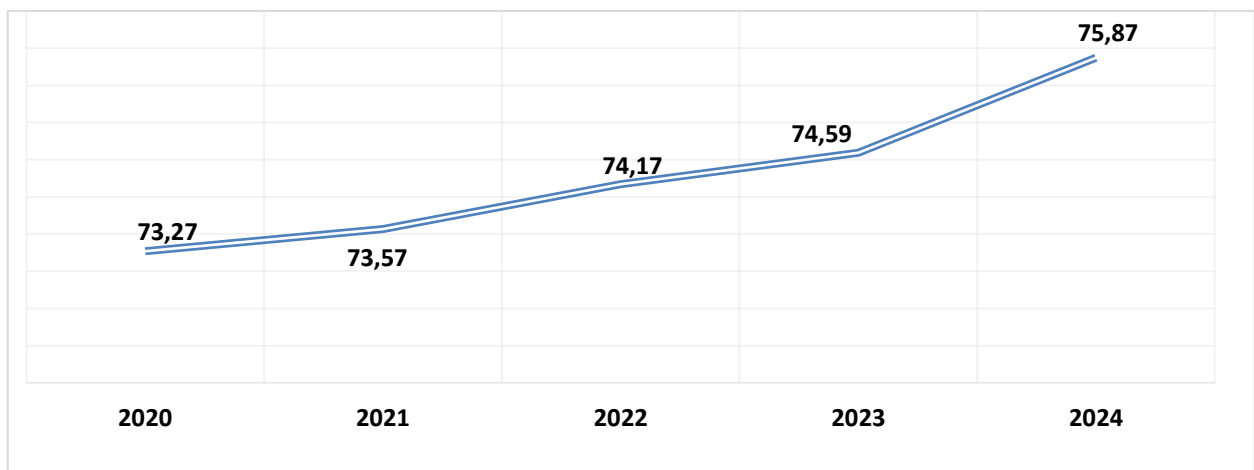
Strategi pengelolaan dapat mencakup edukasi publik tentang efisiensi penggunaan air, pembangunan infrastruktur air bersih, pengembangan sumber air alternatif, serta penguatan perlindungan lingkungan. Upaya konservasi kawasan hulu

dan daerah resapan air, pengelolaan DAS, serta pengendalian deforestasi menjadi komponen kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Indeks ini mencerminkan kinerja suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Di Kabupaten Polewali Mandar, capaian Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Secara rinci, perkembangan IKP Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 2
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber : RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045

Berdasarkan data dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045, nilai indeks pada tahun 2020 tercatat sebesar 73,27, dan terus meningkat menjadi 73,57 pada tahun 2021, 74,17 pada tahun 2022, 74,59 pada tahun 2023, dan mencapai 75,87 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja ketahanan pangan daerah dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dokumen RPJPD tidak merinci secara khusus faktor-faktor penyebab atau intervensi program yang mendasari peningkatan indeks tersebut.

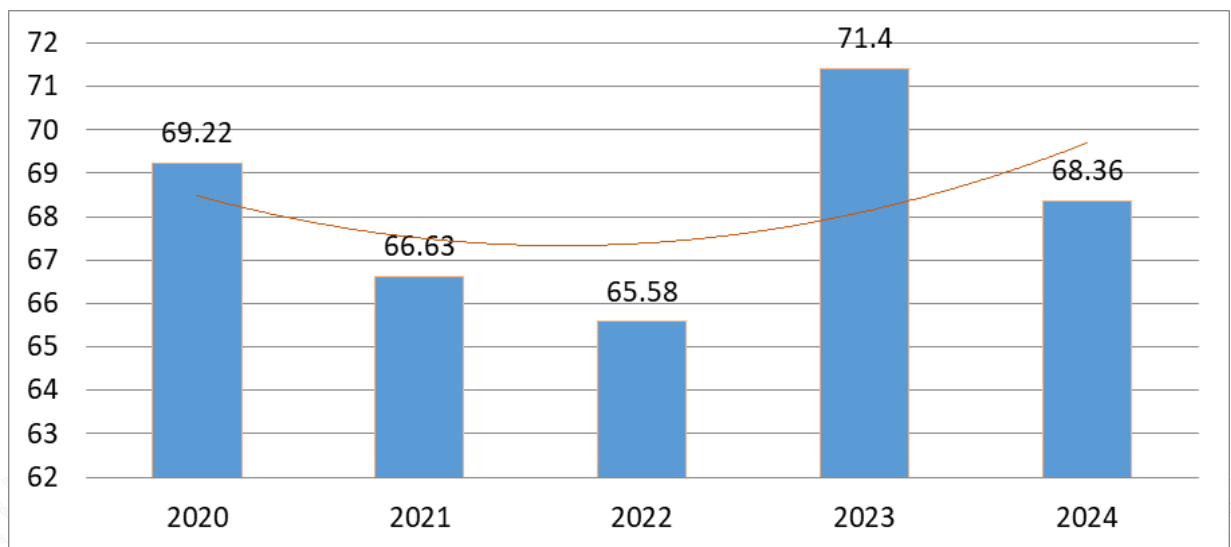
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran komposit yang merepresentasikan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan lima parameter utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH dinyatakan dalam satuan poin (0–100), di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik kualitas lingkungan hidup.

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), IKLH Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 69,22 poin, kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi 66,63 poin pada tahun 2021 dan 65,58 poin pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian 71,40 poin, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai tersebut kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 68,36 poin.

Grafik 2. 3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan, baik dalam menjaga kualitas air, udara, maupun tutupan lahan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 kemungkinan merupakan hasil dari intervensi kebijakan atau program pemulihan lingkungan, meskipun data tersebut memerlukan verifikasi lanjutan. Sementara itu,

penurunan kembali pada tahun 2024 memperkuat pentingnya konsistensi dalam pengelolaan lingkungan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Strategi ke depan perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan kritis, serta edukasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dalam periode tahun 2021 hingga 2024. Data pada tahun 2020 tidak tersedia. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 620 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman dari total 112.710 rumah tangga, sehingga persentasenya sebesar 0,55%. Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman tetap 620 rumah tangga, namun karena jumlah rumah tangga keseluruhan menurun menjadi 117.641 rumah tangga, persentasenya meningkat menjadi 1,05%.

Tabel 2. 3
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman	KK	N/A	620	620	809	1685
2	Jumlah rumah tangga	KK	112.710	112.710	117.641	119.788	119.788
	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Persen	-	0,55	1,05	1,71	2,60

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Polewali Mandar, 2025

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman menjadi 809 rumah tangga dari total 119.788 rumah tangga, atau 1,71%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman mencapai 1.685 rumah tangga, dengan persentase 2,60% dari total 119.788 rumah tangga. Dengan demikian, data menunjukkan tren kenaikan secara bertahap dalam jumlah maupun persentase rumah tangga yang memiliki akses

sanitasi aman di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2021–2024.

2.1.1.5.3 Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan

Timbulan sampah merupakan jumlah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 69.865.964 kg, meningkat menjadi 70.571.874 kg pada 2021, dan terus naik menjadi 71.451.524 kg pada 2022 serta 72.324.166 kg pada 2023 dan tetap pada angka yang sama pada 2024.

Tabel 2. 4
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Kg/Orang	37.035.948	30.225.934	16.826.834	16.403.121	9.915.644
2	Jumlah timbulan sampah	Kg/Orang	69.865.964	70.571.874	71.451.524	72.324.166	72.324.166
	Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	53,01	42,83	23,55	22,68	13,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

Namun demikian, volume sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang terolah mencapai 37.035.948 kg atau 53,01% dari total timbulan sampah. Persentase ini turun menjadi 42,83% pada 2021, kemudian menurun lebih drastis menjadi 23,55% pada 2022, dan menjadi 22,68% pada 2023. Pada tahun 2024, proporsi sampah yang terolah hanya sebesar 13,71%, dengan jumlah sebesar 9.915.644 kg. Penurunan persentase pengolahan sampah ini terjadi meskipun volume timbulan sampah meningkat, sehingga menunjukkan penurunan kinerja fasilitas pengolahan dalam menangani sampah yang dihasilkan.

2.1.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar pada periode 2020–2024 menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan, baik ditinjau dari luas area pelayanan maupun dari proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah. Berdasarkan Tabel 2.4, pada tahun 2020 luas area pelayanan pengumpulan sampah tercatat sebesar 2.823,07 hektar dari total luas area terbangun 6.789,63 hektar, sehingga cakupan layanan berada pada level 41,58%. Cakupan ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 52,61% dan tetap stagnan di angka tersebut hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis cakupan layanan menjadi hanya 25%, dengan luas area pelayanan yang berkurang menjadi 1.697,89 hektar.

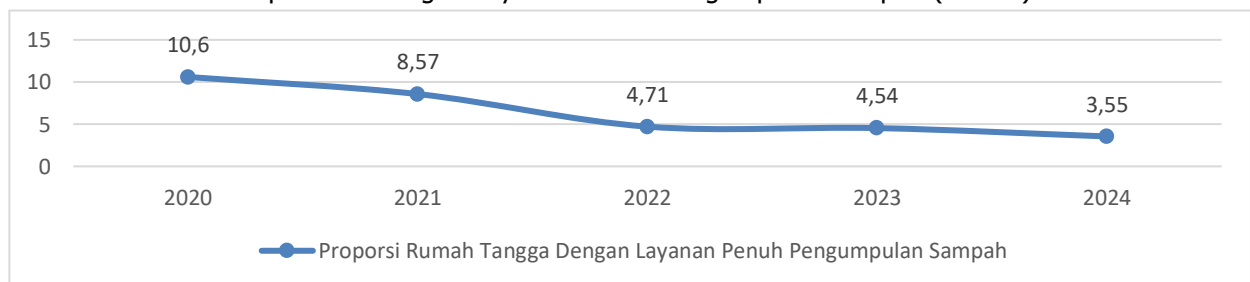
Tabel 2. 5
Cakupan Layanan Persampahan (Persen)

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Area Pelayanan	Ha	2.823,07	3.569,08	3.569,08	3.569,08	1697,89
2	Luas Area Terbangun	Ha	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63
Persentase cakupan layanan		Persen	41,58	52,61	52,61	52,61	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

Penurunan cakupan layanan juga tergambar pada data proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.5, proporsi tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut: dari 10,60% pada tahun 2020 menjadi 8,57% pada 2021, kemudian turun menjadi 4,71% pada 2022, 4,54% pada 2023, dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 3,55%.

Grafik 2. 4
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (Persen)



Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam aspek pengumpulan dan cakupan layanan. Penurunan luas area pelayanan dan rendahnya proporsi rumah tangga yang dijangkau layanan pengumpulan sampah menegaskan perlunya perbaikan sarana dan prasarana persampahan secara menyeluruh, termasuk ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta infrastruktur pendukung lainnya.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Gas rumah kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, dengan meningkatnya GRK di atmosfer dapat menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Polewali Mandar baru dilaksanakan pada tahun 2024 lalu sehingga base line data 5 tahun terakhir tidak dapat disajikan. Intensitas emisi GRK pada tahun 2024 adalah 29,34 Persen.

Kabupaten Polewali Mandar salah satu daerah penghasil sumber emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah sedangkan dari sektor IPPU tidak memiliki sumber emisi karena Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki jenis industri yang dipersyaratkan seperti yang termuat dalam Permen LHK No.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Penyumbang emisi tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar berasal dari sektor limbah, kemudian dari sektor pertanian, sektor energi dan sektor kehutanan.

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu sasaran utama pembangunan daerah menuju Net Zero Emission. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2045, kondisi intensitas emisi GRK pada tahun 2023 tercatat sebesar 30,90 persen, ditetapkan sebagai baseline 40,87 persen pada tahun 2025, dan ditargetkan menurun hingga 73,29 persen pada tahun 2045.

Gas rumah kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, dengan meningkatnya GRK di atmosfer dapat menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Polewali Mandar baru dilaksanakan pada tahun 2024 lalu sehingga base line data 5 tahun terakhir tidak dapat disajikan. Intensitas emisi GRK pada tahun 2024 adalah 29,34 Persen.

Kabupaten Polewali Mandar salah satu daerah penghasil sumber emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah sedangkan dari sektor IPPU tidak memiliki sumber emisi karena Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki jenis industri yang dipersyaratkan seperti yang termuat dalam Permen LHK No.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Penyumbang emisi tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar berasal dari sektor limbah, kemudian dari sektor petanian, sektor energi dan sektor kehutanan.

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu sasaran utama pembangunan daerah menuju Net Zero Emission. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2045, kondisi intensitas emisi GRK pada tahun 2023 tercatat sebesar 30,90 persen, ditetapkan sebagai baseline 40,87 persen pada tahun 2025, dan ditargetkan menurun hingga 73,29 persen pada tahun 2045.

Tabel 2. 6
Penurunan Intensitas Emisi GRK

Tahun	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
Kondisi Tahun 2023	30,90
Baseline 2025	40,87
Target 2045	73,29

Sumber: RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045

2.1.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

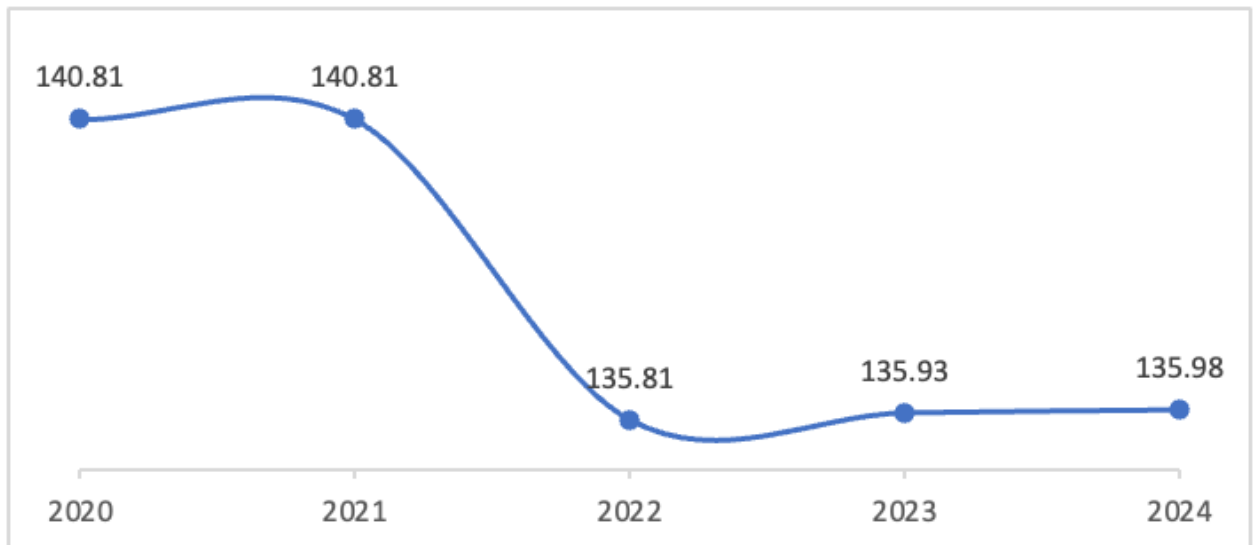
Indeks Risiko Bencana diperoleh dari hasil kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Secara konseptual, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Posisi geografis, topografi wilayah, dan kondisi alam Kabupaten Polewali Mandar cukup rentan terhadap bencana alam. Wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain:

- A. Bencana tanah longsor meliputi wilayah Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Balanipa, Mapilli, Anreapi, Bulu, Tapango, Matangnga dan Binuang;
- B. Abrasi dan erosi pantai tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang;
- C. Kawasan gelombang pasang dan banjir rob tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang;
- D. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kecamatan Tinambung, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Binuang dan Polewali;
- E. Kawasan rawan gempa bumi berdasarkan riwayat kegempaan terutama di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu dan Tubbi Taramanu;
- F. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal tersebar di Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Bulu, Anreapi, dan Matangnga;
- G. Kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian <10

- meter di atas permukaan laut, terutama di bagian pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, dan Wonomulyo;
- H. Kawasan rawan intrusi air laut meliputi wilayah pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.

Grafik 2. 5
Indeks Risiko Bencana (Poin) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, 2025

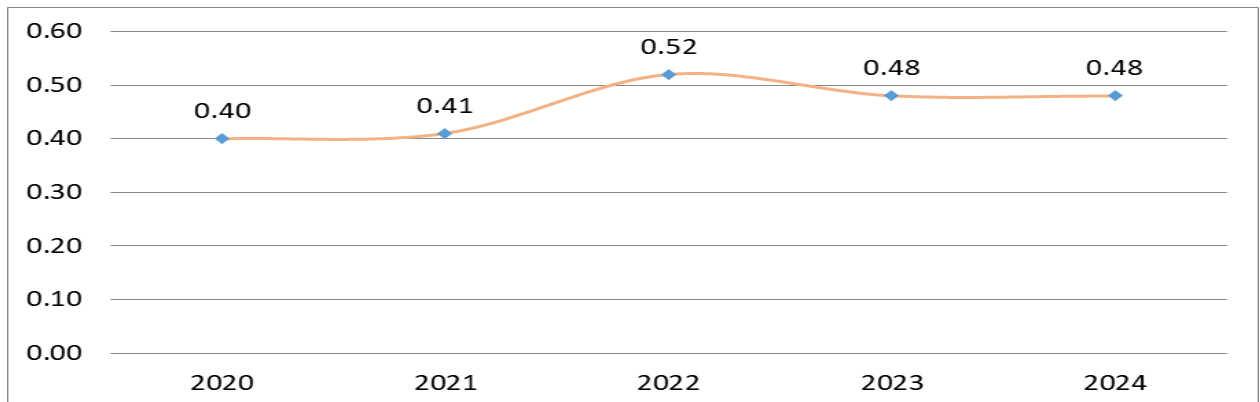
Berdasarkan grafik, dalam lima tahun terakhir nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada dalam kategori sedang (rentang nilai 13–144). Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks tercatat stabil sebesar 140,81. Selanjutnya, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 135,81. Namun, pada tahun 2023 nilai tersebut kembali meningkat sedikit menjadi 135,93, dan mengalami kenaikan tipis lagi pada tahun 2024 menjadi 135,98.

2.1.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah adalah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Grafik 2. 6
Indeks Ketahanan Daerah (Poin) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, 2025

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada angka 0,40 - 0,52 poin. Angka ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana berada pada range kelas sedang (nilai 0,40 – 0,80). Dari grafik data di atas terlihat bahwa tren angka indeks ketahanan daerah cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2020, nilai indeks ketahanan daerah ialah 0,40 poin lalu meningkat menjadi 0,41 poin pada Tahun 2021 dan 0,52 poin pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan nilai menjadi 0,48 poin setelah tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan dan pada Tahun 2024 nilai capaian ini tidak mengalami perubahan (konstan).

2.1.1.7 Demografi

Kondisi demografi menjadi aspek fundamental dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena mencerminkan karakteristik dasar penduduk yang akan menjadi subjek sekaligus objek dari pembangunan. Data dan analisis demografi berperan penting dalam merumuskan kebijakan sektoral yang tepat sasaran, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pengendalian

lingkungan dan penyediaan infrastruktur.

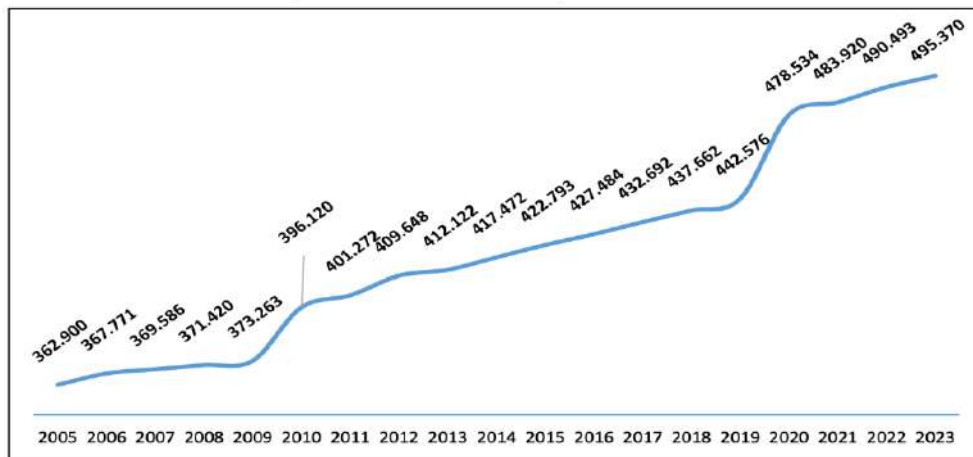
Pada bagian ini, gambaran demografis Kabupaten Polewali Mandar disajikan secara menyeluruh melalui tujuh subbagian. Pertama, disampaikan data jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator dinamika populasi selama lima tahun terakhir. Kedua, komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dianalisis untuk memahami struktur usia produktif dan beban ketergantungan. Ketiga, dijelaskan keberadaan masyarakat adat yang menjadi bagian penting dari keberagaman sosial dan kultural daerah. Keempat, laju pertumbuhan penduduk dipaparkan sebagai indikator keberlanjutan populasi dan implikasinya terhadap daya dukung wilayah.

Kelima, analisis rasio penduduk, baik rasio jenis kelamin maupun rasio ketergantungan, digunakan untuk menilai keseimbangan struktural dalam demografi wilayah. Keenam, data kepadatan penduduk disajikan guna menggambarkan sebaran dan konsentrasi penduduk antarwilayah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Terakhir, bagian ini ditutup dengan penyajian proyeksi dan analisis penduduk lima tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam RPJPD, sebagai acuan perencanaan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029.

2.1.1.7.1 Jumlah dan Laju Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar selama periode tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, jumlah penduduk tercatat sebesar 362.900 jiwa dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 495.370 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada beberapa periode tertentu, salah satunya antara tahun 2009 ke 2010 yang melonjak dari 373.263 jiwa menjadi 396.120 jiwa. Pertumbuhan yang relatif stabil juga terlihat sepanjang tahun 2011 hingga 2019, di mana jumlah penduduk bertambah secara bertahap dari 401.277 jiwa (2011) menjadi 442.576 jiwa (2019).

Grafik 2. 7
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005 - 2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

Lompatan besar lainnya tercatat pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk meningkat tajam dari 442.576 jiwa menjadi 478.534 jiwa, yang mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk pasca-sensus dan proses updating data administrasi kependudukan. Setelah itu, tren pertumbuhan kembali stabil dengan angka 483.920 jiwa di tahun 2021, 490.493 jiwa di tahun 2022, dan 495.370 jiwa pada tahun 2023. Perkembangan ini menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, mengingat jumlah penduduk secara langsung mempengaruhi kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, serta perencanaan jangka menengah dan panjang daerah.

2.1.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 mencerminkan struktur demografi yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan data dari Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 492.339 jiwa, terdiri dari 246.600 jiwa penduduk laki-laki dan 245.739 jiwa penduduk perempuan. Dengan perbandingan tersebut, rasio jenis kelamin berada pada tingkat yang seimbang, yaitu sekitar 100,35, menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 100–101 laki-laki. Jika dirinci menurut kelompok umur, jumlah penduduk usia 0–4 tahun sebanyak 38.158 jiwa, usia 5–9 tahun sebanyak 44.514 jiwa, dan usia 10–14 tahun sebanyak 46.461 jiwa. Ini mencerminkan bahwa sekitar 26,2% penduduk Kabupaten Polewali Mandar

merupakan kelompok usia muda (0–14 tahun). Jumlah yang cukup besar ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap perencanaan pendidikan dasar dan layanan kesehatan anak.

Tabel 2. 7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0 – 4	19.825	18.333	38.158
5 – 9	22.928	21.586	44.514
10 – 14	23.806	22.655	46.461
15 – 19	24.406	23.096	47.502
20 – 24	24.308	23.263	47.571
25 – 29	20.871	19.790	40.661
30 – 34	18.260	17.410	35.670
35 – 39	17.315	17.047	34.362
40 – 44	16.245	16.427	32.672
45 – 49	14.508	15.502	30.010
50 – 54	14.241	14.697	28.938
55 – 59	10.723	11.667	22.390
60 – 64	7.463	8.458	15.921
65 – 69	4.548	5.935	10.483
70 – 74	3.242	4.230	7.472
75+	3.911	5.643	9.554
TOTAL	246.600	245.739	492.339

Sumber: Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025 dalam LPPD Polman 2024

Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) berjumlah 335.697 jiwa, atau setara dengan 68,2% dari total populasi. Kelompok ini tersebar merata mulai dari usia 15–19 tahun sebanyak 47.502 jiwa, usia 20–24 tahun sebanyak 47.571 jiwa, dan menurun secara bertahap hingga usia 60–64 tahun yang mencapai 15.921 jiwa. Dominasi usia produktif ini menandakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar saat ini berada dalam fase bonus demografi, yang jika dikelola dengan baik, dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas) terdiri dari 10.483 jiwa (65–69 tahun), 7.472 jiwa (70–74 tahun), dan 9.554 jiwa (75 tahun ke atas), dengan total sebanyak 27.509 jiwa atau sekitar 5,6% dari total penduduk. Meningkatnya proporsi penduduk lansia menjadi salah satu indikator awal transisi demografi menuju populasi menua, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan kebijakan dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok lanjut usia, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, serta lingkungan yang ramah lansia. Secara umum, struktur komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 menggambarkan arah demografi yang strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Komposisi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta penguatan program-program pembangunan keluarga. Dengan proyeksi demografi yang menunjukkan kecenderungan dominasi usia produktif, maka pemanfaatan momentum bonus demografi perlu dioptimalkan melalui perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.

2.1.1.7.3 Keberadaan Masyarakat Adat

Hingga saat ini, data yang tersedia mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Polewali Mandar masih terbatas dan belum terdokumentasi secara sistematis dalam satu basis data resmi. Meskipun demikian, informasi yang dihimpun dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah dilaksanakan secara terfokus di beberapa wilayah. Lokasi yang menjadi prioritas kegiatan tersebut antara lain Desa Puppuring di Kecamatan Alu serta Desa Taramanu Tua dan Desa Taloba di Kecamatan Tutar. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pada tahun 2024 menargetkan seluruh individu dalam komunitas adat tersebut agar memperoleh akses terhadap program dukungan sosial dan ekonomi berbasis komunitas.

Program pemberdayaan bagi KAT tersebut diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus penguatan kapasitas ekonomi melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, terdapat juga inisiatif melalui pemberian bantuan dalam bentuk

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diarahkan kepada keluarga miskin potensial di dalam komunitas adat tersebut. Pendekatan ini mengedepankan skema bantuan stimulan guna menciptakan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari proses pemberdayaan, khususnya di wilayah yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi dan tingkat keterisolasian geografis.

Program-program tersebut dijalankan dalam kerangka besar Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan ketahanan ekonomi desa dan mendorong berkembangnya usaha ekonomi lokal. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp450.000.000, dengan tingkat realisasi mencapai 94,83 persen, atau sebesar Rp426.712.706. Kegiatan utama yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) serta Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai pilar sosial di tingkat komunitas.

Upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia desa turut dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop yang menyasar perangkat desa maupun masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong peningkatan persentase desa maju dan mandiri sebagai indikator keberhasilan program, serta untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal.

Meskipun data spasial dan kultural terkait keberadaan masyarakat hukum adat di Polewali Mandar masih terbatas, keberadaan program dan kegiatan pemberdayaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengakui eksistensi dan kebutuhan khusus komunitas adat. Oleh karena itu, langkah strategis ke depan adalah melakukan pendataan yang lebih terstruktur, pemetaan sosial-budaya, serta pelembagaan peran Lembaga Adat secara formal, agar kebijakan pembangunan dapat dirancang lebih responsif dan inklusif terhadap masyarakat adat.

2.1.1.7.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator penting dalam menganalisis dinamika kependudukan dan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar, perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama periode tahun 2005 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan beberapa lonjakan dan penurunan signifikan yang mencerminkan dinamika demografis yang kompleks.

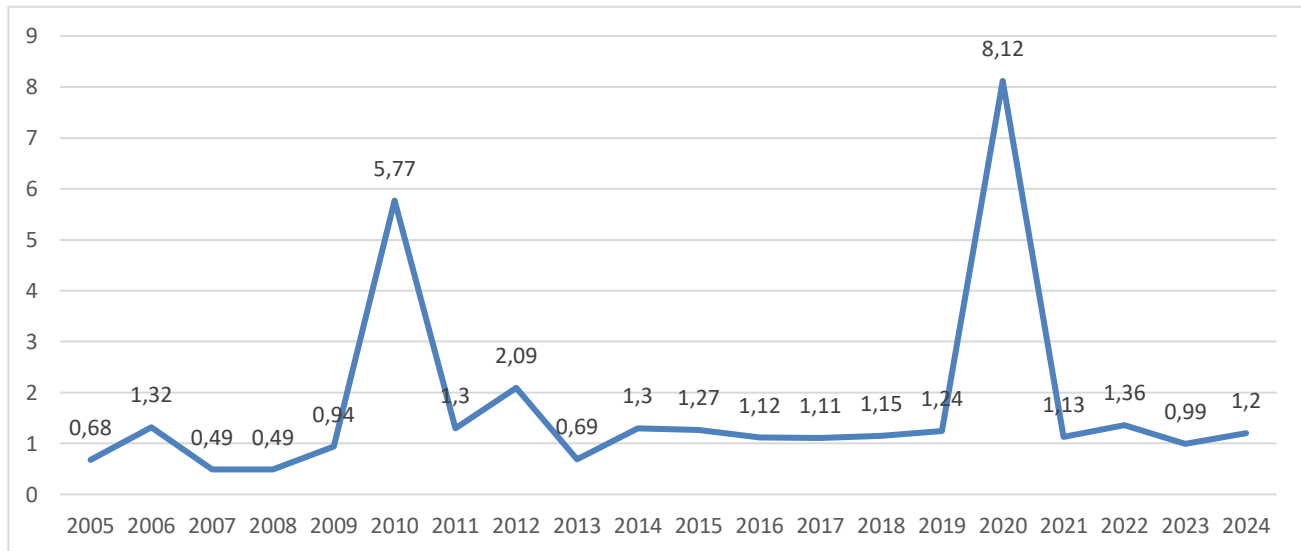
Pada periode 2005–2008, laju pertumbuhan cenderung stabil dalam kisaran rendah, yaitu antara 0,68% hingga 0,49%. Namun pada tahun 2009, terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,94%. Lonjakan signifikan pertama tercatat pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,77%, yang merupakan angka tertinggi sebelum tahun 2020. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan perubahan dalam cakupan pendataan atau migrasi masuk dalam jumlah besar. Setelah tahun 2010, laju pertumbuhan kembali turun ke level yang lebih stabil, berada di kisaran 1,30% hingga 1,27% selama periode 2011–2017. Tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 1,15%, dan kembali naik sedikit menjadi 1,24% pada 2019.

Lonjakan drastis kedua terjadi pada tahun 2020, di mana laju pertumbuhan melonjak tajam hingga 8,12%. Kenaikan ekstrem ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan metode pencatatan, pemutakhiran data, atau peningkatan angka migrasi masuk yang signifikan. Namun, pascalonjakan tersebut, laju pertumbuhan kembali menurun secara drastis pada tahun 2021 ke angka 1,13%, dan mengalami fluktuasi kecil selama tiga tahun terakhir yaitu 1,36% pada 2022, 0,99% pada 2023, dan 1,20% pada tahun 2024.

Tren ini mencerminkan kondisi demografis yang dinamis di Kabupaten Polewali Mandar. Meski secara umum jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan menunjukkan tren melambat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan mulai stabilnya faktor-faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Penurunan laju pertumbuhan ini juga bisa menjadi refleksi dari keberhasilan program pengendalian penduduk dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga. Pemantauan dan pengelolaan laju pertumbuhan penduduk menjadi krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,

terutama dalam pengadaan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk di masa depan.

Grafik 2. 8
Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

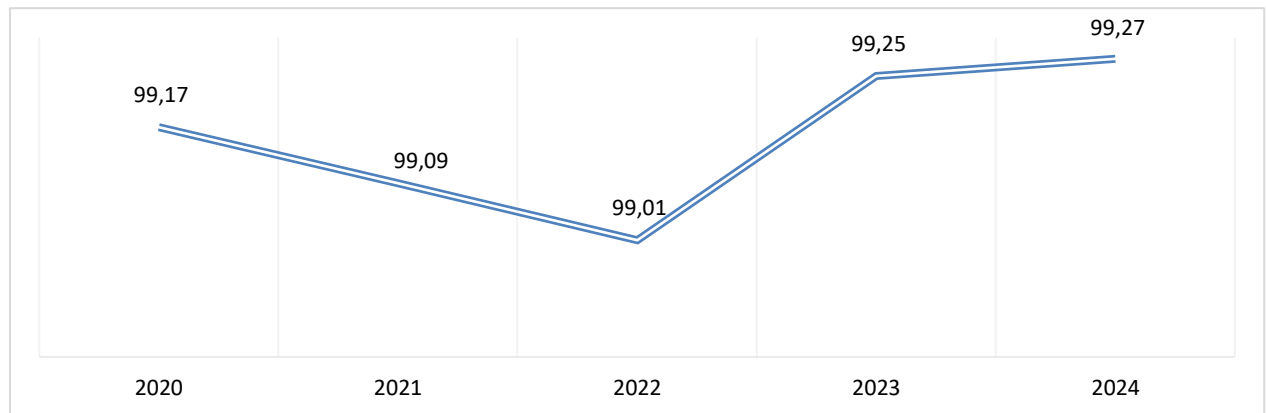
2.1.1.7.5 Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin atau sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam angka per 100. Nilai rasio jenis kelamin di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sebaliknya jika di bawah 100 berarti jumlah perempuan lebih banyak. Rasio ini penting sebagai indikator dasar dalam analisis kependudukan, karena berdampak pada struktur sosial, perencanaan pembangunan berbasis gender, dan proyeksi kebutuhan pelayanan publik jangka panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020–2024, rasio penduduk menunjukkan tren yang relatif stabil dengan nilai yang selalu berada di atas 99. Pada tahun 2020, rasio penduduk tercatat sebesar 99,17, yang menurun secara berturut-turut menjadi 99,09 pada 2021 dan 99,01 pada 2022. Tren penurunan ini mencerminkan sedikit dominasi jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki selama dua tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2023, rasio penduduk kembali meningkat signifikan menjadi 99,25, dan mengalami kenaikan lanjutan

menjadi 99,27 pada tahun 2024.

Grafik 2. 9
Rasio Penduduk (persen) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi tahunan, distribusi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Polewali Mandar cenderung seimbang. Ketimpangan gender dalam jumlah penduduk tidak terlalu signifikan, sehingga memberikan dasar yang stabil bagi perencanaan program pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kedua jenis kelamin secara proporsional.

Tabel 2. 8
Rasio Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar

Tahun	Jumlah penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Penduduk (Laki-Laki /Perempuan)
2020	478.534	238.274	240.260	99,17
2021	483.920	240.860	243.060	99,09
2022	490.493	244.032	246.461	99,01
2023	495.371	246.748	248.623	99,25
2024	501.319	249.736	251.583	99,27

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

2.1.1.7.6 Kepadatan Penduduk

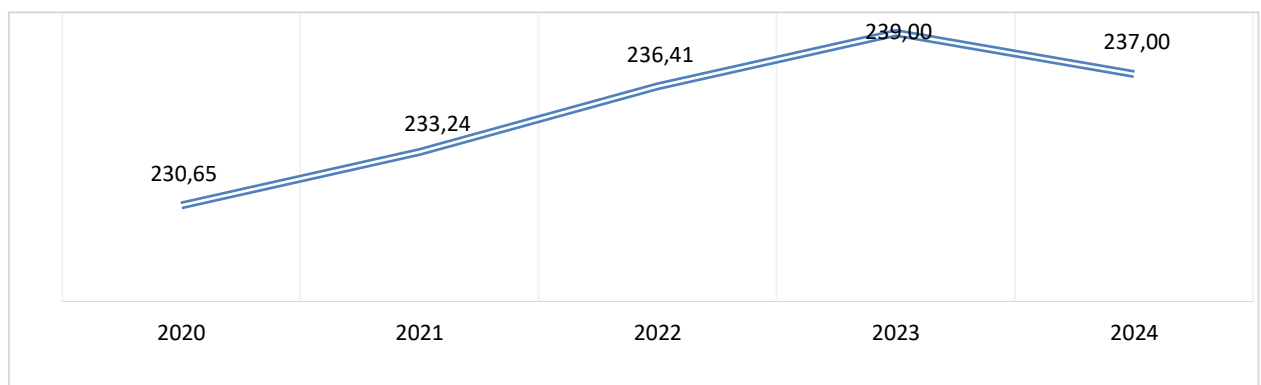
Kepadatan penduduk merupakan indikator demografis yang menggambarkan distribusi jumlah penduduk dalam satuan luas wilayah tertentu, dalam hal ini jumlah jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Indikator ini penting untuk menggambarkan tekanan penduduk terhadap ruang dan sumber daya, serta menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar

tahun 2025, terlihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah ini mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 230,65 jiwa/km², kemudian meningkat menjadi 233,24 jiwa/km² pada tahun 2021. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai kepadatan sebesar 236,41 jiwa/km², dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan angka 239,00 jiwa/km².

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan kepadatan menjadi 237,00 jiwa/km², yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pergerakan penduduk antar wilayah, perubahan komposisi penduduk, atau kebijakan spasial yang berdampak pada distribusi permukiman. Meskipun demikian, secara umum, pola kepadatan penduduk selama lima tahun terakhir mencerminkan tren pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang cukup stabil dan konsisten dengan arah pembangunan wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Grafik 2. 10
Kepadatan Penduduk (orang/km) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Kondisi kepadatan yang cenderung meningkat ini menuntut perhatian dalam pengelolaan tata ruang, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan strategi pengendalian urbanisasi dan migrasi internal agar beban wilayah tertentu tidak menjadi terlalu tinggi, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan yang terus berkembang pesat.

2.1.1.7.7 Proyeksi dan Analisis Penduduk

2.1.1.7.8 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan

pembangunan kependudukan. Proyeksi ini merupakan hasil perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai komponen pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Melalui proyeksi ini, dapat disajikan gambaran tentang jumlah, struktur, dan komposisi penduduk di masa mendatang, yang sangat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Asumsi utama yang digunakan dalam proyeksi penduduk meliputi tiga komponen dasar demografi: kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingginya tingkat kelahiran menunjukkan potensi penambahan penduduk, sementara tingginya angka kematian menunjukkan potensi penurunan. Adapun migrasi—baik masuk maupun keluar—juga turut memengaruhi dinamika jumlah penduduk secara signifikan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan proyeksi ini adalah metode komponen, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dari Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, proyeksi jumlah penduduk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2023	495.371
2025	506.184
2030	529.357
2035	550.336
2040	570.214
2045	590.106

Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebesar 495.371 jiwa, yang kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 506.184 jiwa pada tahun 2025. Selama periode 2025 hingga 2045, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan hingga mencapai 590.106 jiwa.

Meskipun laju pertumbuhan tergolong moderat, tren peningkatan ini menandakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar tetap menjadi daerah yang menarik sebagai tempat tinggal dan berkegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan potensi peningkatan kebutuhan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.

2.1.1.7.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memberikan informasi penting terkait distribusi penduduk laki-laki dan perempuan, yang sangat relevan untuk perencanaan sosial dan ekonomi. Berikut disajikan proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

Tabel 2. 10
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 -2045

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Rasio (L/P x 100)
2023	246.748	248.623	99,25
2025	251.473	254.711	98,73
2030	262.588	266.769	98,43
2035	272.685	277.651	98,21
2040	282.280	287.934	98,04
2045	291.892	298.214	97,88

Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2024

Dari proyeksi tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan selalu sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Rasio jenis kelamin cenderung menurun secara bertahap dari 99,25 pada tahun 2023 menjadi 97,88 pada tahun 2045. Penurunan ini relatif wajar dan mencerminkan pola demografi yang umum, di mana angka harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi. Informasi ini penting dalam konteks perencanaan layanan yang responsif gender, termasuk dalam bidang

kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

2.1.1.7.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur penting untuk menilai tingkat ketergantungan dan potensi produktivitas suatu daerah. Berikut disajikan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan kelompok umur:

Tabel 2.10
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0–14 Tahun	134.926	133.936	132.286	129.659	126.302	125.693
15–64 Tahun	330.201	338.941	357.051	372.247	385.921	397.141
>65 Tahun	30.244	33.307	40.019	48.430	57.991	67.272
Angka Ketergantungan (%)	50,02	49,34	48,26	47,84	47,75	48,59

Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia 0–14 tahun mengalami penurunan dari 134.926 jiwa pada tahun 2023 menjadi 125.693 jiwa pada tahun 2045. Sebaliknya, kelompok usia produktif (15–64 tahun) meningkat signifikan dari 330.201 jiwa menjadi 397.141 jiwa pada tahun yang sama. Kelompok lansia (>65 tahun) menunjukkan lonjakan drastis, dari 30.244 jiwa pada tahun 2023 menjadi 67.272 jiwa pada tahun 2045.

Angka ketergantungan juga mengalami penurunan dari 50,02% menjadi 48,59%, yang berarti bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk menopang penduduk usia tidak produktif relatif menurun. Namun demikian, meningkatnya jumlah lansia menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan adaptasi kebijakan lansia.

Implikasi dari tren ini sangat penting bagi strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang

proaktif, termasuk pengembangan sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, penguatan sistem jaminan sosial, serta layanan kesehatan usia lanjut untuk memastikan bahwa perubahan struktur penduduk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Polewali Mandar. Subbab ini menyajikan data perkembangan kesejahteraan dalam lima tahun terakhir (2020–2024), meliputi indikator ekonomi (pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, PDRB, dan gini ratio), kesehatan (usia harapan hidup, stunting, dan indeks keluarga sehat), pendidikan (lama sekolah, literasi, numerasi), perlindungan sosial, serta indeks keberagamaan, kebudayaan, gender, anak, dan pemuda. Informasi ini menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan daerah 2025–2029.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

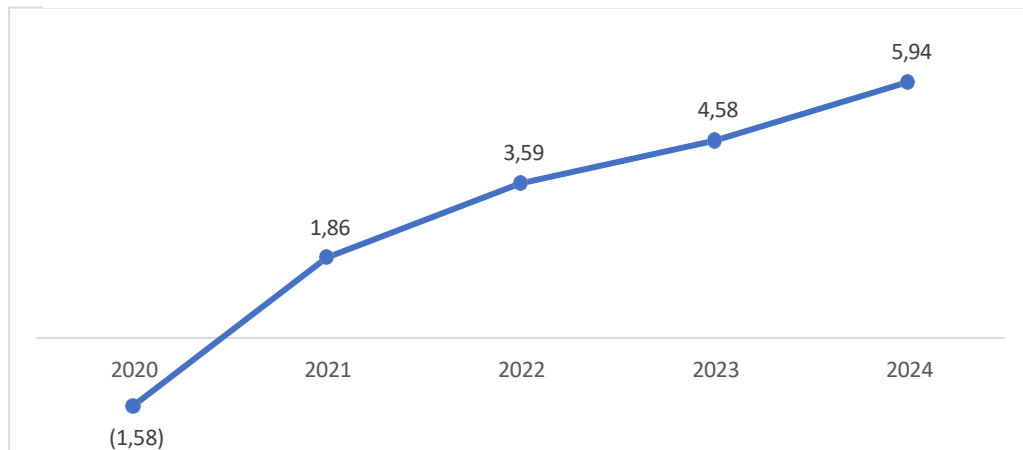
Bagian ini menjelaskan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Polewali Mandar melalui indikator-indikator utama seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan IPM. Analisis dilakukan untuk memahami daya beli, distribusi pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat sebagai dasar perumusan arah kebijakan ekonomi daerah.

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir cenderung melambat. Setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 (-1,58%) akibat adanya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar belum kembali ke level sebelum Pandemi. Proses pemulihan ekonomi berjalan lambat, meskipun menunjukkan tren meningkat pasca Pandemi. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi hanya mencatat angka 5,94 persen. Secara rata-rata, ekonomi hanya tumbuh 2,88 persen per tahun pasca Pandemi Covid-19, jauh berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum Pandemi. Catatan positifnya, pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik yang mengindikasikan proses pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang tepat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali

Mandar masih digerakkan oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan.

Grafik 2. 11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024

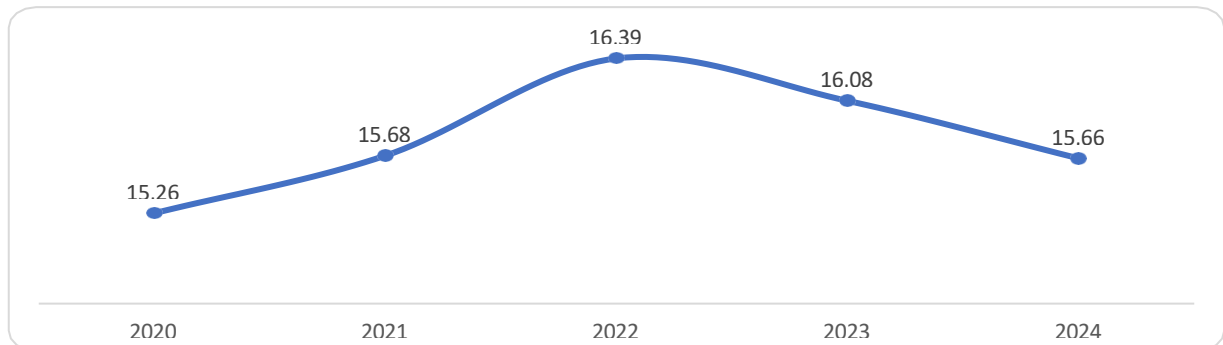


Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

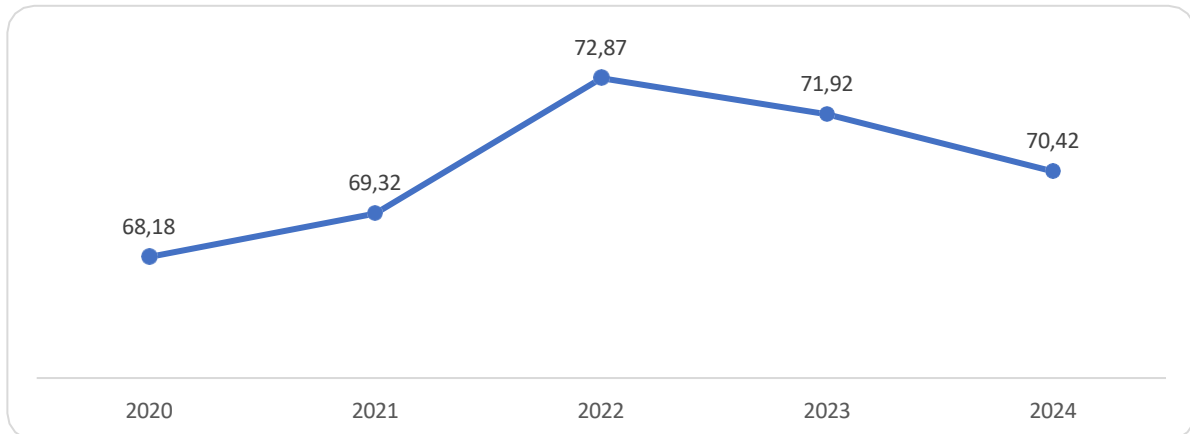
Secara umum, grafik menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2022, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada 2023 dan 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,26 persen, kemudian meningkat menjadi 15,66 persen pada tahun 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan peningkatan, dari 68.180 orang pada tahun 2020 menjadi 70.420 orang pada tahun 2024, atau bertambah sebanyak 2.240 orang. Fakta ini menjadi menarik karena angka kemiskinan justru meningkat di saat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, angka pengangguran bergerak turun, dan laju inflasi melambat.

Grafik 2. 12
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

Grafik 2. 13
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (Ribu Jiwa)

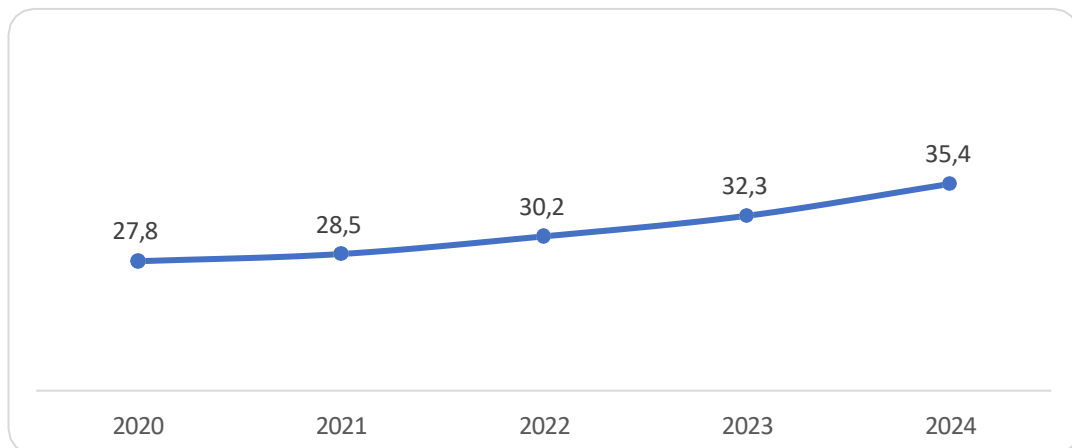


Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

Dalam lima tahun terakhir, PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar tetap menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp 27,80 juta. perekonomian daerah yang terus bertumbuh membuat PDRB Per Kapita mulai bergerak naik hingga mencapai Rp 35,45 juta. Peningkatan PDRB Per Kapita dimungkinkan karena PDRB-ADHB bergerak naik lebih akseleratif ketimbang pertumbuhan jumlah penduduk. Secara umum, peningkatan PDRB Per Kapita mengindikasikan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 14
PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (Rp Juta)

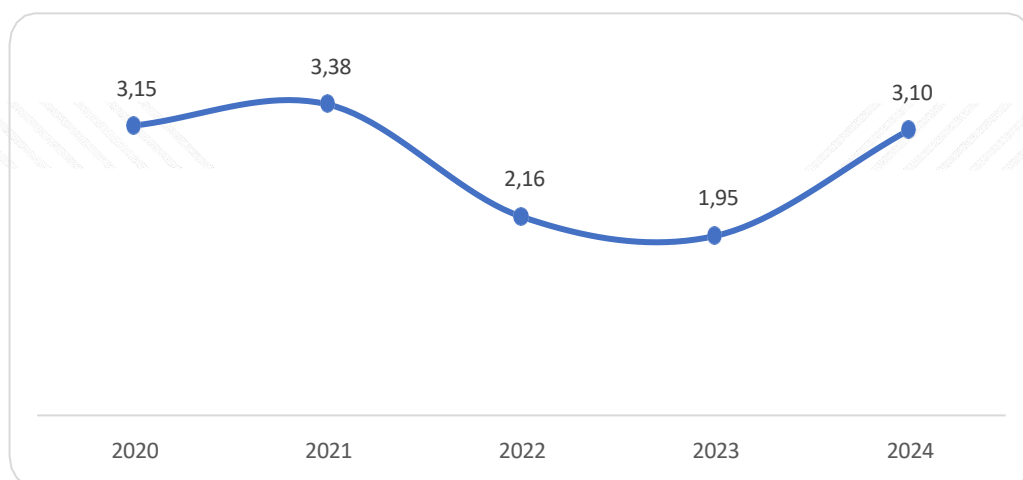


Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 3,15 persen. TPT bergerak naik hingga mencapai angka 3,38 persen pada tahun 2021. Namun di tahun berikutnya, TPT bergerak turun di level 2,16 persen. Penurunan TPT terus berlanjut di tahun berikutnya hingga mencapai angka 1,95 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 3,10 di tahun 2024. Untuk gambaran lebih lengkapnya dapat dilihat di gambar berikut.

Grafik 2. 15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (Persen)

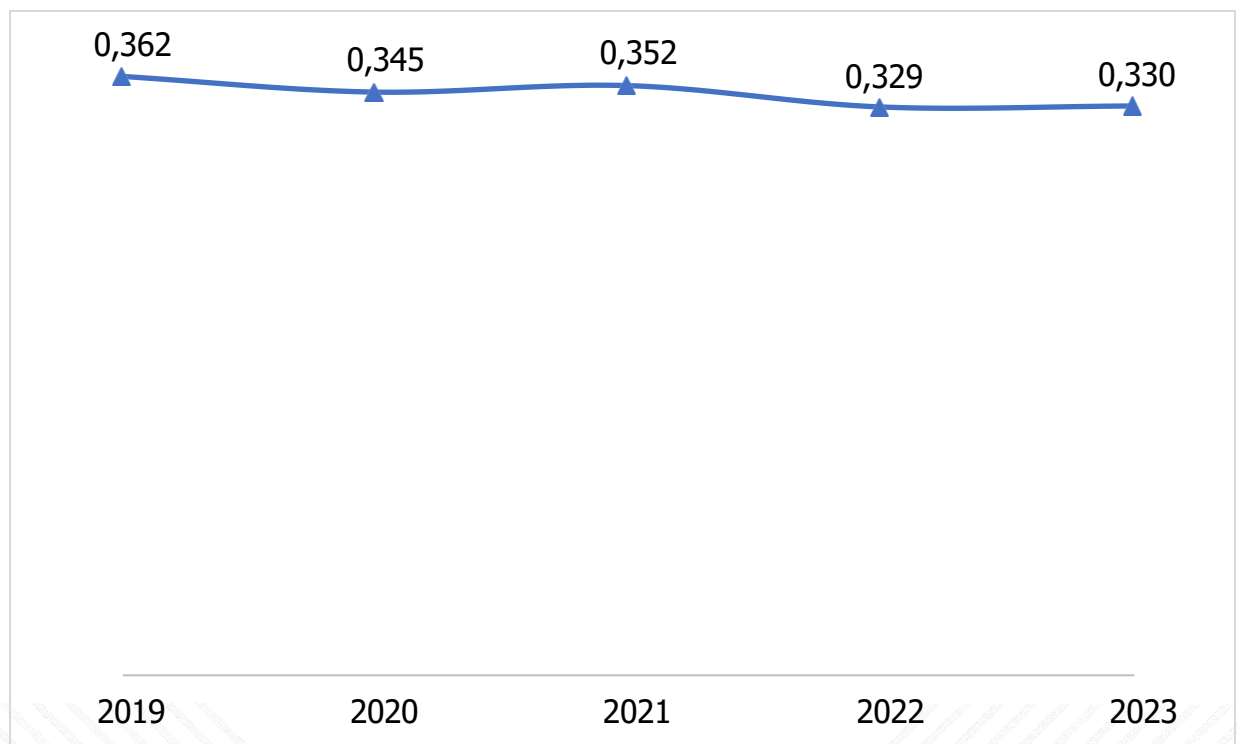


Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2019, Indeks Gini menunjukkan angka 0,362 dan kemudian menurun menjadi 0,330 pada tahun 2023. Penurunan Indeks Gini ini mengindikasikan membaiknya distribusi pendapatan antar kelompok penduduk. Atau dengan kata lain, ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menyempit di Kabupaten Polewali Mandar. Kemajuan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk.

Grafik 2. 16
Indeks Gini Kabupaten Polewali Mandar, 2019-2023



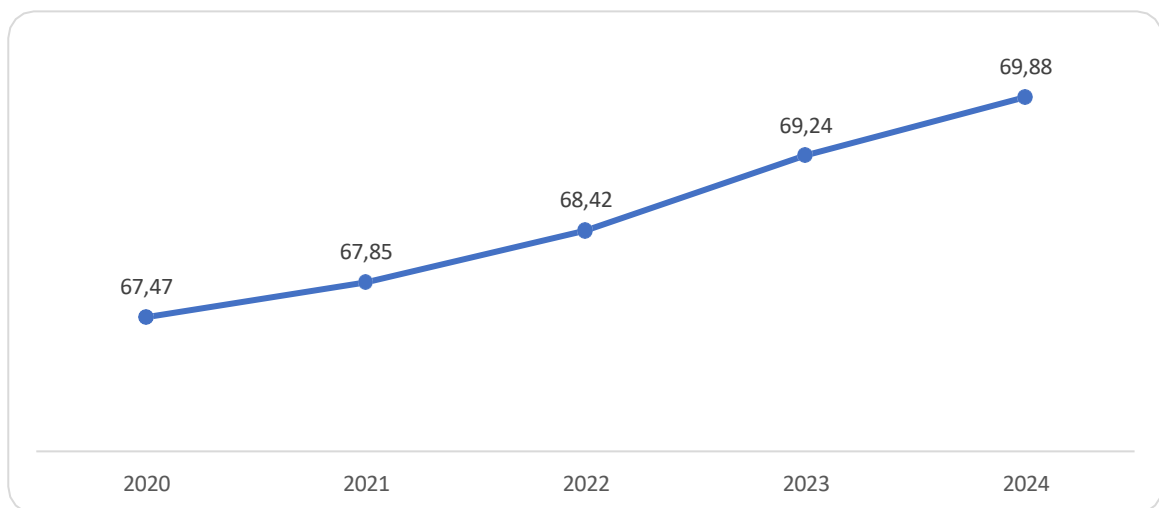
Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.2.1.6 Indeks Modal Manusia / IPM

IPM Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024. Peningkatan IPM terbesar terjadi pada kurun waktu 2022-2023 yaitu sebesar 0,82 poin, dan terendah selama kurun waktu 2020-2021 yaitu sebesar 0,38 poin. IPM terus bergerak naik dari 67,47 pada tahun 2020 menjadi 69,88 pada tahun 2024 atau meningkat 2,41 poin.

Berdasarkan kriteria United Nation Development Program (UNDP), IPM Kabupaten Polewali Mandar termasuk dalam kategori sedang ($60 < \text{IPM} < 70$). Sebagai catatan tambahan, UNDP mengelompokkan pencapaian IPM ke dalam empat kategori, yaitu sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$), tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan rendah ($\text{IPM} < 60$). Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Polewali Mandar tergolong dalam kategori sedang. Dengan nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar sebesar 69,88 pada tahun 2024.

Grafik 2. 17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Transformasi daerah di bidang kesehatan difokuskan pada perluasan upaya promotif dan preventif, percepatan penanganan stunting dan penyakit menular, pemenuhan tenaga kesehatan yang merata khususnya di wilayah 3T, serta pengembangan sistem layanan berbasis teknologi (telemedisin) dan jaminan sosial. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan aspek ini antara lain: Usia Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak (AKI dan prevalensi stunting),

penanganan tuberkulosis (cakupan dan tingkat keberhasilan pengobatan), serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

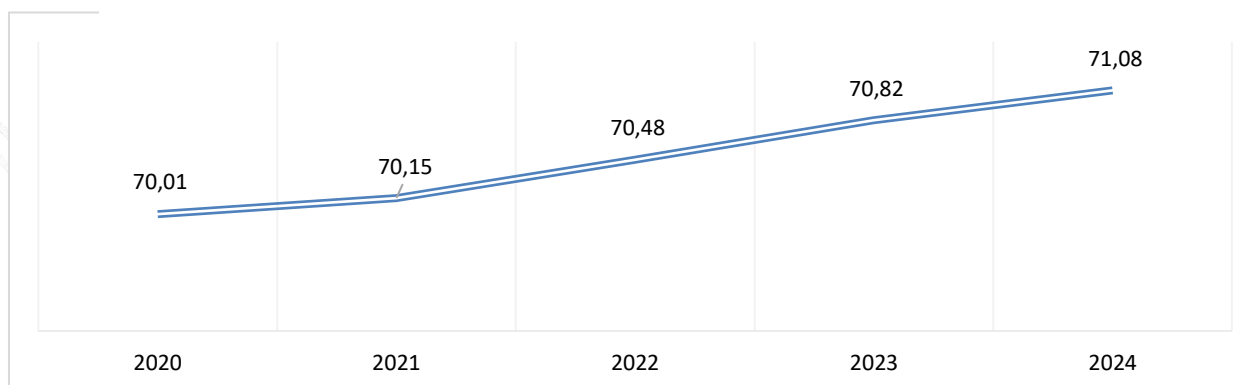
2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat secara umum, yang mencerminkan rata-rata perkiraan umur hidup penduduk sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku tetap berlangsung. Di Kabupaten Polewali Mandar, tren UHH menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), UHH pada tahun 2020 tercatat sebesar **70,01 tahun** dan meningkat berturut-turut menjadi **70,15 tahun** (2021), **70,48 tahun** (2022), **70,82 tahun** (2023), hingga mencapai **71,08 tahun** pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan layanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta penurunan angka kematian.

Peningkatan Usia Harapan Hidup juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memperkuat upaya promotif dan preventif, serta menjangkau layanan kesehatan ke wilayah-wilayah terpencil dan rentan. Meskipun tren ini menunjukkan kemajuan positif, perlu terus dilakukan penguatan terhadap sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif agar kualitas hidup masyarakat terus meningkat di masa mendatang.

Grafik 2. 18
Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

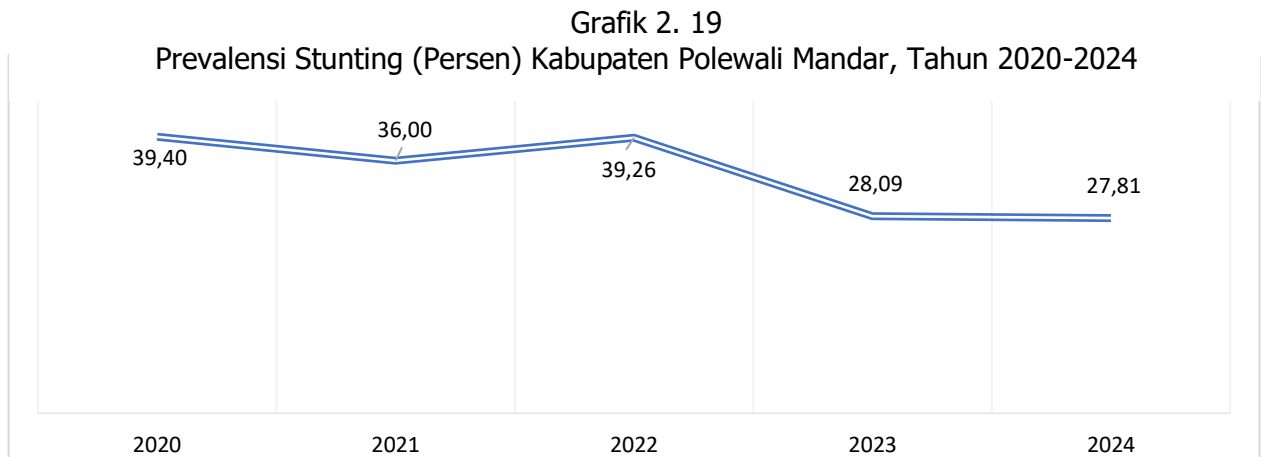
2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan keluarga berdasarkan sejumlah variabel, seperti perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), akses terhadap layanan kesehatan, status gizi anggota keluarga, hingga kepesertaan jaminan kesehatan. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan intervensi pembangunan kesehatan berbasis keluarga di tingkat kabupaten/kota.

Namun demikian, hingga saat ini data mengenai capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Polewali Mandar belum tersedia secara resmi. Ketiadaan data ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat layanan primer serta integrasi lintas sektor dalam pengumpulan informasi keluarga sehat. Ke depan, penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan optimalisasi peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan dasar menjadi kunci penting untuk mendapatkan data IKS yang valid dan representatif sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 39,40%, kemudian menurun menjadi 36,00% pada 2021. Namun, angka tersebut kembali naik ke 39,26% pada tahun 2022. Perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan penurunan tajam menjadi 28,09%, dan kembali menurun meskipun tipis menjadi 27,81% di tahun 2024. Data ini menunjukkan efektivitas intervensi percepatan penurunan stunting dalam dua tahun terakhir, meskipun masih dibutuhkan upaya konsisten untuk mencapai target nasional. (Sumber: SSGI dan SKI, 2024).



Sumber : SSGI dan SKI, 2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjadi kunci dalam memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan antargenerasi. Oleh karena itu, arah pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Polewali Mandar difokuskan pada terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Transformasi pendidikan diarahkan untuk memastikan seluruh satuan pendidikan menghasilkan lulusan dengan kompetensi minimal yang setara serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan transformasi daerah mencakup beberapa aspek utama, antara lain: peningkatan kualitas asesmen kompetensi minimum siswa, penguatan manajemen dan kualitas tenaga pendidik, peningkatan akses pendidikan vokasi sesuai potensi lokal, dan percepatan partisipasi pendidikan dasar. Untuk mengukur capaian tersebut, ditetapkan sejumlah indikator utama seperti persentase literasi membaca dan numerasi, harapan lama sekolah, proporsi penduduk berpendidikan tinggi, serta rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen baseline tahun 2025, nilai literasi membaca di Polewali Mandar tercatat sebesar 49,04 persen, sedangkan numerasi baru mencapai 19,89 persen. Harapan lama sekolah berada di angka 13,62 tahun, dengan proporsi penduduk berpendidikan tinggi sebesar 10,71 persen dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,88 tahun. Capaian ini menjadi dasar arah kebijakan selanjutnya

guna mendorong pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

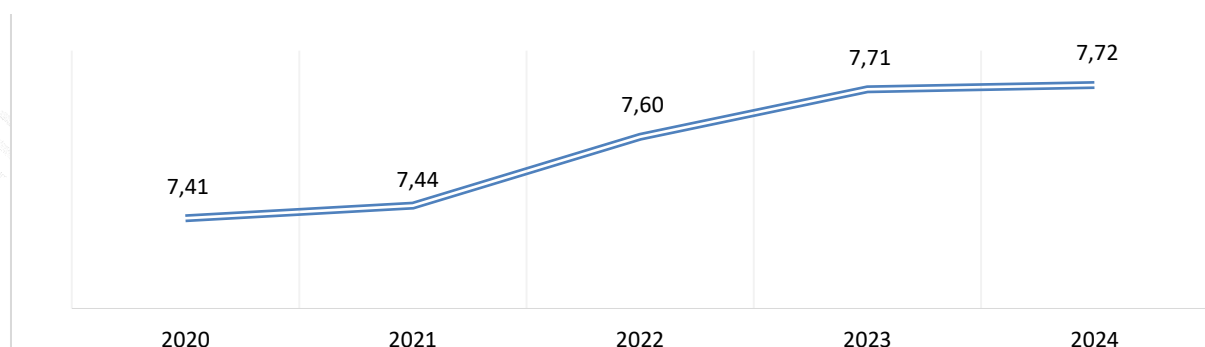
2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pencapaian pendidikan penduduk, khususnya usia 15 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, dan menjadi salah satu proksi dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar, rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 7,41 tahun, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 7,44 tahun pada 2021, 7,60 tahun pada 2022, dan 7,71 tahun pada 2023. Hingga tahun 2024, indikator ini mencapai 7,72 tahun.

Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat Polewali Mandar, meskipun masih terdapat tantangan dalam mendekati target nasional rata-rata 9 tahun wajib belajar. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi angka putus sekolah, serta memperkuat pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan indikator ini ke depan.

Grafik 2. 20
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

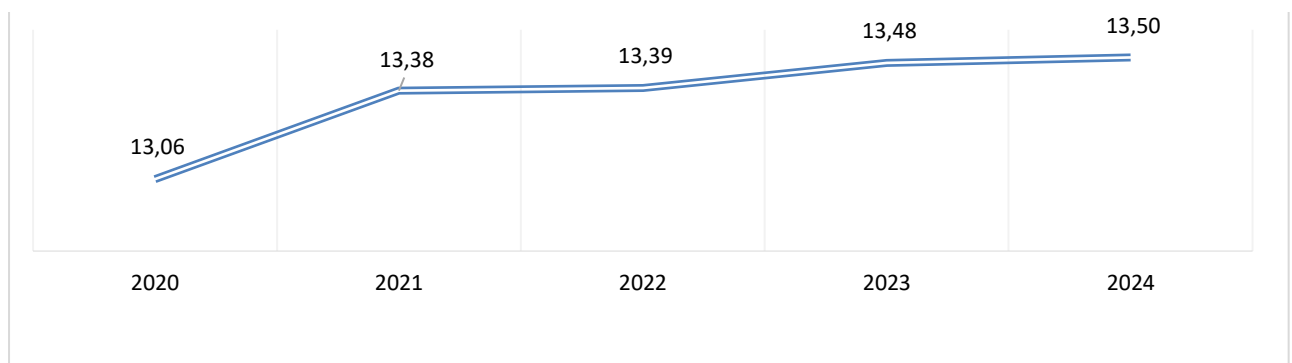
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan estimasi jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke depan,

dengan asumsi bahwa pola partisipasi pendidikan saat ini terus berlangsung. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Polewali Mandar, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tren kenaikan HLS selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 13,06 tahun dan mengalami lonjakan signifikan menjadi 13,38 tahun di tahun 2021. Selanjutnya, peningkatan berjalan lebih stabil dengan nilai 13,39 tahun pada 2022, naik menjadi 13,48 tahun di 2023, dan mencapai 13,50 tahun pada tahun 2024.

Kenaikan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan, baik dari sisi akses, kualitas, maupun keberlanjutan pendidikan, yang berdampak pada peningkatan ekspektasi pendidikan anak-anak di Polewali Mandar. Meski demikian, upaya terus-menerus masih diperlukan untuk memastikan kesetaraan pendidikan dan meminimalkan disparitas antarwilayah dan kelompok sosial.

Grafik 2. 21
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



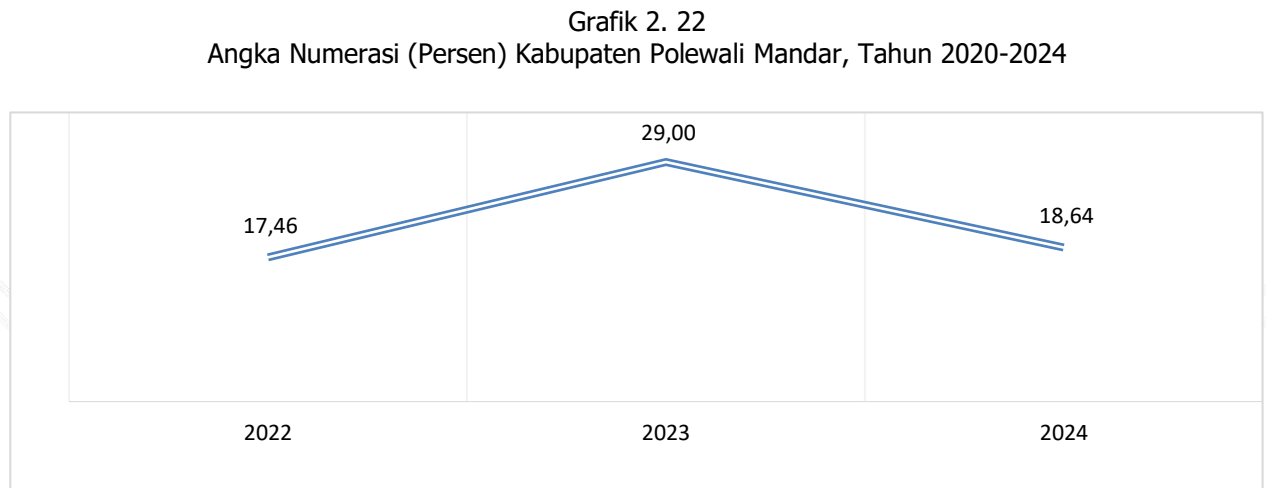
Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerisasi

Angka literasi di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat angka tercatat untuk tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022, angka literasi mulai tercatat sebesar 17,36 persen dan mengalami lonjakan drastis menjadi 40,66 persen pada tahun 2023. Kinerja positif ini terus berlanjut dengan peningkatan hingga 48,02 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas program pendidikan dasar, literasi masyarakat, serta perbaikan mutu pembelajaran di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.



Tren angka numerasi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Data numerasi mulai tersedia sejak tahun 2022 dengan capaian awal sebesar 17,46 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 29,00 persen, yang mencerminkan penguatan kapasitas peserta didik dalam berpikir logis dan pemahaman matematika dasar. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 18,64 persen. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan pembelajaran numerasi, kualitas asesmen, serta intervensi kurikulum yang lebih terarah.

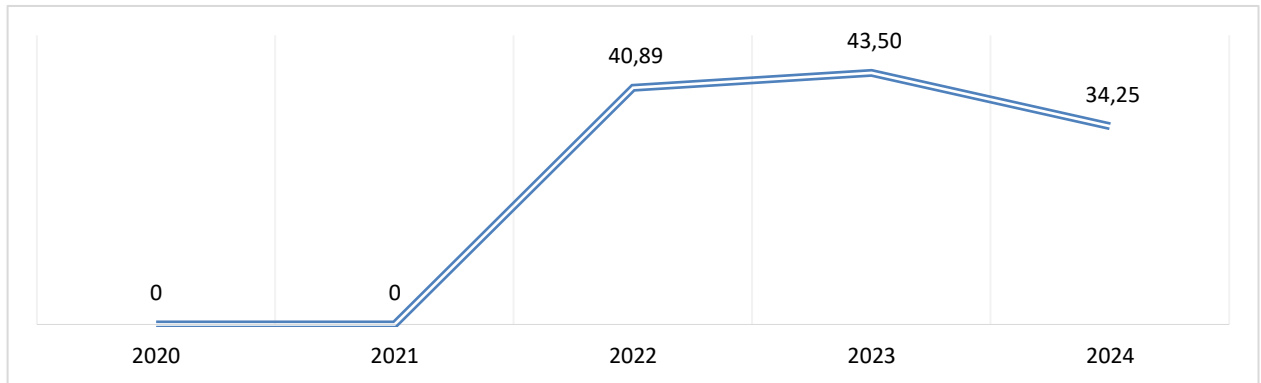


2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar mulai terukur sejak tahun 2022 dengan nilai 40,89, meningkat menjadi 43,50 pada 2023,

namun menurun menjadi 34,25 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali akses, fasilitas, dan program literasi masyarakat secara berkelanjutan.

Grafik 2. 23
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.2.3.5 Indeks Literasi Digital

Sampai saat ini, Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki data resmi terkait Indeks Literasi Digital. Padahal, indikator ini penting untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara aman dan produktif. Ketiadaan data ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pemantauan literasi digital di daerah. Ke depan, pemerintah daerah perlu menjalin koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BPS untuk menyusun baseline dan mengintegrasikan pengukuran literasi digital dalam perencanaan pembangunan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat paling rentan. Pendekatan ini menekankan penguatan perlindungan bagi kelompok miskin, lansia tidak mampu, penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang belum terlindungi. Melalui transformasi kebijakan daerah, perlindungan sosial diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, antara lain dengan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas

dalam sektor formal.

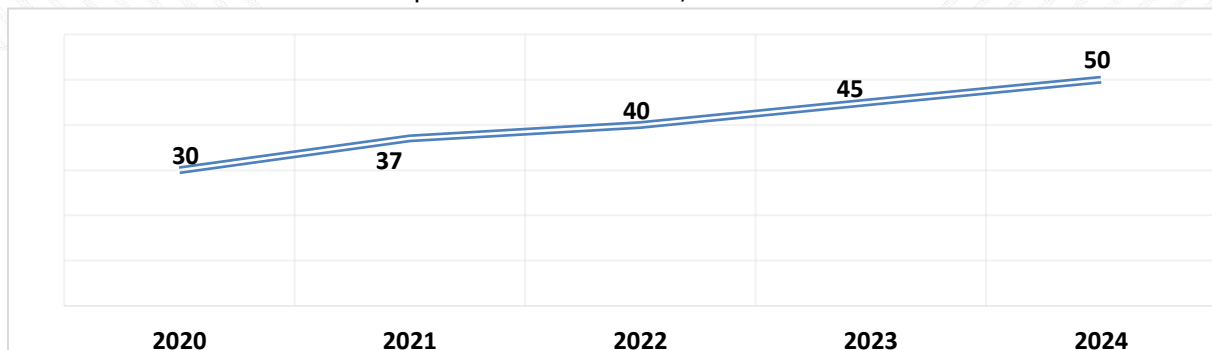
Selain itu, pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi fondasi penting untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas intervensi, sehingga bantuan sosial dan program jaminan dapat menjangkau individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur arah pembangunan ini adalah tingkat kemiskinan (%), cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat kabupaten (%), serta persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%).

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Grafik 2.24 memperlihatkan tren peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 30 persen, kemudian meningkat bertahap menjadi 37 persen pada tahun 2021, 40 persen pada tahun 2022, 45 persen pada tahun 2023, dan mencapai 50 persen pada tahun 2024.

Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh dan upaya nyata dari pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal. Hal ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong keikutsertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan adaptif.

Grafik 2. 24
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.2.4.2 Indikator lainnya Sesuai Konteks Daerah

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya diarahkan untuk memperkuat kerukunan sosial serta memajukan peradaban lokal yang harmonis dan inklusif. Di Kabupaten Polewali Mandar, arah pembangunan pada aspek ini mencakup dua dimensi utama, yakni penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, serta penguatan modal sosial melalui pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan arah kebijakan ini antara lain adalah persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, dengan baseline tahun 2025 tercatat sebesar 15,02%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya daerah.

Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menjadi ukuran penting lainnya dalam mencerminkan stabilitas sosial dan kohesi antarumat beragama. Pada tahun 2025, IKUB Kabupaten Polewali Mandar mencapai angka 76,08, menandakan tingkat kerukunan yang relatif tinggi dan perlu terus dijaga melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif, termasuk pendidikan karakter sejak usia dini dan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik sosial yang merugikan seperti perkawinan anak.

Dengan pijakan ini, arah pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga membentuk fondasi sosial yang kokoh dalam mendukung transformasi daerah secara berkelanjutan.

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

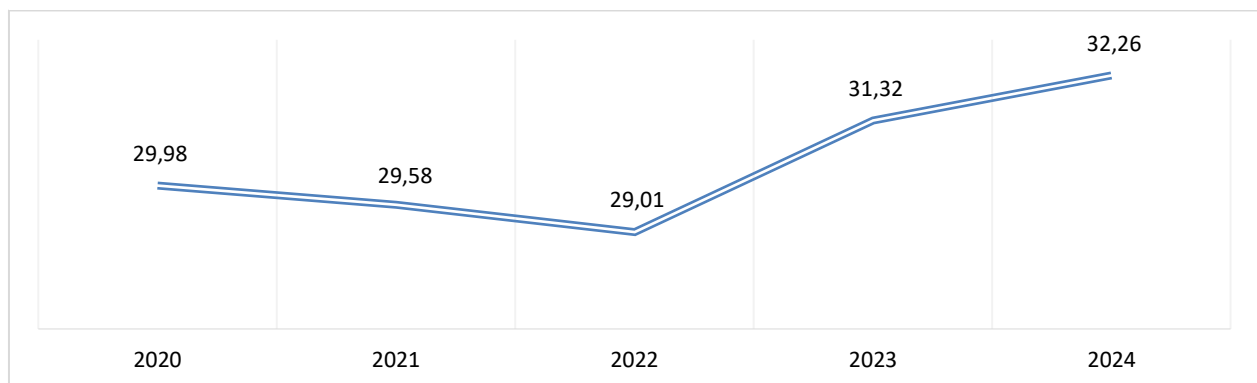
Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berdaya saing. Di Kabupaten Polewali Mandar, arah pembangunan dalam dimensi ini diarahkan pada dua hal utama: penguatan pendidikan yang menjunjung kerukunan antar etnis dan agama, serta pelestarian budaya dan penguatan karakter masyarakat berbasis kearifan lokal.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur dimensi ini adalah **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana umat beragama di suatu wilayah dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan berkolaborasi dalam menjaga keharmonisan sosial. IKUB menjadi penting terutama di wilayah yang memiliki keragaman keagamaan, karena tingginya indeks ini mencerminkan stabilitas sosial yang kuat serta kemampuan masyarakat dalam mencegah konflik horizontal.

Berdasarkan baseline tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar, **nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama tercatat sebesar 76,08**. Capaian ini mencerminkan kondisi sosial yang relatif kondusif dan perlu dijaga serta ditingkatkan melalui kebijakan berbasis pendidikan kerukunan, penguatan nilai toleransi, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam agenda pembangunan sosial.

2.1.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Grafik 2. 25
Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan aspek kebudayaan dalam suatu wilayah. IPK disusun berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan secara nasional dan dihitung secara berkala oleh instansi berwenang.

Berdasarkan Grafik 2.26, nilai IPK Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IPK tercatat sebesar **29,98**, lalu mengalami penurunan menjadi **29,58** pada tahun 2021, dan kembali

menurun menjadi **29,01** pada tahun 2022. Setelah itu, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan nilai **31,32**, dan berlanjut meningkat menjadi **32,26** pada tahun 2024.

Data ini menunjukkan adanya tren peningkatan IPK dalam dua tahun terakhir setelah mengalami penurunan selama dua tahun sebelumnya. Nilai IPK tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan di daerah serta menjadi dasar penyusunan kebijakan penguatan sektor kebudayaan ke depan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada kualitas keluarga, keadilan gender, serta keterlibatan kelompok rentan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga dan penciptaan lingkungan sosial yang inklusif menjadi bagian integral dalam agenda transformasi pembangunan daerah. Ketahanan keluarga yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat menjadi fondasi untuk memperkuat struktur sosial masyarakat, serta mendukung pengasuhan yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Di sisi lain, pemenuhan hak-hak kelompok rentan termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme perlindungan yang meliputi perawatan, pembentukan resiliensi, dan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pendekatan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender dan inklusivitas akan memperkuat modal sosial masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan arah kebijakan ini adalah **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)** dan **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**. Keduanya menjadi parameter penting dalam memantau tingkat kesejahteraan keluarga serta kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara adil dan setara.

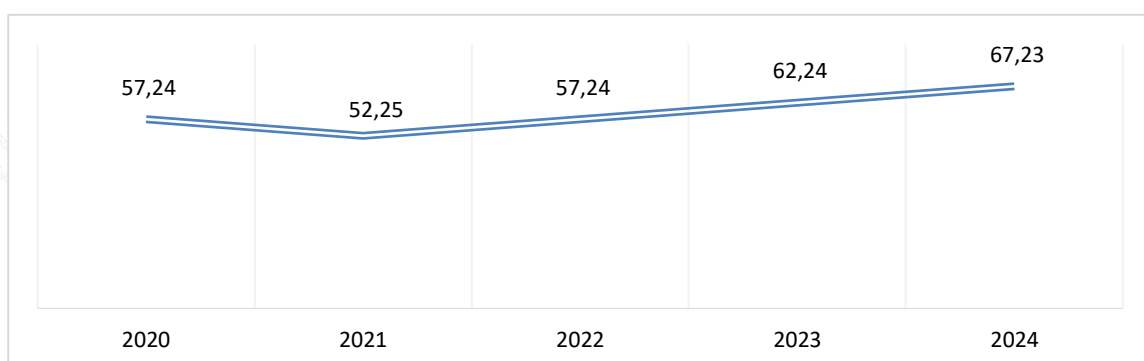
2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di suatu wilayah, termasuk aspek pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan atas tumbuh kembang anak secara optimal. Indeks ini menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai komitmen daerah terhadap pembangunan yang responsif terhadap anak.

Berdasarkan Grafik 2.27, capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi pada awal periode, namun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 57,24, kemudian mengalami penurunan menjadi 52,25 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, indeks kembali naik ke angka 57,24 dan terus meningkat menjadi 62,24 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan capaian indeks sebesar 67,23.

Kenaikan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya penguatan program-program perlindungan anak di tingkat daerah, baik melalui regulasi, kelembagaan, maupun intervensi langsung kepada kelompok anak rentan. Hal ini juga merefleksikan meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak

Grafik 2. 26
Indeks Perlindungan Anak (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender

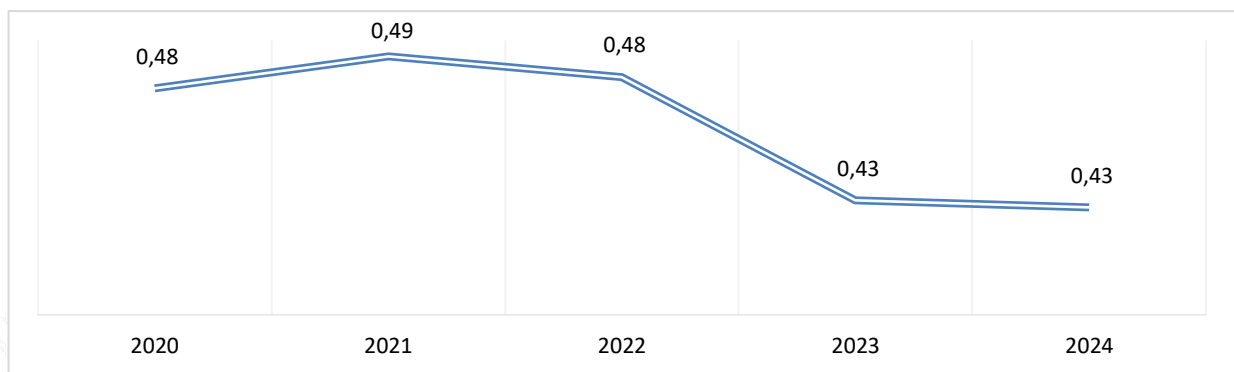
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai

dimensi pembangunan, khususnya pada bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai indeks, maka semakin kecil tingkat ketimpangan gender yang terjadi di suatu wilayah.

Berdasarkan data pada Grafik 2.28, capaian IKG Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IKG berada pada angka 0,48 dan sedikit meningkat menjadi 0,49 pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022, indeks mulai mengalami penurunan kembali ke angka 0,48, kemudian menurun signifikan ke 0,43 pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, baik dari sisi akses pendidikan, partisipasi perempuan dalam sektor formal, maupun peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Stabilitas capaian di tahun 2023 dan 2024 juga memperlihatkan bahwa kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Polewali Mandar mulai menunjukkan dampak positif secara berkelanjutan.

Grafik 2. 27
Indeks Ketimpangan Gender (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender

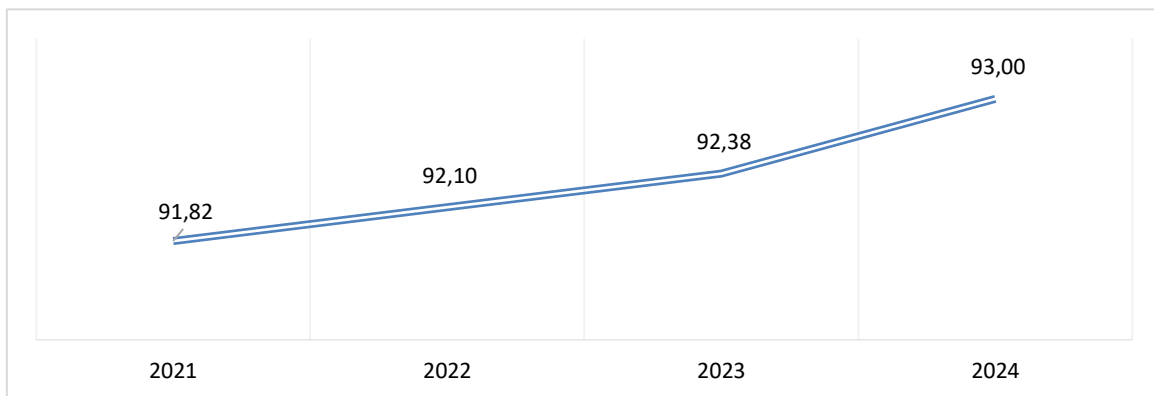
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang mempertimbangkan kesetaraan gender, terutama dalam tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPG merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disesuaikan untuk mencerminkan pencapaian relatif antara laki-laki dan

perempuan.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Grafik 2.29, capaian IPG Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan konsisten selama periode 2021–2024. IPG tercatat sebesar 91,82 pada tahun 2021, meningkat menjadi 92,10 pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 92,38 pada tahun 2023, dan mencapai 93,00 pada tahun 2024.

Peningkatan IPG ini mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang setara. Capaian ini juga menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar mulai bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap dimensi gender.

Grafik 2. 28
Indeks Pembangunan Gender (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

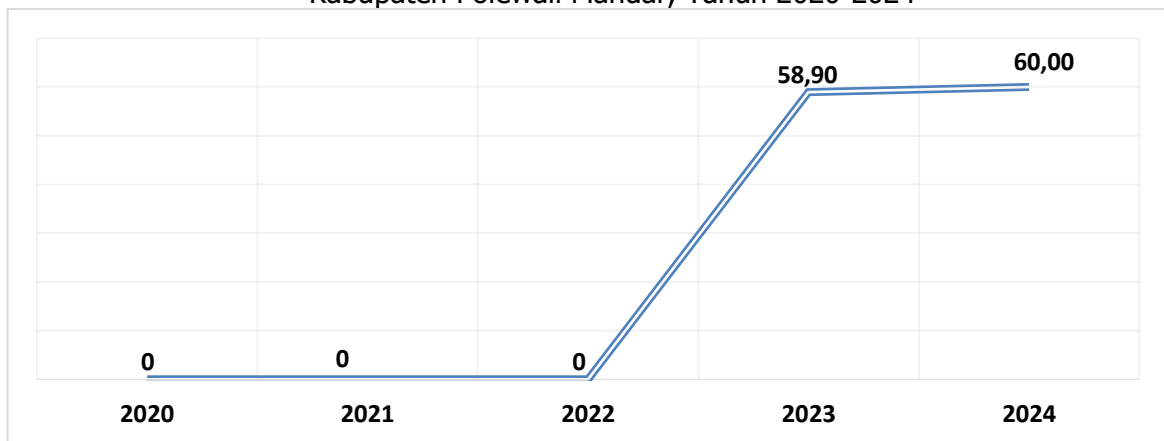
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi strategis seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan ketenagakerjaan. Di Kabupaten Polewali Mandar, perkembangan IPP menunjukkan dinamika yang signifikan dalam periode 2020–2024.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 hingga 2022, nilai IPP tercatat sebesar 0, atau belum tersedia nilai terukur. Namun, mulai tahun 2023 terjadi

lonjakan drastis dengan nilai IPP mencapai 58,90, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 60,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan potensi pemuda di Polewali Mandar mulai terukur dan menunjukkan hasil positif sejak tahun 2023.

Kenaikan tajam ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari mulai diterapkannya program-program strategis yang menasar pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah. Meski demikian, tren ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kebijakan lintas sektor yang berpihak pada pemuda agar keberlanjutan pembangunan generasi muda lebih terjamin.

Grafik 2. 29
Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

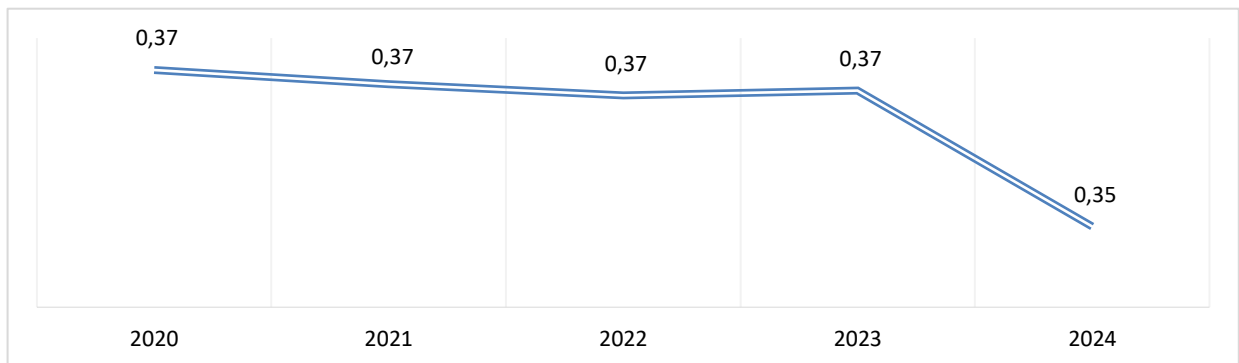
Aspek daya saing mencerminkan kapasitas Kabupaten Polewali Mandar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kualitas SDM, sektor unggulan, inovasi, dan keterhubungan kawasan. Peningkatan daya saing diperlukan agar daerah mampu beradaptasi dengan tantangan global dan memaksimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing SDM berfokus pada kualitas, kuantitas, dan struktur penduduk usia produktif. Penguatan SDM menjadi fondasi utama dalam memanfaatkan bonus demografi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja unggul.

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Grafik 2. 30
Angka Ketergantunganr (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin rendah angka ketergantungan, maka semakin besar proporsi penduduk yang produktif secara ekonomi, yang dapat menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan data Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020–2024, angka ketergantungan relatif stagnan pada level 0,37 selama empat tahun berturut-turut (2020 hingga 2023). Angka ini mencerminkan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat sekitar 37 penduduk usia non-produktif yang menjadi tanggungan. Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan nilai menjadi 0,35, yang menunjukkan perbaikan dalam komposisi demografi, yaitu semakin banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan yang non-produktif.

Penurunan angka ketergantungan ini dapat menjadi peluang strategis bagi Polewali Mandar untuk memanfaatkan bonus demografi. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja, maka potensi pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih ditingkatkan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

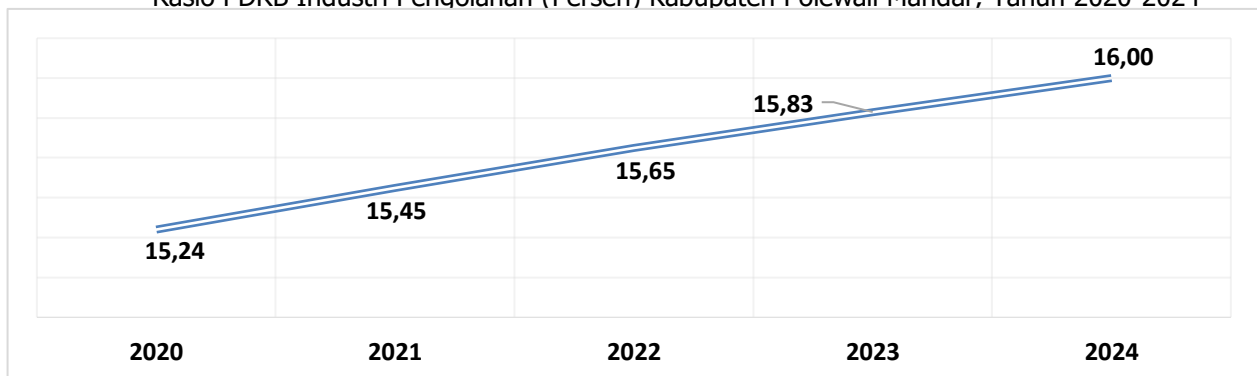
Subbab ini membahas peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek) dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan penguatan struktur

ekonomi jangka panjang di daerah. Pemanfaatan Iptek yang efektif akan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta akomodasi dan makanan-minuman. Produktivitas juga tercermin dari rasio kewirausahaan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan capaian indeks inovasi daerah yang merefleksikan kapasitas adaptif daerah terhadap perubahan dan daya saing ekonomi jangka panjang.

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 15,24 persen, kemudian naik menjadi 15,45 persen (2021), 15,65 persen (2022), 15,83 persen (2023), dan mencapai 16,00 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, yang menandakan penguatan struktur ekonomi daerah menuju sektor hilir yang lebih produktif dan bernilai tambah

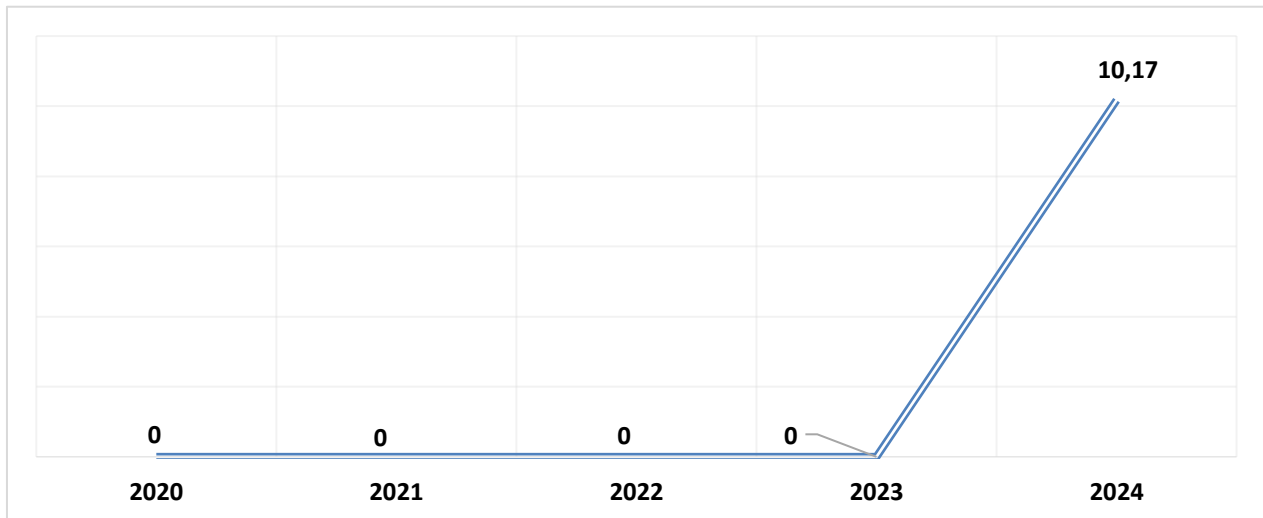
Grafik 2. 31
Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor akomodasi serta makanan dan minuman di Kabupaten Polewali Mandar tidak menunjukkan kontribusi pada tahun 2020 hingga 2023, tercatat sebesar 0 persen selama empat tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 10,17 persen. Kenaikan tajam ini menandakan munculnya aktivitas ekonomi baru di sektor pariwisata dan jasa kuliner, yang berpotensi menjadi sektor unggulan daerah ke depan apabila didukung dengan pengembangan infrastruktur, promosi wisata, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Grafik 2. 32
Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024

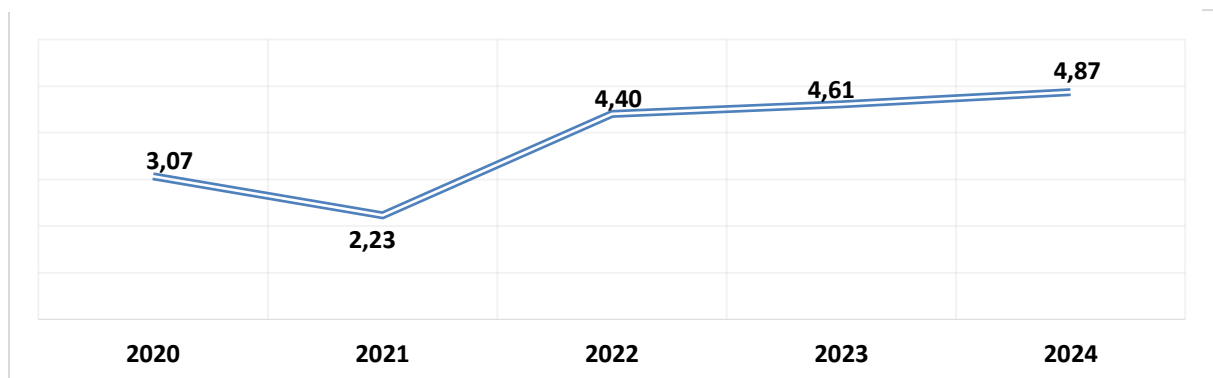


2.1.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah sempat turun dari 3,07 persen pada tahun 2020 menjadi 2,23 persen pada 2021, rasio ini menunjukkan tren kenaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya: 4,40 persen (2022), 4,61 persen (2023), hingga mencapai 4,87 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya minat dan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha, yang dapat menjadi pendorong penting bagi kemandirian ekonomi lokal dan perlu terus difasilitasi melalui pelatihan, akses modal, dan pendampingan usaha.

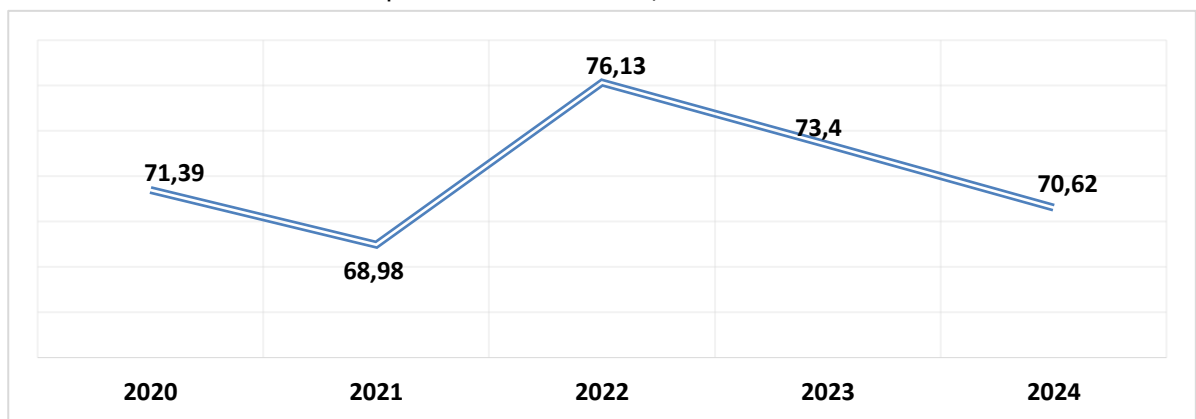
Grafik 2. 33
Rasio Kewirausahaan (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 71,39 persen dan menurun menjadi 68,98 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 76,13 persen. Namun, angka ini kembali menurun menjadi 73,40 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 70,62 persen. Perubahan dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja di daerah ini.

Grafik 2. 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024

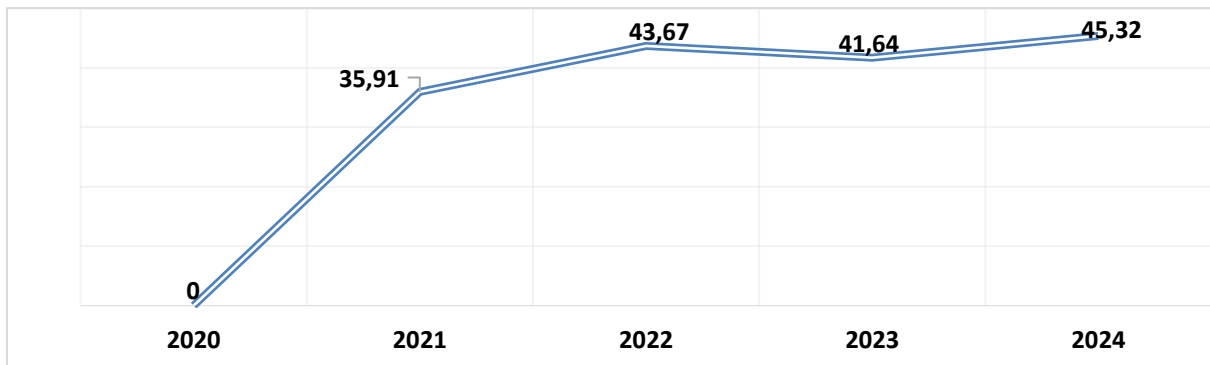


Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara umum. Pada tahun 2020, indeks masih berada di angka 0. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 35,91. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 43,67. Meskipun sempat menurun pada 2023 ke angka 41,64, nilai tersebut kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 45,32. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa secara umum terdapat penguatan dalam kapasitas inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, baik dalam hal kelembagaan, kebijakan, maupun pelayanan publik berbasis inovasi. Grafik 2.36 secara visual memperlihatkan dinamika capaian indeks inovasi daerah tersebut.

Grafik 2. 35
Indeks Inovasi Daerah (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: Kemendagri RI, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana transformasi ekonomi suatu wilayah mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Indeks ini mencakup aspek investasi hijau, efisiensi sumber daya, serta penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini data Indeks Ekonomi Hijau untuk Kabupaten Polewali Mandar belum tersedia.

2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia bertujuan untuk mengukur kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara berkelanjutan, mencakup pemanfaatan sumber daya laut, perlindungan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Saat ini, Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki data resmi terkait capaian Indeks Ekonomi Biru.

2.1.3.3.3 Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer menggambarkan komitmen dan capaian suatu wilayah dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan rendah karbon. Namun, untuk Kabupaten Polewali Mandar, data terkait proporsi EBT dalam bauran energi primer belum tersedia.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong

efisiensi tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di era digital. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperluas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta memperkuat adopsi teknologi di berbagai sektor pembangunan daerah.

Untuk mengukur kemajuan dalam transformasi digital, salah satu indikator utama yang digunakan secara nasional adalah **Indeks Masyarakat Digital**. Indeks ini mencerminkan tingkat keterhubungan, penggunaan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam ruang digital, termasuk aspek akses, kecakapan digital, dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi digital.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), **nilai baseline Indeks Masyarakat Digital untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 45,62 poin**. Angka ini menjadi titik awal penting dalam menilai kesiapan dan arah pembangunan digital Kabupaten Polewali Mandar, serta menjadi referensi bagi perencanaan strategis dan kebijakan transformasi digital di masa mendatang. Tabel berikut menyajikan data baseline yang dimaksud:

Tabel 2. 11
Baseline Indeks Masyarakat Digital tahun 2025

No	Sasaran Pokok Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025
1	Terwujudnya Transformasi Digital	Indeks Masyarakat Digital (Indeks)	45,62

Selanjutnya, peningkatan indeks ini akan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur TIK hingga ke desa, serta inklusi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan infrastruktur, akses, dan pemanfaatan teknologi informasi di suatu wilayah. IP-TIK menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan daerah menghadapi era digital. Untuk Kabupaten Polewali Mandar, data

resmi terkait IP-TIK hingga tahun 2024 belum tersedia.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dalam rangka mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional, Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan arah transformasi daerah menuju integrasi ekonomi domestik dan global. Fokus utama dari arah ini adalah pengembangan kawasan, baik perkotaan maupun perdesaan, secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah, serta peningkatan keterlibatan dalam rantai pasok dan perdagangan nasional maupun internasional, menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Sebagai pijakan awal pengukuran, terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan kondisi integrasi ekonomi daerah, yaitu:

1. **Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, yang merepresentasikan kestabilan harga sebagai faktor kunci ketahanan ekonomi rumah tangga. Nilai baseline untuk indikator ini pada tahun 2025 tercatat sebesar **0,17 persen**.
2. **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai Persentase terhadap PDRB**, yang mencerminkan kapasitas investasi produktif dalam mendukung transformasi struktural ekonomi. Capaian awal Kabupaten Polewali Mandar untuk indikator ini adalah **24,88 persen** pada tahun 2025.
3. **Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB**, yang menggambarkan sejauh mana daerah telah terlibat dalam perdagangan barang dan jasa, baik antarwilayah maupun dengan pasar nasional dan global. Angka baseline pada tahun 2025 berada di angka **3,91 persen**.

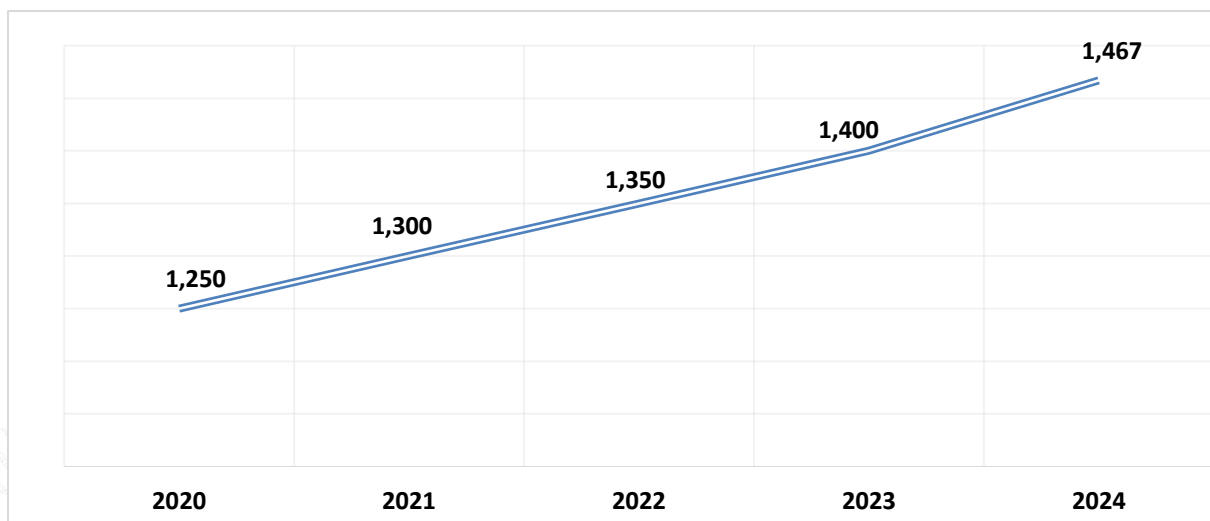
Ketiga indikator tersebut menjadi dasar untuk memetakan posisi awal Kabupaten Polewali Mandar dalam kerangka integrasi ekonomi dan sekaligus menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan lanjutan. Meskipun belum tersedia target lima tahunan secara spesifik, baseline ini penting untuk evaluasi awal dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah dan terukur. Ke depan, penyusunan

roadmap kebijakan dan penguatan sistem data statistik diperlukan agar indikator-indikator ini dapat dimonitor secara periodik dan ditindaklanjuti secara strategis.

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Grafik 2.37 menunjukkan tren pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Polewali Mandar pada periode 2020–2024. Nilai PMTB terus meningkat dari Rp1.250 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.467 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini konsisten setiap tahun: 2021 sebesar Rp1.300 miliar, 2022 mencapai Rp1.350 miliar, dan 2023 naik menjadi Rp1.400 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan investasi pada barang modal seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PMTB yang stabil juga menunjukkan potensi daya saing daerah dalam menarik investasi jangka panjang dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Grafik 2. 36
Pembentukan Modal tetap Bruto (Milyar Rupiah)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu arah kebijakan strategis yang diusung adalah industrialisasi koperasi. Strategi ini bertumpu pada tiga elemen utama, yaitu hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi, serta adopsi

teknologi yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendorong koperasi agar tidak hanya menjadi wadah ekonomi rakyat, tetapi juga mampu naik kelas sebagai pelaku utama dalam rantai pasok industri daerah.

Upaya hilirisasi diarahkan agar hasil produksi lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang berdaya saing tinggi. Sementara itu, kelembagaan koperasi diperkuat melalui pelatihan, akses pendanaan, dan fasilitasi pemasaran agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Penerapan teknologi menjadi kunci akselerasi efisiensi dan inovasi dalam tata kelola koperasi dan proses produksi.

Sebagai gambaran awal, capaian indikator ekspor barang dan jasa sebagai persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 berada pada angka 3,91 persen. Angka ini mencerminkan kontribusi sektor perdagangan luar daerah terhadap perekonomian lokal, dan sekaligus menjadi titik awal untuk mengukur kemajuan dalam mendorong keterbukaan ekonomi serta daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional.

Meskipun saat ini data lanjutan untuk target tahapan belum tersedia, angka baseline tersebut penting sebagai pijakan awal perencanaan program dan kegiatan penguatan koperasi dan UMKM unggulan berbasis komoditas daerah. Ke depan, pengumpulan data berkala dan evaluasi indikator ini akan sangat penting untuk menilai efektivitas arah kebijakan industrialisasi koperasi secara konkret.

2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar bisa diukur dengan capaian indeks infrastruktur, akses hunian layak, dan peningkatan jumlah status desa mandiri.

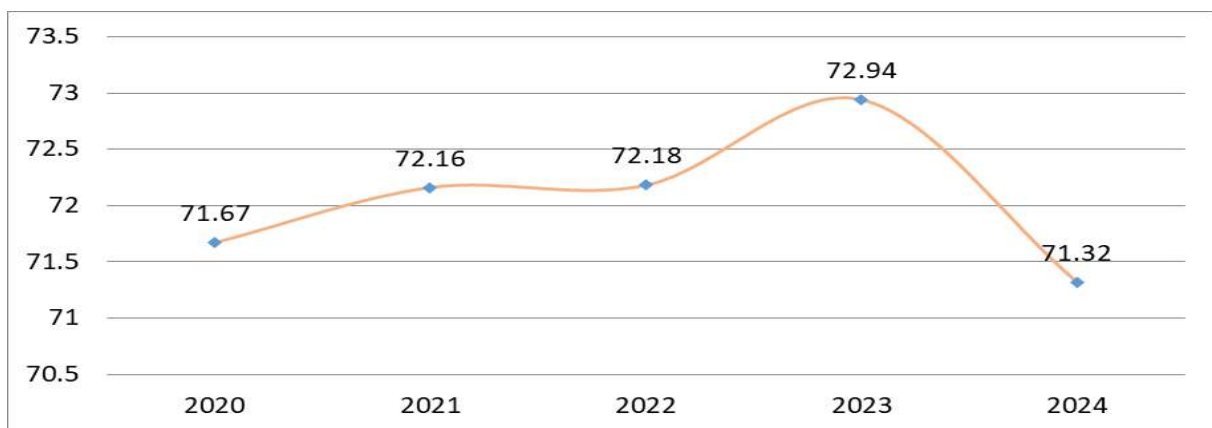
2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah indeks yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari indeks infrastruktur wilayah dan indeks infrastruktur permukiman. Indeks infrastruktur wilayah menggambarkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur telekomunikasi dan rasio elektrifikasi. Sedangkan indeks infrastruktur permukiman menggambarkan kondisi layanan akses air minum,

sanitasi, serta PSU perumahan dan kawasan permukiman diantaranya prasarana persampahan, penerangan jalan umum dan drainase.

Indeks Infrastruktur di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 71,67 persen, kemudian terus meningkat hingga mencapai 72,94 persen pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan menjadi 71,32 persen pada tahun 2024. Capaian indeks ini menggambarkan bahwa adanya penurunan kondisi infrastruktur waktu lima tahun terakhir. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan indeks infrastruktur tersebut adalah menurunnya kondisi kemantapan jalan kabupaten.

Grafik 2. 37
Indeks Infrastruktur (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



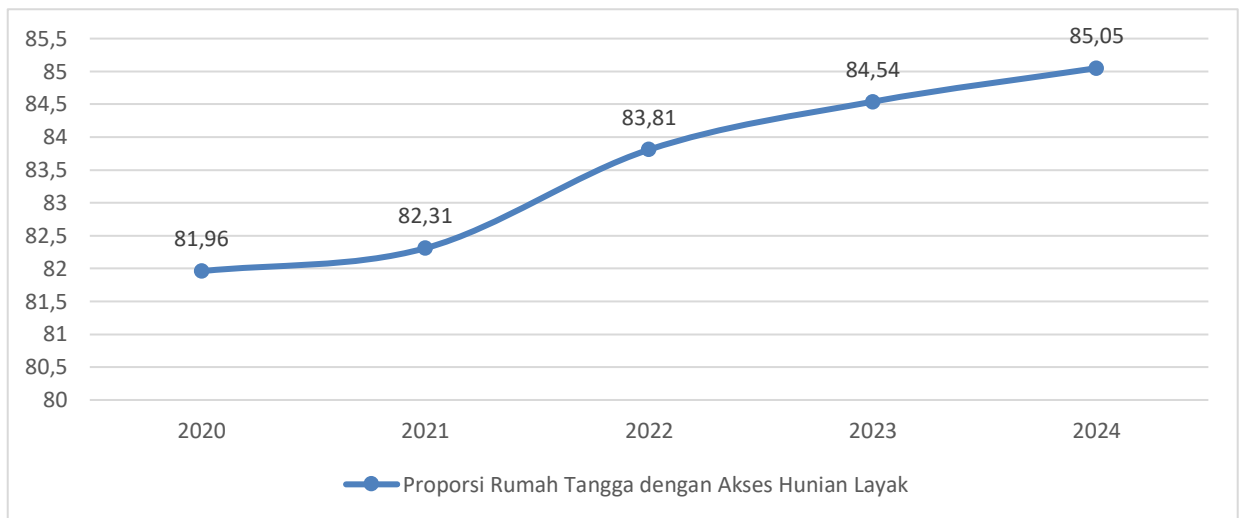
Sumber: Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.3.6.2 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

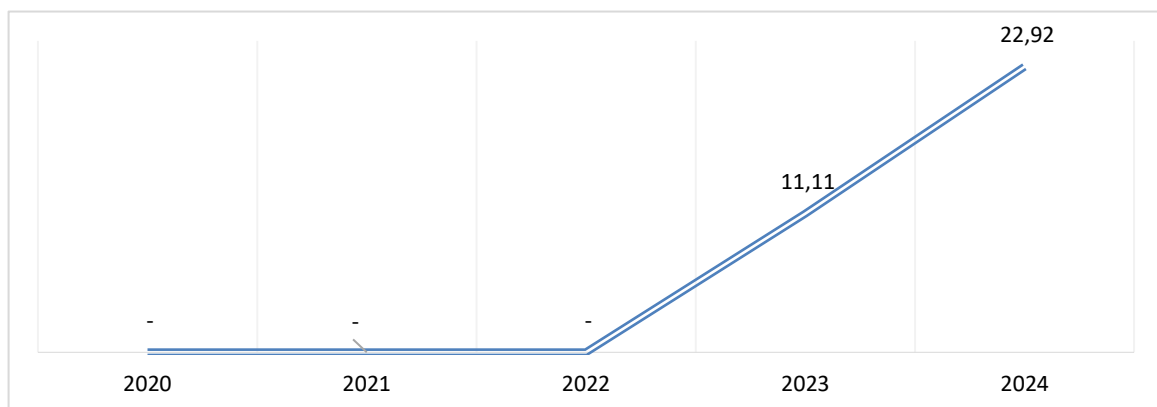
Hunian layak di kabupaten Polewali Mandar masih diukur dengan kriteria kondisi bangunan utama antara lain kondisi atap, kondisi lantai dan kondisi dinding. Berdasarkan data yang ada, proporsi rumah tanggan dengan akses hunian layak di kabupaten polewali mandar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Grafik 2. 38
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri

Grafik 2. 39
Persentase Desa Mandiri (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar, 2025

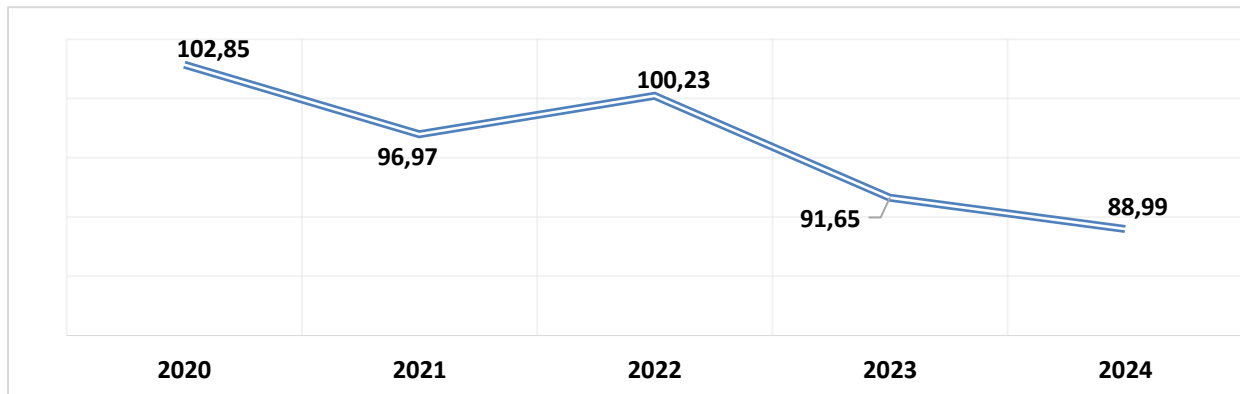
Pada tahun 2020 hingga 2022, persentase desa mandiri di Kabupaten Polewali Mandar belum tercatat atau masih nol. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan capaian sebesar 11,11 persen, yang kemudian meningkat pesat menjadi 22,92 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa, khususnya dari aspek kapasitas ekonomi, sosial, dan ekologi yang menjadi indikator desa mandiri.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar **102,85%**, namun menurun menjadi **96,97%** pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat menjadi **100,23%** di tahun 2022, tren kembali menurun hingga mencapai **91,65%** pada 2023 dan **88,99%** pada 2024. Data ini menunjukkan penurunan efektivitas kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto wilayah, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penguatan fiskal daerah.

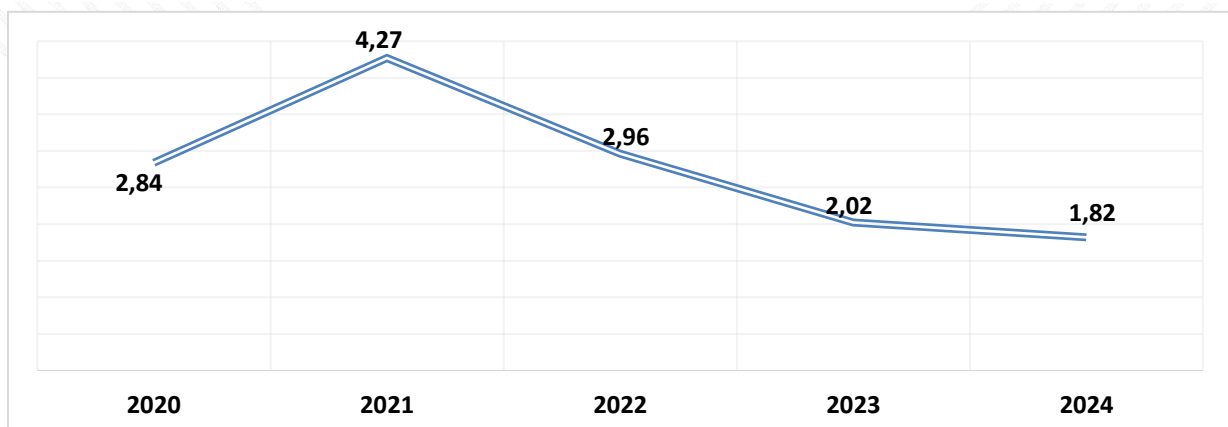
Grafik 2. 40
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Grafik 2. 41 Tingkat Inflasi (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: TPID Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan berbagai kemajuan dalam hal tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kualitas regulasi, reformasi birokrasi, serta digitalisasi sistem pemerintahan. Hal ini tercermin dari capaian indeks reformasi hukum, indeks SPBE, dan indeks pelayanan publik yang menjadi tolok ukur transformasi birokrasi modern.

Selain itu, aspek integritas pemerintahan juga dipantau melalui berbagai instrumen nasional seperti Indeks Integritas (SPI), dan tingkat maturitas SPIP. Penilaian terhadap penegakan hukum, capaian aksi HAM, dan partisipasi demokratis juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan akuntabel, meskipun sebagian indikator seperti IDI dan Indeks Rasa Aman masih belum tersedia datanya secara spesifik.

Di bidang kerja sama antarwilayah, peningkatan daya saing daerah menjadi perhatian utama. Capaian Indeks Daya Saing yang menunjukkan tren positif mengindikasikan bahwa berbagai intervensi pembangunan mulai berdampak pada produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat pun memperlihatkan kinerja yang sangat baik dan konsisten.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. Transformasi birokrasi dilakukan secara bertahap melalui perbaikan regulasi, penguatan sistem digital pemerintahan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di setiap lini layanan.

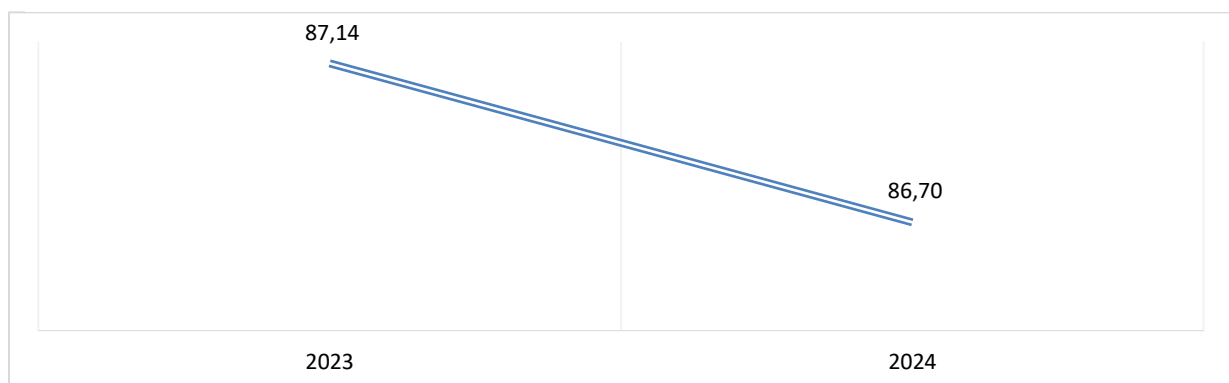
Beberapa indikator kunci digunakan untuk memantau kemajuan tersebut, seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Pelayanan Publik. Di sisi lain, penguatan integritas diwujudkan melalui penilaian Indeks Integritas Nasional, termasuk survei penilaian integritas (SPI), dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Capaian indikator-indikator tersebut tidak hanya menggambarkan efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana birokrasi di Polewali Mandar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, lebih responsif, terbuka, dan berbasis data.

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren **penurunan tipis** dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks tercatat sebesar **87,14**, kemudian menurun menjadi **86,70** pada tahun 2024. Penurunan ini meskipun relatif kecil, tetap perlu menjadi perhatian karena dapat mencerminkan perlambatan dalam upaya penyederhanaan regulasi, penataan kelembagaan hukum, atau pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam aspek hukum daerah. Untuk menjaga kualitas tata kelola yang berintegritas dan adaptif, dibutuhkan langkah evaluatif terhadap strategi reformasi hukum, termasuk penguatan koordinasi antar

Grafik 2. 42
Indeks Reformasi Hukum (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



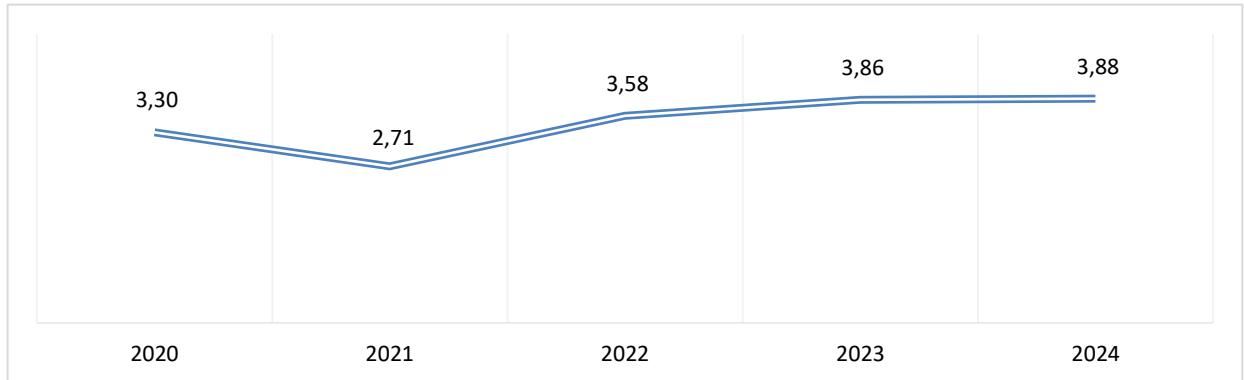
instansi hukum dan percepatan digitalisasi layanan berbasis regulasi yang efisien.

2.1.4.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada periode 2020–2024, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren yang positif. Indeks ini sempat menurun dari 3,30 pada tahun 2020 menjadi 2,71 pada tahun 2021. Namun, setelahnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,58 di tahun 2022, lalu naik kembali menjadi 3,86 pada 2023, dan mencapai 3,88 pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan

digital, termasuk aspek layanan publik digital, manajemen data, serta efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan.

Grafik 2. 43
Indeks SPBE (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024

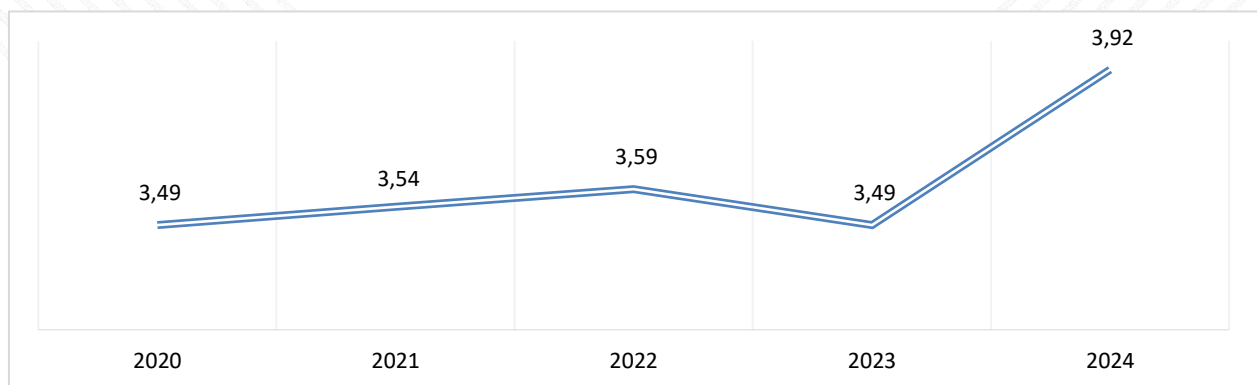


Sumber: Kementerian Kominfo RI, 2025

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Polewali Mandar dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Indeks tercatat sebesar 3,49 pada tahun 2020, kemudian meningkat berturut-turut menjadi 3,54 pada 2021 dan 3,59 pada 2022. Meskipun terjadi penurunan kembali ke angka 3,49 pada tahun 2023, perbaikan signifikan terlihat pada tahun 2024 dengan lonjakan indeks menjadi 3,92. Kenaikan ini mencerminkan upaya perbaikan kualitas layanan publik yang konsisten, baik dari sisi aksesibilitas, kecepatan, maupun akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Grafik 2. 44
Indeks Pelayanan Publik (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian PAN RB RI, 2025

2.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Kabupaten Polewali Mandar tercermin dalam perkembangan tiga indikator utama integritas nasional, yaitu: (1) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI), (2) Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, dan (3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

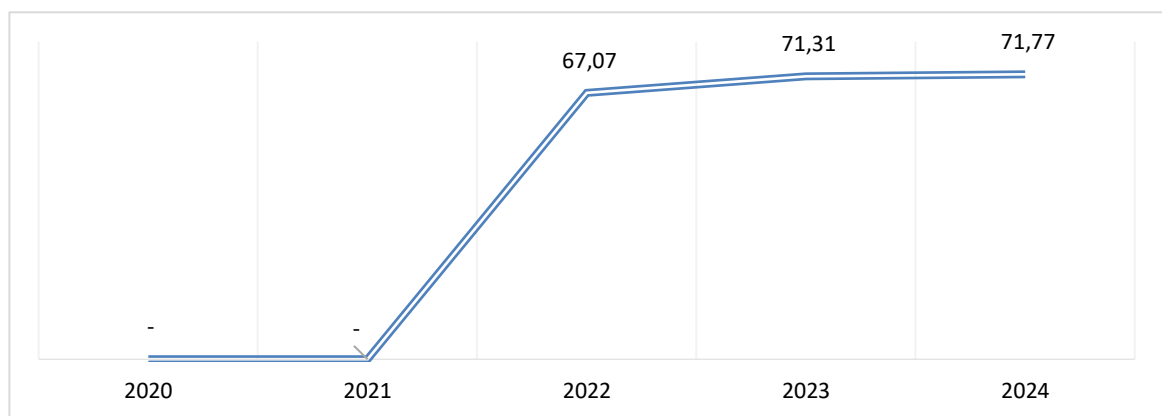
Pertama, berdasarkan data Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK, terlihat bahwa Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan skor dari 3,04 pada tahun 2020 menjadi 3,11 di tahun 2021. Selanjutnya, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 3,53, meskipun sedikit menurun menjadi 3,45 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks kembali menguat menjadi 3,51. Pola fluktuatif ini menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan prinsip integritas di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik, meskipun tren jangka menengahnya tetap positif.

Kedua, pada indikator Nilai MCP KPK, terjadi peningkatan tajam dari 0 (belum tersedia data) di tahun 2020 dan 2021, menjadi 67,07 pada tahun 2022. Kenaikan ini menandai awal dari pemantauan sistematis oleh KPK terhadap kepatuhan pemerintah daerah terhadap area intervensi antikorupsi. Tren ini terus menunjukkan perbaikan di tahun-tahun berikutnya, yakni 71,31 pada 2023 dan naik tipis menjadi 71,77 pada 2024. Konsistensi ini mencerminkan peningkatan komitmen dan implementasi tindakan pencegahan korupsi oleh Pemkab Polewali Mandar melalui sembilan area MCP yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan APIP.

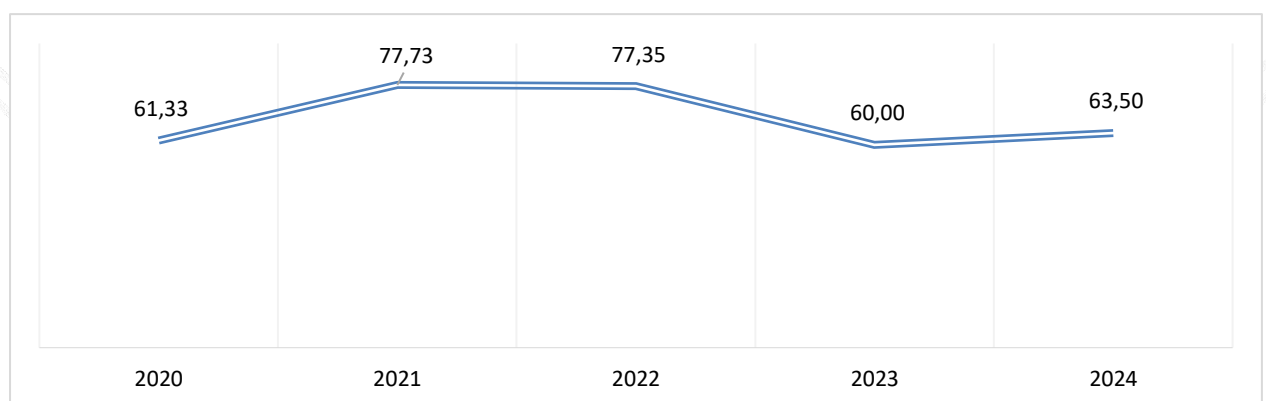
Ketiga, pada aspek Indeks Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP, nilai Polewali Mandar juga menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, nilai indeks berada di angka 61,33 dan meningkat signifikan menjadi 77,73 pada 2021, kemudian tetap tinggi di angka 77,35 pada tahun 2022. Namun, indeks mengalami penurunan pada 2023 menjadi 60,00, sebelum kembali meningkat ke 63,50 di tahun 2024. Penurunan pada 2023 perlu menjadi perhatian untuk evaluasi internal dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah agar tata kelola dan akuntabilitas tetap terjaga.

Secara keseluruhan, ketiga grafik tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengupayakan penguatan sistem integritas, baik melalui instrumen pengawasan eksternal oleh KPK dan BPKP, maupun melalui penguatan nilai dan praktik antikorupsi di tingkat internal. Konsistensi peningkatan nilai MCP dan SPI menjadi modal penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi ke depan. Namun, adanya fluktuasi dalam nilai SPIP menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pengawasan internal dan pembinaan manajerial pada seluruh perangkat daerah.

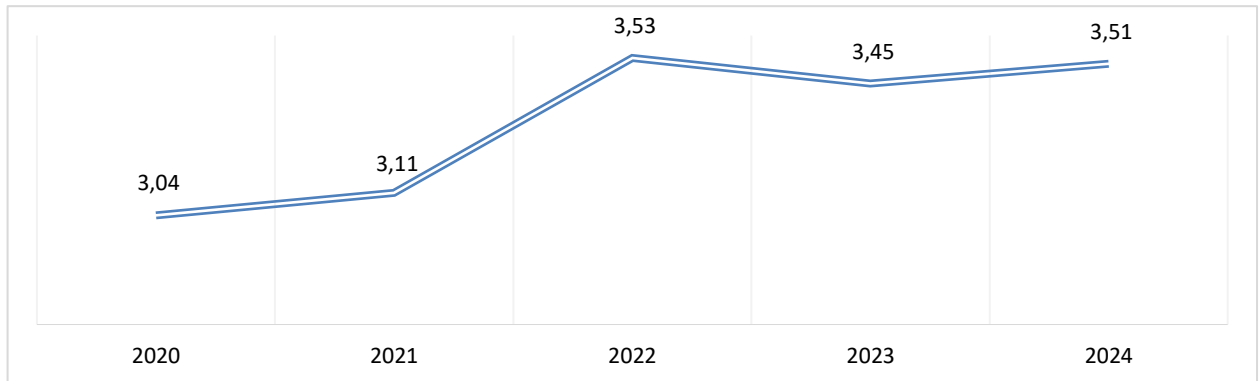
Grafik 2. 45
Indeks Integrasi Nasional (Indeks Survey Penilaian Integritas), (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Grafik 2. 46
Indeks Integrasi Nasional (Nilai MCP KPK), (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Grafik 2. 47
Indeks Integrasi Nasional (Indeks Maturitas SPIP), (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Demokrasi Substansial

Aspek hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, serta demokrasi yang substansial merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Polewali Mandar, upaya untuk mewujudkan tata kelola yang menjunjung prinsip keadilan hukum, menjamin rasa aman, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi terus menjadi prioritas. Hal ini tercermin dalam indikator-indikator kunci seperti persentase penegakan Peraturan Daerah, capaian aksi HAM, dan penguatan kualitas demokrasi lokal.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan seperti belum tersedianya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Rasa Aman secara spesifik, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen melalui pelaporan indikator lain yang relevan dan upaya peningkatan koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, pembangunan sistem hukum yang inklusif dan tegaknya supremasi hukum, serta partisipasi publik yang bermakna dalam proses demokratis, menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan berdaulat secara demokratis.

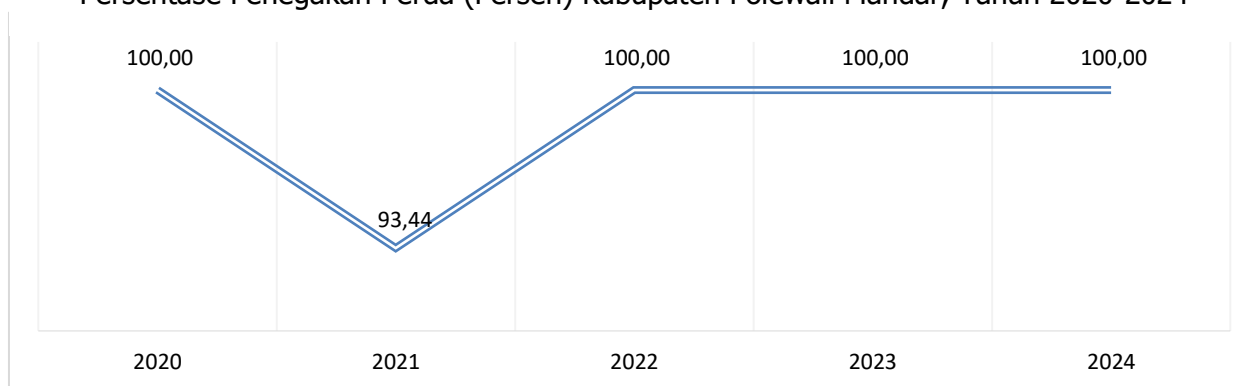
2.1.4.2.1 Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Polewali Mandar secara umum menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dalam kurun waktu 2020–2024.

Pada tahun 2020, capaian berada pada angka **100,00%**, kemudian sempat menurun menjadi **93,44%** pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, persentase penegakan Perda kembali stabil di angka **100,00%** secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.

Stabilitas ini mencerminkan upaya yang optimal dari aparat pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi yang telah ditetapkan. Konsistensi ini perlu dipertahankan dan diperkuat dengan peningkatan kualitas sosialisasi hukum serta koordinasi lintas sektor agar efektivitas penegakan Perda terus berkelanjutan.

Grafik 2. 48
Persentase Penegakan Perda (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar, 2025

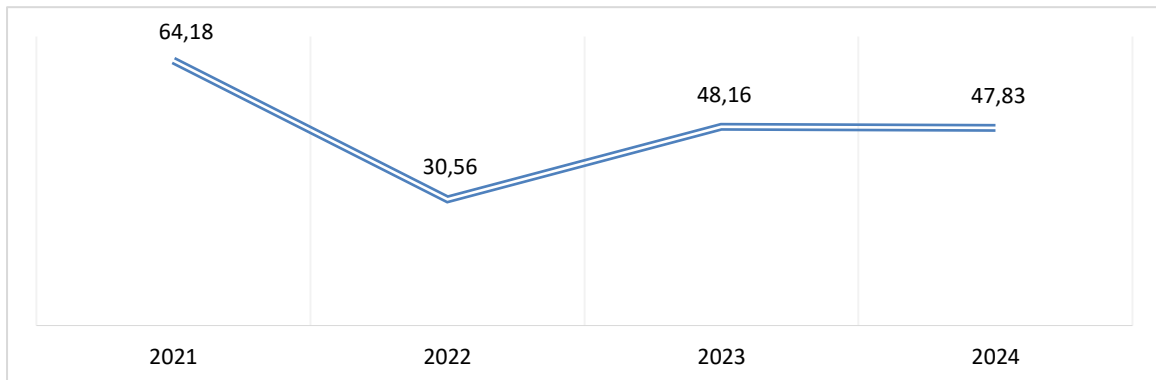
2.1.4.2.2 Aksi Hak Asasi Manusia

Persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, capaian mencapai angka tertinggi sebesar **64,18%**, namun mengalami penurunan tajam menjadi **30,56%** di tahun 2022. Selanjutnya, terjadi pemulihan pada tahun 2023 dengan peningkatan capaian menjadi **48,16%**, meskipun sedikit menurun kembali pada tahun 2024 menjadi **47,83%**.

Variasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Aksi HAM masih menghadapi tantangan konsistensi dan keberlanjutan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, integrasi data pelaporan, serta monitoring berkelanjutan agar capaian Aksi HAM dapat ditingkatkan secara stabil dan

merata dari tahun ke tahun.

Grafik 2. 49
Persentase Capaian Aksi HAM (Persen)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian HAM Sulawesi Barat, 2025

2.1.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Pada saat penyusunan dokumen ini, data **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** untuk Kabupaten Polewali Mandar belum tersedia dalam publikasi resmi baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi terkait lainnya. Padahal, IDI merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan peran lembaga demokrasi, telah dijalankan di suatu wilayah.

Ketiadaan data IDI ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mendorong peningkatan kapasitas dalam pengumpulan dan pelaporan data yang relevan. Hal ini penting agar kualitas tata kelola pemerintahan dan pelibatan masyarakat dalam proses demokratis dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.1.4.2.4 Indeks Rasa Aman

Data mengenai **Indeks Rasa Aman** untuk Kabupaten Polewali Mandar saat ini belum tersedia secara spesifik dalam basis data nasional maupun daerah. Indeks ini seharusnya merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan pribadi maupun lingkungan tempat tinggal, serta ketakutan terhadap kejahatan atau gangguan sosial lainnya.

Absennya data ini menjadi catatan penting bahwa aspek rasa aman perlu

menjadi perhatian dalam agenda pembangunan sosial. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan survei atau kerja sama lintas sektor, khususnya dengan lembaga kepolisian, BPS, dan lembaga riset, guna menghadirkan data yang valid untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan berbasis rasa aman warga.

2.1.4.2.5 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Hingga dokumen ini disusun, tidak terdapat data spesifik terkait **Indeks Ketenteraman dan Ketertiban** di Kabupaten Polewali Mandar. Padahal, indikator ini penting dalam mencerminkan stabilitas sosial dan tertibnya kehidupan bermasyarakat, termasuk penegakan hukum, pencegahan konflik, serta penanganan pelanggaran sosial.

Ketiadaan data ini dapat menghambat proses pemantauan terhadap kondisi sosial yang harmonis di daerah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sistem pelaporan dan integrasi data dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat, agar indikator ini dapat tersedia secara rutin dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ketenteraman wilayah.

2.1.4.2.6 Indikator lainnya sesuai konteks Daerah

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

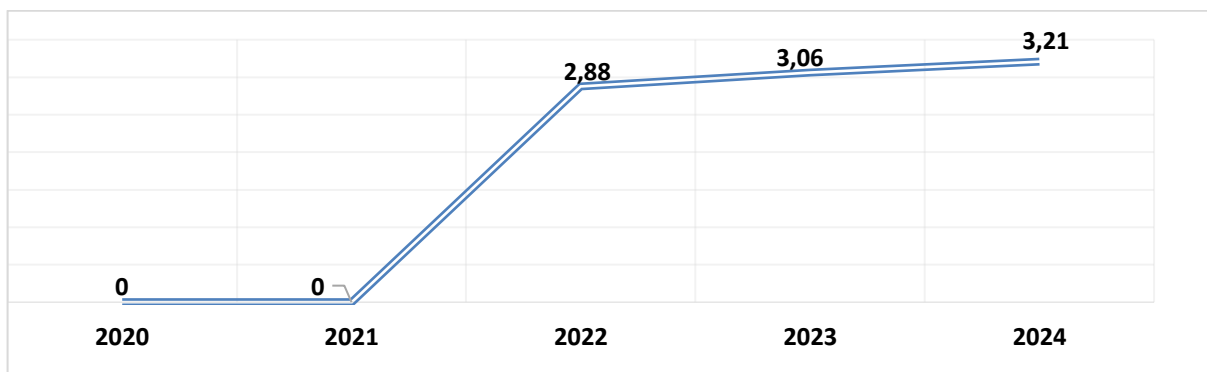
Upaya untuk memperkuat posisi strategis daerah di kawasan diwujudkan melalui peningkatan kerja sama daerah serta penguatan daya saing wilayah. Hingga tahun 2025, jumlah kerja sama daerah yang telah terjalin di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak **15 kerja sama**, mencerminkan fondasi awal dalam menjalin kolaborasi antardaerah maupun lintas batas administratif dalam kerangka penguatan diplomasi daerah.

Selain itu, **Indeks Daya Saing Daerah** Kabupaten Polewali Mandar pada baseline tahun 2025 berada pada angka **5,00**. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dari angka 3,16 pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai intervensi pembangunan daerah telah berdampak positif terhadap aspek produktivitas, efisiensi birokrasi, kualitas SDM, serta infrastruktur penunjang daya saing ekonomi daerah.

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan perkembangan positif sejak tahun 2022. Setelah tidak tercatat pada tahun 2020 dan 2021, indeks ini mulai terukur pada tahun 2022 dengan nilai 2,88, kemudian meningkat menjadi 3,06 pada 2023, dan mencapai 3,21 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kapasitas daerah dalam aspek ekonomi, kelembagaan, dan infrastruktur sebagai faktor utama penentu daya saing wilayah.

Grafik 2. 50
Indeks Daya Saing Daerah (Angka)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024

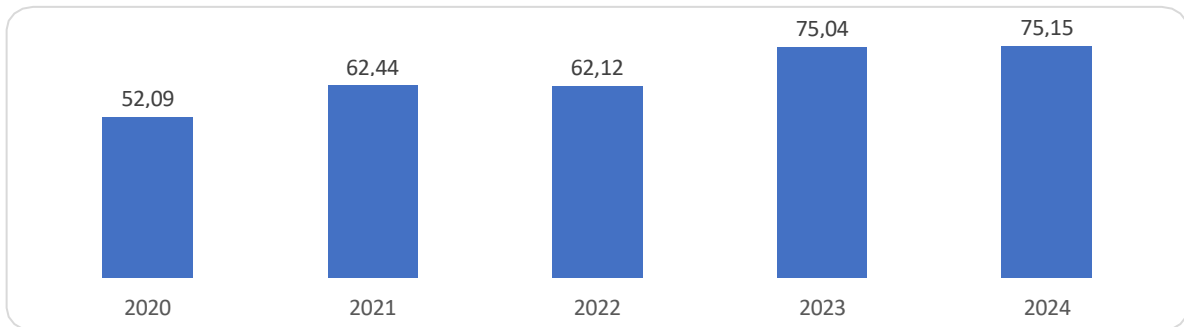


2.1.4.4 Urusan Pendidikan

2.1.4.4.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuasi dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, APK PAUD sebesar 52,09 persen, dan pada tahun 2024 APK PAUD meningkat signifikan sebesar 75,15 persen. Ini menunjukkan bahwa Jumlah anak terlayani program PAUD juga mengalami peningkatan selama 5 tahun dari 23.348 orang anak pada tahun 2020 menjadi 26.135 orang anak pada tahun 2024 artinya terjadi kenaikan sebanyak 2.787 orang anak atau 0,89%. Dengan nilai APK PAUD Kabupaten Polewali Mandar sebesar 75,15 pada tahun 2024, Capaian ini merupakan capaian tertinggi dari 6 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat dan diatas dari capaian APK PAUD Provinsi Sulawesi Barat sebesar 57,25 pada tahun 2024.

Grafik 2. 51
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

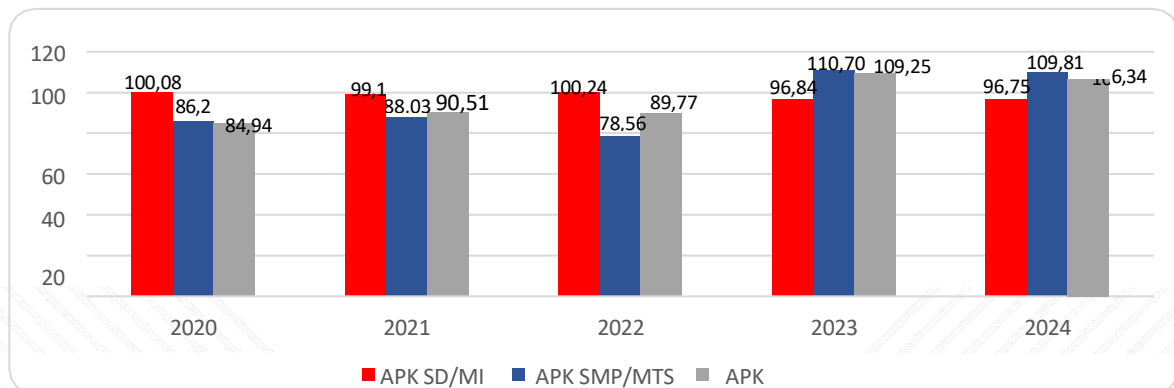


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.4.2 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA

Dalam kurun waktu 2020-2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah SD/MI relatif tinggi lebih tinggi ketimbang APK Sekolah SMP/MTS dan APK Sekolah SMA/MA. Kondisi APK pada jenjang SMP dan SMA terus meningkat pada tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang SMP dan jenjang SMA lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SMP/MTS dan penduduk usia SMA/MA di Kabupaten Polewali Mandar.

Grafik 2. 52
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

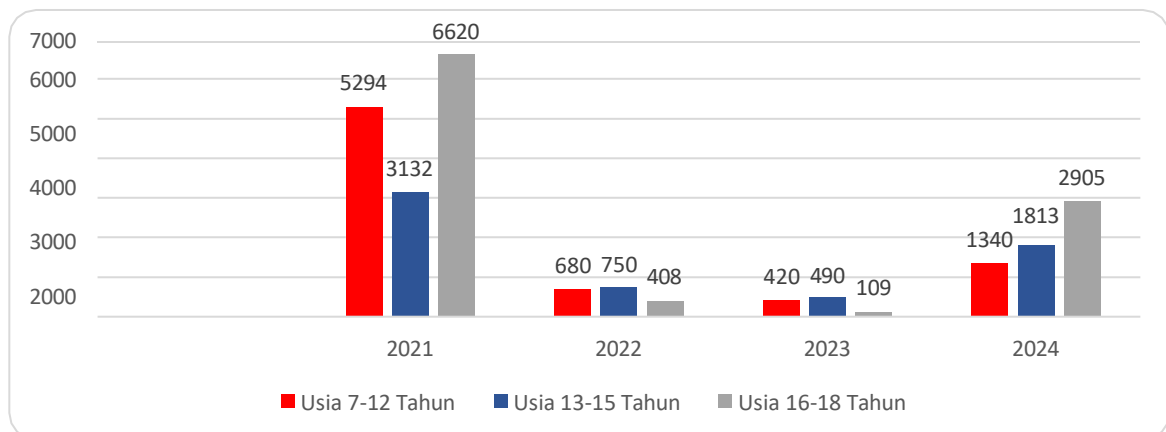
2.1.4.4.3 Angka Tidak Sekolah

Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun). Semakin tinggi Jumlah

Anak Tidak Sekolah (ATS) menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka ATS semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin membaik.

Jumlah ATS tahun 2021 menunjukkan Jumlah terbesar, baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/MA. Kondisi ATS cenderung fluktuatif pada tahun 2022-2024. Pada jenjang pendidikan SD/MI, ATS meningkat dari 420 anak menjadi 1.340 anak. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, ATS meningkat dari 490 anak menjadi 1.813 anak. Jumlah ATS terbesar pada jenjang SMA/MA dari 109 anak menjadi 2.905 anak. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya ATS antara lain; jarak lokasi tempat tinggal dengan fasilitas sekolah, pernikahan dini, membantu orang tua mencari nafkah, dan lain-lain.

Grafik 2. 53
Angka Putus Sekolah SD dan SMP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024



Sumber: BKBN (2021), DIKNAS (2022-2023) Kemendikbud Ristek (2024)

2.1.4.4.4 Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuatif dengan tren menurun selama rentang waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Angka Melanjutkan Pendidikan mencapai 86,62 persen, berlanjut pada tahun 2021-2022 mencapai 98,87 persen. Namun pada tahun 2023-2024 Angka Melanjutkan Pendidikan kembali menurun ke level 92,83 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh lulusan SD/MI atau Sederajat pada tahun 2023 hanya 92,83 persen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs atau Sederajat.

Tabel 2. 12
Angka Melanjutkan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Siswa Baru SMP/MTS Sederajat	7.087	5.327	7.087	7.087	8.094
2	Lulusan SD/MI Sederajat	8.182	7.536	8.103	7.444	8719
3	Persentase	86,62	98,74	98,87	95,20	92,83

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar 2025

2.1.4.4.5 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dalam kondisi baik menunjukkan tren fluktuatif untuk semua jenjang pendidikan. Fasilitas pendidikan Pra Sekolah (PAUD/KB/TK/RA/PLB) dari 5 indikator, capaian yang masih rendah pada kondisi toilet sebesar 2,82 persen di tahun 2024 dari total 605 satuan pendidikan (PAUD/KB/TK/RA/PLB). Pada periode yang sama, fasilitas pendidikan SD/MI dari 8 indikator, capaian yang masih rendah pada laboratorium computer sebesar 53 di tahun 2024 dari total 421 satuan pendidikan SD/MI. Begitu pula fasilitas pendidikan SMP/MTs dari 5 indikator, capaian yang paling rendah pada Laboratorium IPA sebesar 47 di tahun 2024 dari total 152 satuan pendidikan SMP/MTS.

Tabel 2. 13
Sekolah Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sarana Pendidikan PAUD							
1	Kondisi Ruang Kelas	Jumlah	766	1068	746	746	786
2	Kondisi Akses Listrik	Jumlah	-	372	375	490	514
3	Kondisi Akses Internet	Jumlah	-	372	128	131	182
4.	Kondisi Sarana Cuci Tangan	Persen	-	92,86	70,45	71,15	73,26
5	Kondisi Toilet	Persen	-	3,06	2,56	2,88	2,82
Sarana Pendidikan SD/MI							
1	Kondisi Ruang Kelas	Jumlah	1617	1024	1196	1196	1195
2	Kondisi Akses Listrik	Jumlah	287	326	327	328	329
3	Kondisi Akses Internet	Jumlah	91	166	200	220	220
4	Kondisi Sarana Cuci Tangan	Persen	52,72	56,63	72,89	68,37	68,37
5	Kondisi Toilet	Jumlah	402	446	508	513	578
6	Kondisi Perpustakaan	Jumlah	117	149	156	174	244

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kondisi UKS	Jumlah	8	33	55	46	107
8	Kondisi Laboratorium Komputer	Jumlah	119	152	156	28	53
Sarana Pendidikan SMP/MTS							
1	Kondisi Ruang Kelas	Jumlah	479	325	228	266	275
2	Kondisi Akses Listrik	Jumlah	71	86	85	84	84
3	Kondisi Akses Internet	Jumlah	25	86	62	56	56
4	Kondisi Sarana Cuci Tangan	Persen	58,63	61,63	75,58	70,59	70,59
5	Kondisi Toilet	Jumlah	28	81	349	368	407
6	Kondisi Perpustakaan	Jumlah	10	33	41	37	101
7	Kondisi UKS	Jumlah	13	15	17	49	98
8	Kondisi Laboratorium Komputer	Jumlah	10	21	21	30	56
9	Kondisi Laboratorium IPA	Jumlah	27	32	36	44	47

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.4.6 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru-Murid Pendidikan SD dan SMP

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengidentifikasi kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar cenderung meningkat, baik pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, Rasio Ketersediaan Sekolah menurun dari 76,79 pada tahun 2020 menjadi 76,02 pada tahun 2024. Berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs justru meningkat dari 50,39 menjadi 54,40 pada periode yang sama. Peningkatan Rasio Ketersediaan Sekolah ini menunjukkan bahwa jumlah murid untuk setiap sekolah secara rata-rata cenderung meningkat.

Tabel 2. 14
Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru/Murid Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No.	JENJANG PENDIDIKAN	2020	2021	2022	2023	2024
-----	--------------------	------	------	------	------	------

1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	416	406	418	419	421
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.177	52.222	52.932	53.456	55.383
1.3	Rasio ketersediaan sekolah	76,79	77,75	78,97	78,38	76,02
1.4	Jumlah Guru	4.410	4.334	4.352	4.554	4.776
1.5	Jumlah Murid	53.506	51.548	52.671	51.820	48.207
1.6	Rasio Guru terhadap Murid	12,13	11,89	12,10	11,38	10,09
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	149	143	150	151	152
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	29.569	27.938	28.318	28.598	27.937
2.3	Rasio ketersediaan sekolah	50,39	51,18	52,97	52,80	54,40
2.4	Jumlah Guru	2.341	2.564	2.336	2.642	2.663
2.5	Jumlah Murid	26.074	24.736	23.860	23.365	22.131
2.6	Rasio Guru terhadap Murid	11,13	9,65	10,21	8,84	8,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar, 2025

Rasio murid terhadap guru (RMG) digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas, karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Secara keseluruhan Rasio murid per guru dari kurun waktu tahun 2020-2024 sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disyaratkan Kemendikbud yaitu 1 guru melayani 15 – 30 murid per kelas untuk jenjang SD/MI, untuk SMP/MTs 1 guru melayani 12 – 25 murid per kelas.

2.1.4.4.7 Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidikan

Jumlah Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah Guru ASN yang bersertifikat hanya sebanyak 2.059 orang, kemudian meningkat menjadi 5.556 orang pada tahun 2024. Sertifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan menjamin kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Tabel 2. 15
Guru Aparat Sipil Negara yang Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	Orang	665	417	471	760	936
2	SD	Orang	1.042	1.064	1.142	1.224	3.240
3	SMP	Orang	531	517	536	681	1.381

Jumlah	Orang	2.238	1.998	2.149	2.665	5.556
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.4.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar relatif cukup baik pada PAUD dan Pendidikan Dasar. Pada tahun 2024, capaian SPM PAUD dan Pendidikan Dasar masing-masing sebesar 92,05 persen dan 92,96 persen. Capaian ini juga terus meningkat mendekati angka 100 persen, yang merupakan target SPM. Namun capaian SPM Pendidikan Kesetaraan telah mencapai angka 100 persen.

Tabel 2. 16
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Belum Terlayani	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.198	15.830	1.368	92,05
2	Pendidikan Dasar	81.447	75.714	5.733	92,96
3	Pendidikan Kesetaraan	2.081	2.081	0	100

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5 Bidang Kesehatan

2.1.4.5.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2020, AKB sebesar 11,82 bayi per 1.000 kelahiran hidup, kemudian naik menjadi 14,90 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sedangkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa persentase bayi yang lahir hidup dan mampu bertahan hidup hingga usia satu tahun tidak mengalami perubahan selama rentang waktu 2020-2024.

Tabel 2. 17
Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan AKHB
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Lahir Hidup	8.294	8.234	8.144	7.524	6.842
2	Jumlah Kematian Bayi	98	86	78	81	102
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	11,82	10,44	9,58	10,76	14,9

4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	988	990	991	989	985
---	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.2 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, setiap Posyandu secara rata-rata harus melayani sebanyak 80 balita. Rasio ini menurun di tahun 2024, dimana setiap Posyandu secara rata-rata hanya melayani 20 balita. Membaiknya rasio balita per Posyandu ini karena meningkatnya jumlah Posyandu di satu sisi, dan menurunnya jumlah balita di sisi lain. Capaian ini sudah mencukupi standar 1 (satu) Posyandu melayani 100 balita.

Tabel 2. 18
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

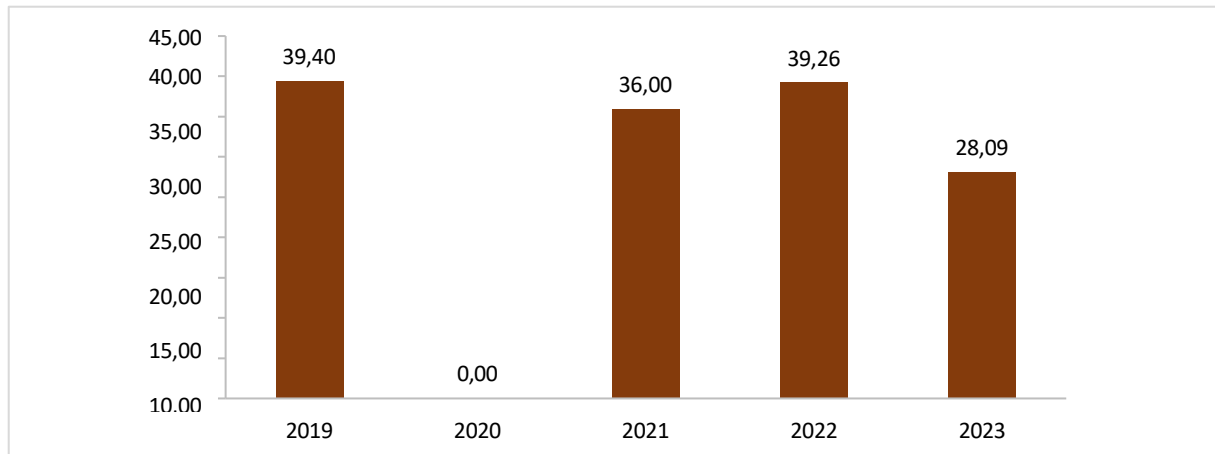
NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	657	657	657	675	675
2.	Jumlah Balita	52.790	56.277	39.978	34.835	33.274
3.	Rasio Balita Per Posyandu	80	86	61	52	20

Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.3 Jumlah Prevalensi Anak Stunting

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi ada tahun 2023, dimana angka prevalensi stunting berkurang dari 39,26 persen pada tahun 2022 menjadi 28,09 persen pada 2023 yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Capaian ini mengindikasikan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar cukup berhasil dan diharapkan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Grafik 2. 54
Prevalensi Stunting di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019-2023



Sumber: 2019 data SSGBI, 2021 dan 2022 data SSGI dan 2023 data SKI

2.1.4.5.4 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar cenderung membesar. Pada tahun 2020, setiap fasilitas kesehatan (Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu) melayani 5.696 penduduk, kemudian membesar menjadi 5.897 penduduk pada tahun 2023. Membesarnya rasio ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan pertambahan jumlah fasilitas kesehatan. Selama lima tahun terakhir, jumlah fasilitas kesehatan sama sekali tidak bertambah. Meskipun demikian, rasio ini masih berada dalam rentang ideal.

Tabel 2. 19
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Poliklinik	8	8	8	8	0
3.	Jumlah Pustu/Poskesdes	56	56	56	56	155
4.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	84	84	84	84	76
5.	Jumlah Penduduk	478.534	483.920	490.493	495.371	****
6.	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	5.696	5.761	5.839	5.897	***

Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.5 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penambahan dalam lima tahun terakhir. Penambahan 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum (Pemerintah) terjadi pada tahun 2020. Sedangkan penambahan 1 (unit) Rumah Sakit Umum (Swasta) terjadi pada tahun 2024. Penambahan 2 (dua) unit Rumah Sakit dimaksud adalah Rumah Sakit Hajjah Andi Depu yang berada di Kecamatan Polewali dan Rumah Sakit Pratama yang berada di Kecamatan Wonomulyo. Penambahan 2 (dua) unit Rumah Sakit ini menyebabkan Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk mengecil, yang mengindikasikan kondisi yang membaik.

Tabel 2. 20

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	2	2	2	2
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	0	0	0	0	0
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Umum (Swasta)	2	2	2	3	3
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	3	4	4	5	4
6	Jumlah Penduduk	478.534	483.9200	490.4930	495.371	***
7	Rasio (5/6)	0,0001	0,0061	0,0081	0,008	***

Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.6 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar terus menurun. Pada tahun 2019, setiap dokter harus melayani 3.688 penduduk, kemudian menurun menjadi 3.280 penduduk pada tahun 2023. Penurunan rasio ini terjadi karena jumlah dokter bertambah lebih cepat ketimbang pertambahan jumlah penduduk. Selama lima tahun terakhir, jumlah dokter bertambah sebanyak 31 orang. Penurunan rasio ini menunjukkan kondisi layanan kesehatan yang semakin membaik.

Tabel 2. 21
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter (Umum, Ahli, Gigi)	140	159	159	151	191
2	Jumlah Penduduk	478.534	483.920	490.493	495.371	***
3	Rasio Dokter per Penduduk	3.418	3.043	3.085	3.280	***

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.7 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis (bidan, perawat, dan lainnya) per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, setiap tenaga medis harus melayani 682 penduduk, kemudian menurun drastis menjadi 185 penduduk. Penurunan rasio ini terjadi karena adanya peningkatan bidan empat kali lipat dan peningkatan perawat hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Juga dalam tiga terakhir ada rekrutmen tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan total jumlah tenaga medis meningkat empat kali lipat selama periode 2019-2023.

Tabel 2. 22
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bidan	264	214	974	1.067	993
2.	Bidan PTT	0	0	0	0	0
3.	Perawat	385	642	1.030	1.090	1.041
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya	-	-	562	529	635
5.	Jumlah tenaga Medis	649	856	2.566	2.676	2.669
6.	Jumlah Penduduk	442.576	478.534	483.920	490.493	495.371
Rasio Tenaga Medis Per Penduduk		682	557	188	183	185

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.5.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan pelayanan kesehatan dasar lainnya mencakup cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa Universal Child Immunization

(UCI), persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, dan cakupan Balita pneumonia yang ditangani.

Dari data yang tersedia, seluruh indikator yang terkait dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Beberapa indikator, seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, sebenarnya membaik selama rentang waktu 2020-2022, namun kemudian menurun pada dua tahun terakhir yakni 2023 dan 2024. Indikator yang mengalami penurunan paling tajam adalah persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, yaitu dari 48,70 persen (2020) menjadi 27,80 persen (2023). Namun, kembali naik hingga 53,6% di 2024.

Tabel 2. 23
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

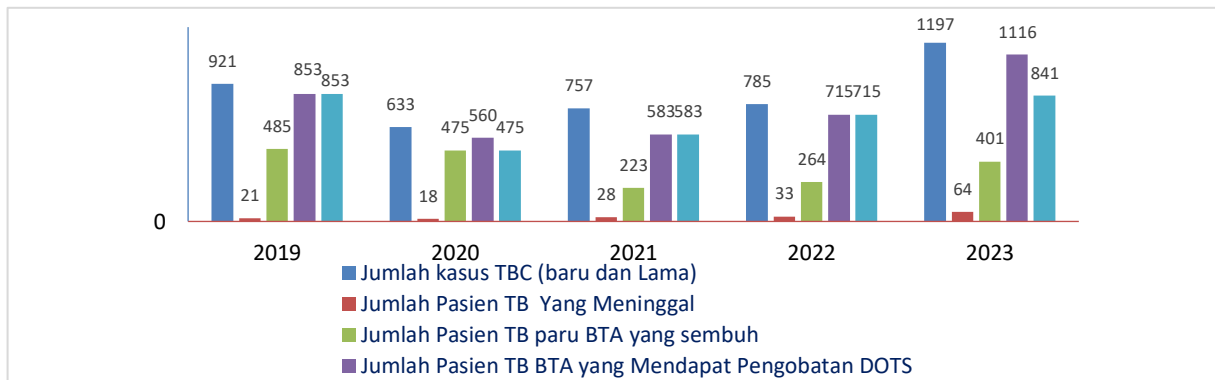
NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	81,00%	88,5%	89,4%	74,3%	66,5%
2	Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82,20%	93,1%	90%	71%	65,5%
3	Cakupan desa UCI	43,70%	38,32	51%	53,3%	27,5%
4	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	48,70%	73,8%	78,6%	27,8%	53,6%
5	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	14,21%	9,37%	21,24%	23,16%	55,80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.9 Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB

Jumlah kasus TBC (baru dan lama) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, setelah sempat menurun dalam empat tahun sebelumnya. Jumlah pasien TB paru BTA yang sembuh malah menurun, sementara jumlah pasien TB paru yang meninggal justru meningkat. Namun berita baiknya, jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan DOTS semakin meningkat dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2. 55
Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.5.10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS)

Secara umum, cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular (DBD, Diare, Malaria, dan HIV/AIDS) di Kabupaten Polewali Mandar cukup baik. Meskipun persentase penderita diare yang ditangani mengalami sedikit penurunan, namun cakupan penanganan penderita DBD, angka kejadian penyakit malaria, tingkat kematian akibat malaria, dan prevalensi HIV/AIDS menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Dalam lima tahun terakhir, semua penderita penyakit DBD 100 persen tertangani dan tidak ada kematian akibat penyakit malaria.

Tabel 2. 24
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (DBD, Diare, Malaria, dan HIV/AIDS)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
2	Penderita diare balita yang ditangani	39,24	26,09	38,90	62,03	225,64
3	Angka kejadian malaria	0,88	4,90	4,20	0,76	0,1
4	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
5	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	1,22	0,82	0,007	0,08	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.5.11 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar, secara umum, relatif baik. Beberapa jenis layanan dasar, seperti

pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, menunjukkan capaian di atas 70 persen. Bahkan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mencapai angka 100 persen, yang berarti bahwa semua penderita dapat tertangani atau terlayani.

Tabel 2. 25
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.726	6.600	4.126	61,53
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.240	7.296	2.944	71,25
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.753	7.285	2.468	74,69
4	Pelayanan kesehatan balita	44.205	35.810	8.395	81,01
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	76.284	29.906	46.378	39,20
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	329.770	163.717	166.053	49,65
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	48.549	30.297	18.252	62,40
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	24.667	18.591	6.076	75,37
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4.651	4.651	0	100
10	Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	981	864	117	88,07
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	7.490	7.490	0	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	11.772	6.659	5.113	56,57

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.6 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.6.1 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Proporsi jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang mencapai 71,48%, kemudian sedikit meningkat menjadi 73,51% pada 2021. Namun,

sejak 2022, persentase ini terus menurun hingga 52,43% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya panjang jalan dalam kondisi baik, dari 570,561 km pada tahun 2020 menjadi hanya 359,857 km pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah jalan rusak dan rusak berat terus meningkat secara signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, dengan jalan rusak naik dari 49,855 km pada tahun 2020 menjadi 195,750 km pada tahun 2024, serta jalan rusak berat yang bertambah dari 199,665 km menjadi 243,012 km dalam periode yang sama. Selain itu, total panjang jalan Kabupaten sesuai Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 221 Tahun 2023 mengalami penambahan pada di Tahun 2023, namun tidak diiringi dengan perbaikan kondisi secara keseluruhan. Rehabilitasi jalan yang mengalami degradasi signifikan juga yang menjadi penyebab terjadinya penurunan, meningkatnya penyebab kerusakan jalan, seperti beban kendaraan berlebih, faktor cuaca dan bencana alam, serta kurangnya pemeliharaan berkala tiap tahun.

Tabel 2. 26
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi Jalan Baik	Km	570,561	580,098	533,14	409,893	359,857
2	Kondisi Jalan Sedang	Km	54,685	62,937	89,656	133,779	123,641
3	Kondisi Jalan Rusak	Km	49,855	40,375	68,124	185,835	195,75
4	Kondisi Jalan Rusak Berat	Km	199,665	191,356	183,846	192,753	243,012
5	Total	Km	874,766	874,766	874,766	922,26	922,26
Proporsi Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap $((1+2)/5)$			71,48%	73,51%	71,20%	58,95%	52,43%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.2 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jaringan jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020 hingga 2024. Rasio ini menggambarkan seberapa besar ketersediaan infrastruktur jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, rasio tercatat sebesar 0,0037 km per jiwa atau 3,66 Meter per jiwa, yang menunjukkan tingkat ketersediaan jalan yang relatif stagnan dengan kecenderungan menurun oleh karena jumlah

penduduk mengalami peningkatan dari 478.534 jiwa pada tahun 2020 menjadi 495.371 jiwa pada tahun 2024. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk di masa mendatang. Rasio panjang jalan per kapita idealnya 5-10 orang per kapita.

Tabel 2. 27
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan	Km	1.832,89	1.832,89	1.832,89	1.811,98	1.811,98
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	478.534	483.920	490.493	495.371	495.371
3.	Rasio Jalan Terhadap Penduduk	Km/jiwa	0,0038	0,0038	0,0037	0,0037	0,0037

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.3 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan proporsi jalan dalam kondisi mantap dari 73,29% pada Tahun 2020 menjadi 67,76% pada Tahun 2024. Kondisi jalan rusak dan rusak berat terjadi peningkatan pada tahun 2022 sampai tahun 2024, yang berdampak pada turunnya kondisi mantap jalan. Tren penurunan tersebut diakibatkan masih banyak ruas jalan di bawah kewenangan kabupaten yang mengalami kerusakan akibat usia jalan, semakin berkurangnya pemeliharaan dan terjadinya bencana alam (banjir dan longsor).

Tabel 2. 28
Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kondisi Jalan Baik	Km	1.237,43	1.296,16	1.242,83	1.123,41	1.078,61
2.	Kondisi Jalan Sedang	Km	105,96	150,93	119,97	164,53	149,16
3.	Kondisi Jalan Rusak	Km	59,64	81,49	82,27	201,11	211,03
4.	Kondisi Jalan Rusak Berat	Km	429,85	304,3	387,82	322,93	373,19
5	Total	Km	1.832,89	1.832,89	1.832,89	1.811,98	1.811,98

Proporsi Jaringan Jalan Kondisi Mantap (1+2/5)	73,29%	78,95%	74,35%	71,08%	67,76%
--	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.4 Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik

Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 53,61%, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 56,25% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 49,83%. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya panjang drainase dalam kondisi baik, yang turun dari 124.161 km pada tahun 2023 menjadi 95.503 km pada tahun 2024. Selain itu, total panjang drainase perkotaan juga mengalami penyusutan dari 220.745 km pada tahun 2020-2023 menjadi 191.654 km pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya kerusakan atau perubahan sistem drainase yang menyebabkan penurunan kualitas.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya perbaikan dan pemeliharaan drainase perkotaan secara lebih intensif agar kondisi drainase tetap optimal dan mampu mendukung sistem tata air perkotaan secara efektif.

Tabel 2. 29
Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Drainase Perkotaan Kondisi Baik	118.331	122.628	123.671	124.161	95.503
2	Panjang Drainase Perkotaan	220.745	220.745	220.745	220.745	191.654
3	Persentase Drainase Perkotaan Kondisi Baik	53,61%	55,55%	56,02%	56,25%	49,83%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.5 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, hanya 82,07% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, namun angka ini meningkat pesat menjadi 92,54% pada tahun 2021 dan

terus bertambah hingga mencapai 95,56% pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, dari 87.279 KK pada tahun 2020 menjadi 99.808 KK pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah total rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi pada tahun 2021, sebelum akhirnya tetap di angka 104.445 KK sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Tren positif ini merupakan keberhasilan program peningkatan sanitasi di Kabupaten Polewali Mandar, baik melalui pembangunan fasilitas sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun program pemerintah yang mendukung akses sanitasi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga berupaya menghilangkan akses sharing. Namun, masih ada sekitar 4,44% rumah tangga (sekitar 4.637 KK) pada tahun 2024 yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai.

Tabel 2. 30

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga berakses Sanitasi	KK	93.657	96.318	98.249	98.750	99.808
2	Jumlah rumah tangga	KK	104.084	104.084	104.445	104.445	104.445
	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	Persen	89,51%	92,54%	94,07%	94,54%	95,56%

Sumber: Pokja PKP Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.6 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya 8,64% bangunan yang memiliki IMB, kemudian mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 10,60% pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah bangunan ber-IMB dari 9.094 unit pada tahun 2020 menjadi 11.491 unit pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah total bangunan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 105.298 unit pada tahun 2020 menjadi 108.360 unit pada tahun 2024. Meskipun tren rasio bangunan ber-IMB meningkat, angka ini masih tergolong rendah, mengingat bahwa pada 2024 hanya sekitar 10,60% dari total bangunan yang memiliki IMB. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak bangunan yang belum memiliki izin resmi, yang dapat berdampak pada

aspek legalitas, tata ruang, dan keamanan bangunan.

Tabel 2. 31
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	9.094	10.015	10.325	10.720	11.491
2.	Jumlah bangunan	Unit	105.298	106.219	106.529	107.533	108.360
	Rasio Bangunan ber-IMB	Persen	8,64	9,42	9,69	9,96	10,6

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.7 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, kondisi jaringan irigasi yang baik mencapai 81,50%, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 (73,04%) dan tahun 2022 (64,66%). Setelah itu, terdapat sedikit perbaikan pada tahun 2023 (69,01%) dan tahun 2024 (69,89%), meskipun belum kembali ke tingkat awal tahun 2020. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kondisi bendung, yang mengalami kemerosotan drastis dari 100% pada 2020 menjadi hanya 45,45% pada tahun 2022. Meskipun ada sedikit pemulihan hingga 59,09% pada tahun 2024, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, saluran irigasi dan pintu air mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, dengan persentase saluran irigasi baik naik dari 61,92% pada tahun 2020 menjadi 65,21% pada tahun 2024, serta pintu air dalam kondisi baik meningkat dari 82,58% menjadi 85,37% dalam periode yang sama.

Tabel 2. 32
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	61,92	63,22	64,39	64,85	65,21
2	Persentase Bendung dalam Kondisi Baik	Persen	100	72,73	45,45	56,82	59,09
3	Persentase Pintu Air dalam Kondisi Baik	Persen	82,58	83,18	84,15	85,37	85,37
4	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (Rata-rata)	Persen	81,50	73,04	64,66	69,01	69,89

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.8 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio jaringan irigasi terhadap luas areal sawah tercatat sebesar 9,14%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 11,06% pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya panjang jaringan irigasi dari 169.253 meter pada tahun 2020 menjadi 187.174 meter pada tahun 2024. Sementara itu, luas areal sawah mengalami sedikit penurunan dari 18.509 hektar pada tahun 2020 menjadi 16.919 hektar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, peningkatan rasio jaringan irigasi dipengaruhi adanya perbaikan atau pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih optimal dalam mendukung sektor pertanian. Namun, dengan adanya penurunan luas areal sawah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan efektivitas penggunaan jaringan irigasi, seperti perbaikan sistem distribusi air, peningkatan efisiensi irigasi, serta pengendalian konversi lahan pertanian agar produktivitas pertanian tetap terjaga.

Tabel 2. 33
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Irigasi	Meter	169.253	182.874	182.874	185,278	187.174
2	Luas Areal Sawah	Hektar	18.509	16.738	16.941	16.941	16.919
3	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	9,14	10,92	10,80	10,90	11,06

Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.9 Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jumlah RTLH di Kabupaten Polewali terus berkurang. Jumlah RTLH yang telah ditangani dalam 5 tahun terakhir sebanyak 3.525 unit. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga terus mengupayakan penanganan RTLH baik itu melalui pembiayaan APBD maupun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta. Sampai dengan tahun 2024, masih terdapat 17.908 unit RTLH yang belum mendapatkan penanganan.

Tabel 2. 34
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Database RTLH	Unit	21.433	20.333	19.934	19.047	18.518
2.	RTLH Tertangani	Unit	1.100	399	887	529	610
3.	Jumlah RTLH Belum Tertangani	Unit	20.333	19.934	19.047	18.518	17.908

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.10 Cakupan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

Jumlah perumahan formal di Kab. Polewali Mandar terus mengalami peningkatan dari 35 unit (2020) menjadi 57 unit (2024). Namun pembangunan perumahan formal tidak sejalan dengan kualitas PSU yang terbangun. Sehingga pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pembangunan PSU Perumahan Formal.

Tabel 2.28
Jumlah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumahan Formal yang mendapatkan Bantuan PSU	Lokasi	0	3	6	8	3
2	Jumlah Perumahan Formal	Lokasi	35	39	48	52	57
3	Persentase Perumahan Formal yang mendapatkan PSU	Persen	0	7,5	12,24	15,09	5,17

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.11 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, 83,80% penduduk memiliki akses terhadap air minum layak, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada 2021 (84,77%). Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 78,95%, yang menunjukkan adanya kendala dalam akses air minum layak pada tahun tersebut. Setelah mengalami penurunan, persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak

kembali meningkat menjadi 84,44% pada 2023, dan melonjak signifikan pada 2024 menjadi 91,61%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak, dari 400.993 jiwa pada 2020 menjadi 453.795 jiwa pada 2024. Sementara itu, jumlah total penduduk juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk berakses air minum layak. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan gangguan dalam penyediaan air bersih atau infrastruktur air minum pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, tren peningkatan akses air minum layak pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan air bersih, baik dari segi cakupan jaringan maupun kualitas distribusi.

Tabel 2. 35
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Layak	Jiwa	400.993	410.242	387.251	418.310	453.795
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	478.534	483.920	490.493	495.371	495.371
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	83,8	84,77	78,95	84.44	91,61

Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.6.12 Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan SK kumuh sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Tahun 2020 dan 2024. Dalam SK Bupati Nomor 624 Tahun 2020 luasan permukiman kumuh adalah sebesar 280,22 Ha. Luasan ini kemudian berkurang menjadi 160,54 Ha dalam SK Bupati Nomor 2320 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanganan kumuh di Kabupaten Polewali Mandar cukup optimal karena selama Tahun 2020-2024 terjadi pengurangan luasan kumuh yang signifikan yaitu sebesar 119,68 Ha atau berkurang 42,71 persen.

Tabel 2. 36
Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
-----	--------	--------	------	------	------	------	------

1	Luas Permukiman Kumuh	Ha	280,22	280,22	280,22	280,22	160,54
2	Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani	Ha	15,42	90,08	0,74	0,49	0
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan yang Tertangani		Persen	5,5	32,15	0,26	0,17	0

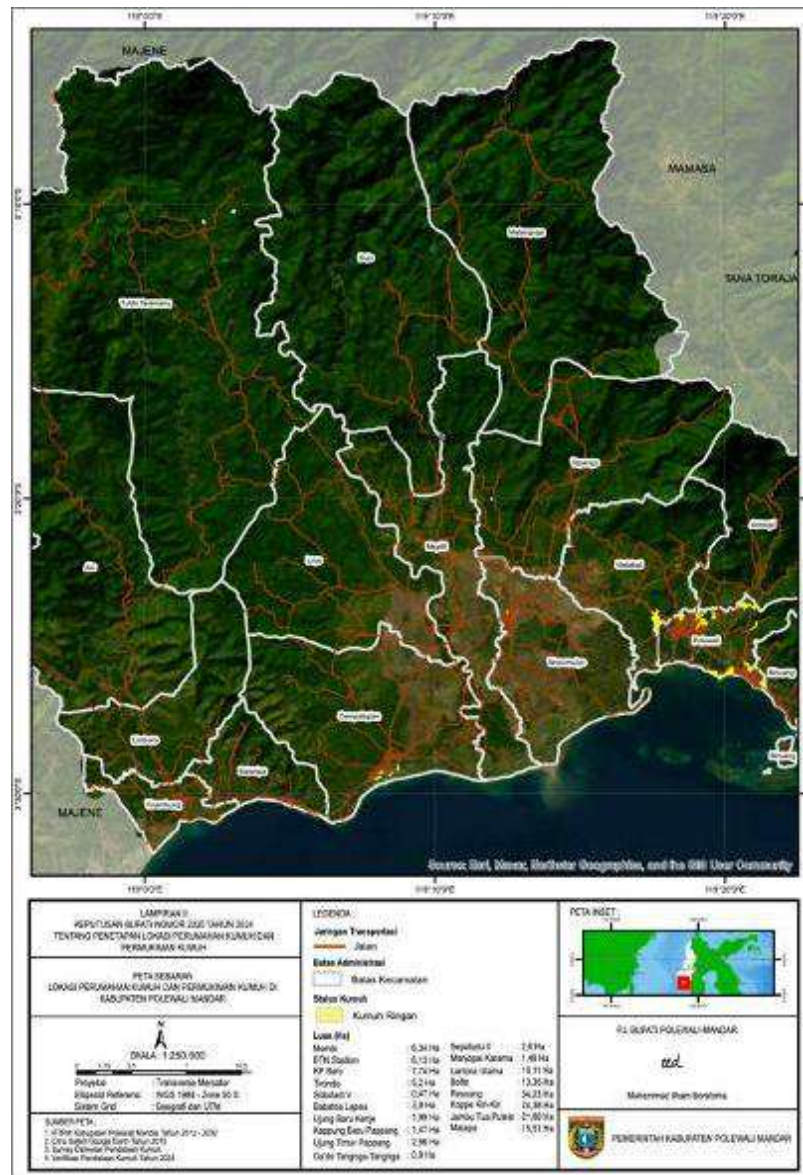
Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025

Dari sisi penanganan, luas permukiman kumuh yang berhasil ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, luasan kumuh yang tertangani ialah sebesar 15,42 Ha dan meningkat drastis pada Tahun 2021 menjadi 90,08 Ha. Tetapi, capaian ini menurun signifikan pada Tahun 2022 dan 2023 yang hanya sebesar 0,74 Ha dan 0,49 Ha kawasan tertangani. Konsistensi pemerintah daerah dalam menangani kawasan permukiman kumuh terus berlanjut pada Tahun 2024, namun kegiatan yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap indikator kumuh sehingga capaian pengurangan kumuh pada tahun tersebut ialah 0 Ha.

2.1.4.6.13 Peta Lokasi Kawasan Kumuh

Hasil pemetaan terbaru yang dituangkan dalam SK Bupati Nomor 2320 Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan kumuh ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Polewali, Matakali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung dengan total luasan sebesar 160,54 Ha. Adapun luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten (luasan dibawah 10 Ha) ialah sebesar 41.08 Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) kawasan.

Gambar 2. 3
Peta Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023



Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024

Gambar 2. 2
Peta Lokasi Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Tahun 2024



Sumber: Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Polewali Mandar, 2025.

2.1.4.6.14 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar terlihat bahwa rasio rumah ibadah per satuan penduduk terus menurun. Dalam lima tahun terakhir, rasio rumah ibadah per satuan penduduk menurun dari 441 orang per rumah ibadah menjadi 410 orang per rumah ibadah. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa jumlah rumah ibadah bertumbuh lebih cepat ketimbang jumlah penduduk.

Tabel 2. 37
Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah tempat ibadah	Unit	1.003	1.003	1.139	1.215	1.208
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	442.576	478.534	483.920	490.493	495.371
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	441	477	430	403	410

Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.4.6.15 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan indikator penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik menunjukkan capaian kinerja 100 persen. Sedangkan dua indikator SPM lainnya, tidak dilaksanakan karena tidak adanya korban bencana yang membutuhkan rehabilitasi rumah dan juga tidak adanya masyarakat yang terkena relokasi rumah akibat program pemerintah daerah.

Tabel 2. 38
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2125 SR	2125 SR	0	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1412 RT	1412 RT	0	100
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.7 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

2.1.4.7.1 Indeks Risiko Bencana

Capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Polewali Mandar relatif cukup baik, yang ditandai dengan angka Indeks Risiko Bencana yang terus menurun. Pada tahun 2020, capaian Indeks Risiko Bencana berada di angka 140,81, kemudian menurun menjadi 135,98 pada tahun 2024. Meskipun menurun dari segi angka indeks, namun dari segi kategori, tetap berada di kategori sedang.

Tabel 2. 39
Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Resiko Bencana	140,81	140,81	135,81	135,93	135,98
2.	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

2.1.4.7.2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami perubahan selama rentang waktu 2020-2024. Angkanya tetap bertahan di 59 persen. Angka ini dapat diinterpretasi bahwa dari total luas wilayah kabupaten, hanya sekitar 60 persen yang berada dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran. Sekitar 40 persen selebihnya tidak bisa ditangani karena berupa wilayah pegunungan atau wilayah terpencil yang sangat sulit untuk dijangkau.

Tabel 2. 40 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Wilayah
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Ha	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137
2.	Luas Wilayah kabupaten	Ha	202.230	202.230	202.230	202.230	202.230
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		%	59%	59%	59%	59%	59%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.7.3 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir relatif baik. Ini terlihat dari tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK yang terus meningkat. Pada tahun 2024, angka penanganan kebakaran dalam jangkauan WMK telah mencapai 100 persen, yang berarti bahwa semua bencana kebakaran yang terjadi dalam WMK dapat ditangani dengan tingkat waktu tanggap kurang dari 15 menit.

Tabel 2. 41
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kali	20	19	46	88	48
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	Kali	23	22	46	88	48
Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK			86,9%	86,3%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.7.4 Persentase Penegakan PERDA

Penegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Polewali Mandar tampak berjalan dengan baik. Catatan positifnya bahwa jumlah pelanggaran Perda terus menurun. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran Perda hanya 105 kasus, menurun dari 380 kasus yang terjadi lima tahun sebelumnya. Dalam dua tahun terakhir, seluruh pelanggaran Perda dapat diselesaikan seluruhnya, sehingga persentase penegakan Perda mencapai 100 persen.

Tabel 2. 42
Persentase Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	55	341	104	105	73
2.	Jumlah Pelanggaran PERDA	64	467	104	105	73
Persentase Penegakan PERDA		86%	73%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.7.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum dan Linmas

Secara umum pada Tahun 2024, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Pada tabel 2.37 dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator SPM, tingkat capaian kinerja semua jenis pelayanan dasar ialah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Tabel 2. 43
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas
di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Belum Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	134	134	0	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	30	30	0	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30	30	0	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	86	86	0	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	68	68	0	100

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.8 Urusan Sosial

2.1.4.8.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, sebanyak 612 orang menerima bantuan, meningkat signifikan pada 2021 menjadi 1.982 orang. Namun, pada 2022 jumlahnya turun menjadi 1.309 orang sebelum meningkat lagi di 2023 menjadi 3.639 orang. Tahun 2024, jumlah penerima bantuan menurun drastis menjadi 615 orang atau masih terdapat 86,78 persen yang tidak memperoleh bantuan sosial. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial tetap konstan di angka 4.652 jiwa setiap tahun.

Tabel 2. 44
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial (Jiwa)	612	1.982	1.309	3.639	615
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial (Jiwa)	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		13,16%	42,60%	28,13%	78,22%	13,22%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.8.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Polewali Mandar sangat impresif. Seluruh indikator yang terkait dengan SPM bidang sosial menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 persen. Terdapat satu indikator yang tidak dilaksanakan karena tidak adanya gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial.

Tabel 2. 45
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	40	100	40	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	70	100	70	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	80	100	80	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	0	0	0	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	79	100	79	100

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.9 Urusan Tenaga Kerja

2.1.4.9.1 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat dari tahun ke tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pencari kerja perempuan menurun pada Tahun 2024, peningkatan jumlah pencari kerja laki-laki lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah perempuan. Dari seluruh pencari kerja yang terdaftar, tidak semuanya dapat terserap di pasar kerja. Bahkan persentase tenaga kerja yang terserap relatif rendah, terutama tenaga kerja laki-laki.

Tabel 2. 46 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	283	233	495	189	1548	502	756	392	911	288
2	Jumlah Pencari Kerja Terserap	64	94	16	37	247	163	151	190	205	66
Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap		22,61	40,34	3,23	19,57	15,98	32,47	19,97	48,46	22,50	22,91

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.9.2 Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2020, jumlah penganggur mencapai 7.298 orang. Jumlah penganggur bergerak naik hingga mencapai 7.644 orang pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022, terjadi penurunan jumlah penganggur yang cukup tajam, dan terus berlanjut hingga tahun 2023. Jumlah penganggur pada tahun 2023 sisa 5.182 orang yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Kemudian kembali naik menjadi 8.042 orang pada tahun 2024.

Tabel 2. 47
Jumlah Penganggur di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Angkatan Kerja	231.686	226.409	252.376	265.301	259.446
2.	Jumlah Bekerja	224.388	218.765	246.925	260.119	251.424
3.	Jumlah Penganggur	7.298	7.644	5.451	5.182	8.042

Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar Tahun, 2025

2.1.4.9.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2020- 2024 mengalami perubahan. Ini setidaknya terlihat dari jumlah perusahaan perusahaan yang menerapkan K3 di tahun 2021, dengan pemulihan menuju angka yang lebih baik mulai tahun 2022 hingga 2024. Meskipun jumlah perusahaan yang menerapkan K3 mengalami penurunan, total jumlah perusahaan

menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2022, namun berkurang pada tahun 2024. Akibatnya, Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami perubahan dengan tren peningkatan di tahun 2024, yang mencerminkan upaya progresif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja.

Tabel 2. 48
Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

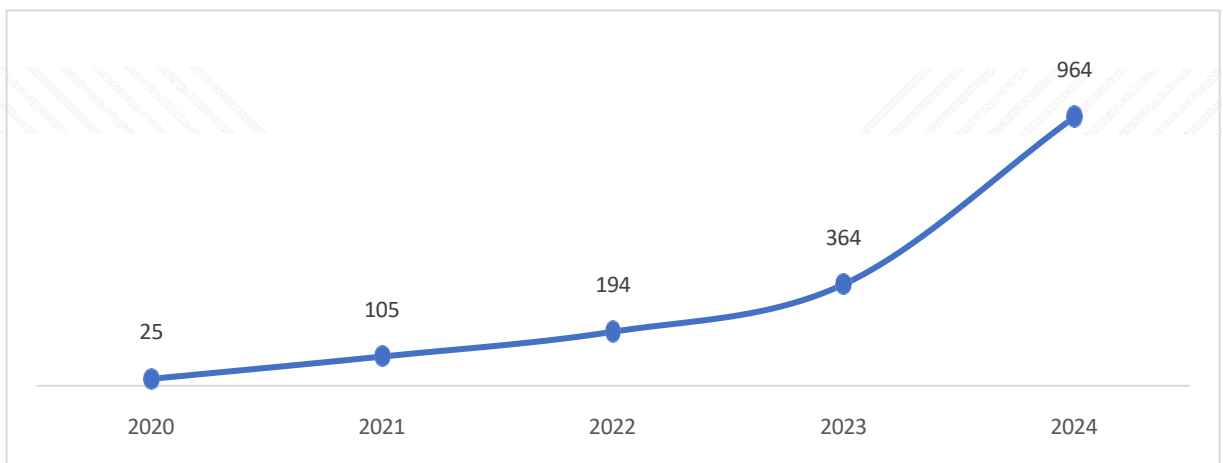
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	358	28	130	184	184
2.	Jumlah Perusahaan	553	541	2.624	2.624	1306
	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan K3	64,74%	5,18%	4,95%	7,01%	14,08%

Sumber : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.9.4 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja

Jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan kerja di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan kerja hanya 25 orang, maka angka tersebut naik signifikan pada tahun 2024 menjadi 964 orang. Jenis pelatihan kerja yang diberikan cukup bervariasi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan pasar kerja.

Grafik 2. 56
Jumlah Tenaga Kerja yang Sudah Mendapatkan Pelatihan Kerja
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



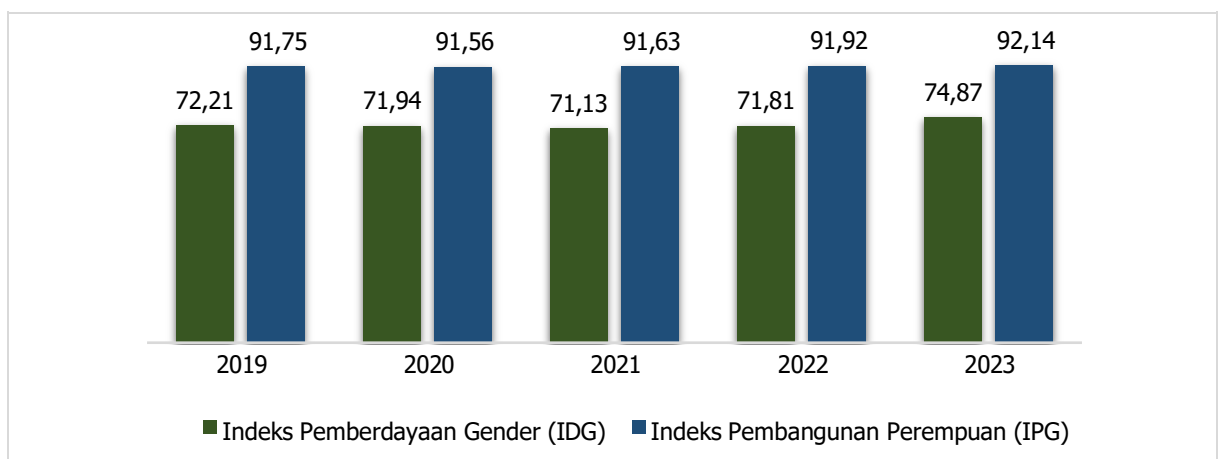
Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

2.1.4.10.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Baik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat dalam lima tahun terakhir. IDG bergerak naik dari 72,21 pada tahun 2019 menjadi 74,87 pada tahun 2023. Begitu pula IPG bergeser ke atas dari 91,75 menjadi 92,14 pada periode yang sama. Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengarusutamakan isu gender dalam pembangunan daerah.

Grafik 2. 57
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.10.2 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Polewali Mandar menurun drastis. Penurunan dimaksud dari 63 kasus pada tahun 2019 menjadi hanya 2 kasus di tahun 2023. Itu sebabnya rasio KDRT terhadap jumlah rumah tangga juga menurun drastis. Ini mengindikasikan membaiknya kesadaran masyarakat untuk menghindari KDRT. Proses penyadaran dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dapat dinilai cukup efektif.

Tabel 2. 49
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah KDRT	63	3	9	17	2
2.	Jumlah Rumah Tangga	98.929	106.341	106.341	106.341	90.405
Rasio KDRT terhadap Jumlah RT		0,00064	0.00003	0.00008	0.00015	0.00002

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.11 Urusan Pangan

2.1.4.11.1 Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren menurun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, SPPH mencatat angka 88,50 persen, Angka ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan yang menjadi prasyarat untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Tabel 2. 50
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	KELOMPOK PANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	0,8	1,02	1.00	1,1	1,0
3	Pangan hewani	14,8	24	23.92	21,9	22,4
4	Minyak dan Lemak	4	4,6	4.19	5,0	5,0
5	Buah/ Biji berminyak	0,7	1	1.00	0,8	0,7
6	Kacang-kacangan	2,7	6,8	7.00	4,8	5,9
7	Gula	1,8	1,14	1.25	0,8	0,9
8	Sayur dan Buah	28,2	24,3	24.63	28,7	27,5
9	Lain-lain	0	0	0	0	0
Total		77,80	87,87	87.99	88,15	88,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.11.2 Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per Kecamatan

Secara umum, status kewaspadaan gizi dan pangan di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar berstatus Waspada. Artinya, 3 (tiga) indikator utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap

pangan, dan pemanfaatan pangan, tidak terpenuhi dengan baik di hampir seluruh kecamatan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan, hanya terdapat empat kecamatan dalam status aman yaitu Kecamatan Alu, Mapilli, Tapango, dan Binuang.

Tabel 2. 51
Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per-Kecamatan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tinambung	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
2	Balanipa	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada
3	Limboro	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada
4	Tubbi Taramanu	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Waspada
5	Alu	Waspada	Aman	Aman	Aman	Aman
6	Campalagian	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
7	Luyo	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
8	Wonomulyo	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
9	Mapilli	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman
10	Tapango	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman
11	Matakali	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
12	Polewali	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
13	Binuang	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman
14	Anreapi	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
15	Matangnga	Aman	Aman	Aman	Aman	Waspada
16	Bulo	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Waspada

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.12 Urusan Pertanahan

Hasil kegiatan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan gambaran yang menarik. Perkembangan jenis sertifikat tanah menunjukkan gambaran yang bervariasi. Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Namun sebaliknya, Sertifikat Hak Guna Pakai cenderung meningkat. Konflik Tanah yang Ditindaklanjuti juga menunjukkan tren positif.

Tabel 2. 52
Jumlah Sertifikat dan Konflik Tanah yang Ditindaklanjuti
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sertifikat Hak Milik	Bidang	6.622	6.622	7.663	3.319	151.596
2	Sertifikat Hak Guna Pakai	Bidang	17	17	194	21	820
3	Sertifikat Hak Guna Bangunan	Bidang	592	592	573	544	9.716
4	Konflik Tanah yang Ditindaklanjuti	Bidang	10	10	6	11	0

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.13 Urusan Lingkungan Hidup

2.1.4.13.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH Kabupaten Polewali Mandar cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka 68,36 turun dari 71,40,55 pada tahun 2023. Dari tiga indeks komposit pembentuk IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menunjukkan kinerja paling buruk, bukan hanya karena mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir tetapi juga menunjukkan angka yang relatif paling rendah. Memburuknya IKTL disebabkan oleh pembukaan lahan, alih fungsi lahan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau.

Tabel 2. 53
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	68,00	52,35	50,80	61,35	55,91
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Persen	40,77	44,41	44,40	48,97	49,80
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	85,74	88,56	90,76	92,87	89,96
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	69,22	65,28	65,58	71,40	68,36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.13.2 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan

Rasio ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat terbatas dan tidak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Namun secara fungsional, terdapat banyak tanaman atau tumbuhan hijau di kawasan perkotaan yang dapat menggantikan fungsi RTH.

Tabel 2. 54
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Perkotaan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	169,03	169,03	169,03	169,03	169,03
Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00
Rasio RTH	Persen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.13.3 Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga dan penduduk. Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama kegiatan perdagangan, perindustrian, hotel, dan restoran juga turut memperbesar jumlah timbulan sampah.

Tabel 2. 55
Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah tertangani	M ³	115.557,87	100.874,60	60.289	51.153,03	33.052,57
2	Jumlah timbulan sampah	M ³	217.971,67	235.507,73	238.007,27	238.007,27	241.080,57
	Persentase sampah tertangani	Persen	53,02	42,83	25,33	22	13,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.13.4 Cakupan Layanan Persampahan

Hingga tahun 2021, layanan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya angkutan sampah dari rumah tangga ke TPA, TPS, atau TPS3R, mencakup

wilayah perkotaan yang terletak di sepanjang pesisir. Cakupan layanan ini disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di luar area layanan, pengelolaan sampah masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan berbagai metode yang belum sesuai dengan standar pengelolaan persampahan.

Sejak akhir tahun 2021, layanan angkutan sampah mengalami penurunan drastis akibat tidak beroperasinya TPA. Ketiadaan tempat pengolahan akhir menyebabkan sampah tidak dapat diangkut dan diolah sebagaimana mestinya, sehingga cakupan layanan angkutan sampah terus berkurang dari tahun ke tahun. Sebagai alternatif sementara, sempat dilakukan upaya pengolahan sampah di beberapa lokasi lain. Namun, solusi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat karena selalu mendapat penolakan dari warga sekitar.

Tabel 2. 56

Cakupan Layanan Persampahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Area Pelayanan	Ha	2.823,07	3.569,08	3.569,08	3.569,08	1697,89
2	Luas Area Terbangun	Ha	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63
Persentase cakupan layanan		Persen	41,58	52,61	52,61	52,61	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.14 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Polewali Mandar terus membaik. Persentase ketersediaan database kependudukan, persentase kepemilikan kartu keluarga, dan persentase kepemilikan akta kelahiran terus meningkat dari tahun ke tahun. Satu-satunya layanan administrasi kependudukan yang belum menunjukkan kinerja yang baik adalah persentase enrollment KTP-e.

Tabel 2. 57

Jumlah Penduduk dan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS DATA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk :	Jiwa	484.112	486.236	488.857	488.698	490.029

NO.	JENIS DATA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
a.	Laki-laki	Jiwa	241.400	242.917	244.968	244.815	245.371
	(%)	Persen	49,86	49,96 %	50,11%	50,09%	50,07%
b.	Perempuan	Jiwa	242.712	243.319	243.889	243.883	244.658
	(%)	Persen	50,14 %	50,04 %	49,89%	49,90%	49,93 %
2	Persentase ketersediaan data base kependudukan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase enrollment KTP-el	Persen	94,13	97,02		64,78	93,30
4	Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	90,74	96,09	96,70	99,74	99,29
5	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	88,43	90,36	95,89	95,66	96,84

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.15 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.15.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami perubahan berarti dalam lima tahun terakhir. Semua indikator pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami stagnasi. Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan kemasyarakatan, persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif, dan jumlah BUMDES tidak mengalami perubahan. Satu-satunya indikator yang mengalami peningkatan yaitu jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG).

Tabel 2. 58

Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan Kemasyarakatan	167	167	167	167	167
2	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	86	86	86	86	87
3	Jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG)	9	10	12	13	14

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah BUMDES	144	144	144	144	144

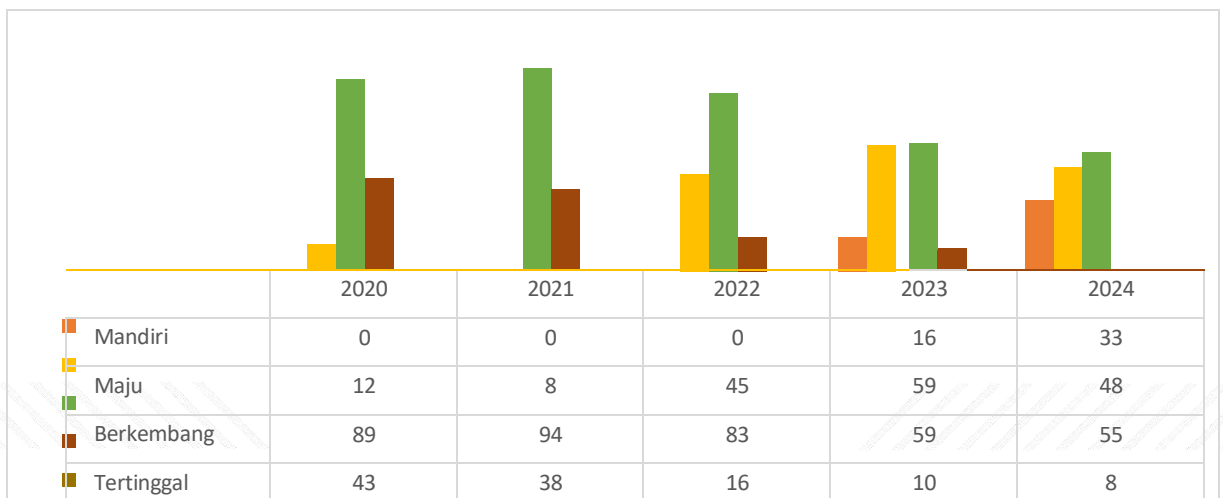
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.15.2 Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kemajuan berarti selama rentang waktu 2020-2024. Pada tahun 2024, sudah terdapat 33 desa dengan status Desa Mandiri, padahal di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada saat yang sama, jumlah desa dengan status Desa Tertinggal sisa 8 desa, padahal lima tahun yang lalu masih berjumlah 43 desa. Ini berarti bahwa desa-desa di Kabupaten Polewali Mandar terus membaik kondisinya sehingga mampu bergerak dari status yang rendah (sangat tertinggal) ke status yang tinggi (mandiri). Kabupaten Polewali Mandar mengalami perkembangan positif dalam pembangunan desa.

Grafik 2. 58

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.16 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.4.16.1 Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah Tenaga Penyuluh KB meningkat empat kali lipat, dari 21 orang pada tahun

2019 menjadi 89 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan yang cukup tajam pada jumlah Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Sementara jumlah Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPKLB/Koordinator) tidak mengalami penambahan.

Tabel 2. 59
Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	PPLKB/Koordinator	16	15	16	16	16
2	PKB/PLKB	5	3	7	66	73
Jumlah		21	18	23	82	89

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.16.2 Persentase Peserta KB Aktif

Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan penurunan selama periode 2019-2023. Penurunannya bergerak dari 75,40 persen pada tahun 2019 menjadi 56,96 persen pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya jumlah peserta KB aktif dari 50.970 orang menjadi 36.937 orang pada periode yang sama.

Tabel 2. 60
Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Peserta KB Aktif	50.970	49.142	63.926	28.550	36.937
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	67.592	66.635	78.566	57.627	64.836
3	Persentase Peserta KB Aktif	75,40	73,75	81,38	49,54	56,96

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.17 Urusan Perhubungan

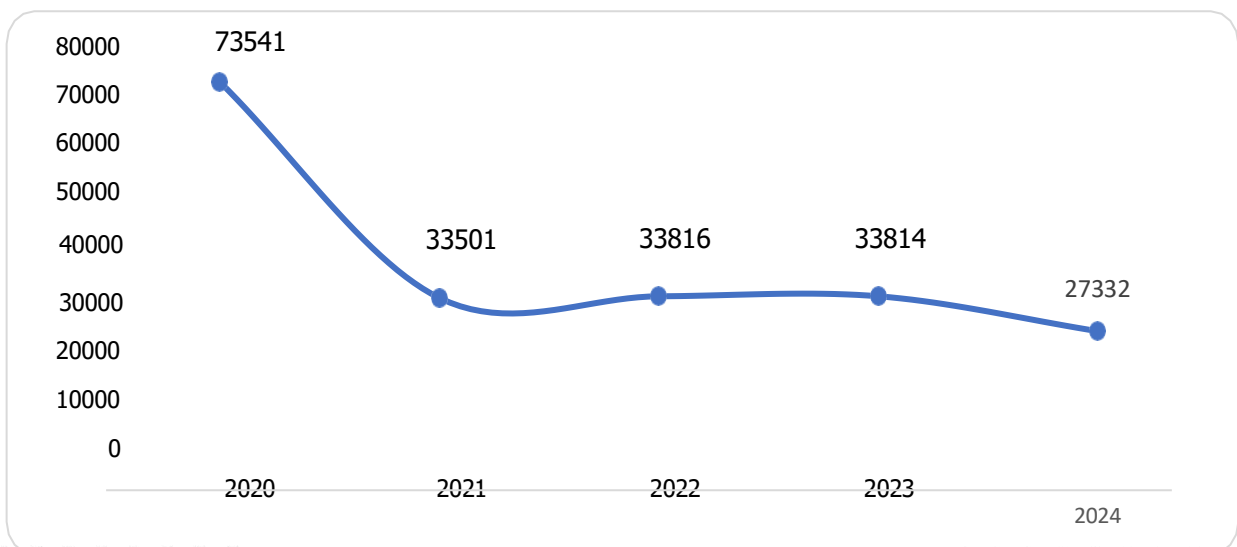
2.1.4.17.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Bus)

Jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan umum di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan trend menurun. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, jumlah penumpang angkutan umum menurun dari 73.541 orang menjadi 27.332 orang dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini

dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan alat transportasi pribadi dalam menjalankan aktivitasnya.

Tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan tajam (lebih dari 50%), setelah itu jumlah penumpang tidak mengalami peningkatan signifikan, dapat dilihat pada tahun 2022, 33.816 jiwa yang tahun sebelumnya 33.501 jiwa, dimana keadaan angkutan umum mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2024 kembali turun, yang mungkin menunjukkan berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum atau bertambahnya kendaraan pribadi. Masyarakat semakin jarang menggunakan transportasi umum, kemungkinan karena kenyamanan kendaraan pribadi, kualitas layanan angkutan umum, atau kebijakan transportasi yang berubah.

Grafik 2. 59
Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.17.2 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar, terlihat bahwa angka kecelakaan mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2022. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2022 ke 2023, dengan peningkatan sebesar 89 kejadian. Sementara itu, dari 2023 ke 2024, angka kecelakaan masih meningkat, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya.

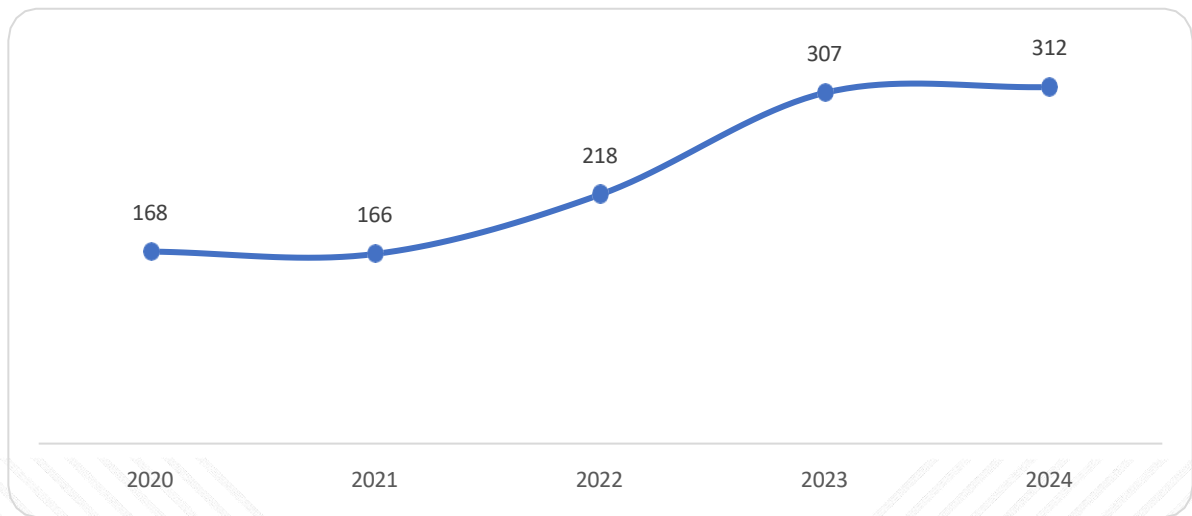
Fluktuasi di Awal Periode (2020-2021), tahun 2020 mencatat 168 kejadian, dan

jumlah ini sedikit menurun pada 2021 menjadi 166 kejadian. Lonjakan Signifikan pada tahun 2022 jumlah kecelakaan meningkat tajam menjadi 218 kejadian (+52 kejadian dari tahun sebelumnya). Kenaikan ini bisa menandakan peningkatan aktivitas lalu lintas, mungkin akibat mobilitas yang lebih tinggi setelah pandemi atau faktor lainnya.

Puncak Lonjakan pada tahun 2023, mencatat lonjakan terbesar, dengan 307 kejadian (+89 kejadian dibanding 2022). Ini merupakan peningkatan drastis yang mengindikasikan adanya faktor-faktor baru yang berkontribusi terhadap kecelakaan, seperti kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, atau faktor pengemudi. Stabilisasi pada tahun 2024 masih menunjukkan peningkatan menjadi 312 kejadian, tetapi kenaikannya relatif kecil dibanding tahun sebelumnya (hanya +5 kejadian). Ini mungkin menunjukkan bahwa angka kecelakaan mulai mencapai titik keseimbangan atau ada intervensi tertentu yang menahan pertumbuhannya.

Grafik 2. 60

Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: Polres Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.17.3 Rasio Ijin Trayek

Jumlah izin trayek angkutan umum jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sangat bervariasi antar tahun. Pada tahun 2022 menjadi puncak penerbitan izin trayek, dengan 211 izin dikeluarkan, mungkin karena peningkatan kebutuhan transportasi pasca-pandemi. Namun, tahun 2023 mengalami penurunan tajam, dan pada tahun 2024, tidak ada satu pun izin trayek yang

dikeluarkan. Ini menunjukkan perubahan kebijakan dari Dinas Perhubungan, menurunnya permintaan transportasi umum, atau regulasi baru yang membatasi izin trayek. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi sektor transportasi di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 2. 61

Rasio Izin Trayek Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	Buah	5	57	211	34	0
Jumlah Penduduk	Jiwa	442.576	486,339	488,857	495.371	490.030
Rasio izin trayek terhadap jumlah penduduk	Buah/Jiwa	0,00001	0,00011	0,04316	0.000069	0,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.17.4 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan angkutan umum yang mengikuti uji KIR di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi tajam. Pada tahun 2020, hanya 48,52% kendaraan yang diuji, namun pada tahun 2021, kepatuhan melonjak drastis hingga 80,48%, menandakan peningkatan kesadaran atau pengetatan regulasi.

Tren ini tidak bertahan. Pada tahun 2022 mencatat sedikit penurunan (67,71%), tetapi pada tahun 2023, kepatuhan anjlok ke titik terendah, hanya 34,30%. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau hambatan dalam proses uji KIR.

Pada tahun 2024, kepatuhan mulai membaik menjadi 53,01%, namun masih jauh dari angka tertinggi di tahun 2021. Jika tren ini tidak ditangani, risiko kendaraan tidak layak jalan meningkat, yang dapat berdampak pada keselamatan lalu lintas. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan edukasi agar kepatuhan kembali stabil.

Tabel 2. 62

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Buah	2.308	2.874	2.418	1.255	1.893

Jumlah Kendaraan Roda Empat	Unit	4.757	3.571	3.571	3.571	3.571
Persentase Jumlah Uji KIR dengan Jumlah kendaraan	%	48,52%	80,48%	67,71%	34,30%	53,01%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.18 Urusan Komunikasi dan Informatika

2.1.4.18.1 Jaringan Komunikasi

Dalam lima tahun terakhir, jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Polewali Mandar cenderung berkurang, akibat penurunan jumlah jaringan telepon seluler. Meski demikian, jumlah desa yang belum terjangkau jaringan internet menurun drastis, dari 63 desa di tahun 2020 menjadi sisa 33 desa di tahun 2024. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, tidak ada lagi desa yang tidak terjangkau jaringan internet.

Tabel 2. 63
Jaringan Komunikasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jaringan Telepon Seluler	7	7	5	4	4
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	1	1	1	1	1
3	Total Jaringan Komunikasi	8	8	6	5	5
4	Jumlah Desa yang belum terjangkau Jaringan Internet	63	63	47	39	33

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.18.2 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Jumlah surat kabar (koran) yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak empat jenis koran yang kesemuanya merupakan koran terbitan lokal. Berubahnya format koran, dari koran paper ke koran digital, menyebabkan jumlah koran yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar berkurang secara signifikan.

Tabel 2. 64
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	5	5	8	-	-
2	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	5	5	6	4	4
3	Total Jenis Surat Kabar	10	10	14	4	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.18.3 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kabupaten Polewali Mandar hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Jumlah radio lokal dan nasional masing-masing 1 unit, jumlah penyiaran TV lokal 1 unit. Namun, Jumlah penyiaran TV Nasional dari 17 unit menjadi 14 unit di tahun 2024.

Tabel 2. 65
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

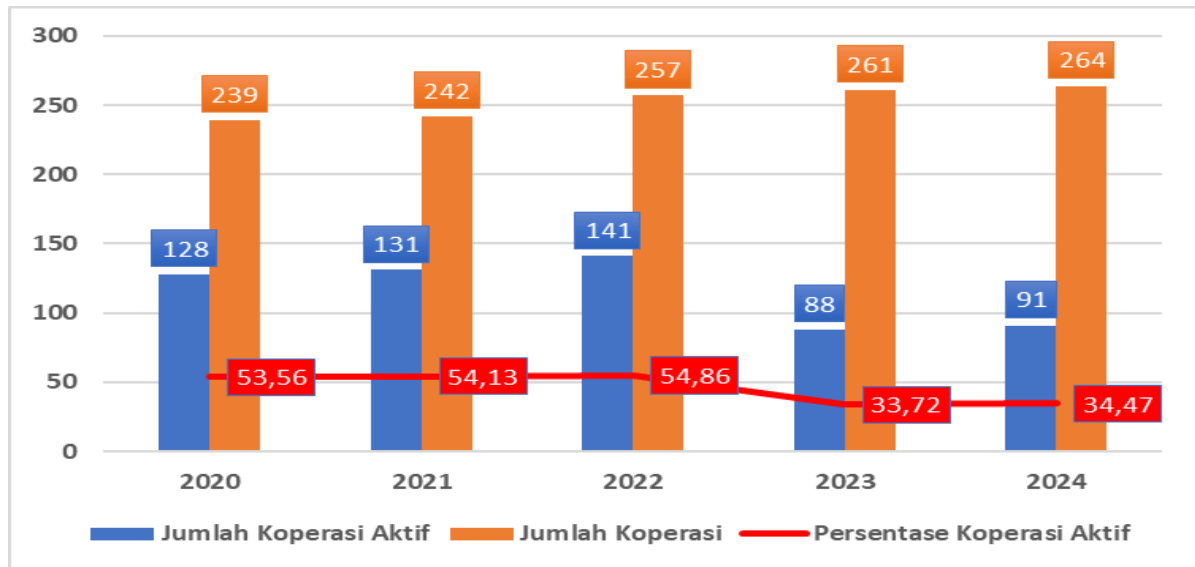
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah Penyiaran TV Lokal	1	1	1	1	1
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	17	17	17	17	14
5	Total Penyiaran Radio/TV Lokal	20	20	20	20	17

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.19 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif sebesar 53,56 persen, kemudian meningkat selama dua tahun berikutnya hingga mencapai angka 54,86 persen pada tahun 2022, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Memasuki tahun 2023 dan 2024, jumlah koperasi terus meningkat menjadi 261 dan 264, tetapi persentase koperasi aktif hanya mencapai 33,72% dan 34,47% secara berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa meskipun jumlah koperasi bertambah, tidak diiringi dengan peningkatan jumlah koperasi yang aktif.

Grafik 2. 61
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Ka. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.20 Urusan Penanaman Modal

2.1.4.20.1 Jumlah PMA dan PMDN

Dari data yang tersedia, kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak ada di Kabupaten Polewali Mandar. Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat kegiatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilainya menunjukkan tren meningkat selama periode 2020-2024. Total nilai PMA dan PMDN pada tahun 2024 sudah menembus angka Rp 657,55 miliar.

Tabel 2. 66
Indikator Capaian Kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Investasi Penanaman Modal Asing (Rp)	-	-	-	-	924.500.917
2	Investasi Penanaman Modal dalam Negeri	78.957.486.000	79.507.530.000	186.523.356.799	651.234.944.128	656.632.116.292
Total (Rp)		494.552.801.000	78.957.486.000	79.507.530.000	651.234.944.128	657.556.617.209

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.20.2 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani

Jenis dan jumlah izin yang dilayani di Kabupaten Polewali Mandar terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Selama periode 2020-2024, perizinan masih didominasi oleh SIUP, izin praktek perawat dan izin penelitian. Pada tahun 2024 terdapat penambahan jenis izin sebanyak 7 jenis dengan jumlah izin yang dilayani mencapai 1.875.

Tabel 2. 67

Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS IZIN	2020	2021	2022	2023	2024
1	IGTU	-	-	-	-	-
2	IUJK	46	3	-	-	-
3	SIUP	473	370	2000	-	-
4	TDP	-	-	-	-	-
5	SIUI	5	5	740	-	-
6	TDG	7	16	1	5	11
7	IMB	1035	1009	321	-	-
8	Izin Pelataran	-	-	-	-	-
9	Izin Reklame	-	-	-	-	-
10	Trayek (Karwas)	-	-	-	-	-
11	SIUSP/TDUP	-	14	-	-	-
12	Izin Praktek Dokter	67	138	150	111	78
13	Izin Praktek Dokter Gigi	12	-	3	19	11
14	Izin Praktek Dokter Spesialis	16	-	-	71	60
15	Izin Praktek Bidan	109	307	305	453	366
16	Izin Praktek Perawat	114	175	343	606	403
17	Izin Usaha Sarana Pariwisata	-	-	-	-	-
18	Izin Apotik	19	23	24	-	-
19	Izin Toko Obat	1	1	2	3	-
20	Izin Pendirian Apoteker	-	-	-	-	-
21	TDU/Penggilingan Padi	2	1	-	-	-
22	Izin Penelitian	379	896	821	808	946
23	Izin Prinsip	-	-	-	-	-
24	Izin Lokasi	3	1	-	-	-
25	Izin Lingkungan	7	3	-	-	-
26	IUSP	1	-	-	-	-
27	Izin Operasional PAUD/TK	14	-	-	-	5
28	Izin Operasional .PKBM,TBM & LKP	7	-	-	-	6
29	Izin Pendirian Klinik	-	-	-	-	-
30	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	-	-	-
31	Izin Terapis Gigi & Mulut	9	-	2	9	13
32	SIP – ATML	7	23	11	28	33

NO.	JENIS IZIN	2020	2021	2022	2023	2024
33	Izin Kerja Tehnis Farmasi	4	26	23	35	17
34	Izin Optik	-	-	-	-	-
35	Izin K. REFRAKSIONIS OPTISIEN/ OPTOMETRIS	-	-	1	1	2
36	Izin Praktik Tenaga Giizi	-	3	9	7	7
37	I. Praktek Radiografer	-	4	6	9	-
38	Izin Operasional. SD DAN SMP	-	-	-	-	-
39	Izin Apoteker	30	68	-	.57	49
40	Izin Operasional Klinik	-	3	1	1	-
41	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	1	-	1	-	-
42	TDI	-	2	-	-	-
43	Izin Laboratorium Klinik	-	-	-	-	-
44	Izin Praktik Fisioterafis	-	3	7	3	9
45	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisatawan	-	-	-	-	-
46	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan Minum	5	-	-	-	-
47	Tanda Daftar Penyediaan Akomodasi	4	-	-	-	-
48	Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3	1	-	-	-	-
49	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	7	-	4	6	8
50	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	3	-	1	-	-
51	Izin Usaha Industri Rumah Tangga Pangan	29	-	-	-	-
52	Izin Pendirian Puskemas	1	-	-	-	-
53	Izin Toko Alat Kesehatan	1	-	-	-	-
54	Tanda Daftar Usaha Perjalanan Pariwisata	1	-	-	-	-
55	Surat Pencabutan Izin Apoteker	4	-	-	-	-
56	Izin Praktik Elektromedis	-	2	1	-	-
57	Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional	-	1	-	-	-
58	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-	45	-	-	-
59	Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet	-	1	-	-	-
60	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	-	1	-	-	-
61	izin koperasi simpan pinjam	-	3	3	-	-
62	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	-	79	122	49	-
63	Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal					

NO.	JENIS IZIN	2020	2021	2022	2023	2024
		-	7	1	-	11
64	Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal	-	1	-	1	2
65	Izin Kerja Ortotis Protesis	-	-	2	-	-
66	Izin Praktik Penata Anestesi	-	-	7	2	7
67	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	7	-	-
68	Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR)	-	-	12	9	5
69	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)	-	-	1	5	2
70	Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan	-	-	-	65	2
71	Kartu Pencari Kerja	-	-	-	1153	1186
72	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	-
73	Izin Operasional Puskesmas	-	-	-	10	-
74	Izin Praktek Dokter Intensip	-	-	-	38	40
75	Izin Praktek Gigi Spesialis	-	-	-	6	6
76	Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	-	-	-	18	11
77	Izin Kerja Perekaman Medis	-	-	-	7	2
78	Pencabutan Izin	-	-	-	41	-
79	Izin Operasional Apotek	-	-	-	21	-
80	Izin Sektor Kesehatan (OSS)	-	-	-	81	121
81	Izin Sektor Pariwisata (OSS)	-	-	-	964	612
82	Izin Sektor Perindustrian (OSS)	-	-	-	7760	3202
83	Izin Sektor Perdagangan (OSS)	-	-	-	1669	193
84	Izin Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (OSS)	-	-	-	136	251
85	Izin Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (OSS)	-	-	-	266	317
86	Izin Sektor Pertanian (OSS)	-	-	-	483	661
87	Izin Sektor Perikanan dan Kelautan (OSS)	-	-	-	461	224
88	Izin Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (OSS)	-	-	-	26	12
89	Izin Sektor Perhubungan (OSS)	-	-	-	37	31
90	Izin Sektor Koperasi dan UKM (OSS)	-	-	-	7	-
91	Izin Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (OSS)	-	-	-	20	11
92	Izin Sektor Kominikasi dan Informasi (OSS)	-	-	-	26	24
93	Izin Sektor Ketenagakerjaan	-	-	-	15	7

NO.	JENIS IZIN	2020	2021	2022	2023	2024
	(OSS)					
94	Izin Sektor Agama (OSS)	-	-	-	4	4
95	Izin Sektor Otoritas Jasa Keuangan (OSS)	-	-	-	4	10
96	Izin Sektor Bank Indonesia (OSS)	-	-	-	2	1
97	Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	-	-	391	358
98	Izin Sektor Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	1
99	Izin Sektor Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	-	-	7
100	Izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	-	-	35
101	Pencabutan Izin (Non OSS)	-	-	-	-	412
102	Izin Praktik Tehnisi Kardiovaskuler	-	-	-	-	1
103	Promosi Kesehatan	-	-	-	-	1
104	Fisikawan Medis	-	-	-	-	1
	JUMLAH	2.424	3234	4973	15870	11519

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.21 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan generasi muda terus dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda. Pembinaan tersebut telah melahirkan pemuda kader dan pemuda wirausaha yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 68
Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemuda Kader	750	800	800	800	800
2	Pemuda Pelopor	65	65	40	40	40
3	Pemuda wirausaha	400	450	450	480	510

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2025

Selain pembinaan generasi muda, pembinaan olahraga juga terus dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Pembinaan tersebut telah menyebabkan jumlah atlet berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 40 atlet pada tahun

2020 menjadi 638 atlet pada tahun 2024. Tampaknya peningkatan atlet berprestasi ini terjadi karena pemerintah daerah lebih berfokus pada pembinaan beberapa cabang olah raga saja.

Tabel 2. 69
Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	18	31	5	6	6
2	Jumlah Cabang Olah Raga	59	59	59	28	28
3	Jumlah Atlet Berprestasi	40	18	55	230	638
4	Persentase cabang olah raga yang dibina	30,50%	52,54%	8,47%	64,00%	35,00%

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.22 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Polewali Mandar digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik berupa pengumpulan data sektoral, verifikasi data sektoral, pengolahan data sektoral, analisis data sektoral, diseminasi dan publikasi data, pengelolaan data makro, penyusunan standar data, penyusunan meta data, fasilitasi polewali mandar satu data, penghargaan data award, fasilitasi forum satu data, pengelolaan data berbasis spasial, dan interoperabilitas data.

2.1.4.23 Urusan Kebudayaan

Seluruh indikator kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, penyelenggaraan festival seni dan budaya sudah dilakukan dua kali, dimana sebelumnya hanya sekali. Begitu pula, jumlah organisasi/keompok kesenian/kebudayaan yang dibina menurun ditahun 2024 dari 62 organisasi kesenian menjadi 30 kesenian organisasi. Sedangkan jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya juga mengalami penurunan dari 62 organisasi kesenian menjadi 30 organisasi kesenian.

Tabel 2. 70
Indikator Kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS DATA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	2 kali	2 kali	2 kali
2	Jumlah organisasi/kelompok kesenian/kebudayaan yang dibina	22	20	32	62	30
3	Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya	29	20	135	62	30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025

Penyelenggaraan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan asli Kabupaten Polewali Mandar yang beragam. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Polewali Mandar terus bertambah, namun pertambahan tersebut telah memberi tekanan kepada pemerintah daerah untuk melestarikannya.

Tabel 2. 71
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS DATA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	19	15	15	17	17
2	Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah	19	56	67	69	69
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	27	10	17	17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.24 Urusan Perpustakaan

Secara umum, semua indikator perpustakaan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kemajuan dalam lima tahun terakhir, kecuali jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah berkurangnya jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah dikarenakan perpustakaan digital terus berkembang dan minimnya jumlah buku bacaan yang berkualitas.

Tabel 2. 72
Indikator Perpustakaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS DATA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	78.559	1.471	3.275	6.039	11.559
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	23.571	23.909	24244	22.503	24.915
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	8.408	8.454	8672	9.614	10.637
4	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah	135	385	478	484	456
5	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,31	0,33	0.60	0.90	0.90

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.25 Urusan Kearsipan

Pada tahun 2024, di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 12 lembaga yang telah menyerahkan arsip inaktif ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Pada saat yang sama, jumlah box arsip telah mencapai 1.066 box arsip. Namun jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, dan rujukan) masih sangat terbatas.

Tabel 2. 73
Indikator Kearsipan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD	Instansi	-	29	35	21	12
2	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)	Orang	-	-	0	3	5
3	Jumlah SDM pengelola arsip di LKD	Orang	6	5	5	8	8
4	Box Arsip	Unit	1.160	400	1.000	1.030	1.066

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.26 Urusan Pariwisata

Jumlah objek wisata di Kabupaten Polewali Mandar cukup banyak, mencapai 49

unit. Banyaknya objek wisata ini telah menarik kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Polewali Mandar naik cukup signifikan mencapai 1.169 orang begitupun dengan kunjungan wisatawan domestik yang juga naik mencapai 790.424 orang. Seiring dengan membaiknya situasi, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ini sangat dipengaruhi oleh publikasi melalui media sosial dan beberapa penghargaan yang diterima oleh objek wisata di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

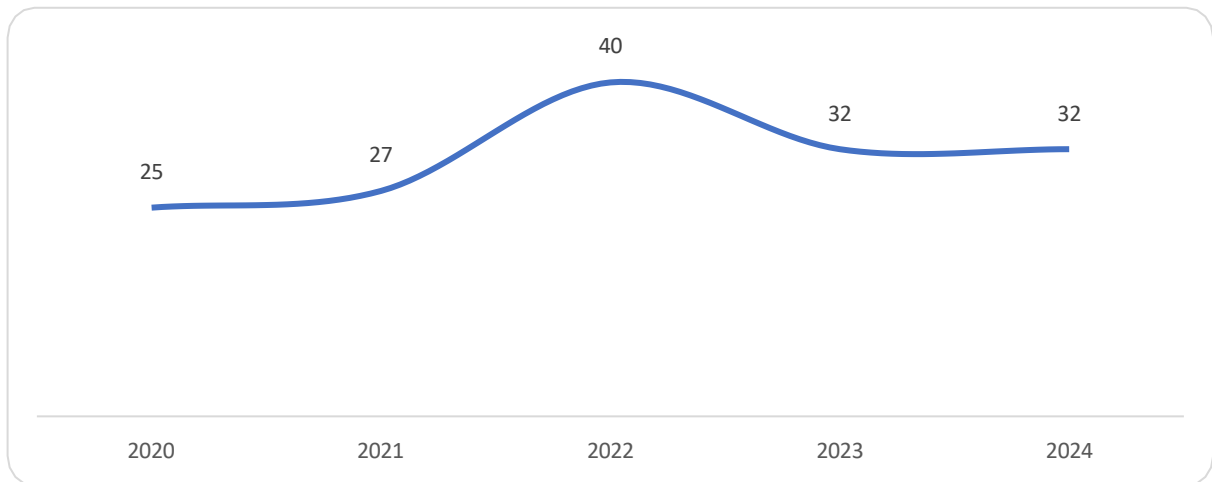
Tabel 2. 74
Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Objek Wisata	40	41	42	40	49
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	8	0	32	820	1169
3	Kunjungan Wisatawan Domestik (orang)	267.445	223.477	389.047	620.855	790.424

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2025

Tahun 2024, jumlah kelompok sadar wisata sebanyak 32 kelompok, jumlahnya sama dengan jumlah kelompok sadar wisata tahun 2023. Kelompok sadar wisata yang tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar ini mengelola berbagai jenis objek wisata, mulai dari wisata bahari, wisata budidaya, sampai wisata pegunungan. Kelompok ini membentuk komunitas untuk melakukan beberapa inovasi dalam upaya menarik kunjungan wisatawan yang didampingi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.

Grafik 2. 62
Jumlah Perkembangan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.27 Urusan Pertanian

2.1.4.27.1 Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan di Kabupaten Polewali Mandar tampaknya menghadapi tantangan serius. Sejumlah komoditas tanaman pangan memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan. tiga komoditas Kabupaten Polewali Mandar, yaitu padi ladang, jagung dan kacang tanah, menunjukkan penurunan luas panen, yang menyebabkan produksi turut menurun. Sedangkan Komoditas tanaman pangan lainnya, mengalami peningkatan dikarenakan peningkatan luas panen sehingga jumlah produksi bertambah.

Tabel 2. 75
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS TANAMAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah						
	Luas Panen	Ha	38.844,60	32.738	35.921,84	31.134,09	31.253,18
	Produksi	Ton	281.984,42	239.081,60	264.240,84	230.381,34	231.097,04
	Produktivitas	Kuintal/Ha	72,59	69,2	69,50	69,8	73,90
2	Padi Ladang						
	Luas Panen	Ha	7.114,80	5.349,50	4.046,00	3.793,00	2.994,00
	Produksi	Ton	27.854,61	21.046,88	15.980,35	15.022,79	11.827,80

	Produktivitas	Kuintal/Ha	39,2	39,4	39,50	39,6	39,50
3	Jagung						
	Luas Panen	Ha	9.359,80	2.464,60	7.464,60	6.027,10	3.457,75
	Produksi	Ton	40.883,04	11.658,42	35.291,45	28.505,80	16.440,65
	Produktivitas	Kuintal/Ha	43,7	46,1	46,30	46,9	47,50
4	Kacang Kedelai						
	Luas Panen	Ha	1.943,20	226,60	32,03	5,25	82,30
	Produksi	Ton	3.356,13	395,28	49,58	9,11	172,83
	Produktivitas	Kuintal/Ha	17,3	16,4	17,10	1,81	21
5	Kacang Tanah						
	Luas Panen	Ha	49	71,10	42,30	68,50	59,60
	Produksi	Ton	116,92	172,22	104,29	169,55	147,28
	Produktivitas	Kuintal/Ha	23,9	24,2	24,40	24,5	24,70
6	Kacang Hijau						
	Luas Panen	Ha	309,90	213,10	182,75	124,96	145,10
	Produksi	Ton	674,16	472,48	410,22	279,52	323,11
	Produktivitas	Kuintal/Ha	21,8	21,6	22,30	22,4	22,30
7	Ubi Kayu						
	Luas Panen	Ha	710	475,70	360	293,60	302,80
	Produksi	Ton	9.636,26	6.347,02	4.904,13	3.990,07	4.151,16
	Produktivitas	Kuintal/Ha	135,7	13,52	135,40	135,9	13,71
9	Ubi Jalar						
	Luas Panen	Ha	109	82,70	62,40	85,50	138,60
	Produksi	Ton	1.559,41	1.181,41	895,82	1.227,46	1988,13
	Produktivitas	Kuintal/Ha	143,1	14,26	143,40	143,5	14,34

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.27.2 Infrastruktur Pertanian

Kondisi lahan persawahan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami kondisi yang memprihatinkan karena terjadinya alih fungsi lahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, selama periode 2020-2024, terjadi pengurangan luas lahan sawah karena alih fungsi lahan, meskipun luas lahan yang dialih-fungsikan cenderung menurun.

Tabel 2. 76
Perkembangan Kondisi Lahan Persawahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	KONDISI LAHAN PERSAWAHAN	SATUAN	LUAS (HA)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Beralih Fungsi	Ha	1,08	0,83	1,69	2,08	-
2	Percetakan Sawah	Ha	-	-	-	3,20	9,15

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

Ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan variasi kemajuan antar jenis infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur jalan tani menunjukkan kemajuan yang impresif, sedangkan infrastruktur jaringan irigasi tersier justru menunjukkan penurunan kinerja.

Tabel 2. 77
Perkembangan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	INFRASTRUKTUR PERTANIAN	PANJANG (KM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan Tani (Meter)	29.631	18.190	16.385	42.093	-
2	Jembatan Tani (Unit)	-	-	-	-	-
3	Jaringan Irigasi Tersier (Meter)	5.327	1.647	2903	3.856	680
4.	Jaringan Irigasi Tanah (unit)	18	10	19	-	-
5.	Embung (Unit)	9	4	7	-	-
6.	Irigasi Perpompaan			1	-	13
7.	Irigasi Perpipaan			1	-	4

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.27.3 Peternakan

Komoditas peternakan unggulan di Kabupaten Polewali Mandar adalah sapi dan kambing. Jenis ternak sapi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah sapi bali dan sapi brahman. Populasi ternak sapi bali jauh lebih besar dari populasi ternak sapi brahman. Sapi Bali mengalami kenaikan populasi, yang menyebabkan produksi daging semakin meningkat. Sama halnya dengan ternak kambing, populasi dan produksi dagingnya juga meningkat pada tahun 2024.

Tabel 2. 78
Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Peternakan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	JENIS TERNAK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Perah					
	- Jumlah (Ekor)		-		-	
	- Produksi Susu (Liter)		-		-	
2	Sapi Brahman					
	- Jumlah (Ekor)	38	38	12	7	7
3	Sapi Bali					
	- Jumlah (Ekor)	35.404	35.683	35.882	34.369	34.541
	- Produksi Daging (Ton)	130,20	391,34	150,75	198,30	256.44
4	Kambing PE					
	- Jumlah (Ekor)	94.838	94.986	94.999	93.881	94.531
	- Produksi Daging (Ton)	8,25	16,23	8.89	0.96	3.348

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, jumlah kelompok tani yang dibina pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika diamati menurut klasifikasi, kelompok lanjut memperlihatkan jumlah paling banyak dan kelompok utama paling sedikit. Dari 2.523 kelompok tani, 1.196 kelompok diantaranya adalah kelompok lanjut, 103 kelompok adalah kelompok utama, dan sisanya kelompok pemula dan kelompok madya yang relatif berimbang.

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	KLASIFIKASI KELOMPOK TANI	JUMLAH KELOMPOK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemula	675	429	529	636	628
2	Lanjut	1.012	1.149	1.149	1.251	1.196
3	Madya	517	579	644	610	596
4	Utama	110	119	111	107	103
Jumlah		2.179	2.314	2.276	2.433	2.523

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.27.4 Perkebunan

Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat tujuh komoditas perkebunan utama, yaitu kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh,

kakao, dan kemiri. Dari tujuh komoditas tersebut, komoditas kakao dan kelapa dalam mencatat volume produksi paling besar dengan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Komoditas kopi robusta, cengkeh, dan kemiri juga menunjukkan peningkatan produksi. Sedangkan Komoditas kelapa hibrida dan kopi arabika menunjukkan produksi yang sama pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 2.74
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	JENIS TANAMAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Dalam					
	Luas Areal (Ha)	20.477,04	20.477,04	20.477,04	20.477,04	20.476,94
	Produksi (Ton)	17.490,54	17.497,79	17.660,67	17.676,32	17.700,51
2	Kelapa Hibrida					
	Luas Areal (Ha)	2.665,15	2.665,15	2.665,15	2.665,15	2.665,15
	Produksi (Ton)	2.536,17	2.398,40	2.398,45	2.398,61	2.398,61
3	Kopi Robusta					
	Luas Areal (Ha)	1.833,79	1.830,46	1.830,46	1.844,96	1.874,96
	Produksi (Ton)	699,78	670,57	671,52	678,32	704,85
4	Kopi Arabika					
	Luas Areal (Ha)	386,42	386,42	386,42	394,92	394,92
	Produksi (Ton)	123,15	123,14	122,45	128,34	128,34
5	Cengkeh					
	Luas Areal (Ha)	523,76	523,76	523,76	529,76	529,76
	Produksi (Ton)	125,81	126,73	126,83	131,38	134,25
6	Kakao					
	Luas Areal (Ha)	48.929,50	48.925,50	48.929,50	48.929,50	48.929,50
	Produksi (Ton)	33.475,28	36.480,55	36.482,11	36.563,18	36.579,04
7	Kemiri					
	Luas Areal (Ha)	7.055,02	7.055,02	7.055,02	7.055,02	7.055,02
	Produksi (Ton)	1.834,42	1.836,94	1.837,02	1.836,36	1.842,72

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.28 Urusan Kehutanan

2.1.4.28.1 Luas Kawasan Hutan

Luas hutan di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 94.049,18 Ha. Wilayah yang kawasan hutan paling luas adalah Kecamatan Tubbi Taramanu seluas 27.749,42 Ha atau 28,79 persen dari total luas hutan. Sementara luas hutan yang paling kecil

berada di Kecamatan Tinambung yang luasnya hanya 23,31 Ha atau 0,02 persen dari total luas hutan. Terdapat dua kecamatan yang tidak memiliki hutan, yaitu Kecamatan Wonomulyo dan Balanipa.

Tabel 2. 79
Luas Kawasan Hutan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	PERSEN (%)
1	Alu	14.803,86	15,74
2	Anreapi	3.830,41	4,07
3	Balanipa	-	0,00
4	Binuang	4.898,99	5,21
5	Bulo	13.648,82	14,51
6	Campalagian	97,28	0,10
7	Limboro	2.203,06	2,34
8	Luyo	436,75	0,89
9	Mapilli	3.254,29	3,46
10	Matakali	1.716,03	1,82
11	Matangnga	16.349,96	17,38
12	Polewali	136,43	0,15
13	Tapango	5.570,12	5,92
14	Tinambung	23,31	0,02
15	Tubbi Taramanu	27.079,87	28,79
16	Wonomulyo	-	0,00
Total		94.049,18	100,00

Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.4.29 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

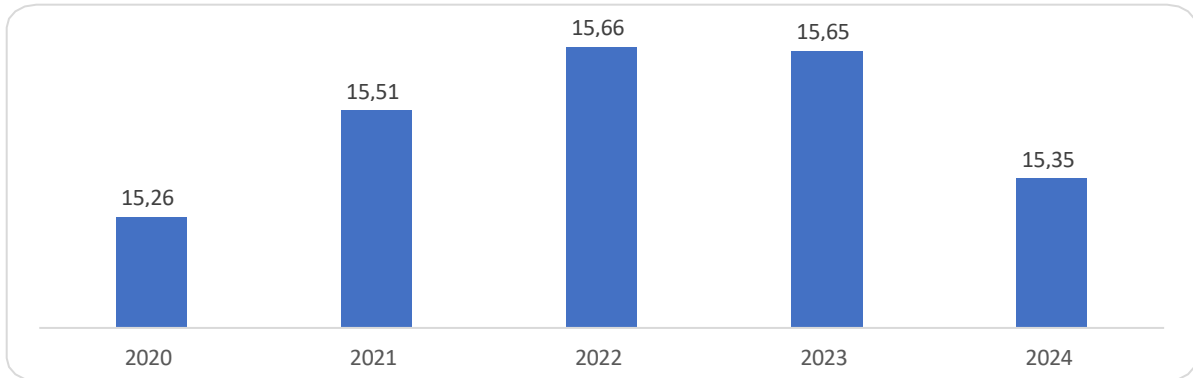
Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Polewali Mandar disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 99.011 unit yang terbagi atas Rayon Polewali sebanyak 37.514 unit dan Rayon Wonomulyo sebanyak 61.497 unit.

2.1.4.30 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Polewali Mandar setelah sektor pertanian. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB rata- rata di atas 15 persen dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2023, sektor perdagangan sudah menyumbang 15,65 persen terhadap

PDRB, namun pada 2024 kembali menurun menjadi 15,15 persen.

Grafik 2. 63
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.31 Urusan Perindustrian

Berbagai aspek yang terkait dengan perindustrian di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kinerja yang positif dalam lima tahun terakhir. Jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi, semuanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah sentra industri tetap sebanyak 37 buah dan tidak mengalami perubahan selama periode 2020-2024.

Tabel 2. 80
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sentra	Unit	371	371	371	371	371
Jumlah Perusahaan	Unit	6.265	6.702	6.792	6.942	6.987
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	14.578	15.437	15.684	15.981	16.025
Nilai Investasi	(Rp juta)	43.455	45.327	46.084	47.057	47.360
Nilai Produksi	(Rp Juta)	288.709	318.675	326.359	334.336	336.191

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar, 2024

Di Kabupaten Polewali Mandar, jenis industri sandang (pemintalan benang, pertenunan, pakaian jadi, dll.) sangat dominan, mencapai 63,41 persen terhadap total industri. Jenis industri pangan (makanan dan minuman tradisional) menempati posisi kedua dengan menyumbang 28,23 persen terhadap total industri. Sisanya,

disumbangkan oleh jenis industri kerajinan (kayu, rotan, bambu, gerabah, dll.), penggilingan gabah, dan lainnya (percetakan, bahan bangunan, dll.) dengan sumbangan kurang dari 10 persen terhadap total industri.

Tabel 2. 81
Persentase Industri Kecil Berdasarkan Komoditas
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Sandang (Pemintalan Benang, Pertenunan, Pakaian Jadi, dll.)	Persen	63,4	63,41	63,41	63,41	63,41
2	Industri Pangan (Makanan dan Minuman Tradisional)	Persen	27,13	27,135	27,585	28,225	28,725
3	Industri Kerajinan (Kayu, Rotan, Bambu, Gerabah, dll.)	Persen	3,6	3,64	3,64	3,64	3,64
4	Penggilingan Gabah	Persen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
5	Lainnya (Percetakan, Bahan Bangunan, dll.)	Persen	5,1	5,05	5,05	5,05	5,05

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.32 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi Umum Swakarsa Mandiri (TSM) di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 100 KK dalam kurun waktu tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, dan jumlah Satuan Kawasan Permukiman Transmigrasi dalam kurun waktu 2020- 2024 hanya sebanyak 4 SKP. Angka ini tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 82
Jumlah Pemberangkatan Transmigran di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Transmigrasi Umum Swakarya	KK	100	100	100	100	100
2	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman Transmigrasi	SKP	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.33 Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja perikanan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan (budidaya dan tangkap) meningkat dari 26.021,56 Ton pada tahun 2020 menjadi 77.874,23 Ton pada tahun

2024 atau meningkat hampir tiga kali lipat. Begitu pula jumlah konsumsi ikan, juga meningkat dari 56,1 Ton menjadi 71,10. Semua kelompok nelayan di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan pembinaan. Produksi perikanan kelompok binaan ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 83
Capaian Produksi Perikanan, Jumlah Konsumsi Ikan dan Kelompok Nelayan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Produksi Perikanan (Perikanan Budidaya + Perikanan Tangkap)	Ton	26.021,56	27.010,74	75.791,35	76.623,28	77.874,23
2.	Capaian Jumlah Konsumsi Ikan	Ton	56,1	68,5	68,50	69.98	71,10
3.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	%	100	100	100	100	100
4.	Produksi perikanan kelompok Binaan	Ton	10,20	11,00	11,05	11,15	11,25
5.	Jumlah kelompok (KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR)	Klp	670	657	687	699	809

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.34 Unsur Penunjang Perencanaan

Kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar sangat baik. Semua dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD) telah tersedia dan telah ditetapkan secara tepat waktu dengan peraturan perundangan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut juga telah selaras, sinkron, dan konsisten dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Tabel 2. 84
Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, (%)	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.35 Unsur Penunjang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Penjabaran APBD telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 2. 85

Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	APBD:					
	· Peraturan Daerah	1	1	1	2	5
	· Peraturan Bupati	3	5	5	9	27
2	Pengelolaan Keuangan Daerah					
	· Peraturan Daerah	-	-	-	1	2
	· Peraturan Bupati	1	3	1	4	9

Sumber: Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar, 2025

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama empat tahun berturut-turut selama kurun waktu 2020-2022. Pada tahun 2023 dan 2024, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), meskipun secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, namun terdapat pengecualian yang material.

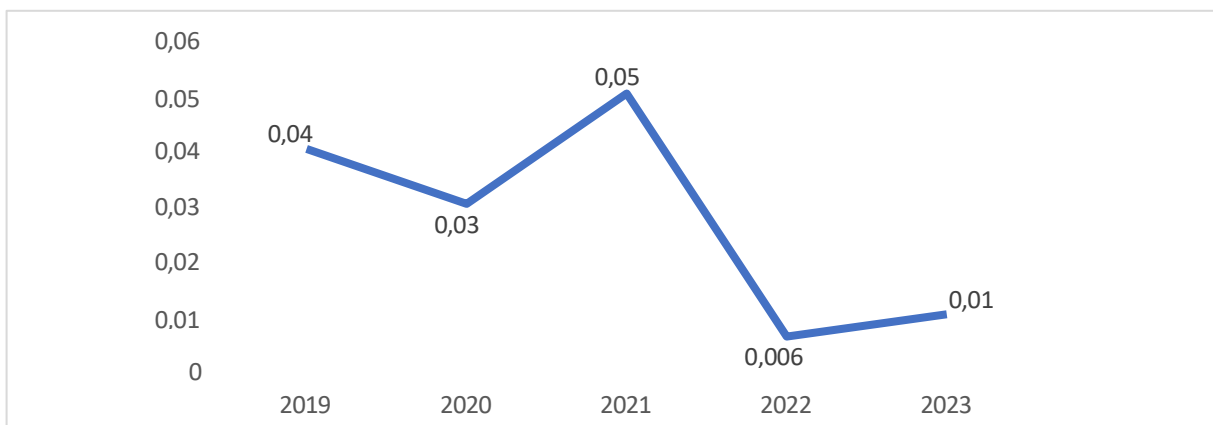
Tabel 2. 86
Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP

Sumber: Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar, 2025

Persentase Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap APBD Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Persentase Belanja SILPA terhadap APBD bergerak menurun, dari 0,04 persen pada tahun 2019 menjadi 0,01 persen pada tahun 2023. Penurunan SILPA ini dapat dimaknai sebagai bentuk membaiknya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Grafik 2. 64
Persentase Belanja SILPA Terhadap Total APBD di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2024

2.1.4.36 Unsur Penunjang Kepegawaian

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Polewali Mandar terus menurun. Jika pada tahun 2020, masih ada 5,68 persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, maka pada tahun 2024 hanya 0,57 persen. Meskipun jumlah ASN di Kabupaten Polewali Mandar semakin berkurang, namun jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan yang lebih tajam. Pada tahun 2024, hanya 44 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 87
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	358	315	360	75	44
2.	Jumlah ASN	6.294	6.059	5.872	6.002	7699
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5,68	5,19	6,13	1,24	0,57

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar, 2025

2.1.4.37 Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2024, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural hanya 0,16 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang masih tercatat hanya 0,82 persen. Secara absolut, jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural hanya 1 orang.

Tabel 2. 88
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	0	13	16	5	1
2	Jumlah total jabatan	804	516	571	606	606
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,00	2,51	2,80	0,82	0,16

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.38 Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki kepentingan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun dapat dilihat dari persentase implementasi rencana kegiatan penelitian dan pengembangan berkisar antara 70-100% pertahunnya dan

persentase pemanfaatan hasil kegiatan penelitian berkisar 50-70%:

Tabel 2. 89
Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	80	80	100	70	100
2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	50	50	70	90	100

Sumber: Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2024

2.1.4.14. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar cukup baik dalam lima tahun terakhir. Semua alat kelengkapan DPRD tersedia, mulai dari dokumen rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD, dokumen program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD, hingga program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

Tabel 2. 90
Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024

NO .	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Tersusun dan terintegrasinya dokumen program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO .	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, 2025

2.1.4.39 Unsur Penunjang Pengawasan

Kinerja pengawasan di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal, setidaknya dilihat dari indikator, yaitu persentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan persentase temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindak lanjuti oleh OPD. Pada tahun 2023, persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya 64,41 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula, persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti oleh OPD hanya 58,36 persen. Dengan kata lain, masing-masing ada 35 persen dan 51 persen temuan BPK dan APIP yang tidak ditindaklanjuti.

Tabel 2. 91
Kinerja Pengawasan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti OPD (%)	71,95	82,75	73,00	63,41	64,41
2	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti oleh OPD (%)	37,28	37,00	35,56	38,57	58,36
3	Persentase pengaduan masyarakat/Lembaga lainnya ke APIP yang ditindaklanjuti (%)	33,00	33,00	64,00	71,00	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, 2024

1.2. Gambaran Keuangan Daerah

1.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Analisis Keuangan Daerah diperlukan untuk memberi gambaran mengenai kemampuan atau kapasitas fiskal yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan analisis keuangan daerah memungkinkan untuk memperoleh informasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, pengalokasikan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

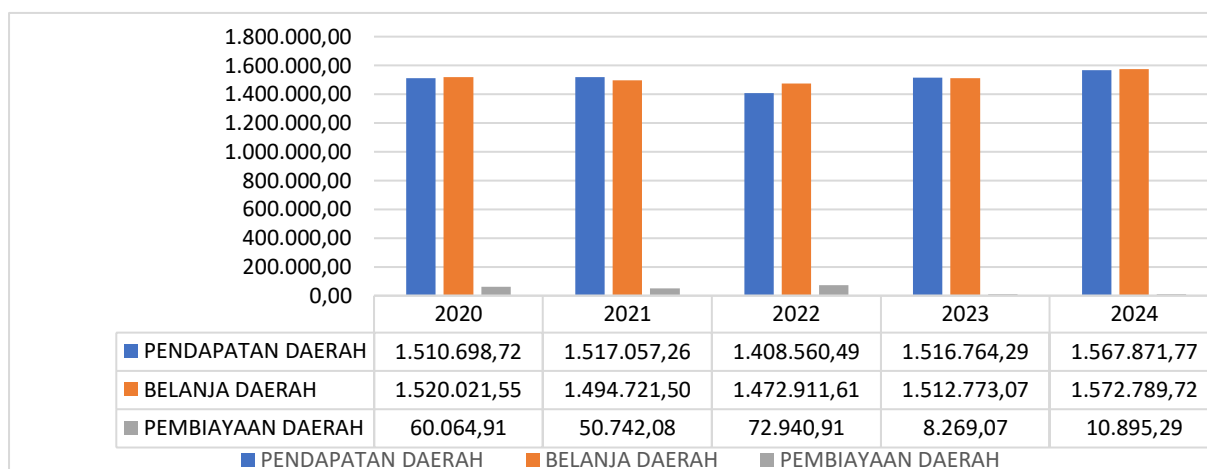
Gambaran keuangan daerah menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menyajikan informasi mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam rangka memahami kinerja keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar dapat dijelaskan dengan mengamati Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Grafik 2.52
Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar (Juta Rupiah)



Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar, diolah, 2025

Gambaran umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah cenderung fluktuatif dengan tren meningkat.
- Belanja Daerah, mengikuti pola Pendapatan Daerah, juga cenderung fluktuatif dengan tren meningkat.
- APBD mengalami surplus pada tahun 2021 dan 2023, sedangkan APBD mengalami defisit pada tahun 2020, 2022, dan 2024.
- Pembiayaan Daerah hanya terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan tidak ada Pembiayaan Pengeluaran, sehingga Pembiayaan Netto menunjukkan angka positif.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menunjukkan angka yang relatif cukup besar, tetapi menunjukkan tren menurun.

2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah

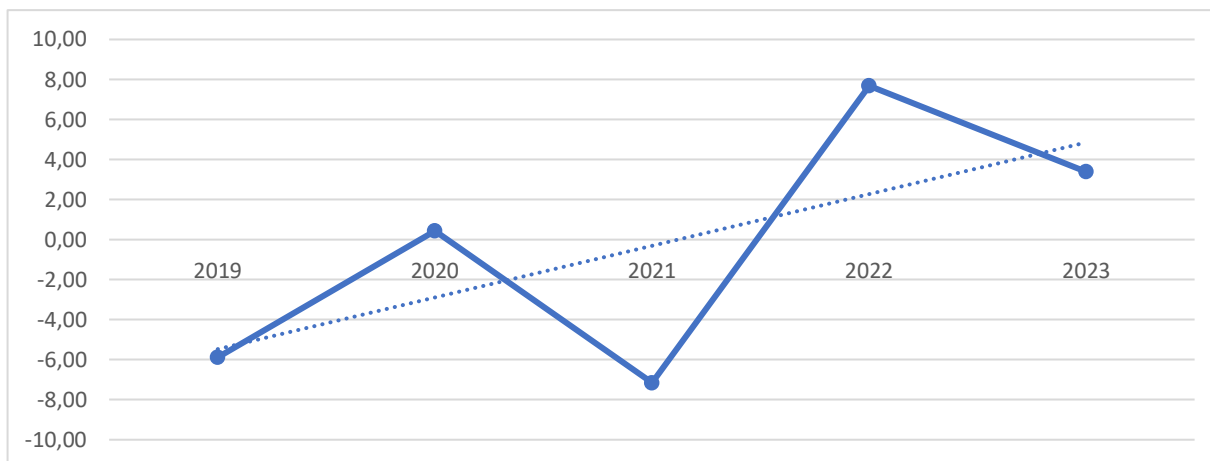
Secara umum, dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi dengan tren meningkat. Di tahun 2020, Pendapatan Daerah mencatat angka sebesar Rp 1.510,70 miliar, kemudian menurun menjadi Rp 1.408,56 miliar pada tahun 2022, lalu meningkat menjadi Rp 1.568,12 miliar pada tahun 2024. Namun, jika diamati laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun, tampak bahwa Pendapatan Daerah mencatat pertumbuhan negatif -0,32 persen per tahun. Penurunan paling tajam terjadi pada 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19. Sedangkan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, dimana Pendapatan Daerah meningkat sebesar 7,68 persen, yang sekaligus merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	PENDAPATAN DAERAH	1.510.698,72	1.517.057,26	1.408.560,49	1.516.764,29	1.567.811,25
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	211.985,06	260.705,67	199.068,67	230.029,36	230.174,58
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.377,04	25.645,07	30.633,72	31.169,11	32.164,63
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.716,80	19.298,26	11.370,01	15.584,92	17.630,94
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.542,89	3.488,10	3.914,09	3.973,31	3.906,60
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	172.348,33	212.274,25	153.150,86	179.302,02	176.472,41
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.226.152,35	1.195.396,62	1.147.376,63	1.283.499,10	1.302.744,64
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.012.302,58	961.122,28	931.661,98	1.084.591,47	1.104.301,31
	Bagi Hasil Pajak	8.398,36	14.741,04	12.455,39	11.095,13	9.991,70
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	861,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	671.333,87	664.134,14	661.542,15	705.636,66	823.062,88
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	331.708,47	282.247,09	257.664,44	318.988,78	271.246,73
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	169.555,85	193.386,04	167.131,86	149.822,89	149.163,22
	Dana Penyesuaian	169.555,85	-	-	-	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	32.388,10	15.373,66	-	0,00
	Dana Desa	-	160.997,94	151.758,20	144.190,87	142.976,31
	Insentif Fiskal	-	-	-	5.632,01	6.186,91
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	39.293,92	40.888,30	48.255,22	49.084,75	49.280,11
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.293,92	40.888,30	48.255,22	49.084,75	49.280,11
2.4	Bantuan Keuangan	5.000,00	-	327,58	-	0,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.000,00	-	327,58	-	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.561,31	60.954,97	62.115,19	3.235,83	34.892,03
3.1	Pendapatan Hibah	72.561,31	60.954,97	62.115,19	3.235,83	34.952,55

Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar

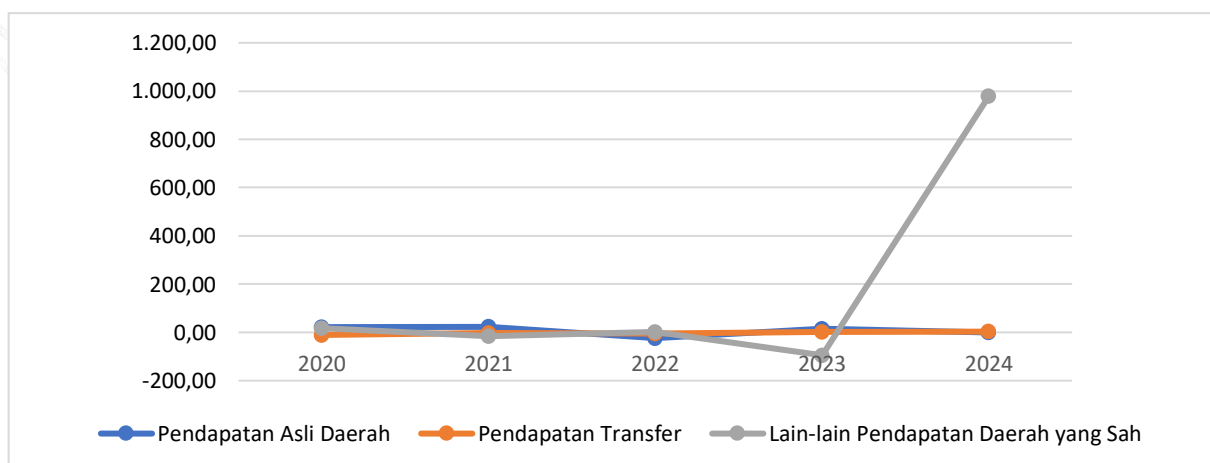
Gambar 1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dari ketiga komponen Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan pertumbuhan yang paling mengesankan dan sekaligus paling fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, Lain-lain Pendapatan yang Sah menurun tajam dari Rp 72,56 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 3,230 miliar pada tahun 2023, tetapi kemudian meningkat kembali menjadi Rp 34,89 miliar pada tahun 2024. Secara rata-rata tahunan, Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat sebesar 177,47 persen per tahun. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, PAD meningkat rata-rata 7,40 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan Pendapatan Daerah. Sebaliknya, komponen Pendapatan Daerah lainnya, yaitu Pendapatan Transfer justru menunjukkan penurunan. Secara rata-rata, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar -2,42 persen per tahun. Penurunan Pendapatan Transfer terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.

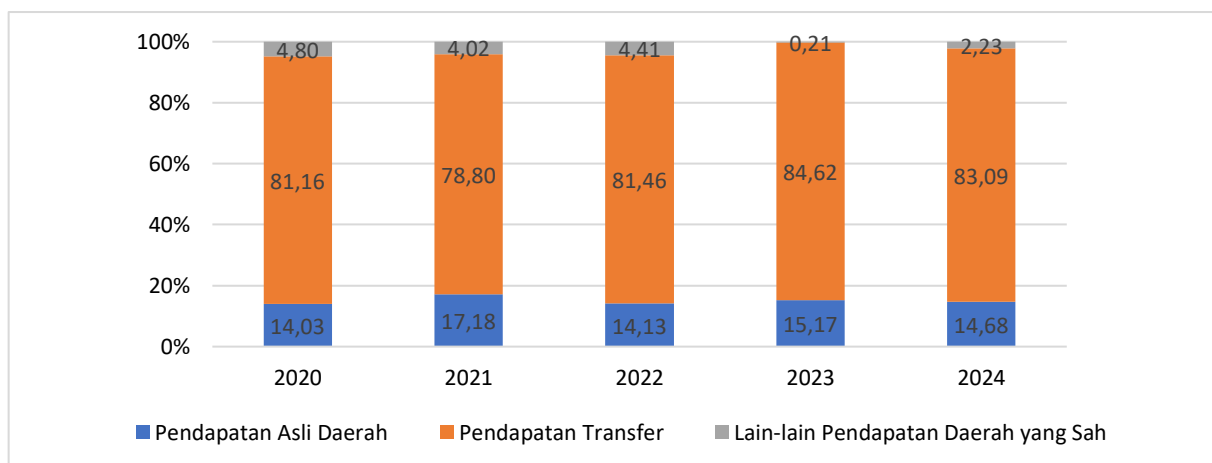
Gambar 2
Pertumbuhan PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Penurunan Pendapatan Transfer telah memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Daerah, mengingat Pendapatan Transfer merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Daerah. Secara rata-rata, Pendapatan Transfer menyumbang 81,83 persen per tahun terhadap Pendapatan Daerah, dengan tren meningkat. Pada tahun 2020, Pendapatan Transfer menyumbang 81,16 persen terhadap Pendapatan Daerah, kemudian meningkat menjadi 84,62 persen pada tahun 2023, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun berikutnya, kontribusi Pendapatan Transfer sedikit menurun menjadi 83,09 persen. Peningkatan kontribusi Pendapatan Transfer terjadi karena komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan Pendapatan Transfer. Jadi sekalipun komponen Pendapatan Transfer lainnya mengalami penurunan, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah terhadap mengalami peningkatan.

Gambar 3
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (%)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah ditopang oleh peningkatan PAD dan Pendapatan Transfer pada dua tahun terakhir. Peningkatan PAD terutama dikongtribusi oleh peningkatan seluruh komponen PAD, kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan peningkatan Pendapatan Transfer dikongtribusi oleh peningkatan dua komponen utama Pendapatan Transfer, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan dua komponen Pendapatan Transfer, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya dan Bantuan Keuangan justru menunjukkan penurunan.

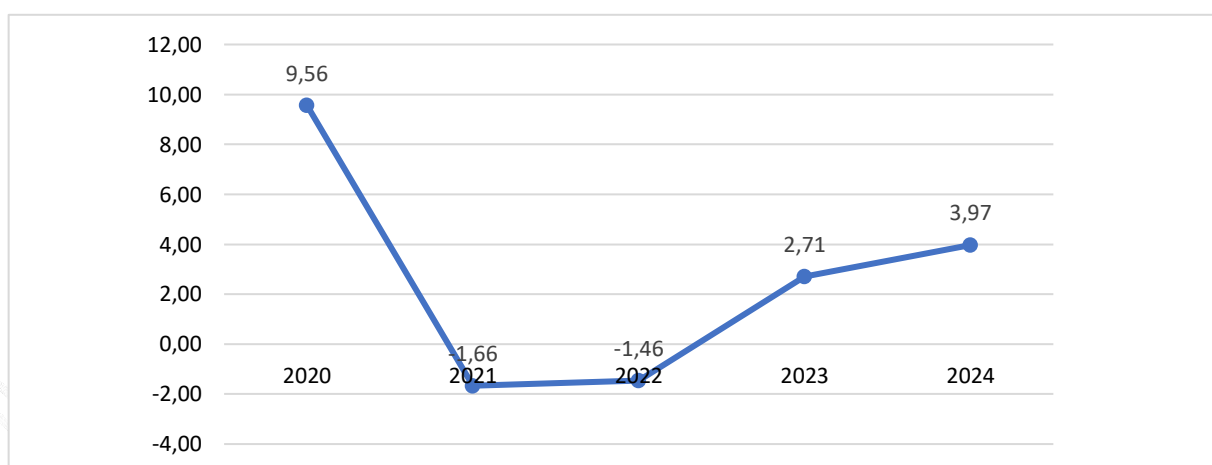
Komponen terakhir Pendapatan Daerah, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bukan hanya menunjukkan angka nominal yang relatif kecil, tetapi juga menunjukkan

penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 72,56 miliar, kemudian hanya tersisa sebesar Rp 3,23 miliar pada tahun 2023, dan kemudian meningkat menjadi Rp 34,89 pada tahun 2029 atau menurun lebih dari setengah dibandingkan lima tahun sebelumnya. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 akibat adanya Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

2.2.1.1.2. Belanja Daerah

Mengikuti pola perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir juga cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2020, Belanja Daerah sebesar Rp 1.520,02 miliar, kemudian terus menurun hingga menjadi Rp 1.472,91 miliar pada tahun 2022, yang merupakan Belanja Daerah terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, tahun 2023, Belanja Daerah mengalami titik balik dan meningkat menjadi Rp 1.512,77 miliar. Tren peningkatan terus berlanjut hingga mencapai Rp 1.572,79 miliar pada tahun 2024, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata 2,62 persen per tahun selama kurun waktu 2020-2025.

Gambar 4
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (%)



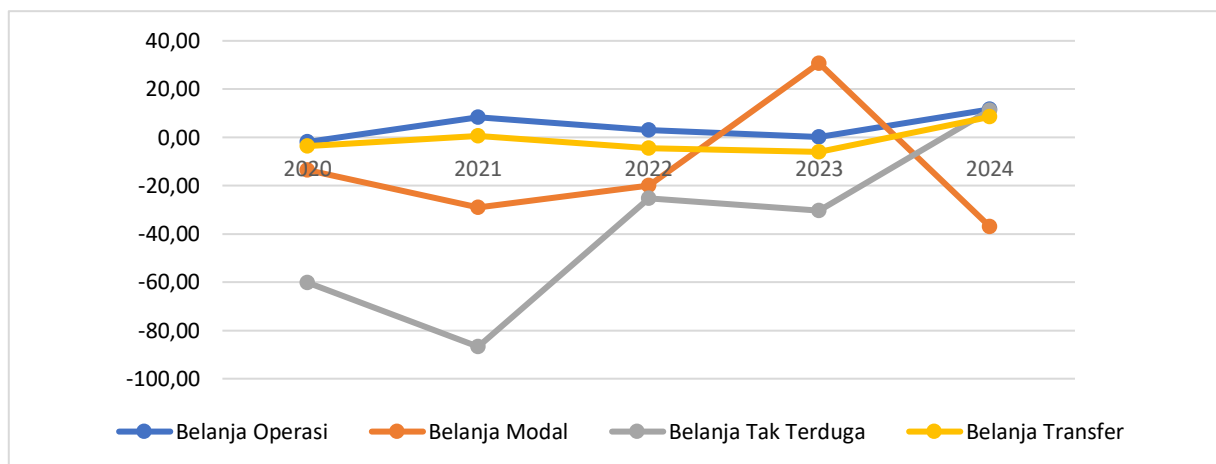
Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah

Dari empat komponen Belanja Daerah, hanya komponen Belanja Operasi yang bertumbuh positif dalam lima tahun terakhir. Sedangkan tiga komponen Belanja Daerah lainnya, yaitu Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer bertumbuh negatif. Belanja Operasi rata-rata tumbuh sebesar 4,25 persen per tahun, di atas pertumbuhan Belanja Daerah. Sedangkan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer masing-masing mengalami penurunan rata-rata 13,76 persen, -38,29 persen, dan -1,05 persen per tahun. Tingginya penurunan rata-rata Belanja Tak Terduga, terutama terkait dengan besarnya Belanja

Tak Terduga pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan kemudian mengalami penurunan tajam di tahun-tahun berikutnya seiring dengan berakhirnya secara berangsur-angsur Pandemi Covid-19.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Belanja Daerah sepenuhnya disebabkan oleh peningkatan Belanja Operasi. Peningkatan seluruh komponen Belanja Operasi, mulai dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, hingga Belanja Bantuan Sosial, telah mendorong pembengkakan Belanja Operasi. Belanja Hibah misalnya, mengalami peningkatan lebih dari empat kali lipat dalam lima tahun terakhir. Demikian pula Belanja Pegawai, sebagai komponen terbesar dalam struktur Belanja Operasi, juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024.

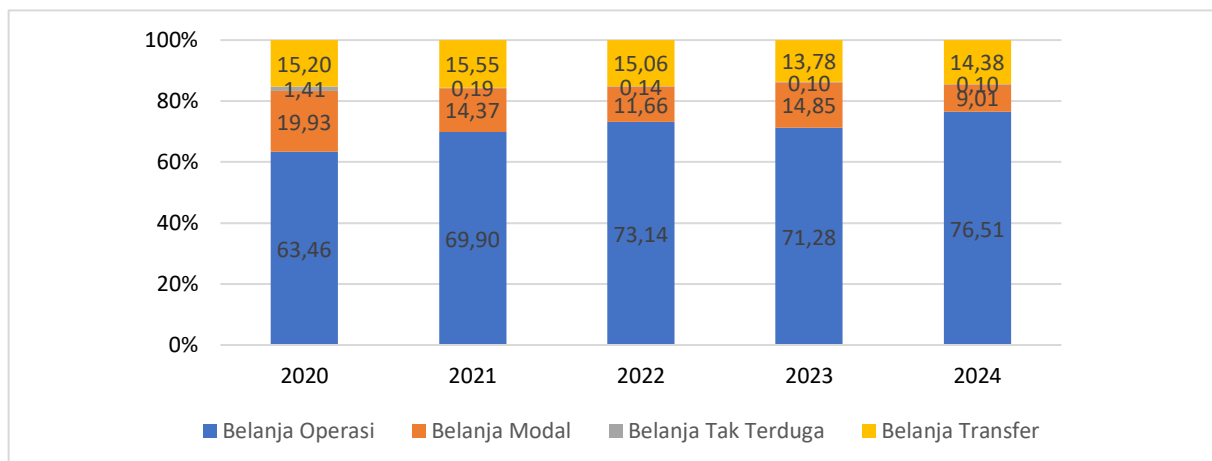
Tabel 3
Pertumbuhan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar, seperti juga yang terjadi di banyak kabupaten/kota lainnya, masih didominasi oleh Belanja Operasi. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah secara rata-rata mencapai 70,86 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2020, proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah mencapai 63,46 persen. Proporsi ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 76,51 persen pada tahun 2024, yang merupakan angka tertinggi sedikitnya dalam lima tahun terakhir.

Gambar 5
Perkembangan Struktur Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah.

Peningkatan proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah, telah menekan komponen belanja lainnya, terutama Belanja Modal. Dalam lima tahun terakhir, Belanja Modal terus menunjukkan penurunan secara signifikan. Belanja Modal terpengkas lebih dari setengah selama rentang waktu Akibatnya, proporsinya terhadap Belanja Daerah menunjukkan penurunan berarti, dari 19,93 persen pada tahun 2020, menjadi 9,01 persen pada tahun 2024. Angka ini semakin menjauh dari angka yang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu 30 persen dari Belanja Daerah. Begitu pula dengan Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, proporsinya terhadap Belanja Daerah juga cenderung menurun selama periode 2020-2024. Kecenderungan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar di masa depan, saat Pemerintah Pusat meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk menekan proporsi Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai.

Tabel 2
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	BELANJA DAERAH	1.520.021,55	1.494.721,50	1.472.911,61	1.512.773,07	1.572.789,72
1	BELANJA OPERASI	964.538,68	1.044.751,97	1.077.248,17	1.078.299,09	1.203.380,98
1.1	Belanja Pegawai	601.699,77	573.232,46	634.972,03	586.271,38	695.010,12
1.2	Belanja Barang dan Jasa	340.807,45	431.240,13	398.280,40	422.890,44	410.595,52
1.3	Belanja Hibah	20.131,25	38.916,63	39.872,12	63.149,25	94.617,14
1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.900,21	1.362,75	4.123,62	5.988,02	3.158,20
2	BELANJA MODAL	302.905,19	214.738,63	171.766,62	224.579,87	141.663,61
2.1	Belanja Modal Tanah	1.426,82	1.366,74	4.710,95	670,05	11,40
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.119,11	60.149,71	61.365,19	85.522,04	47.622,49
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.929,20	81.767,13	65.816,00	70.663,13	49.052,87
2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	78.151,13	68.152,20	37.331,89	63.465,13	40.097,65
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.278,92	3.302,85	2.542,59	4.259,52	4.879,20
3	BELANJA TAK TERDUGA	21.459,17	2.844,02	2.124,93	1.479,74	1.645,65
3.1	Belanja Tak Terduga	21.459,17	2.844,02	2.124,93	1.479,74	1.645,65
4	BELANJA TRANSFER	231.118,52	232.386,88	221.771,89	208.414,37	226.099,48
4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	2.254,77	3.156,38	2.508,39	0,00
4.2	Transfer Bantuan Keuangan	231.118,52	230.132,11	218.615,51	205.905,98	226.099,48

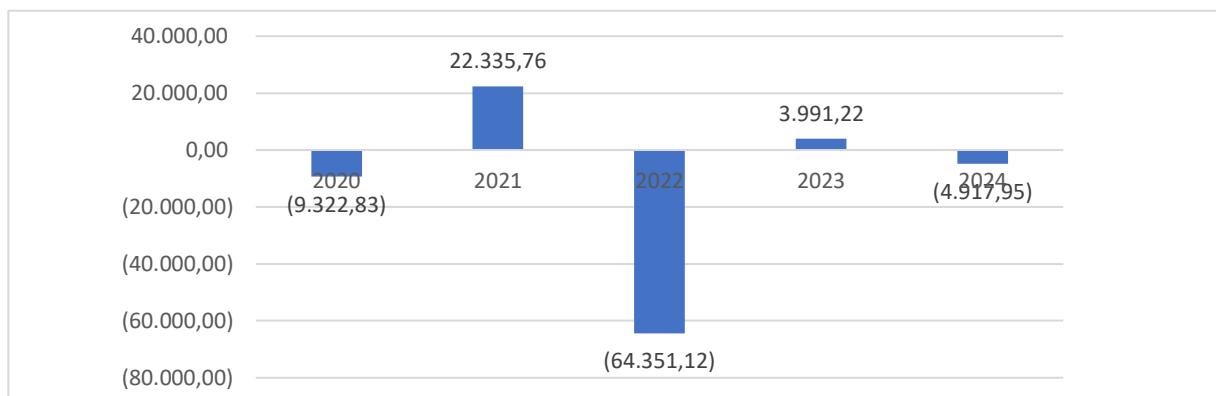
Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Sepanjang periode 2020-2024, APBD Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan anggaran surplus dan defisit. Pada tahun 2020, 2022, dan 2024, APBD mencatat angka defisit, dan sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2023, APBD mencatat angka surplus. Anggaran defisit menandakan bahwa Pendapatan Daerah lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Daerah. Sebaliknya, anggaran surplus menandakan Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah.

Angka defisit paling besar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai Rp 64,35 miliar. Menurunnya secara signifikan Pendapatan Daerah di tahun tersebut menjadi penyebab utama terjadinya defisit. Penurunan Pendapatan Daerah di tahun 2020 akibat menurunnya PAD dan Pendapatan Transfer. Sedangkan terjadinya surplus yang relatif besar pada tahun 2021, akibat meningkatnya Pendapatan Daerah di satu sisi, dan menurunnya Belanja Daerah di sisi lain. Penurunan Belanja Daerah terjadi akibat penurunan Belanja Modal dan terpengkasnya Belanja Tak terduga akibat berakhirnya Pandemi Covid-19.

Gambar 6
Perkembangan Surplus/Defisit APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

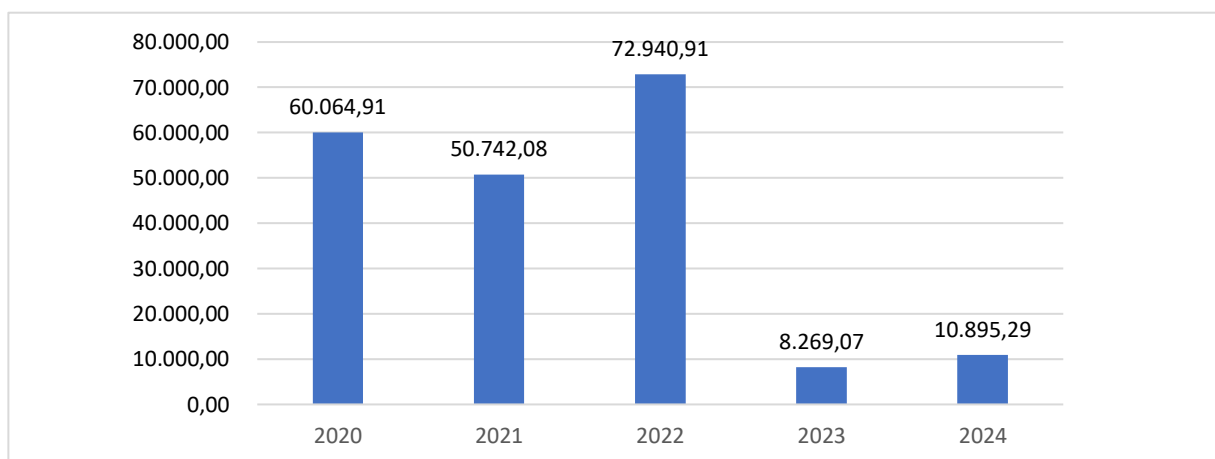
Tabel 4
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
SURPLUS/DEFISIT	(9.322,83)	22.335,76	(64.351,12)	3.991,22	(4.917,95)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.064,91	50.742,08	72.940,91	8.269,07	10.895,29
Penggunaan SILPA	60.064,91	50.742,08	72.940,91	8.269,07	10.895,29
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PEMBIAYAAN NETTO	60.064,91	50.742,08	72.940,91	8.269,07	10.895,29
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	50.742,08	73.077,84	8.589,79	12.260,29	5.977,34

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar hanya terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan tidak ada Pembiayaan Pengeluaran. Pembiayaan Penerimaan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang secara nominal angkanya cukup besar, tetapi dengan kecenderungan menurun. Akibatnya, Pembiayaan Netto juga menunjukkan nominal yang besar karena semata-mata hanya bersumber dari SiLPA dan tidak ada Pembiayaan Pengeluaran. Itu sebabnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) mencatat angka nominal yang cukup besar, terutama pada saat anggaran mengalami surplus. Pembiayaan Netto yang positif dan anggaran yang surplus, menyebabkan angka SiLPA membesar. Bahkan pada saat anggaran mengalami defisit, SiLPA tetap mencatat angka positif karena Pembiayaan Netto berada di atas angka defisit. Namun catatan positifnya, angka SiLPA (i kecil) dan SiLPA (I besar) dalam dua tahun terakhir cenderung semakin mengecil yang mengindikasikan membaiknya pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 7
Perkembangan SiLPA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

SiLPA yang positif, apalagi dengan nominal yang cukup besar, menunjukkan adanya anggaran yang tidak terserap atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Padahal SiLPA tersebut sesungguhnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk tujuan yang lebih produktif, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, atau pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu pemerintah daerah pada akhir periode perencanaan. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Neraca daerah mencakup

seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari aktivitas keuangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, neraca daerah menggambarkan kondisi kekayaan dan kewajiban keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu (biasanya akhir tahun anggaran).

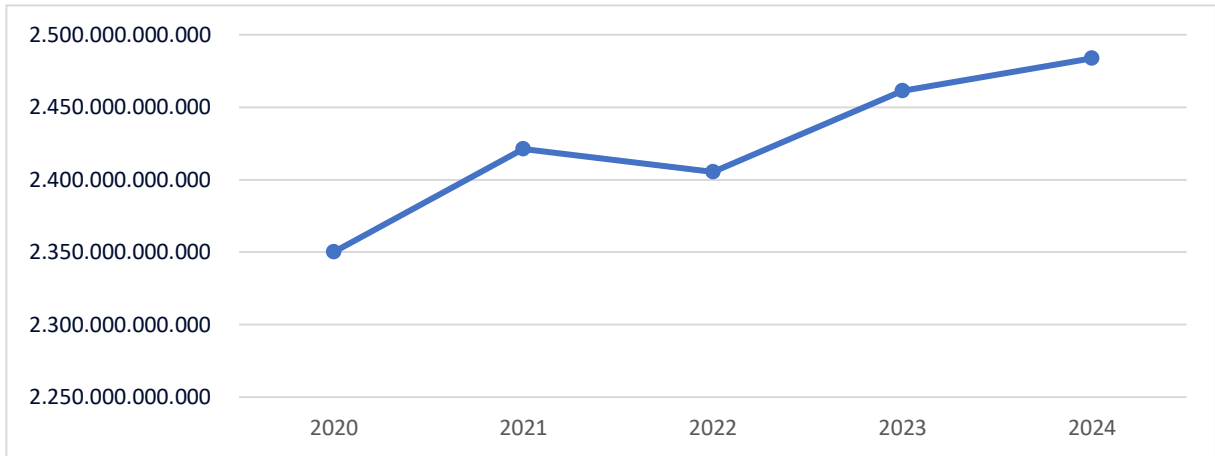
Selama lima tahun terakhir perkembangan aset pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar cenderung meningkat. Ini terjadi karena adanya peningkatan pada komponen investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan properti investasi di tahun 2024. Namun, aset lancar mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Padahal aset lancar sangat penting untuk menghasilkan pemasukan rutin bagi pemerintah daerah.

Investasi jangka panjang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar berupa penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan BUMD pada tahun 2020 mencapai Rp 26,64 miliar. Penyertaan modal dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2024, sama sekali tidak ada penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Namun, kewajiban daerah dalam lima tahun terakhir juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Padahal idealnya kewajiban daerah sebaiknya menurun dari tahun ke tahun sebab di dalam kewajiban daerah terkandung utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki kewajiban sebesar Rp 40,70 miliar, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 90,59 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini dipicu oleh kewajiban jangka pendek, berupa utang belanja. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengatur keuangan daerahnya agar beban kewajiban tidak semakin besar.

Harta pemerintah daerah, yang merupakan penjumlahan kewajiban dan ekuitas, menunjukkan tren yang meningkat selama lima tahun terakhir. Di tahun 2020, harta pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar mencapai Rp 2.350,18 miliar di tahun 2020. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp 2.483,71 miliar lima tahun kemudian, atau hanya bertambah 5,68 persen.

Grafik 2.57
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rp)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2024

Tabel 2.91
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	51.574.728.556,80	72.914.672.848	164.594.332,22	4.352.117.213,12	343.029.852
Setara Kas (Deposito)					
Kas di BLUD	-	-	7.557.595.588,13	3.350.078.671,35	1.494.224.427
Kas Di Bendahara FKTP	-	-	93.783.936,00	646.382.196,00	63.165.302
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	8.016.861,00	7.503.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	559.472.176,00	1.579.592.246,00	158.545.562
Kas Dana BOS	-	-	53.004.635,00	1.000.000,00	-
Kas Lainnya	-	-	3.598.782.720,00	2.860.541.915,00	159.041.787
Kas Dana BOSP					6.588.004
Kas Dana BOK Puskesmas					3.752.735.741
Piutang Pajak Daerah	47.992.209.335,05	10.749.881.181	10.951.402.137,00	10.979.301.426,67	12.725.100.450
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Piutang Retribusi	-	762.322.500	636.304.950,00	1.081.733.540,00	194.916.700
Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	10.419.419.455	10.609.024.455,00	2.927.538.971,00	3.220.419.292
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	16.028.788.211	25.717.434.455,00	31.805.411.280,02	58.537.990.987
Penyisihan Piutang Lain2 PAD yang Sah	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya	-	5.065.000.000	5.065.000.000,00	10.534.457.916,99	11.267.891.769
Penyisihan Piutang	-	(25.663.020.758)	(27.586.535.194,57)	(36.851.030.486,56)	(38.913.148.770)
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-
Persediaan	14.851.818.213,12	18.731.449.974	21.108.288.233,75	14.518.524.203,00	27.741.483.451
Jumlah Aset Lancar	114.418.756.104,97	109.008.513.411,11	58.536.169.284,53	47.793.152.092,59	80.751.984.554
INVESTASI JANGKA PANJANG					

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
Investasi dalam Dana Bergulir	9.739.642.937	9.739.642.937	9.739.642.937	5.000.000.000	5.000.000.000
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	9.739.642.937	9.739.642.937	9.739.642.937	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan	10.399.000.000	-	39.268.050.095,82	39.992.621.522,82	-
Penyertaan Modal Kepada BUMD	16.241.343.186	38.812.801.981	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	26.640.343.186,82	38.812.801.980,82	39.268.050.095,82	39.992.621.522,82	39.992.621.522,82
Jumlah Investasi Jangka Panjang	26.640.343.186,82	38.812.801.980,82	39.268.050.095,82	39.992.621.522,82	39.992.621.522,82
ASET TETAP					
Tanah	347.401.835.687,50	349.145.931.703,50	354.588.654.954,00	355.756.801.781,00	358.252.079.293
Peralatan dan Mesin	457.556.193.137,99	493.079.200.086,13	554.483.945.886,00	637.979.511.146,00	632.728.195.130
Gedung dan Bangunan	1.096.560.320.609,82	1.166.282.623.511,60	1.249.564.442.987,00	1.335.756.637.485,00	1.360.892.643.028
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	997.917.847.148,44	1.069.352.535.490,27	1.122.106.260.784,00	1.155.277.219.903,00	1.223.716.177.031
Aset Tetap Lainnya	9.091.708.901,58	7.535.511.060,35	7.666.376.508,00	7.997.923.467,00	8.910.100.462
Konstruksi dalam Pengerjaan	26.654.786.871,00	35.085.213.457,77	39.478.602.766,00	50.253.252.892,00	52.153.501.149
Akumulasi Penyusutan	(822.862.297.877,18)	(941.603.483.869,20)	(1.113.706.658.079,00)	(1.291.234.710.098,00)	(1.399.709.764.225)
Jumlah Aset Tetap	2.112.320.394.479,15	2.178.877.531.440,42	2.214.181.625.806,00	2.251.786.636.576,00	2.236.942.931.868
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran	13.352.012.525,99	12.457.128.134	11.566.243.741,00	9.733.728.312,00	9.733.728.312
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				6.531.476.479,00	6.531.476.479
Aset Tak Berwujud	472.491.931,67	2.365.020.500	2.486.020.500,00	2.767.872.500,00	1.828.226.700
Amortisasi ATB		(2.037.228.508)	(2.177.045.115,00)	(2.325.809.255,00)	(1.743.156.300)
Aset Lain-lain	82.972.228.391,37	81.793.007.307	80.279.885.601,00	111.192.045.023,00	145.857.134.335
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	(7.586.513.532,00)	(36.659.516.337)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	1.302.744.614,00	930.718.000,00	29.505.000
Jumlah Aset Lainnya	96.796.732.849,03	94.577.927.432,85	93.457.849.341,00	121.243.517.527,00	125.577.398.189

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi Tanah	-	-	-	441.635.360,00	441.635.360
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	441.635.360,00	441.635.360
JUMLAH ASET	2.350.176.226.619,97	2.421.276.774.265,20	2.405.443.694.527,35	2.461.257.563.078,41	2.483.706.571.493
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.486.800,00	-	7.237.333,00	-	-
Utang Belanja	35.025.162.001,00	66.019.151.658	41.990.780.404,00	104.380.307.001,00	90.585.939.237
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.678.111.640,48		16.228.936.187,00		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	40.704.760.441,48	66.019.151.658,00	58.226.953.924,00	104.380.307.001,00	90.585.939.237
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					-
Utang Pemerintah Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	40.704.760.441,48	66.019.151.658,00	58.226.953.924,00	104.380.307.001,00	90.585.939.237
JUMLAH EKUITAS AWAL	2.309.471.466.178,49	2.355.257.622.607	2.347.216.740.320,00	2.356.877.256.079,00	2.393.120.632.260
JUMLAH EKUITAS	2.309.471.466.178,49	2.355.257.622.607	2.347.216.740.320,00	2.356.877.256.079,00	2.393.120.632.260
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.350.176.226.619,97	2.421.276.774.265,20	2.405.443.694.244,00	2.461.257.563.080,00	2.483.706.571.497

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2024

2.2.2. Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.2.1. Proporsi Belanja Aparatur

Perhitungan proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran daerah (belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan) diperlukan untuk mengetahui seberapa besar belanja aparatur membebani keuangan daerah. Proporsi belanja pegawai dihitung dengan membandingkan total belanja pegawai dengan total pengeluaran daerah.

Dari hasil perhitungan, tampak bahwa proporsi belanja pegawai menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2020, proporsi belanja pegawai mencapai 46,68 persen, kemudian meningkat menjadi 51,61 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa total belanja pegawai bergerak lebih cepat ketimbang total pengeluaran daerah. Kecenderungan ini memberi tekanan kepada pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar karena adanya keharusan pemerintah daerah untuk mengupayakan penurunan proporsi belanja aparatur sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Bagi daerah yang masih melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan atau paling lambat tahun 2027.

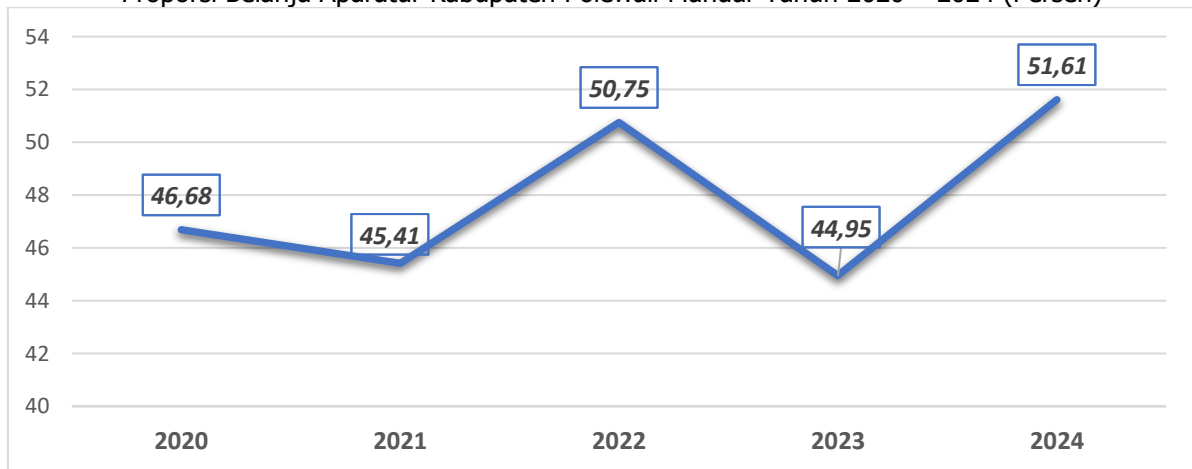
Tujuan utama menekan proporsi belanja aparatur tidak lain agar pemerintah daerah dapat memiliki anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan bagi upaya peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik, perbaikan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2.92
Analisis Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*
Total Belanja Pegawai	601.699,77	573.232,46	634.972,03	586.271,38	695.112,46
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	1.288.903,03	1.262.334,61	1.251.139,71	1.304.358,70	1.346.749,02
Proporsi Belanja Aparatur (%)	46,68	45,41	50,75	44,95	51,61

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2025

Grafik 2.58
Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (Persen)



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2025

2.2.2.2. Defisit Riil

Defisit riil adalah selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perhitungan defisit riil dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keuangan daerah mengalami defisit dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit tersebut.

Tabel 2.93
Perkembangan Defisit Riil Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rp)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*
Pendapatan Daerah	1.510.698,72	1.517.057,26	1.408.560,49	1.516.764,29	1.567.811,25
Belanja Daerah	1.520.021,54	1.494.721,49	1.472.911,59	1.512.773,07	1.572.789,72
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Riil Daerah	(9.322,83)	22.335,76	(64.351,12)	3.991,22	(4.917,95)

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2025

Dari hasil perhitungan tampak bahwa defisit riil Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan tren menurun. Di tahun 2020, Kabupaten Polewali Mandar mengalami defisit riil sebesar Rp 9,32 miliar, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 64,35 miliar, dan kemudian pada tahun 2024 defisit riil sedikit menurun menjadi Rp 4,92 miliar. Mengingat bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan sehingga angka defisit riil persis sama dengan defisit APBD.

Meskipun APBD Kabupaten Polewali mengalami defisit riil yang relatif cukup besar, namun tidak menimbulkan masalah karena besarnya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA (i kecil). Se jauh ini, penerimaan pembiayaan masih mampu menutup defisit riil dan bahkan masih mencatat SiLPA (I besar) yang positif.

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

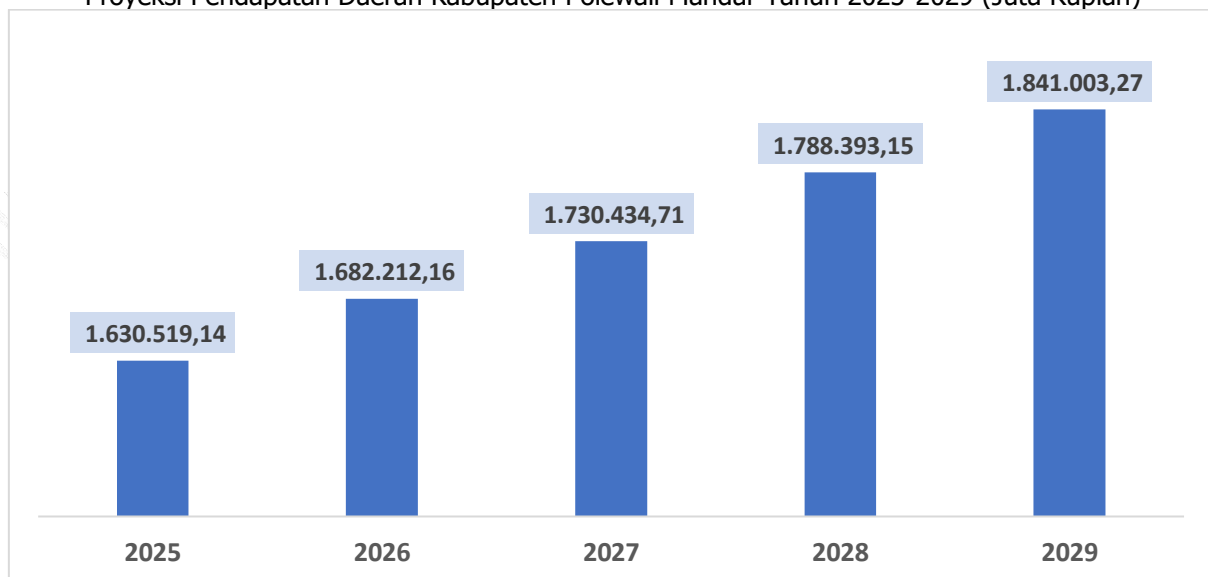
Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan. Beberapa pilihan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, antara lain:

1. Diversifikasi sumber pendapatan, dimana pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan utama, seperti pajak daerah atau retribusi, tetapi juga mencari peluang-peluang pendapatan baru, seperti pengembangan sektor pariwisata, investasi infrastruktur yang menguntungkan, atau pengembangan industri lokal.
2. Peningkatan kepatuhan pajak, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara warga dan pelaku usaha. Ini bisa melalui penyuluhan, penerapan teknologi untuk pemantauan dan pengawasan pajak yang lebih efektif, serta insentif bagi yang patuh.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini bisa melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengelolaan tambang yang ramah lingkungan, dan strategi lain yang memastikan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD tanpa merusak lingkungan.
4. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), dengan memberikan dukungan kepada UKM lokal dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas, pelatihan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing mereka. UKM yang kuat akan menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.
5. Kolaborasi dengan swasta, dengan mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek yang menguntungkan, seperti pengembangan properti, proyek infrastruktur, atau program kemitraan publik-swasta lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

6. Peningkatan tata kelola keuangan, dengan memperkuat tata kelola keuangan daerah untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara. Ini meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, penerapan sistem pengawasan yang kuat, dan peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
7. Pengembangan inovasi dan teknologi, dengan mendorong penggunaan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem informasi keuangan terintegrasi, aplikasi pembayaran pajak online, dan teknologi lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.
8. Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan PAD, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Berdasarkan data series keuangan daerah beberapa tahun terakhir dan memperhatikan kondisi perekonomian daerah, maka Pendapatan Daerah diproyeksikan bertumbuh rata-rata 3,08 persen per tahun selama lima tahun ke depan. Dengan menggunakan baseline 2024, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp 1.841,03 miliar di tahun 2029. Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan PAD yang diproyeksikan tumbuh 2,19 persen per tahun dan Pendapatan Transfer yang diproyeksikan tumbuh 3,26 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tumbuh lebih kuat di angka 9,17 persen per tahun sampai dengan tahun 2029.

Grafik 2.60
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Juta Rupiah)



Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Dengan proyeksi seperti itu, maka PAD diproyeksi akan mencapai Rp 320,31 miliar di tahun 2029. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksi akan mencapai Rp 1.519,98 miliar di tahun 2029. Peningkatan Pendapatan Transfer ini dipengaruhi oleh peningkatan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik.

Tabel 2.94
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah)

URAIAN	KONDISI AWAL 2025	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
PENDAPATAN	1.682.212,16	1.682.212,16	1.682.212,16	1.730.434,71	1.788.393,15	1.841.003,27	3,08%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	293.778,63	293.778,63	299.237,63	306.940,98	313.720,51	320.315,92	2,19%
Pendapatan Pajak Daerah	58.866,00	58.866,00	61.366,00	64.434,30	67.656,02	71.106,48	4,84%
Pendapatan Retribusi Daerah	226.011,63	226.011,63	228.961,63	233.540,86	237.043,97	240.125,54	1,53%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.150,00	4.150,00	4.155,00	4.196,55	4.230,12	4.272,42	0,73%
Lain-lain PAD Yang Sah	4.751,00	4.751,00	4.755,00	4.769,27	4.790,40	4.811,48	0,32%
PENDAPATAN TRANSFER	1.336.740,51	1.336.740,51	1.382.474,53	1.422.993,73	1.474.072,64	1.519.987,35	3,26%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.162.814,75	1.162.814,75	1.206.909,74	1.245.944,85	1.295.172,91	1.340.916,79	3,63%
Bagi Hasil Pajak	8.245,31	8.245,31	8.299,73	8.631,72	9.063,31	9.543,67	3,74%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	856.907,30	856.907,30	872.035,00	915.636,75	968.743,68	1.017.180,86	4,39%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	297.662,14	297.662,14	326.575,01	321.676,38	317.365,92	314.192,26	1,47%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	39.195,81	39.195,81	39.783,95	40.181,79	40.663,97	41.111,27	1,20%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.195,81	39.195,81	39.783,95	40.181,79	40.663,97	41.111,27	1,20%
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Desa	134.729,95	134.729,95	135.780,84	136.867,09	138.235,76	137.959,26	0,60
Dana Alokasi Desa	134.729,95	134.729,95	135.780,84	136.867,09	138.235,76	137.959,26	0,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	500,00	500,00	600,00	700,00	9,17%
Pendapatan Hibah	-	-	500,00	500,00	600,00	700,00	9,17%
Pendapatan Hibah dari pemerintah	-	-	500,00	500,00	600,00	700,00	9,17%
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-					

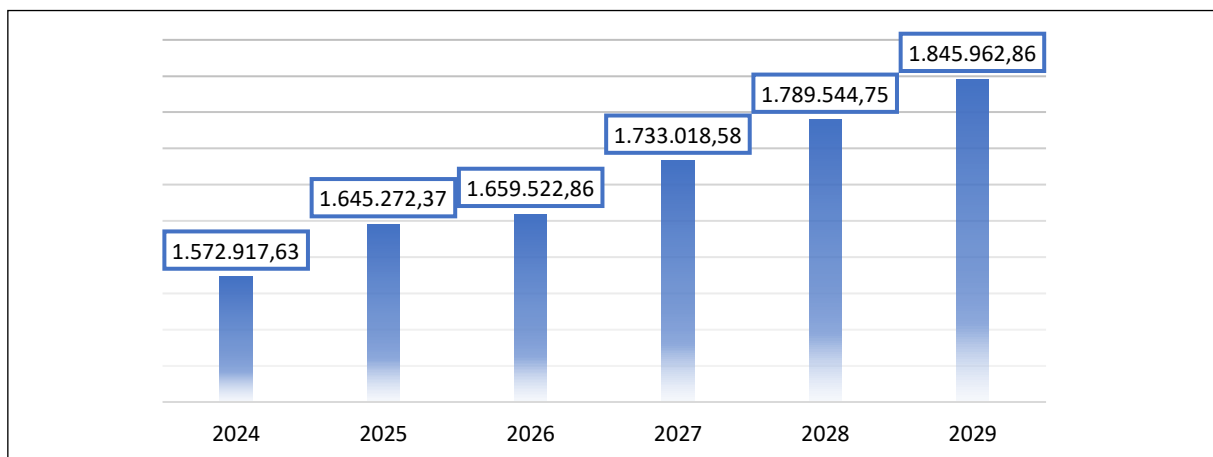
Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

2.2.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memproyeksikan Belanja Daerah berada di atas Pendapatan Daerah. Dengan kata lain, APBD Kabupaten Polewali Mandar diproyeksikan mengalami defisit. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap tahun akan terbentuk SiLPA yang akan digunakan untuk menutup defisit.

Dengan menggunakan baseline 2024, Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 3,26 persen per tahun. Pada tahun 2029, Belanja Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp 1.845,96 miliar pada tahun 2029. Hal ini didasarkan atas beberapa asumsi bahwa terjadi peningkatan pada semua komponen belanja daerah, yakni belanja operasi tumbuh sebesar 2,94 persen, belanja modal tumbuh sebesar 4,79 persen, dan belanja transfer tumbuh sebesar 3,88 persen per tahun sampai dengan tahun 2029.

Grafik 2.61
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Rupiah)



Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Dengan proyeksi seperti itu, maka Belanja Operasi diperkirakan akan mencapai Rp 1.431,50 miliar di tahun 2029. Sedangkan Belanja Modal diproyeksikan akan menjadi Rp 153,19 miliar di tahun 2029. Adapun Belanja Transfer diproyeksikan akan mencapai angka Rp 247,69 miliar di tahun 2029.

Tabel 2.95
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah)

URAIAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
BELANJA	1.572.917,63	1.645.272,37	1.659.522,86	1.733.018,58	1.789.544,75	1.845.962,86	3,26%
BELANJA OPERASI	1.238.893,99	1.254.889,28	1.277.696,35	1.330.048,17	1.390.309,57	1.431.506,67	2,94%
Belanja Pegawai	725.198,87	745.094,18	756.240,59	778.993,14	811.594,11	832.732,77	2,81%
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	421.112,22	461.377,55	471.291,94	478.249,43	500.713,06	515.529,98	4,17%
Belanja Hibah	92.372,90	48.067,55	49.788,57	71.820,16	77.520,86	83.221,55	3,03%
Belanja Bantuan Sosial	210	350	375,25	985,44	481,53	22,37	18,00%
BELANJA MODAL	124.884,14	125.946,12	148.935,31	153.708,96	133.293,87	153.197,54	4,79%
Belanja Tanah	-	520	527,8	535,6	543,4	551,2	-
Belanja Peralatan dan Mesin	50.705,95	43.250,62	58.899,38	34.703,78	24.185,28	55.920,97	16,26%
Belanja Bangunan dan Gedung	38.308,79	45.596,27	49.280,21	50.477,75	38.737,85	26.978,17	(4,82%)
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	33.675,58	34.778,50	38.300,18	67.795,24	67.511,42	65.311,95	17,35%
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.193,82	1.800,73	1.927,74	196,59	2.315,92	4.435,25	213,78%
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	-	-	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500,00	38.500,00	3.552,50	10.841,96	12.203,76	13.565,55	227,63%
Belanja Tidak Terduga	3.500,00	38.500,00	3.552,50	10.841,96	12.203,76	13.565,55	227,63%
BELANJA TRANSFER	205.639,50	225.936,97	229.338,70	238.419,49	253.737,55	247.693,10	3,88%
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.913,50	3.489,60	3.641,94	3.857,99	4.105,30	4.352,61	8,50%
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	202.726,00	222.447,37	225.696,76	234.561,50	249.632,25	243.340,49	3,80%

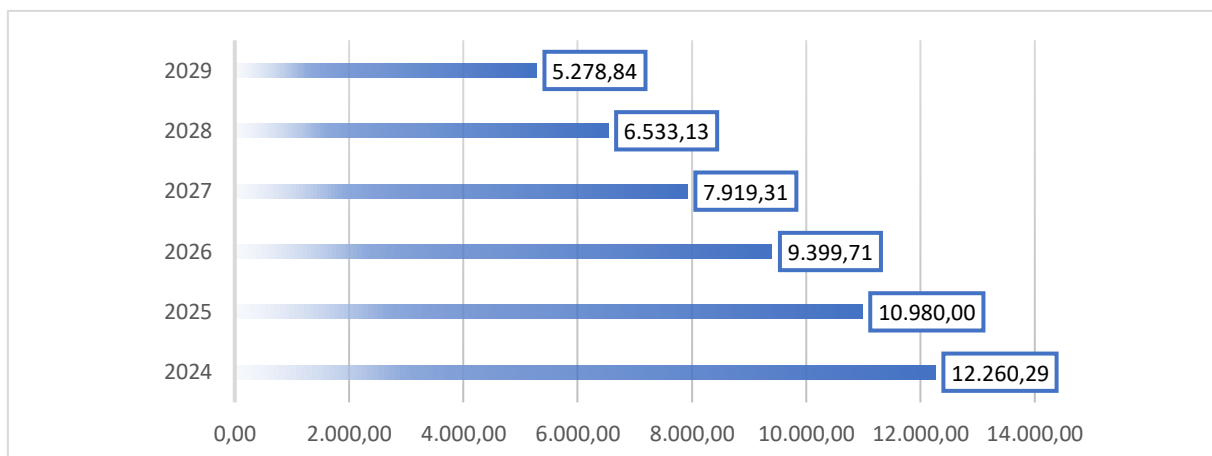
Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

2.2.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah, baik Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, sepenuhnya bergantung pada proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Sesuai dengan prinsip keseimbangan umum dalam pengelolaan keuangan daerah, maka proyeksi Pembiayaan Daerah sangat penting untuk memastikan bagaimana cara menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun ke depan diproyeksi menurun dengan rata-rata sebesar -15,46 persen. Pembiayaan Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja daerah. Pengeluaran Pembiayaan tetap diproyeksikan nihil hingga tahun 2029. Dengan demikian, Pembiayaan Netto diproyeksikan menurun hingga menjadi Rp 5,28 miliar pada tahun 2029.

Grafik 2.62
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Juta Rupiah)



Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar, 2024

Tabel 2.95
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah)

URAIAN	KONDISI AWAL 2024	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
SURPLUS/DEFISIT	-1.280,29	-1.580,29	-1.480,40	-1.386,18	-1.254,29	-1.168,83	
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.260,29	10.980,00	9.399,71	7.919,31	6.533,13	5.278,84	-15,46%
Penggunaan SILPA	12.260,29	10.980,00	9.399,71	7.919,31	6.533,13	5.278,84	-15,46%
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0	-
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	-
PEMBIAYAAN NETTO	12.260,29	10.980,00	9.399,71	7.919,31	6.533,13	5.278,84	-15,46%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	10.980,00	9.399,71	7.919,31	6.533,13	5.278,84	4.110,01	-17,80%

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2024

2.2.3.4. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi: a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Bupati. b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak SK Bupati. c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.
- 2) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 3) Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,41 persen. Di tahun 2020, pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp 964,54 miliar. Kemudian di tahun-tahun berikutnya meningkat secara konsisten hingga menembus angka Rp 1.203,41 miliar pada tahun 2029. Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama hanya bersumber dari belanja operasi daerah, tanpa memasukkan pengeluaran pembiayaan, sebab selama lima tahun terakhir Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki komponen pengeluaran pembiayaan daerah.

Selama lima tahun ke depan, proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Polewali Mandar diproyeksi mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 2,94 persen. Selain itu, juga diproyeksi Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki komponen pengeluaran pembiayaan. Di tahun 2025 pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama diperkirakan sebesar Rp 1.293,38 miliar. Angka ini diproyeksikan menjadi Rp 1.445,07 miliar pada tahun 2029.

Tabel 2.96

Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*	RATA-RATA PERTUMBUHAN
BELANJA OPERASI	964.538,68	1.044.751,97	1.077.248,17	1.078.299,09	1.203.410,66	5,78%
Belanja Pegawai	601.699,77	573.232,46	634.972,03	586.271,38	695.112,46	4,23%
Belanja Barang dan Jasa	340.807,45	431.240,13	398.280,40	422.890,44	410.568,80	5,54%
BELANJA TIDAK TERDUGA	21.459,17	2.844,02	2.124,93	1.479,74	1.674,75	-32,30%
Belanja Tidak Terduga	21.459,17	2.844,02	2.124,93	1.479,74	1.674,75	-32,30%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-		
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH	964.538,68	1.044.751,97	1.077.248,17	1.078.299,09	1.203.410,66	5,78%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2025

Tabel 2.97

Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah)

URAIAN	KONDISI AWAL 2025	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
BELANJA OPERASI	1.680.010,34	1.254.889,28	1.277.696,35	1.330.048,17	1.390.309,57	1.431.506,67	2,94%
Belanja Pegawai	825.438,58	745.094,18	756.240,59	778.993,14	811.594,11	832.732,77	2,81%
Belanja Barang dan Jasa	445.247,74	461.377,55	471.291,94	478.249,43	500.713,06	515.529,98	4,17%
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000,00	38.500,00	3.553,00	10.842,00	12.204,00	13.566,00	227,63%
Belanja Tidak Terduga	4.000,00	38.500,00	3.553,00	10.842,00	12.204,00	13.566,00	227,63%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.680.010,34	1.293.389,28	1.281.249,35	1.340.890,17	1.402.513,57	1.445.072,67	3,09%

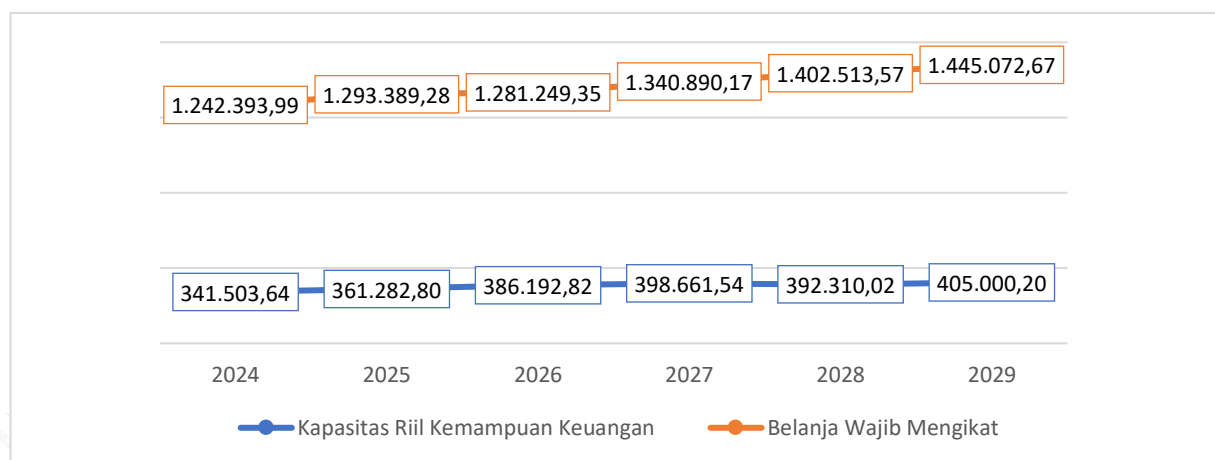
Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilihat dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah atau ruang fiskal (*fiscal space*). Kapasitas riil keuangan daerah menggambarkan fleksibilitas dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar kapasitas riil keuangan daerah yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belajanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun ke depan diproyeksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,51 persen per tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan daerah yang tumbuh rata-rata 3,27 persen per tahun. Belanja wajib mengikat juga diproyeksi meningkat secara rata-rata sebesar 3,09 persen per tahun. Di tahun 2025 kapasitas riil kemampuan daerah diperkirakan sebesar Rp 361,28 miliar dan diproyeksikan mengalami peningkatan hingga menjadi Rp 405,00 miliar di tahun 2029.

Grafik 2.63

Proyeksi Belanja Wajib Mengikat dan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah)



Sumber: Tim Penyusun, 2024

Tabel 2.98
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah)

URAIAN	KONDISI AWAL 2024	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pendapatan	1.571.637,34	1.643.692,08	1.658.042,46	1.731.632,40	1.788.290,46	1.844.794,03	3,27%
SiLPA	12.260,29	10.980,00	9.399,71	7.919,31	6.533,13	5.278,84	-15,46%
Total Penerimaan	1.583.897,63	1.654.672,08	1.667.442,17	1.739.551,71	1.794.823,59	1.850.072,87	3,16%
Dikurangi:							
Belanja Wajib Mengikat	1.242.393,99	1.293.389,28	1.281.249,35	1.340.890,17	1.402.513,57	1.445.072,67	3,09%
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	341.503,64	361.282,80	386.192,82	398.661,54	392.310,02	405.000,20	3,51%

Sumber: Tim Penyusun, 2024

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Penentuan permasalahan pembangunan juga dapat dilakukan berdasarkan komparasi capaian dengan daerah lainnya sebagai bagian dari instrumen pengukuran kinerja. Dengan instrumen ini, kinerja pemerintahan tidak sebatas dinilai dari pencapaian target indikator pembangunan namun lebih jauh dilakukan dengan membandingkannya dengan daerah lainnya atau pun rata-rata capaian di tingkat nasional.

Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan secara lengkap pohon masalah, mulai dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Selanjutnya, masalah pokok, masalah, dan akar masalah tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan daerah). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Pada Level Makro Daerah

1. Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam 1-2 dekade terakhir. Hal ini setidaknya tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan per kapita. Pada tahun 2024, menurut data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Polewali Mandar hanya sebesar Rp 35,45 juta per orang per tahun. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 42,72 juta per orang per tahun, dan jauh di bawah pendapatan per kapita Nasional sebesar Rp 78,60 juta per orang per tahun. Capaian ini juga hanya menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada posisi keempat dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, setelah Kabupaten Pasangkayu, Mamuju dan Majene. Bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu yang merupakan daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, pendapatan per kapita Kabupaten Polewali Mandar tidak sampai setengahnya.

Rendahnya tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Polewali Mandar tampaknya terkait dengan struktur perekonomian daerah yang tidak mengalami transformasi. Dalam 15 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh sektor pertanian dan tanpa perubahan berarti. Sementara sektor industri pengolahan juga mengalami stagnasi, baik dari segi kontribusinya terhadap PDRB maupun peningkatan nilai tambahnya.

Tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar terutama terkait dengan kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian, terbatasnya lapangan kerja yang memberi balas jasa ekonomi yang baik, kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi, tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.

Tabel 2.99
Pohon Masalah Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat	Tidak terjadinya perubahan (transformasi) struktur perekonomian daerah	- Kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian - Mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian
	Terbatasnya lapangan kerja yang memberikan balas jasa ekonomi yang baik	- Kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi - Tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah
	Rendahnya tingkat produktivitas penduduk	Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk

2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Polewali Mandar yang membutuhkan penyelesaian di masa depan. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar masih mencatat angka dua digit, yaitu 15,66% (2024). Angka ini relatif lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat (10,17%) dan Nasional (9,03%). Angka ini juga telah menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada urutan teratas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kecenderungan yang positif dalam rentang waktu yang panjang, namun dalam satu dekade terakhir, penurunan angka kemiskinan berjalan relatif lambat.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan sedikitnya oleh tiga faktor dominan, yaitu tidak adanya pekerjaan (menganggur) atau bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak memberi balas jasa ekonomi (gaji atau upah) yang memadai, tidak adanya akses terhadap sumberdaya ekonomi, dan tidak adanya akses terhadap berbagai pelayanan publik yang diperlukan.

Munculnya tiga faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penduduk miskin, terbatasnya jangkauan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh rumah tangga dan penduduk miskin, kurangnya fasilitasi kepada penduduk miskin untuk memperoleh kredit mikro, dan terbatasnya penghantaran layanan publik dan sosial dasar kepada rumah tangga miskin.

Tabel 2.100
Pohon Masalah Masih Tingginya Angka Kemiskinan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih tingginya angka kemiskinan	Tidak adanya pekerjaan (menganggur) atau bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak memberi balas jasa ekonomi (gaji atau upah) yang memadai	Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penduduk miskin
	Tidak adanya akses terhadap sumberdaya ekonomi	Kurangnya fasilitasi kepada penduduk miskin untuk memperoleh kredit mikro
	Tidak adanya akses terhadap berbagai pelayanan publik yang diperlukan	- Terbatasnya jangkauan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh rumah tangga dan penduduk miskin - Terbatasnya penghantaran layanan publik dan sosial dasar kepada rumah tangga miskin

3. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Permasalahan utama berikutnya yang dihadapi oleh Kabupaten Polewali Mandar adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hal ini tampak pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih menunjukkan angka yang relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Menurut data BPS, IPM Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 sebesar 69,88. Dengan menggunakan kriteria *United Nation Development Program* (UNDP), IPM Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori sedang ($60 < \text{IPM} < 70$). Angka ini sedikit lebih rendah dari IPM Provinsi Sulawesi Barat (70,46) dan berada jauh di bawah angka Nasional (75,02). Capaian ini juga hanya menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada urutan keempat dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, setelah Kabupaten Majene, Mamuju, dan Pasangkayu.

Rendahnya IPM Kabupaten Polewali Mandar terutama oleh rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2024, Kabupaten Polewali Mandar hanya mencatat angka RLS sebesar 7,72 tahun, berada di bawah angka RLS Provinsi Sulawesi Barat (8,15 tahun) dan Nasional (8,85 tahun). Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, posisi RLS Kabupaten Polewali Mandar adalah yang terendah. Capaian ini juga masih jauh berada di bawah target RLS minimum pemerintah, yaitu sembilan tahun sesuai dengan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun.

Selanjutnya, penyebab rendahnya RLS di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain, masih tingginya angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan, rendahnya akses penduduk terhadap pendidikan tinggi, belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan menengah atas, rendahnya akses penduduk miskin terhadap layanan pendidikan, dan masih rendahnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan.

Tabel 2.101
Pohon Masalah Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

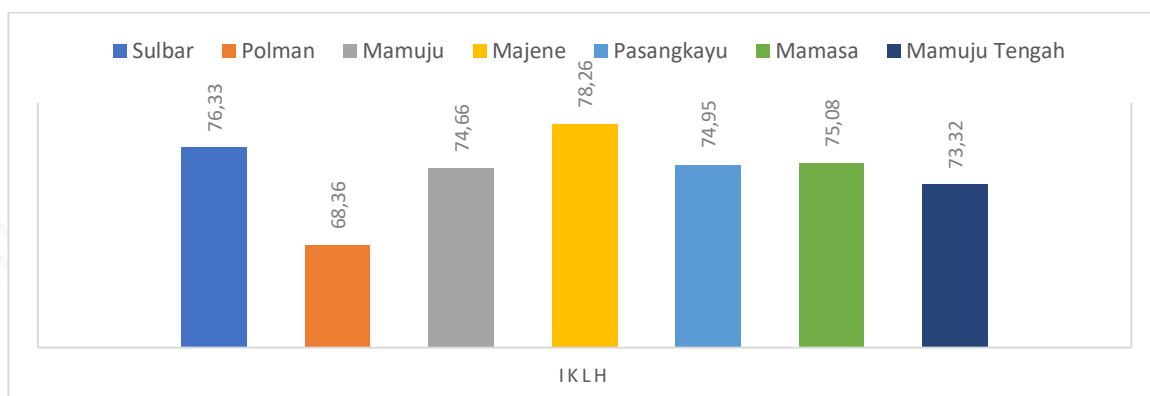
MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah	- Masih tingginya angka putus sekolah pada

		semua jenjang pendidikan - Rendahnya akses penduduk terhadap pendidikan tinggi - Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan menengah atas
--	--	---

4. Belum Berkualitasnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Belum berkualitasnya pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar. Indikasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum berkualitas tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka 68,36 yang merupakan angka terendah dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.64
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup se Sulawesi Barat



Rendahnya IKLH Kabupaten Polewali Mandar dikontribusi oleh rendahnya Indeks Kualitas Lahan. Dari tiga indeks komposit pembentuk IKLH, Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan skor terendah yaitu 49,80, sementara Indeks kualitas air nilainya 55,91 dan Indeks kualitas udara nilainya 89,96. Rendahnya IKL di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan antara lain oleh pembukaan lahan (*deforestasi*) dan alih

fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan dan menurunnya ruang terbuka hijau.

Tabel 2.102
Pohon Masalah Belum Berkualitasnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum berkualitasnya pengelolaan lingkungan hidup	Rendahnya indeks kualitas lahan	- Pembukaan lahan (deforestasi) yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan - Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan menurunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan lainnya yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar adalah tata kelola pemerintahan belum berada pada tingkat yang optimal. Berbagai indikator yang terkait dengan tata kelola pemerintahan belum menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada level yang tinggi. Sebutlah misalnya, Indeks Reformasi Birokrasi masih berada pada angka 71,36 dari skala 0 s/d 100. Begitu pula Indeks Inovasi Daerah masih mencatat angka 45,32 dari skala 0 s/d 100 untuk tahun 2024. Sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 masih berada di angka 3,88 dari skala 0 s/d 5. Adapun Indeks Pelayanan Publik masih mencatat angka 3,92 dari skala 0 s/d 5 untuk tahun 2024.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh belum memadainya kualitas sumberdaya manusia aparatur, belum optimalnya dukungan kelembagaan pemerintahan, belum berkembangnya budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah, belum diterapkan *merit system* dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah.

Tabel 2.103
Pohon Masalah Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik - Belum optimalnya penyelenggaraan dan penguatan sistem inovasi daerah - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	- Belum memadainya kualitas sumberdaya aparatur - Belum optimalnya dukungan kelembagaan pemerintahan - Belum diterapkannya <i>merit system</i> - Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah

2.3.1.2 Permasalahan Level Urusan Pemerintahan

Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan daerah), diidentifikasi sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik (Pada tahun 2024, capaian sarana toilet: 2,82% (PAUD), jumlah laboratorium komputer: 53 ruangan (SD), dan 47 ruangan (SMP);
- 2) Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) (Pada tahun 2024, ATS Usia 7-12 tahun: 1.340 anak, usia 13-15 tahun: 1.813 anak, dan usia 16-18 tahun: 2.905 orang);
- 3) Belum optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan (Pada tahun 2024, guru yang bersertifikat: 67,84% (SD) dan 51,86% (SMP);

- 4) Belum optimalnya capaian literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar (Pada tahun 2024, tingkat literasi: 48,03% (SD) dan 43,86% SMP), tingkat numerasi: 29,03% atau kategori sedang (SD) dan 38,03% atau kategori sedang (SMP).

2. Kesehatan

- 1) Masih tingginya angka prevalensi stunting (28,09% pada tahun 2023);
- 2) Jumlah angka kematian ibu yang masih relatif tinggi (190 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024);
- 3) Capaian Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif masih rendah (57,60% pada tahun 2024);
- 4) Jumlah kasus penyakit endemik dan penyakit menular yang belum terlayani masih cukup tinggi (Pada tahun 2024, Hipertensi: 6.076 jiwa, ODGJ: 117 jiwa, dan HIV: 513 jiwa);
- 5) Cakupan layanan kelompok lanjut usia dengan screening kesehatan lengkap masih rendah (18.252 jiwa pada tahun 2024).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rendahnya kondisi mantap jalan kabupaten (52,43% pada tahun 2024);
- 2) Belum optimalnya akses sanitasi layak (95,56% pada tahun 2024);
- 3) Belum optimalnya akses air minum layak (88,24% pada tahun 2024);
- 4) Belum memadainya kondisi sarana dan prasarana bangunan pemerintahan (26,92% tidak laik fungsi pada tahun 2024);
- 5) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilegalisasi;
- 6) Masih rendahnya kinerja pengelolaan sumber daya air (Indeks pengelolaan sumber daya air: 21,39% pada tahun 2024);
- 7) Seringnya terjadi banjir di kawasan perkotaan akibat kondisi sistem drainase perkotaan yang buruk (50,17% drainase kawasan perkotaan dalam kondisi rusak pada tahun 2024);
- 8) Banyaknya sungai yang mengalami pendangkalan yang menyebabkan mudahnya air sungai meluap.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni (17.908 rumah pada tahun 2024);
- 2) Masih terdapat kawasan kumuh (160,54 hektar pada tahun 2024);
- 3) Masih banyaknya kawasan perumahan belum mendapatkan bantuan prasarana dan sarana utilitas (PSU).

5. Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Tingginya perbandingan rasio jumlah penduduk dan jumlah polisi pamong praja;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran dan penanganan penanggulangan bencana kebakaran;
- 3) Tidak adanya pembaruan dokumen kebencanaan (1 dokumen KRB, 1 dokumen RPB dan 3 dokumen Renkon).

6. Sosial

- 1) Belum maksimalnya masyarakat miskin yang menerima cakupan penjaminan sosial (cakupan 91,74% pada tahun 2024);
- 2) Belum optimalnya pelayanan dalam penanganan PMKS (persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya 13,22% pada tahun 2024);
- 3) Tidak adanya program khusus yang menyasar PMKS terkategori produktif khususnya di wilayah terpencil (Capaian 0% pada tahun 2024);
- 4) Masih terjadinya *exclusion error* dan *inclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial;
- 5) Belum tersedianya data valid jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan sosial.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Pertanian

- 1) Masih banyaknya aset tanah pemda yang belum bersertifikat (46,86% pada tahun 2024);
- 2) Belum adanya dokumen rencana indikatif pengadaan tanah;
- 3) Belum adanya dokumen rencana redistribusi tanah.

2. Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup (IKLH: 68,36 atau kategori sedang pada tahun 2024);
- 2) Belum maksimalnya penanganan dan pengelolaan persampahan (Cakupan layanan dan timbulan sampah yang tertangani 13,71% pada tahun 2024);
- 3) Belum optimalnya fungsi Tempat Penampungan Sementara Sampah Berbasis Masyarakat/ TPS3R (Pengurangan sampah ke TPA melalui pengelolaan di TPS3R masih 0% pada tahun 2024).

3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Belum maksimalnya perekaman data biometrik dan data kependudukan untuk pembuatan atau pembaruan e-KTP (93,98 % pada tahun 2024);
- 2) Belum maksimalnya kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun (96,94% pada tahun 2024);
- 3) Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil khususnya dari unsur waktu layanan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan (Berdasarkan hasil IKM per urusan pada tahun 2024).

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih rendahnya desa yang berstatus desa mandiri (33 desa pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya bumdes yang bebadan hukum (51,02% pada tahun 2024);
- 3) Belum ada Bumdes yang berstatus Maju dan Mandiri;
- 4) Masih terdapat desa yang berstatus tertinggal (8 desa pada tahun 2024).

5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana (Jumlah peserta KB aktif sebanyak 36.402 pada tahun 2024);
- 2) Masih tingginya pernikahan anak usia dini (50 perkara pada tahun 2024);
- 3) Belum memadainya jumlah SDM penyuluh KB (106 penyuluh pada tahun 2024).

6. Perhubungan

- 1) Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.

7. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum maksimalnya cakupan layanan telekomunikasi dan informatika (20,4% desa/kelurahan *blank spot* pada tahun 2024);
- 2) Belum optimalnya layanan aspirasi dan pengaduan (Sebanyak 18 aduan yang terlapor berdasarkan reporting pengaduan melalui SP4N LAPOR pada tahun 2024).

8. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 1) Masih rendahnya daya saing produk usaha kecil dan menengah (Daya saing produk: 0,02% pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya cakupan pembinaan usaha mikro dan kecil (Cakupan Pembinaan UMKM: 0,55% pada tahun 2024);
- 3) Belum Berkembangnya koperasi (Koperasi aktif: 34,47% pada tahun 2024).

9. Penanaman Modal

- 1) Kurangnya data dan informasi potensi daerah yang dibutuhkan pelaku usaha (Belum tersusunnya dokumen IPRO sampai tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya jumlah investor (Total realisasi investor hanya 35,33 % atau 562 Investor pada tahun 2024).

10. Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Rendahnya peran aktif pemuda dalam pembangunan (Total pemuda pelopor: 40 orang pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya atlet olahraga yang berpartisipasi dalam pelatnas (Hanya 1 atlet yang berpartisipasi dalam pelatnas pada tahun 2024).

11. Statistik

- 1) Belum optimalnya ketersediaan Satu Data Indonesia (SDI) dan tata kelola data sektoral (Hanya 60% ketersediaan data dari 1.800 elemen data pada tahun 2024).

12. Persandian

- 1) Belum optimalnya penerapan keamanan informasi dan persandian daerah (Indeks Keamanan Informasi: 37 pada tahun 2024);

- 2) Belum optimalnya kebijakan sistem manajemen keamanan informasi (Terdapat 5 kecamatan yang terkendala dalam penerapan sistem surat tanda tangan elektronik/TTE sampai tahun 2024).

13. Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;
- 2) Belum optimalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (Capaian IPK 32,26 atau kategori sedang pada tahun 2024).

14. Perpustakaan

- 1) Masih rendahnya pertumbuhan pengguna layanan perpustakaan (Jumlah pengunjung 11.559 orang pada tahun 2024);
- 2) Belum optimalnya indeks pembangunan literasi masyarakat (Capaian 43,50 pada tahun 2024).

15. Kearsipan

- 1) Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip (Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip sebanyak 5 orang pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan di Perangkat daerah (Pada tahun 2024, perangkat daerah yang aktif melaporkan kondisi arsipnya: 27,3% OPD).

16. Tenaga Kerja

- 1) Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terserap (22,91% pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja (Tamatan SMA 66,18% pada tahun 2024).

17. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (42 kasus KDRT pada tahun 2024);
- 2) Masih adanya anak yang berhadapan dengan hukum (58 kasus pada tahun 2024);

- 3) Belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak (predikat PRATAMA pada tahun 2023).

18. Pangan

- 1) Masih tingginya wilayah yang berstatus waspada gizi dan pangan (12 kecamatan pada tahun 2024).

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum maksimalnya produksi perikanan tangkap (Produksi perikanan tangkap 21.608,49 ton pada tahun 2024);
- 2) Belum maksimalnya produksi perikanan budidaya (Produksi perikanan budidaya 16.454,12 ton pada tahun 2024).

2. Pariwisata

- 1) Belum berkembangnya kegiatan pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Hanya ada 3 event yang terselenggarakan pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata (Tidak adanya PAD dari sektor pariwisata yang tercapai sejak 3 tahun terakhir).

3. Pertanian

- 1) Masih rendahnya jumlah produksi tanaman pangan (Pada tahun 2024, padi: 231.097,04 ton, jagung: 16.440,65 ton, kedele: 172,83 ton);
- 2) Masih rendahnya jumlah produksi tanaman perkebunan (Pada tahun 2024, kakao: 36.579,04 ton, kelapa: 20.099,12 ton, kopi: 833,19 ton);
- 3) Masih rendahnya ketersediaan prasarana produksi pertanian (18% pada tahun 2024).

4. Perdagangan

- 1) Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pasar (Ketersediaan sarana pasar 18% dari total 13 pasar induk pada tahun 2024).

5. Perindustrian

- 1) Belum optimalnya kapasitas pelaku industri dalam pengembangan industri (2% pada tahun 2024).

6. Transmigrasi

- 1) Belum optimalnya upaya memandirikan transmigran yang ditempatkan di daerah (100 KK pada tahun 2024);
- 2) Jumlah penempatan transmigran tidak mengalami perubahan setiap tahunnya (Terdapat 4 Satuan Kawasan Pemukiman sampai tahun 2024:).

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- 1) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi umum;
- 2) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi perekonomian dan pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

- 1) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi umum sekretariat DPRD;
- 2) Masih belum efektifnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah/Renja PD secara tepat waktu (Rata-rata capaian sebesar 66,67% dalam lima tahun terakhir);
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. (Indikator tujuan dan sasaran pembangunan (kinerja *impact*) yang mencapai target dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 73,33%);

- 3) Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil Musrenbang (Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD di bawah 20% dalam lima tahun terakhir);
- 4) Belum berkembangnya mekanisme terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

2. Keuangan

- 1) Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah (Capaian menurun dari WTP menjadi WDP pada tahun 2024);
- 2) Belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah/PAD (Realisasi PAD Tahun 2024 hanya 75,09 % dari target).

3. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

- 1) Masih kurangnya jumlah ASN dalam memenuhi kebutuhan proporsional daerah (Kekurangan formasi tenaga kesehatan: 164 Formasi, tenaga guru: 389 formasi, dan tenaga teknis: 311 Formasi);
- 2) Penerapan sistem merit belum dilakukan secara optimal (verifikasi hasil penilaian mandiri oleh KASN tahun 2023 berada pada kategori buruk);
- 3) Masih rendahnya tingkat kepatuhan ASN dalam melaporkan kinerjanya secara mandiri (hanya 76,9% pegawai yang memasukkan nilai SKP 2024);
- 4) Masih rendahnya keikutsertaan pejabat struktural dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Eselon II 50%, Eselon III 33,37%, dan Eselon IV 24,93% sampai tahun 2024);
- 5) Belum maksimalnya kinerja penempatan ASN dalam pengembangan karier (6,11% formasi jabatan struktural yang masih lowong pada tahun 2024).

4. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Belum berkembangnya ekosistem riset dan inovasi daerah (Indeks Inovasi Daerah: 45,32 pada tahun 2024);
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan;
- 3) Sangat terbatasnya jumlah peneliti, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Jumlah fungsional peneliti: 1 orang sampai dengan tahun 2024).

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

- 1) Masih rendahnya nilai/indeks hasil penilaian *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK (Sebesar 51,37% atau kategori merah pada tahun 2024);
- 2) Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh APIP dan Pengawas Eksternal/ BPK (Pada tahun 2024, sebesar 67,53% dan 60,36%);
- 3) Belum maksimalnya kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien (Nilai kapabilitas APIP masih berada di level 3 pada tahun 2024).

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

- 1) Kurang efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) Kurang optimalnya pelayanan publik pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 3) Kurang optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan di desa dan kelurahan;
- 4) Kurang efektifnya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pemerintahan;
- 5) Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan di desa dan kelurahan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Masih rendahnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
- 2) Masih rendahnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 4) Belum efektifnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 5) Masih rendahnya kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu Strategis diklasifikasi atas tiga level, yaitu isu strategis internasional/global, isu strategis nasional, dan isu strategis regional/lokal.

2.3.2.1. Isu Internasional/Global

1. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai oleh peningkatan suhu rata-rata bumi, yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan berbagai praktik pertanian yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄). Sejak era industri, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah meningkat secara drastis, menyebabkan efek rumah kaca yang mengurung panas di dalam atmosfer dan mengakibatkan pemanasan global. Dampak jangka panjang dari pemanasan ini sangat luas dan mencakup perubahan pola cuaca yang ekstrem, seperti gelombang panas yang lebih intens, badai, serta musim dingin yang lebih singkat. Selain itu, suhu yang lebih tinggi juga menyebabkan es di Kutub Utara dan Selatan, serta gletser di pegunungan mulai mencair, yang berkontribusi pada naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut akan mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan mengakibatkan banjir, erosi pantai, dan intrusi air laut ke dalam sumber air tawar.

Perubahan iklim juga akan berdampak buruk pada keanekaragaman hayati. Banyak spesies flora dan fauna tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu dan habitat mereka, sehingga meningkatkan risiko kepunahan. Ekosistem yang terganggu, seperti terumbu karang yang memutih akibat pemanasan laut, kehilangan kemampuan untuk mendukung kehidupan laut yang kaya dan beragam. Di sisi lain, perubahan iklim mempengaruhi sektor pertanian dengan merubah pola curah hujan dan memperpanjang periode kekeringan, yang pada

akhirnya mengancam ketahanan pangan global. Petani di banyak negara harus beradaptasi dengan musim tanam yang berubah dan peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Sebagai sebuah negara kepulauan, perubahan iklim membawa dampak signifikan di Indonesia yang lebih rentan terhadap berbagai bencana alam. Peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca telah menyebabkan lebih seringnya terjadi bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai. Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar rentan terhadap naiknya permukaan laut. Peningkatan permukaan laut dapat menyebabkan banjir di daerah pesisir, mengancam pemukiman, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat. Kemudian, erosi pantai yang semakin parah juga menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Polewali Mandar yang akan merusak garis pantai dan mengakibatkan kehilangan tanah yang signifikan. Infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan bangunan di sepanjang pesisir dapat rusak atau hancur akibat abrasi dan banjir yang berulang. Selain itu, lahan pertanian di daerah pesisir bisa terkena intrusi air laut, mengurangi kesuburan tanah dan mempengaruhi hasil pertanian. Adaptasi dan mitigasi yang efektif, seperti pembangunan tanggul, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, dan restorasi ekosistem mangrove, sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk perubahan iklim di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan isu strategis global yang telah berdampak signifikan dalam memudahkan aktivitas harian masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya teknologi digital seperti smartphone dan internet, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan orang untuk berinteraksi secara real-time tanpa batasan jarak. Aplikasi mobile mempermudah akses ke berbagai layanan, seperti perbankan, belanja, dan transportasi, yang sebelumnya memerlukan waktu dan usaha lebih banyak. Di dunia kerja, teknologi seperti email, aplikasi kolaborasi, dan video konferensi meningkatkan produktivitas para pekerja dan memungkinkan mereka kerja jarak jauh yang semakin relevan di era digital ini.

Perkembangan teknologi memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi Kabupaten Polewali Mandar dalam berbagai sektor, salah satunya pada sektor pendidikan. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan merata ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi. Dengan adanya internet dan perangkat teknologi, siswa di Polewali Mandar dapat mengakses materi pembelajaran online, mengikuti kursus daring, dan berpartisipasi dalam program pendidikan jarak jauh yang sangat penting terutama bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan konvensional. Platform pembelajaran digital seperti e-learning dan aplikasi pendidikan dapat menyediakan konten interaktif yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, teknologi juga memungkinkan guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara daring, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kompetensi dan metode pengajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, sekolah-sekolah di Polewali Mandar dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif, membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan isu strategis global yang dirancang untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi dunia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs mengakui bahwa tindakan dalam satu area akan mempengaruhi hasil di area lain dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu strategis ini memerlukan kerja sama global, komitmen politik yang kuat, serta partisipasi aktif dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SDGs, negara-negara di seluruh dunia berusaha untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak merusak lingkungan dan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-

kelompok yang paling rentan. SDGs berfungsi sebagai peta jalan untuk tindakan kolektif yang bertujuan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan populasi besar dan keanekaragaman budaya serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki tantangan dan peluang unik dalam mencapai 17 tujuan SDGs. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai kebijakan serta program yang mendukung pencapaian target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik, dan perlindungan lingkungan. Inisiatif lokal, kemitraan dengan sektor swasta, dan dukungan dari masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam memajukan agenda SDGs di Indonesia. Dengan fokus pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kesetaraan, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.2.2. Isu Nasional

1. Hilirisasi Industri

Hilirisasi industri menjadi isu strategis nasional karena berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat perekonomian nasional. Proses hilirisasi melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, yang dapat meningkatkan nilai ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kemampuan manufaktur dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi defisit perdagangan dan meningkatkan daya saing global. Hilirisasi juga berpotensi mendorong perkembangan industri-industri pendukung, inovasi teknologi, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung hilirisasi, seperti insentif

investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kebutuhan akan teknologi canggih, modal besar, dan manajemen lingkungan yang baik. Dengan mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi hilirisasi, Indonesia dapat memperkuat struktur ekonominya dan mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hilirisasi industri di Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah seperti kelapa, kakao, dan kopi. Melalui proses hilirisasi, bahan mentah ini dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti minyak kelapa, produk cokelat, dan kopi olahan yang siap ekspor. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai jual komoditas tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong perkembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta perlu menyediakan infrastruktur yang memadai, akses ke teknologi modern, dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk mendukung hilirisasi. Selain itu, kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan industri hilir juga diperlukan untuk menarik investor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Dengan demikian, hilirisasi industri di Polewali Mandar dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.

2. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif (16-65 tahun) dalam suatu negara mengalami peningkatan signifikan, yang diiringi oleh penurunan angka kelahiran dan kematian. Proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2045 tepat saat negara ini mencapai usia 100 tahun. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif,

negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di berbagai sektor. Penurunan angka kelahiran dan kematian juga berarti lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang akan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, memanfaatkan bonus demografi secara optimal dapat menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kelahiran yang relatif tinggi dan migrasi masuk dari daerah sekitarnya. Akibatnya, tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik meningkat, yang menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga membuka peluang untuk memperluas basis ekonomi daerah, dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih besar dan beragam dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data demografi dan analisis terkini, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan tetap positif, didorong oleh tingkat kelahiran yang stabil dan migrasi masuk dari daerah sekitarnya.

Bonus demografi dapat menjadi pedang bermata dua bagi Kabupaten Polewali Mandar. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat membawa keuntungan besar bagi daerah ini. Potensi tenaga kerja yang melimpah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Selain itu, dengan perencanaan yang tepat, pemerintah daerah bisa memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, di sisi lain, bonus demografi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk memerlukan penyesuaian dalam berbagai

aspek, termasuk kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang memadai, perumahan, dan fasilitas umum. Jika pemerintah daerah gagal menyediakan hal-hal tersebut, bonus demografi dapat berujung pada meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan tekanan terhadap layanan publik. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang matang diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, termasuk pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi bonus demografi yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk ini. Dengan demikian, proyeksi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar tanpa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang serius.

3. Pemindahan Ibukota Negara (IKN)

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur dengan luas area 256.142 hektar. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berlokasi di Kecamatan Sepaku dengan luasan 6.671 hektar, yang sebagian berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lainnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Regulasi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022. Tahap awal pembangunan IKN direncanakan berlangsung pada tahun 2022-2024.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Indonesia, yang diberi nama Nusantara, merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya berlokasi di Jakarta ke Kalimantan Timur. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan, sehingga menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Proyek ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh

wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Dengan konsep kota pintar dan berkelanjutan, IKN Nusantara diharapkan menjadi kota modern yang mampu menarik investasi, menyediakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kawasan hutan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

Sebagai pulau terdekat dengan IKN di Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Kabupaten Polewali Mandar dapat berperan sebagai daerah mitra yang nantinya bisa mendukung prasarana pembangunan IKN, salah satunya dengan men-supply kebutuhan pangan dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Dari sektor pertanian, Polewali Mandar bisa menyediakan berbagai komoditas pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan, serta produk peternakan. Selain itu, sektor perikanan di Polewali Mandar juga dapat menyediakan hasil laut yang segar dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di IKN. Potensi ini tidak hanya akan membantu kelancaran pembangunan IKN, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Polewali Mandar melalui peningkatan permintaan dan peluang kerja.

2.3.2.3. Isu Regional/Lokal

1. Konektivitas Wilayah

Secara geografis, posisi Kabupaten Polewali Mandar cukup strategis karena berada di jalur Trans-Sulawesi, yang menghubungkan antara Kota Makassar di bagian selatan dengan Kota Manado di bagian utara. Jalur Trans-Sulawesi ini merupakan jaringan transportasi utama untuk mobilitas orang dan barang antar provinsi di Pulau Sulawesi. Selain itu, untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi, pemerintah pusat telah memulai pembangunan jaringan kereta api secara bertahap. Pembangunan jaringan kereta api tahap pertama dengan rute Kota Makassar – Kota Parepare sudah hampir rampung. Ke depan, pembangunan jaringan kereta api akan menjangkau seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Tentu saja, pembangunan jaringan kereta api akan memperlancar perpindahan manusia dan barang dari suatu provinsi ke provinsi lain dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu tempuh yang lebih

cepat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Kesemua situasi ini diharapkan akan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah Kabupaten Polewali Mandar di masa depan.

2. Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan

Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan untuk menunjang ekonomi Ibukota Nusantara (IKN). Penetapan ini mudah dipahami mengingat sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan, merupakan sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan iklim tropis yang ideal, menjadikan daerah ini sebagai penghasil atau produsen berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, kelapa, dan kopi.

Aktivitas perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Peran strategis Provinsi Sulawesi Barat dalam subsektor perkebunan menjadikannya wilayah yang sangat penting dalam rantai pasok komoditas perkebunan di Indonesia. Selain itu, melimpahnya komoditas perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi menjadikan wilayah ini sebagai pusat pengolahan hasil perkebunan.

Salah satu komoditas perkebunan utama yang dihasilkan di Kabupaten Polewali Mandar adalah Kakao. Pada tahun 2023, Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan 36,563 ton, atau setengah dari total produksi Kakao di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar juga mencatat tingkat produktivitas Kakao paling tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 878 Kg/Ha, jauh di atas Kabupaten Mamasa yang hanya 550 Kg/Ha. Saat ini, juga sudah tumbuh beberapa industri pengolahan Kakao, meski dengan skala ekonomi yang masih relatif kecil. Oleh karena itu, penetapan Provinsi Sulawesi Barat sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan diharapkan dapat memberi dampak positif bagi tumbuh-kembangnya industri pengolahan komoditas perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar.

2.3.2.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena memiliki dampak luas dan signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Isu-isu ini bersifat kompleks yang mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Pengidentifikasian isu strategis daerah menjadi salah satu langkah krusial dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah agar arah pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif.

Identifikasi isu-isu strategis berperan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan suatu wilayah. Penyusunan isu strategis daerah dilakukan dengan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis di tingkat internasional/global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. Perumusan isu strategis daerah juga turut memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar guna menyusun langkah-langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perumusan isu strategis daerah dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.104
Kesimpulan Isu Strategis Daerah Kabupaten Polewali Mandar

NO.	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU STRATEGIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1.	Melimpahnya komoditas unggulan sektor pertanian : - Sub sektor tanaman pangan : padi, jagung, kedelai, dan lain-lain - Sub sektor tanaman hortikultura : durian, bawang merah, cabai, dan lain-lain - Sub sektor tanaman perkebunan : kakao, kopi, kelapa, dan lain-lain	Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat	Rendahnya infrastruktur dasar menghambat pengembangan manusia dan ekosistem	Pelaksanaan agenda TPB (Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	- Hilirisasi industri - Pemindahan IKN	Sentra pengolahan komoditas perkebunan	Hilirisasi Komoditas Unggulan
2.	Melimpahnya komoditas unggulan sektor perikanan : - Perikanan tangkap : ikan cakalang, ikan teri, dan lain-lain - Perikanan budidaya : rumput laut, ikan bandeng, udang, dan lain-lain						
3.	Melimpahnya komoditas unggulan sektor peternakan : sapi, kambing, ayam						

...

4.	Besarnya kekayaan panorama alam pada berbagai wilayah, meliputi pantai, gunung, bukit, sungai, danau, serta flora dan fauna yang beragam						
5.	Pemberian bantuan sosial, seperti BLT, dan RTLH	Masih tingginya angka kemiskinan	- Rendahnya infrastruktur dasar menghambat pengembangan manusia dan ekosistem - Kurangnya perlindungan sosial dan layanan kesehatan meningkatkan risiko gizi buruk dan kematian ibu-anak serta memperburuk tata kelola lingkungan	Pelaksanaan agenda TPB Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	-	Konektivitas wilayah	- Kemiskinan - Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
6.	Perluasan cakupan perlindungan sosial jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan)						
7.	Perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)						
8.	Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan bantuan sarana prasarana kerja/ usaha bagi masyarakat miskin						
9.	Proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur kependudukan di Kabupaten Polewali Mandar	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	- Rendahnya infrastruktur dasar menghambat	Pelaksanaan agenda TPB (Tujuan 3 : Kehidupan	Bonus demografi	-	Daya Saing Sumber Daya Manusia

10.	Ketersediaan fasilitas pendidikan dasar (SD dan SMP) yang cukup merata di beberapa kecamatan		pengembangan manusia dan ekosistem	Sehat dan Sejahtera. Serta Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas)			
11.	Ketersediaan Puskesmas di setiap kecamatan, serta ketersediaan RSUD dengan sarana prasarana medis, dan layanan kesehatan yang semakin meningkat		- Kurangnya perlindungan sosial dan layanan kesehatan meningkatkan risiko gizi buruk dan kematian ibu-anak serta memperburuk tata kelola lingkungan				
12.	Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga di beberapa wilayah	Belum berkualitasnya pengelolaan lingkungan hidup	- Tingginya risiko bencana mencerminkan lemahnya mitigasi dan tata kelola lingkungan;	Perubahan iklim dan pemanasan global	-	Kebencanaan dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
13.	Memiliki kawasan hutan lindung yang masih cukup luas, yaitu mencapai 70.196,22 ha (atau 74,68% dari total luas hutan lindung) sebagai penyerap karbon alami serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah		- Lemahnya adaptasi iklim dan perlindungan jasa lingkungan mengancam				
14.	Pelaksanaan program bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce-</i>						

• • • •
• • • •
• • • •

	<i>Reuse-Recycle</i>) di berbagai wilayah, meskipun skalanya masih terbatas		keberlanjutan sumber daya air				
15.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah berpredikat baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	-	Kemajuan teknologi	-	-	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
16.	Peningkatan birokrasi yang berkualitas, tercermin dari capaian indeks reformasi birokrasi dengan kategori B atau predikat baik						
17.	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, tercermin dari nilai SAKIP dengan predikat B atau Baik						

• • • •
• • • •
• • • •

1. Hilirisasi Komoditas Unggulan

Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah transformasi ekonomi berbasis industrialisasi (hilirisasi) komoditas unggulan yang inklusif. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk daerah dan kelompok yang rentan. Hilirisasi yang inklusif juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, sehingga tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan berkelanjutan.

Dalam 15 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh sektor pertanian dan tanpa perubahan berarti. Sementara sektor industri pengolahan juga mengalami stagnasi, baik dari segi kontribusinya terhadap PDRB maupun peningkatan nilai tambahnya. Tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar terutama terkait dengan kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian, terbatasnya lapangan kerja yang memberi balas jasa ekonomi yang baik, kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi, tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.

Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kabupaten Polewali Mandar ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk

menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusifitas pembangunan.

2. Kemiskinan

Isu strategis kemiskinan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian utama. Ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian secara luas, cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum semua masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di daerah yang masih terkategori tertinggal. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan. Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, mengakibatkan tantangan terhadap perlindungan sosial masyarakat untuk pengurangan kemiskinan menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh serta komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Kabupaten Polewali Mandar. Perlindungan sosial adaptif perlu dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, bantuan sosial, program jaminan kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan akses infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan kerja, serta penguatan sektor ekonomi berbasis potensi unggulan. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan antar wilayah secara merata.

3. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.

Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu strategis daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Polewali Mandar terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai

dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja.

Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertanian secara luas. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kabupaten Polewali Mandar dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

5. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sebagai daerah yang ekonominya digerakan oleh sektor ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kabupaten Polewali Mandar hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai *net zero emissions* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor

kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, *agile*, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapan *e-governance* secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kabupaten Polewali Mandar

dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing.



**VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB

3

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

3.1.1 VISI

Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan/terwujud sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran terhadap cita-cita maupun cerminan terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai pembangunan Kabupaten Polewali Mandar ke arah yang lebih baik. Dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2019-2024, memperhatikan hasil analisis isu strategis daerah, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah :

VISI

**POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS
DAN MAJU BERLANDASKAN
NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA, DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN**



Rumusan visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar mencakup 5 (lima) pokok visi didalamnya yaitu Sehat, Cerdas, Maju, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, serta Berwawasan Lingkungan. Kelima pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD.

Adapun makna dari visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **SEHAT** dimaknakan sebagai suatu keadaan atau kondisi individu atau masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang sehat, yang ditandai dengan

tingginya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat guna terwujudnya kualitas hidup masyarakat lebih baik (*health for all*). Terciptanya kondisi tersebut karena meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan bermutu yang dijamin oleh pemerintah (*universal health coverage*), membaiknya ketersediaan dan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat atas kesehatan, serta terciptanya lingkungan kesehatan yang kondusif;

- **CERDAS** dimaknakan sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang terdidik, pintar, dan cerdas yang ditandai dengan tingginya produktivitas, kreatif dan inovatif, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas. Terciptanya kondisi ini karena meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan, meluasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatnya kualitas Pendidikan;
- **MAJU** dimaknakan sebagai kondisi daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami kemajuan pada berbagai aspek pembangunan, yang mencakup berkembangnya perekonomian daerah, meluasnya kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meratanya distribusi pendapatan, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*), membaiknya kesetaraan gender, meningkatnya keberdayaan dan kemandirian desa. Kondisi ini tercipta karena didukung oleh pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (*good governance and clean government*).
- **BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA** memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya, dengan bersandar pada ajaran dan nilai luhur agama serta nilai-nilai budaya Sipamandar/Sipamandaq.
- **BERWAWASAN LINGKUNGAN** memiliki makna bahwa pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan terus menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, harmoni sosial, kelestarian alam, dan tata kelola.

Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari visi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 yaitu **“Polewali Mandar Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agro Industri”** sebagaimana yang diuraikan pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Keselarasan Visi RPJPD Tahun 2025-2045
Dengan Visi RPJMD Tahun 2025-2029



Berdasarkan gambar di atas tampak jelas bahwa visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan visi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045, baik itu keselarasan kata pada pokok visi ataupun keselarasan substansi dan makna pokok visi, sebagaimana penjelasan berikut :

- Kata **Maju** yang menjadi salah satu pokok visi pada RPJPD, menjadi pokok visi pada RPJMD;
- Pokok visi **Berdaya Saing** pada RPJPD, selaras dengan pokok visi **Sehat** dan **Cerdas** pada RPJMD. Salah satu substansi atau penjabaran berdaya saing dalam RPJPD mencakup aspek sumberdaya manusia yang berkualitas, dimana didalamnya tentu saja meliputi aspek kesehatan (sehat) dan aspek pendidikan (cerdas);
- Pokok visi **Berkelanjutan** pada RPJPD, selaras dan memiliki makna yang sama

dengan pokok visi **Berwawasan Lingkungan** pada RPJMD, yaitu prinsip pembangunan yang memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap mempertahankan dan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

- Pokok Visi **Berbasis Agro Industri** pada RPJPD, tidak disebutkan secara eksplisit dalam visi RPJMD, namun tujuan dari Berbasis Agro Industri adalah terwujudnya kemajuan ekonomi di Polewali Mandar yang tentunya selaras dengan pokok visi Maju pada RPJMD yang salah satu arah tujuannya adalah terwujudnya kemajuan Polewali Mandar pada aspek ekonomi.

3.1.2 M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Sehingga untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, sebagai berikut :



MISI

**1**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Clean Government*)

2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau

3

Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat

4

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif

5

Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

6

Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa

7

Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

1. Misi Kesatu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Clean Government*)

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar yang semakin baik dan bersih, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat,

serta didukung inovasi dan teknologi informasi. Selain itu juga mencakup segala upaya untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki integritas, produktif, dan profesional dalam menghadirkan layanan pemerintah yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat serta menciptakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berdampak untuk menghasilkan birokrasi yang lincah, efektif, efisien, adaptif dan transparan, serta tidak adanya praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Misi ke-1 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.

2. Misi Kedua : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau

Misi ini diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses penduduk dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, perluasan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kesehatan guna memberikan pemenuhan hak setiap masyarakat untuk mendapatkan kemudahan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan dan merata pada tiap wilayah.

Misi ke-2 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Cerdas dan Polewali Mandar Sehat.

3. Misi Ketiga : Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian Kabupaten Polewali Mandar yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kontribusi sektor unggulan

terhadap PDRB (khususnya sektor pertanian secara luas, industri pengolahan, dan perdagangan), serta menciptakan lapangan kerja.

Misi ke-3 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.

4. Misi Keempat : Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar yang inklusif guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yaitu pada sektor jalan, irigasi, listrik, dan telekomunikasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yaitu pada sektor air minum, sanitasi, dan perumahan beserta sarana, prasarana, dan utilitasnya.

Misi ke-4 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Sehat dan Polewali Mandar Maju.

5. Misi Kelima : Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, memenuhi hak anak dan melindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pemajuan budaya di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama didalam kehidupan bermasyarakat, serta upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Misi ke-5 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.

6. Misi Keenam : Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan keberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi desa, serta

meningkatkan pembangunan desa pada dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan desa.

Misi ke-6 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.

7. Misi Ketujuh : Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah serta limbah yang ramah lingkungan dan terintegrasi, meningkatkan pelibatan masyarakat dan multi pihak dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati, meningkatkan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim, serta meningkatkan upaya-upaya penanggulangan dan ketahanan bencana.

Misi ke-7 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Sehat dan Polewali Mandar Maju.

Adapun keterkaitan antara 7 (tujuh) rumusan Misi RPJMD dengan pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2025-2029

NO.	MISI	POKOK VISI
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (<i>Clean Government</i>)	Polewali Mandar Maju
2.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau	- Polewali Mandar Cerdas - Polewali Mandar Sehat
3.	Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat	Polewali Mandar Maju

NO.	MISI	POKOK VISI
4.	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif	- Polewali Mandar Sehat - Polewali Mandar Maju
5.	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Polewali Mandar Maju
6.	Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa	Polewali Mandar Maju
7.	Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	- Polewali Mandar Sehat - Polewali Mandar Maju

3.1.2.1 Penyeragaman Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045

Penyeragaman Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Misi RPJPD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2045,
Dengan Misi RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029

MISI RPJPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 - 2045	MISI RPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 – 2029
Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial	(Misi 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi	(Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	(Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (<i>Clean Government</i>)
Misi 4 Menguatkan Keamanan Daerah Tangguh dan Stabilitas Makro Daerah	(Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (<i>Clean Government</i>)

MISI RPJPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 - 2045	MISI RPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 – 2029
Misi 5 Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- (Misi 5) Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak - (Misi 7) Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
Misi 6 Menedepankan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	(Misi 6) Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa
Misi 7 Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	(Misi 4) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif
Misi 8 Menjaga Kesisambungan Pembangunan	- (Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (<i>Clean Government</i>) - (Misi 4) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif

3.1.2.2 Penyeragaman Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2049 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Adapun penyeragaman Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029 terhadap Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Keselarasan Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029,
Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029
Dengan Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

MISI RPJMN (ASTA CITA)	MISI RPJMD KAB. POLEWALI MANDAR	MISI RPJMD PROV. SULAWESI BARAT
Asta Cita 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	-

MISI RPJMN (ASTA CITA)	MISI RPJMD KAB. POLEWALI MANDAR	MISI RPJMD PROV. SULAWESI BARAT
Asta Cita 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	(Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat	(Misi 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Asta Cita 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat - (Misi 4) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif	(Misi 4) Membangun Infrastruktur, Konektivitas, dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	- (Misi 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau - (Misi 5) Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	(Misi 3) Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter
Asta Cita 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berkas Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	(Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat	(Misi 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Asta Cita 6 : Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat - (Misi 6) Mendukung	- (Misi 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan - (Misi 2) Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

MISI RPJMN (ASTA CITA)	MISI RPJMD KAB. POLEWALI MANDAR	MISI RPJMD PROV. SULAWESI BARAT
	Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa	
Asta Cita 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	(Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (<i>Clean Government</i>)	(Misi 5) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Serta Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas
Asta Cita 8 : Memperkuat Penyelarasan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	- (Misi 5) Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak - (Misi 7) Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	(Misi 5) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Serta Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas

3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

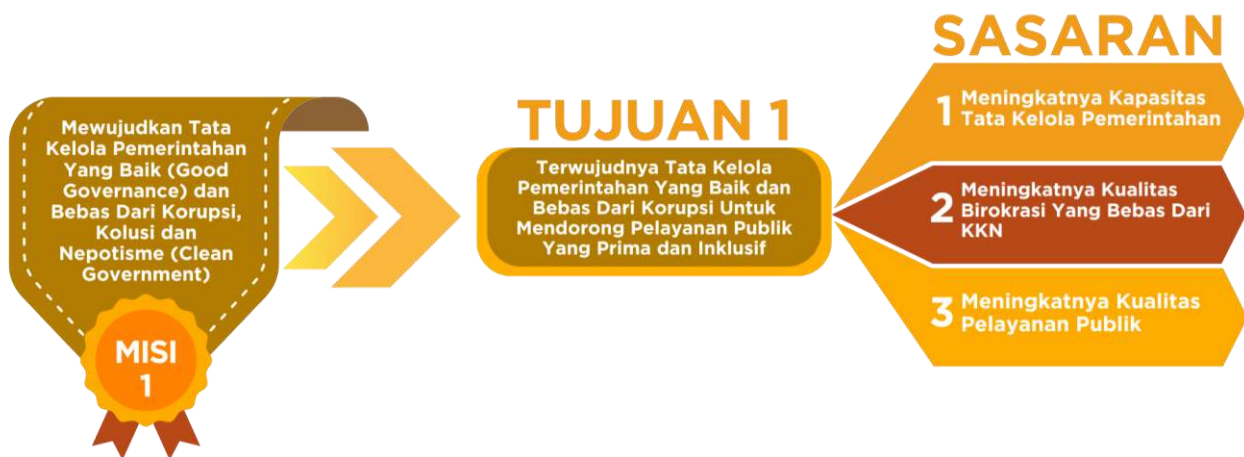
Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) misi pembangunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara cascading kinerja, visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan dapat terwujud apabila kinerja utama dapat dicapai, yakni :

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Prima dan Inklusif, yang ditandai dengan pencapaian 3 (tiga) kinerja yang terkait dengan kapasitas tata kelola pemerintahan, kualitas birokrasi, dan pelayanan publik;
- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, yang ditandai dengan pencapaian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan pendidikan, dan kesehatan;
- Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian 3 (tiga) kinerja yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta lapangan kerja;
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar, yang ditandai dengan pencapaian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan infrastruktur wilayah, dan infrastruktur permukiman;
- Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga yang ditandai dengan pencapaian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, serta kualitas hidup beragama dan penerapan nilai-nilai budaya;
- Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa, yang ditandai dengan pencapaian kinerja yang terkait dengan ketahanan dan kemandirian desa;
- Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana, yang ditandai dengan pencapaian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta manajemen penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut :

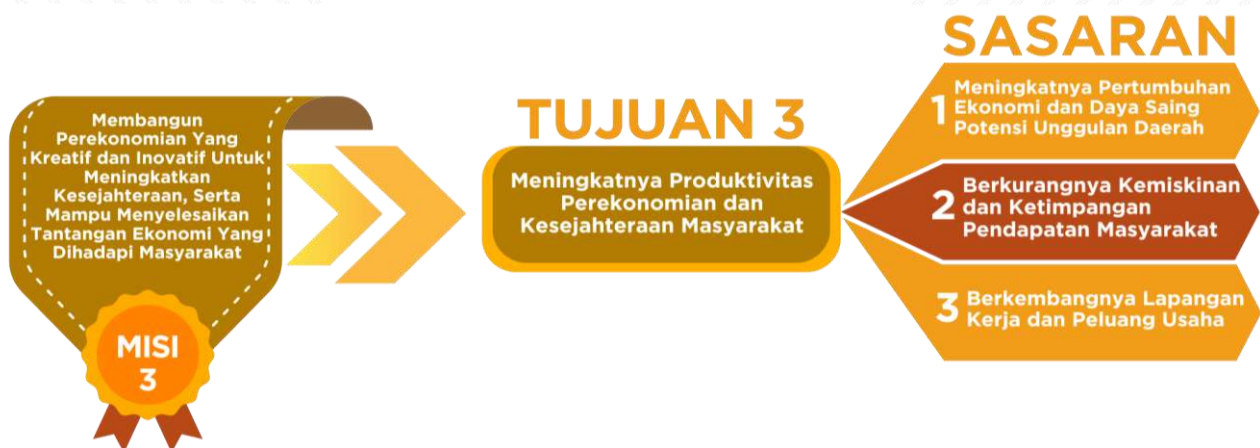
1. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 1 :



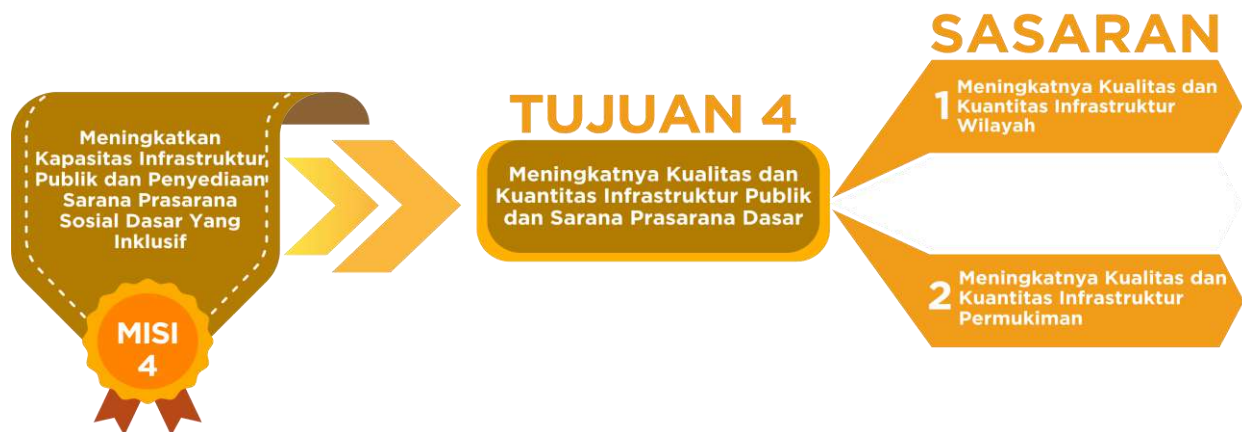
2. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 2 :



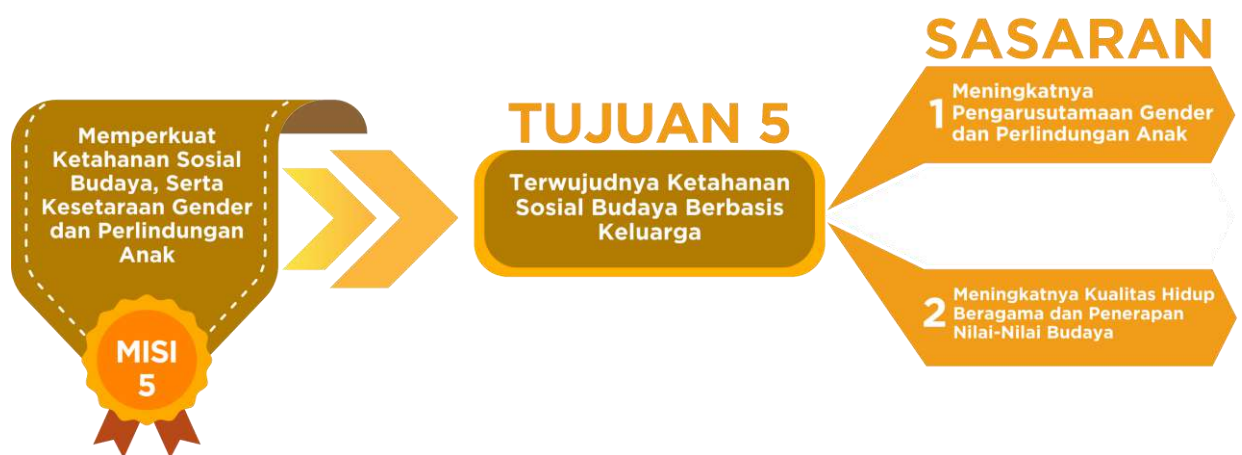
3. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 3 :



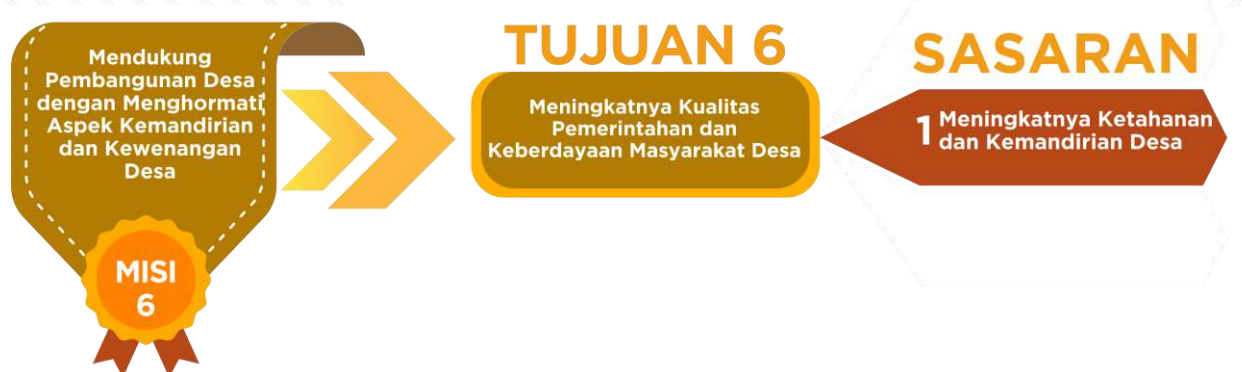
4. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 4 :



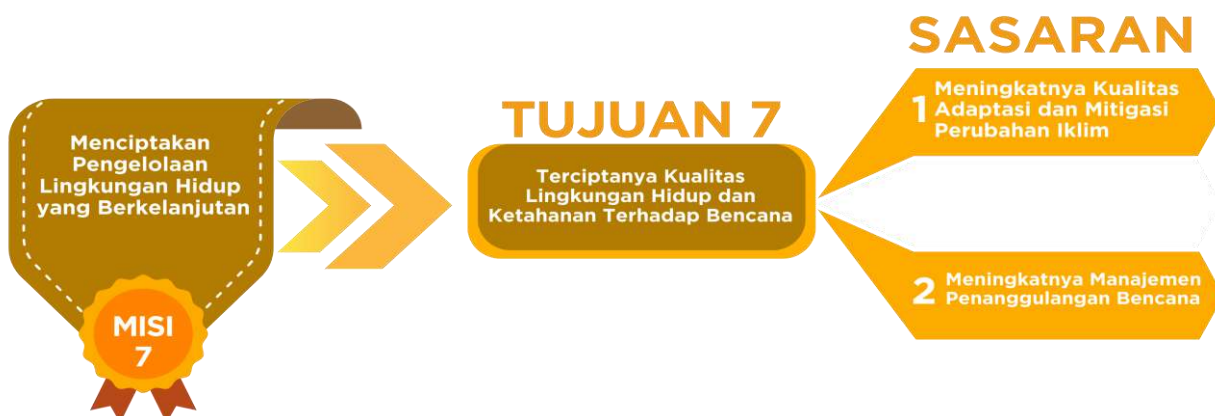
5. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 5 :



6. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 6 :



7. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 7 :



Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di atas, diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 tahap pertama.

Terdapat 7 (tujuh) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Secara lebih rinci rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
 RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

VISI : POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN
NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL : TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (<i>Clean Government</i>)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas Dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif		Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,36)	B (71,65)	B (72,89)	B (74,51)	B (76,45)	B (76,85)	B (78,90)
			Meningkatkannya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Predikat SAKIP	BB (70,73)	BB (71,22)	BB (71,72)	BB (72,39)	BB (73,84)	BB (73,91)	BB (74,18)
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pemerintahan Digital	3,88	3,90	3,92	3,94	3,96	4,00	4,02
				Indeks Sistem Merit	0,29	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
			Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bebas dari KKN	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	63,50*	66,19	67,37	68,10	68,22	69,67	70,60
				Nilai SPIP	3,512	3,652	3,785	3,846	3,950	4,082	4,184
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,92	4,02	4,09	4,19	4,31	4,42	4,53
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya		Indeks Pembangunan Manusia	69,88	71,95	73,89	75,60	77,34	79,09	80,85

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL : TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau	Manusia	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,72 Tahun	7,88 Tahun	7,95 Tahun	8,05 Tahun	8,25 Tahun	8,31 Tahun	8,40 Tahun
				Harapan Lama Sekolah	13,50 Tahun	13,62 Tahun	13,87 Tahun	14,06 Tahun	14,21 Tahun	14,39 Tahun	14,57 Tahun
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,08 Tahun	71,37 Tahun	71,67 Tahun	71,95 Tahun	72,23 Tahun	72,59 Tahun	72,85 Tahun
				Prevalensi Stunting	26,54*%	22,59%	18,63%	14,68%	10,72%	6,77%	3,69%
3	Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		PDRB Per Kapita	35,45 Jt Rp.	38,01 Jt Rp.	40,57 Jt Rp.	43,13 Jt Rp.	45,69 Jt Rp.	48,25 Jt Rp.	50,00 Jt Rp.
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,94%	6,28%	6,63%	6,97%	7,31%	7,66%	8,00%
				Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,94%	7,09%	9,24%	11,39%	13,54%	15,69%	17,50%
			Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	15,66%	15,26%	14,86%	14,46%	14,06%	13,66%	13,26%
				Indeks Gini	0,330*	0,320	0,310	0,300	0,290	0,280	0,270
			Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,10%	2,82%	2,62%	2,47%	2,35%	2,25%	2,00%
4	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana		Indeks Infrastruktur	71,32%	72,86%	74,27%	75,64%	76,93%	78,25%	78,78%
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	68,18%	69,94%	71,70%	73,46%	75,22%	76,98%	77,43%

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL : TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inklusif	Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	74,47%	75,79%	76,85%	77,83%	78,65%	79,52%	80,13%
5	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	#N/A	67,25	67,42	67,60	67,77	67,94	68,29
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,433	0,417	0,401	0,386	0,370	0,354	0,339
				Indeks Perlindungan Anak	67,23	72,23	77,22	82,21	87,21	92,20	97,19
			Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	#N/A	76,08	76,36	76,64	76,91	77,19	77,74
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	32,26	32,66	33,36	34,27	34,76	35,63	36,27
6	Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa	#N/A	74,14	76,09	78,04	79,99	81,94	83,89
			Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	22,92%	25,00%	26,39%	27,78%	29,17%	30,56%	31,94%
7	Menciptakan Pengelolaan Lingkungan	Terciptanya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,36	80,71	80,48	80,97	81,10	81,24	81,37

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL : TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hidup Yang Berkelanjutan	Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca							
				Kumulatif	N/A	192.156,03 Ton CO ² e	216.857,36 Ton CO ² e	245.440,78 Ton CO ² e	278.547,62 Ton CO ² e	312.643,13 Ton CO ² e	350.767,73 Ton CO ² e
				Tahunan	N/A	22.218,27 Ton CO ² e	24.701,33 Ton CO ² e	28.583,42 Ton CO ² e	33.106,84 Ton CO ² e	34.095,50 Ton CO ² e	38.124,61 Ton CO ² e
			Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	135,98/ Sedang	135,98	132,98	129,98	126,98	123,98	120,98

3.1.3.1 Penyelarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (Tahap I), sehingga rumusan sasaran RPJMD sebagai upaya pencapaian tujuan dan visi pembangunan (RPJMD) perlu diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan/arrah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045..

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rangkaian kinerja dan rangkaian kerja yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah tetap pada koridor upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini menjadi penting mengingat pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi fondasi bagi pelaksanaan tahapan RPJPD Tahun 2025-2045 pada periode-periode berikutnya.

Tabel 3.5
Keselarasan Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029
Dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2045

Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2045
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif	
Sasaran 1 : Meningkatkannya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	(S-6) Transformasi Digital (S-9) Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Bebas dari KKN	(S-9) Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif (S-10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	(S-9) Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	
Sasaran 4 : Meningkatnya Mutu Pendidikan	(S-2) Pendidikan Berkualitas Yang Merata
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	(S-1) Kesehatan Untuk Semua
Tujuan 3 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	
Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	(S-4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (S-7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (S-8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (S-11) Stabilitas Ekonomi Makro
Sasaran 7 : Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	(S-3) Perlindungan Sosial Yang Adaptif (S-11) Stabilitas Ekonomi Makro (S-16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
Sasaran 8 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	(S-4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (S-7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (S-10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial
Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar	
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah	(S-8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (S-16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman	(S-16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
Tujuan 5 : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga	
Sasaran 11 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	(S-14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya	(S-13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa	
Sasaran 13 : Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	(S-8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 7 : Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	(S-5) Penerapan Ekonomi Hijau (S-15) Lingkungan Hidup Berkualitas (S-17) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Sasaran 15 : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	(S-5) Penerapan ekonomi hijau (S-15) Lingkungan Hidup Berkualitas (S-17) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3.1.3.2 Penyelarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sehingga penyelarasan sasaran pembangunan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Provinsi Sulawesi Barat sangat penting untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam pembangunan daerah.

Penyelarasan ini memastikan bahwa pembangunan ditingkat kabupaten mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas ditingkat provinsi dan nasional. Adapun penyelarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Keselarasan Sasaran Pembangunan Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029
Dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029	Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif	
Sasaran 1 : Meningkatkannya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	(S-13) Meluasnya Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Pemerintahan (S-14) Berkembangnya Inovasi Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bebas dari KKN	(S-15) Membaiknya Pengendalian dan Pengawasan
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	(S-12) Membaiknya Pelayanan Publik (S-14) Berkembangnya Inovasi Daerah
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Sasaran 4 : Meningkatnya Mutu Pendidikan	(S-7) Meningkatkan Akses terhadap Layanan Pendidikan
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	(S-8) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Tujuan 3 : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	
Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	(S-1) Berkembangnya Hilirisasi Komoditas Unggulan (S-2) Meningkatkan Peran Ekonomi Biru dalam Perekonomian Daerah
Sasaran 7 : Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	(S-3) Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan (S-5) Menurunnya Angka Kemiskinan (S-6) Membaiknya Posisi Tawar Petani
Sasaran 8 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	(S-4) Meningkatkan Kesempatan Kerja
Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar	
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah	(S-9) Membaiknya Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman	(S-9) Membaiknya Konektivitas Antar Wilayah
Tujuan 5 : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga	
Sasaran 11 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	(S-16) Membaiknya Lingkungan Sosial Masyarakat
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya	(S-17) Meningkatkan Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa	
Sasaran 13 : Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	(S-16) Membaiknya Lingkungan Sosial Masyarakat
Tujuan 7 : Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	(S-10) Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
Sasaran 15 : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	(S-11) Menurunnya Potensi Risiko Bencana

3.1.3.3 Penyeragaman Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan daerah diperlukan penyeragaman perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyeragaman RPJMD Kabupaten Polewali Mandar terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi dan kabupaten, mewujudkan RPJMD Kabupaten yang harmonis dengan RPJMD Provinsi, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi, serta menjamin hadirnya dukungan perencanaan kabupaten terhadap sasaran, program, dan target pembangunan provinsi dan nasional.

Salah satu penyeragaman yang dilakukan adalah penyeragaman target indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya pencapaian target indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk mendorong kabupaten agar dapat merumuskan dan menyeragaman pencapaian target yang mendukung pencapaian target provinsi dan nasional dengan mempertimbangkan intervensi kebijakan serta karakteristik dan potensi daerah. Adapun penyeragaman target indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro Provinsi Sulawesi Barat dengan target indikator makro Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun indikator makro tersebut yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.7
Penyelarasan Target Makro RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
Terhadap Target Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJMD Prov. Sulawesi Barat		Target RPJMD Kab. Polewali Mandar	
	2025	2030	2025	2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi, %	5,20	8,00	6,28	8,00
PDRB Per Kapita, Juta Rupiah	42,72	71,90	38,01	50,00
Tingkat Kemiskinan, %	10,42	5,80	15,26	13,26
Indeks Gini (Angka)	0,320	0,290	0,320	0,270
Tingkat Pengangguran Terbuka, %	2,51	1,90	2,82	2,00
Indeks Modal Manusia (Provinsi) - Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten), Angka	0,55	0,60	71,95	80,85
Penurunan Intensitas Emisi GRK, %	61,65	77,25	41,07	57,37
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Angka	85,50	88	80,71	81,37

3.1.3.4 Penyeragaman Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Developments Goals (SDG's)*

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG's)*, yang mengarah pada upaya pengentasan persoalan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Penyeragaman antara RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dengan Tujuan SDG's dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's

Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bebas dari KKN	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	(T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Sasaran 4 : Meningkatnya Mutu Pendidikan	(T-4) Pendidikan Berkualitas
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	(T-3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Tujuan 3 : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	

Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (T-12) Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab
Sasaran 7 : Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	(T-1) Tanpa Kemiskinan (T-2) Tanpa Kelaparan (T-10) Berkurangnya Kesenjangan
Sasaran 8 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar	
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau (T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman	(T-6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (T-11) Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan
Tujuan 5 : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga	
Sasaran 11 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	(T-5) Kesenjangan Gender
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa	
Sasaran 13 : Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Tujuan 7 : Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	
Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	(T-13) Penanganan Perubahan Iklim
Sasaran 15 : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	(T-14) Ekosistem Lautan (T-15) Ekosistem Daratan

Berdasarkan pemetaan keselarasan pada tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's yang memiliki semangat untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan yang inklusif, serta menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun waktu lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada sub bab sebelumnya, maka diperlukan langkah-langkah atau upaya untuk mencapainya. Langkah-langkah atau upaya tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan pengeralahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan.

Di dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun penahapan pembangunan yang dimaksud pada penjelasan strategi tersebut adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah.

Penahapan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 – 2030 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Strategi Pembangunan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030

NO.	SASARAN	TAHAPAN STRATEGI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penerapan indikator kinerja yang SMART dan cascading yang runtut pada RPJMD dan Renstra PD serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pencapaian perjanjian kinerja pada seluruh perangkat daerah	Memperkuat sistem pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis digital terintegrasi melalui penerapan teknologi informasi dan didukung oleh fungsi pembinaan dan supervisi APIP pada seluruh perangkat daerah	Mengembangkan standar pengumpulan data yang seragam untuk memastikan kualitas dan konsistensi data pada seluruh perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas capaian perjanjian kinerja pada setiap level baik kinerja yang bersifat tematik maupun kinerja yang bersifat umum	Meningkatkan akses informasi yang mudah dan jelas mengenai kegiatan dan keuangan pemerintah daerah serta korelasinya dengan capaian pembangunan daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Bebas Dari KKN	Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sebagai	Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas dalam	Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui sistem	Meningkatkan kesejahteraan ASN secara proporsional melalui pemberian	Meningkatkan evaluasi dan pemantauan dalam penggunaan aset

		instrumen pencegahan korupsi yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses terhadap informasi publik	pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada unit-unit pemerintahan daerah	pengawasan yang ketat, tegas dan konsisten, khususnya terkait keuangan	tunjangan kinerja secara berkeadilan	daerah dan anggaran
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis standar pelayanan melalui peningkatan kompetensi pelaku pelayanan publik dan pemanfaatan sistem digital terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan lokus prioritas pada pelayanan perizinan dan non perizinan.	Mengembangkan sistem digital terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penguatan integrasi data dan layanan, baik pada layanan berbasis SPM maupun layanan non SPM.	Meningkatkan sistem pemantauan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berbasis SPM dan non SPM dengan memperhatikan kepuasan penerima layanan terutama pada wilayah yang sulit terjangkau.	Meningkatkan sistem evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berbasis SPM dan non SPM dengan memperhatikan kepuasan penerima layanan terutama pada perangkat daerah pemberi layanan yang sebelumnya dengan skor IKM paling rendah.	Memberikan reward pada inovasi pelayanan publik melalui lomba inovasi dan riset, baik secara individu maupun tim, diikuti dengan replikasi inovasi tersebut pada jenis pelayanan publik yang relevan.

4.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Optimalisasi sarana/prasarana untuk pemenuhan partisipasi pendidikan masyarakat pada level PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan melalui beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun pada seluruh wilayah kecamatan	Mengembangkan pusat-pusat akselerasi peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan SD dan SMP Unggulan di setiap kecamatan dengan didukung oleh guru berkualitas dan penerapan metode pembelajaran mendalam (deep learning) yang handal.	Meningkatkan kemampuan siswa dalam literasi, numerasi dan penguasaan sains melalui metode pembelajaran mendalam dan dukungan guru berkualitas pada pendidikan dasar di seluruh wilayah kecamatan.	Meningkatkan literasi masyarakat melalui peran perpustakaan daerah dan perpustakaan desa diiringi dengan gerakan gemar membaca pada seluruh wilayah kecamatan.	Mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan hidup (life skills) bagi pemuda dan remaja dengan lokus pada Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) berbasis pemanfaatan potensi lokal untuk pertanian, kerajinan, ekonomi kreatif dan UMKM.
5.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pelayanan terintegrasi di posyandu dan puskesmas dengan SDM kesehatan berkualitas serta sarana/parasarana dan fasilitas kesehatan yang	Optimalisasi pemanfaatan potensi pangan lokal untuk perbaikan kualitas gizi balita dan anak usia sekolah diiringi dengan aksi konvergensi penanganan dan	Optimalisasi upaya promotif dan preventif kesehatan melalui penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat pada seluruh tingkatan	Peningkatan kualitas layanan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit lain/klinik dengan didukung oleh kecukupan tenaga dokter	Meningkatkan kesadaran gizi dan pola makan sehat bagi masyarakat diiringi dengan pemenuhan unsur-unsur keluarga

		lengkap dengan lokus prioritas pada kecamatan dengan kualitas pelayanan paling tertinggal.	pengegasan stunting dengan prioritas pada kecamatan dengan prevalensi stunting tertinggi	usia dan disesuaikan konteks sosio-kultural lokal.	spesialis dan berbagai fasilitas pendukung pelayanan	sehat pada seluruh wilayah kecamatan.
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Optimalisasi penerapan praktek pertanian yang baik (good agricultural practices) dalam meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, pompanisasi dalam penguatan kapasitas irigasi, dan pengoperasian brigade pangan dalam menjamin penerapan teknologi dan kepastian harga bagi petani dengan lokus prioritas	Mengembangkan industri pengolahan kakao dengan produk berdaya saing ekspor oleh pelaku swasta yang bermitra dengan usaha mikro didukung oleh suplai biji kakao bermutu melalui peningkatan kompetensi petani dalam menerapkan budidaya kakao yang memenuhi kriteria treacability dengan lokus prioritas pada kecamatan sentra kakao	Meningkatkan nilai tambah produk UMKM melalui pendampingan teknologi produksi, akses pemasaran dan jejaring bisnis diiringi dengan penguatan permodalan dan ekosistem bisnis serta bersinergi dengan pengembangan kawasan industri berbasis pengolahan hasil pertanian, perkebunan,	Mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan memperkuat penerapan konsep ekowisata yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta	Melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat ekosistem investasi yang mendukung sektor-sektor unggulan daerah, inovasi dalam bidang pertanian, pariwisata, serta industri pengolahan, memperkenalkan insentif investasi yang menarik untuk mendatangkan lebih banyak investor, khususnya di

		pada kecamatan sentra padi sawah		peternakan, perikanan.	diiringi dengan pengembangan sentra ekonomi kreatif.	bidang industri pengolahan, teknologi, dan energi terbarukan.
7.	Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Memperkuat program perlindungan sosial yang sudah ada pada target rumah tangga miskin dan memperluas akses ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dengan program kewirausahaan, pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan akses pasar	Mengembangkan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal terutama di daerah dengan angka kemiskinan tinggi, pembangunan aksesibilitas jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi serta pembangunan pasar lokal untuk meningkatkan transaksi perdagangan lokal	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Mengembangkan sektor UMKM dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah, memberikan fasilitas pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha kecil dan menengah, khususnya yang berbasis pada produk lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan,	Memperkuat jaringan sosial melalui peningkatan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, memperkuat sistem jaminan sosial yang mencakup asuransi kesehatan dan pensiun bagi masyarakat miskin, serta memberikan bantuan untuk penanggulangan bencana dan bantuan darurat

					dan produk olahan untuk lapangan kerja yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUB) dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan	bagi masyarakat yang terdampak krisis ekonomi atau bencana alam.
8.	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Menumbuhkan wirausaha baru sebagai motor penggerak penciptaan lapangan kerja dengan melaksanakan program inkubasi bisnis berbasis potensi lokal seperti pertanian, kelautan, dan industri rumahan,	Mempeluas investasi padat karya melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif dan insentif fiskal bagi investor lokal maupun luar daerah, fasilitasi kemitraan antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar	Menyesuaikan keterampilan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, memperkuat sinergi antara lembaga pelatihan kerja, dunia industri, dan	Menyediakan fasilitas akses permodalan yang lebih luas serta mendorong inovasi usaha berbasis teknologi, memperkuat peran lembaga keuangan dan skema	Membangun ekosistem ketenagakerjaan dan wirausaha yang berkelanjutan dan inklusif, memperkuat regulasi ketenagakerjaan yang ramah

		pelatihan kewirausahaan terpadu, pemberian bantuan modal usaha mikro, serta pendampingan manajerial dan pemasaran bagi pelaku usaha pemula terutama dari kalangan pemuda	melalui program klaster ekonomi berbasis rantai pasok, revitalisasi UMKM dengan memperkuat akses keuangan, digitalisasi usaha, dan pendampingan legalitas usaha dan memperluas peluang kerja melalui sektor-sektor unggulan yang menyerap banyak tenaga kerja seperti agroindustri, pariwisata, dan pengolahan hasil laut	lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, peningkatan pelatihan kerja sektor pertanian dan digitalisasi	pembiayaan dalam mendukung modal usaha masyarakat kecil, pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna sebagai tulang punggung penciptaan usaha baru yang kompetitif, serta penciptaan Inkubator inovasi daerah dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan startup lokal	investasi sekaligus melindungi hak-hak tenaga kerja, serta memperluas jejaring usaha dengan pasar regional dan nasional, pengembangan zona ekonomi baru dan pusat-pusat ekonomi kreatif sebagai bagian dari diversifikasi sumber lapangan kerja
9.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam menginisiasi, memelihara, dan mengembangkan keberfungsian tempat	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk penanganan banjir melalui pemenuhan infrastruktur drainase dan gorong-gorong	Meningkatkan dan memelihara kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam membuka koneksitas wilayah pusat-pusat	Meningkatkan dan memelihara layanan irigasi melalui perbaikan dan pemeliharaan jaringan sekunder dan tersier serta	Memenuhi, menata dan memelihara infrastruktur untuk keindahan dan kenyamanan wilayah perkotaan melalui pemenuhan

		pembuangan akhir dan tempat pembuangan sementara dalam penanganan sampah dilengkapi dengan ketersediaan armada angkutan sampah yang mencukupi dan didukung oleh kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga dan lingkungannya dengan lokus utama pada kecamatan dengan timbulan sampah yang besar.	yang efektif mengalirkan air, pengembangan dan pemeliharaan wilayah resapan air, sarana/prasarana penanganan luapan air dari sungai, serta sarana/prasarana tanggap darurat banjir dengan lokus wilayah prioritas pada ibukota kabupaten, Kecamatan Matakali dan Kecamatan Binuang.	produksi di pedesaan/pedalaman dengan pusat-pusat pertumbuhan di ibukota kabupaten dan kecamatan dengan lokus prioritas pada wilayah pedesaan/pedalaman dengan infrastruktur jalan paling tertinggal	pembangunan embung dan sarana pompanisasi serta didukung oleh jalan tani yang membuka akses petani pada ruas-ruas sawah dengan lokus prioritas pada sentra produksi padi sawah.	lampu-lampu jalan, penataan taman-taman kota, pemeliharaan ruang terbuka hijau diiringi dengan pemenuhan infrastruktur untuk keindahan dan kenyamanan wilayah perdesaan.
--	--	--	--	---	--	---

10.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar air minum dengan lokus prioritas pada kompleks perumahan dan pemukiman padat rumah serta rumah pedesaan dan pedalaman yang sulit mengakses sumber air bersih.	Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk penanganan limbah domestik pada seluruh kecamatan dan fasilitas sanitasi lingkungan khususnya pada warga yang tinggal pada lingkungan kumuh perkotaan, bantaran sungai dan pinggir pantai.	Mendorong kerjasama pemerintah, swasta dan Baznas dalam perbaikan rumah tidak layak menjadi rumah layak huni dengan lokus prioritas pada rumah tangga miskin ekstrem atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di kecamatan.	Membangun, merehabilitasi, dan memelihara fungsi prasarana dan sarana umum (PSU) pada kawasan pemukiman terutama dalam mewujudkan pemukiman bebas sampah dan bebas banjir dengan lokus utama pada kompleks perumahan dan pemukiman padat rumah	Memperluas jangkauan layanan infrastruktur telekomunikasi dan akses teknologi digital dengan lokus prioritas pada kecamatan yang memiliki wilayah belum terjangkau layanan teknologi informasi dan transformasi digital.
11	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Menciptakan dan memelihara lingkungan sosial sehat melalui perwujudan keluarga berkualitas dan responsif gender serta ramah terhadap anak dengan lokus pada	Mengakselerasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang	Mengakselerasi sinergi multipihak untuk menekan perkawinan anak usia dini dan mencegah potensi eksploitasi anak sebagai pekerja	Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi pada sektor publik, bidang politik, maupun dunia usaha dengan lokus pada sistem	Memperkuat masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan pada berbagai bidang pergerakan dalam mewujudkan sistem kemasyarakatan

		berbagai setting sosial budaya kehidupan keluarga.	responsif gender termasuk penyusunan gender budgeting statement pada kegiatan strategis perangkat daerah	serta mendorong pemenuhan unsur-unsur untuk perwujudan Polman sebagai daerah layak anak.	promosi dunia birokrasi, sistem rekrutmen pada partai politik, dan sistem karir pada dunia bisnis.	yang responsif gender dan ramah anak serta sadar atas hak-hak demokrasi.
12.	Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan umat beragama secara bersinergi dengan revitalisasi nilai budaya dan unsur bendawi kebudayaan	Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama melalui penguatan peran Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama dan penguatan pemahaman prinsip toleransi	Meningkatkan perlindungan warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai penting dalam sejarah yang telah diakui dengan lokus prioritas pada pusat-pusat warisan budaya.	Meningkatkan pembinaan organisasi kesenian dalam fungsi pelestarian budaya dan komersialisasi secara bersinergi dengan dukungan organisasi kepemudaan untuk literasi dan kepeloporan dengan lokus prioritas pada kecamatan yang memiliki potensi organisasi kesenian dan kepemudaan.	Meningkatkan praktik kearifan lokal dalam relevansinya dengan kemajuan teknologi dan perubahan spirit zaman bagi pemajuan kebudayaan daerah.

13.	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	Meningkatkan fungsi desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan lokus prioritas pada desa-desa yang memiliki kinerja pelayanan dasar yang rendah	Meningkatkan ketahanan sosial desa dengan lokus prioritas pada desa-desa yang memiliki ketahanan sosial rendah	Meningkatkan ketahanan ekonomi desa dengan lokus prioritas pada desa-desa yang memiliki ketahanan ekonomi rendah.	Meningkatkan ketahanan ekologi desa dengan lokus prioritas pada desa-desa yang memiliki kerentanan ekologi tinggi.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa berbasis kapasitas struktural fungsional masyarakat desa
14.	Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam kerangka perwujudan Polewali Mandar bebas sampah dan banjir	Menegakkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan Polewali Mandar bebas sampah dan banjir	Mengembangkan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah serta menggalakkan pemahaman dan kesadaran tentang pembangunan rendah karbon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati	Mengendalikan dan mengurangi produksi emisi gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas transportasi dan perhubungan, pertanian dan peternakan, deforestasi, dan aktivitas lainnya

15.	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas institusi dan regulasi terkait penanggulangan bencana diiringi dengan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana daerah terutama pada lokasi dengan kerawanan bencana yang tinggi.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pencegahan dan kesiagsiagaan dini melalui penguatan tim SAR, tagana, dan desa siaga bencana dengan lokus prioritas pada lokasi rawan bencana.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penanganan tanggap darurat bencana diiringi dengan pemahaman masyarakat tentang jalur evakuasi dan titik evakuasi.	Meningkatkan koordinasi dalam penanganan pasca bencana terutama dalam proses rehabilitasi psikologis dan rekonstruksi fisik serta pengembangan bangunan tahan bencana	Optimalisasi sistem komando dalam penanganan tanggap darurat dan pasca bencana baik secara vertikal maupun horizontal.
-----	---	--	---	--	---	--

Selanjutnya di dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 3.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030



MISI

ARAH KEBIJAKAN

4

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif

1. Pemenuhan kemandirian jalan kewenangan kabupaten
2. Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan jalan tani
3. Pemenuhan sarana/prasarana telekomunikasi dan informasi
4. Pemenuhan sarana/prasarana dan fasilitas air minum
5. Pemenuhan sarana/prasarana dan fasilitas penanganan limbah domestik dan sanitasi lingkungan
6. Penanganan rumah tidak layak huni
7. Pemenuhan PSU kawasan pemukiman
8. Penanganan kawasan pemukiman kumuh
9. Pemenuhan sarana/prasarana perhubungan

5

Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan dan pemeliharaan kehidupan keluarga
2. Preservasi dan pemajuan kebudayaan daerah
3. Pengembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
5. Pengembangan prestasi pemuda dan olah raga
6. Penguatan kehidupan spiritual dan kerukunan antar umat beragama

6

Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan desa
2. Penguatan peran desa dalam pelayanan dasar
3. Penguatan ketahanan sosial desa
4. Penguatan ketahanan ekonomi desa
5. Penguatan ketahanan ekologi desa
6. Pemberdayaan masyarakat desa
7. Pengurangan kemiskinan di desa

7

Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

1. Penanganan sampah terpadu, terintegrasi dan modern
2. Pencegahan dan penanganan banjir terpadu dan terintegrasi
3. Pemeliharaan kualitas air
4. Pemeliharaan tutupan lahan dan reforestasi kawasan hulu
5. Pengembangan dan pemeliharaan taman kota dan ruang terbuka hijau
6. Pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca dari aktivitas transportasi dan perhubungan, pertanian dan peternakan, pembukaan tutupan lahan, dan penyadaran masyarakat tentang wawasan perubahan iklim
7. Peningkatan kapasitas dalam deteksi dini, penanganan kondisi darurat, dan penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana
8. Pengembangan sistem informasi wilayah rawan bencana, sistem evakuasi dan sistem pelayanan darurat bencana
9. Pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Selain arah kebijakan berbasis Misi, terdapat arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana termuat dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi

Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan serta implementasi pertanian berketahanan iklim melalui:

- a. Penguatan akses pasar dan pembiayaan pengembangan komoditas pertanian dan keturunannya, dengan output: pendampingan dalam sertifikasi produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- b. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output: penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, optimalisasi lahan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan
- c. Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan output: dukungan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan
- d. Pengembangan kawasan dan benih padi biofortifikasi, dengan output: pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi)
- e. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dengan output: pendampingan lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor dan kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan
- f. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian muda, dengan output: pembentukan lembaga pendidikan menengah vokasi pertanian, pendidikan tinggi vokasi pertanian diploma tiga (D-III), dan pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV)
- g. Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan output: rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan

pertanian dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim

h. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan

2. Pengembangan komoditas perikanan budidaya

- a. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan output: pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan jumlah kluster kawasan revitalisasi tambak udang, dan jumlah kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan
- b. Pengembangan input produksi perikanan budi daya, dengan output: produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistik perikanan, dengan output: penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil KP, pembangunan unit pengolahan ikan (UPI), pengembangan sarana distribusi logistik produk KP dan sarana distribusi logistik produk KP.

3. Kawasan Transmigrasi (KT)

- a. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman
- b. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian
- c. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi
- d. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil,

dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran

4. Kawasan Rawan Bencana

- a. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan output penyusunan Peta kawasan rawan bencana gempa bumi, penyediaan peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP, penyediaan peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), fasilitasi dan pelayanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur.
- b. Pendampingan penanganan kedaruratan bencana, dengan output penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana, bantuan kepada korban bencana alam berupa bantuan logistik tanggap darurat, dan terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat.
- c. Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana gempa bumi, dengan output: terpasangnya instrumentasi peringatan dini, persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara dan terlaksananya pembinaan penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat
- d. Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketaahanan seismic
Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami"

3.2.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan rumusan visi dan misi, yang selanjutnya diturunkan dalam tujuan dan sasaran, maka ditetapkan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029, yaitu serangkaian program yang dihasilkan dari cascading kinerja Visi - Misi - Tujuan - Sasaran.

Di dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

Program prioritas RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029 berdasarkan cascading dari Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Program Prioritas RPJMD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif	Meningkatkannya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi		
				Predikat SAKIP		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayaan, dan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
				Opini BPK atas Laporan Keuangan		

			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
				Persentase penurunan SILPA		
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap		
				Indeks Pemerintahan Digital		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)		
				Indeks Sistem Merit		

			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik		
		Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Bebas Dari KKN		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah		
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatn		
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
				Nilai SPIP		

			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraab Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan		
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

			Meningkatnya Penanganan Gangguan Keetentruman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tribumtranmas		
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Mutu Pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				Rata-Rata Lama Sekolah		
				Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan		
				Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan (Kesetaraan)		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Dinas Kesehatan

			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat	Meningkatnya produktivitas perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah		PDRB Per Kapita		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan Peningkatan produksi hortikultura Peningkatan produksi komoditas peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		

			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan pembangunan industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		

				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Penyandang Disabilitas		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
				Indeks Peranan Sosial		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
				Indeks Gini		
			Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Pertumbuhan Wirausaha		

			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
		Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
			Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social	Hubungan Industrial	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas			Indeks Infrastruktur		
		Meningkatnya Kualitas dan		Indeks Infrastruktur Wilayah		

Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif	Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar	Kuantitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik		
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman		Indeks Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Sarana Prasarana Penyelenggaraan LLAJ dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Ditangani	Kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				Indeks Ketimpangan Gender		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		

						Perlindungan Anak
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Anak		
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		Perlindungan Perempuan dan

			Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak			Perlindungan Anak
		Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah yang Dilaksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mendukung Pembangunan Desa dengan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan			Indeks Desa		
				Persentase Desa Mandiri		

Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa	dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat		
Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara		

			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Manajemen Manajemen Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Penanganan Bencana	Dinas Sosial
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		



				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
--	--	--	--	--	--	--

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar juga dirumuskan melalui pendekatan 3 (tiga) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2030 terdiri atas:

Untuk mewujudkan **POLMAN SEHAT**, maka program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

1. Cegah Stunting
2. Sehat Untuk Semua
3. Bebas Sampah dan Banjir

Untuk mewujudkan **POLMAN CERDAS**, maka program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

4. Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Miskin
5. Pengembangan SD dan SMP Unggulan di Setiap Kecamatan
6. Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

Untuk mewujudkan **POLMAN MAJU**, maka program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

7. Industrialisasi Kakao
8. UMKM Baik
9. Majukan Desa dan Kelurahan

Gambar 3.4
 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030



Tabel 3.11
Penyelarasan Program Unggulan Ke Dalam Program Prioritas RPJMD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN (BUPATI DAN WAKIL BUPATI)	PROGRAM PRIORITAS (SESUAI PERMENDAGRI)	OP
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
			Rata-Rata Lama Sekolah			
			Harapan Lama Sekolah			
				BEASISWA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA MISKIN	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PENGEMBANGAN SD DAN SMP UNGGULAN DI SETIAP KECAMATAN	Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 – 2029

		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	SEHAT UNTUK SEMUA	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Dinas Kesehatan
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				POLMAN BEBAS SAMPAH DAN BANJIR	Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Prevalensi Stunting		
				CEGAH STUNTING	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

					Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Dinas Kesehatan
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan pangan
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat	Meningkatnya produktivitas perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	PDRB Per Kapita			
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan			
				INDUSTRIALISASI KAKAO	Perencanaan pembangunan industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
					Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
					Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
					Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
			Laju Pertumbuhan Ekonomi			
				UMKM BAIK	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
					Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
					Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa			
			Persentase Desa Mandiri			
				MAJUKAN DESA DAN KELURAHAN	Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Kewenangan
Desa**

Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
Pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB

4

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah kumpulan program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta program yang ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun program operasional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana program perangkat daerah disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, program kepala daerah, arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD, dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026-2030 diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

- a. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Program Pengelolaan Pendidikan;
- c. Program Pengembangan Kurikulum.

2. Urusan Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Penataan Bangunan Gedung;
- b. Program Penyelenggaraan Jalan;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- f. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Program Pengembangan Perumahan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Program Penanggulangan Bencana;
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6. Urusan Sosial

- a. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana.

7. Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja;

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

9. Urusan Pangan

- a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

10. Urusan Pertanian

- a. Program Penatagunaan Tanah.

11. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

15. Urusan Perhubungan

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

18. Urusan Penanaman Modal

- a. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

20. Urusan Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

21. Urusan Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

22. Urusan Kebudayaan

- a. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. Program Pengelolaan Permuseuman;
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- d. Program Pengembangan Kebudayaan.

23. Urusan Perpustakaan

- a. Program Pembinaan Perpustakaan.

24. Urusan Kearsipan

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

25. Urusan Pariwisata

- a. Program Pemasaran Pariwisata.

26. Urusan Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- d. Program Penyuluhan Pertanian.

27. Urusan Perdagangan

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

28. Urusan Perindustrian

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

29. Urusan Transmigrasi

- a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

30. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

31. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan.

32. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

- a. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

33. Unsur Penunjang Perencanaan

- a. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.

34. Unsur Penunjang Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

35. Unsur Penunjang Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah.

36. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

37. Unsur Penunjang Pengawasan

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

38. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- c. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

39. Unsur Pemerintahan Umum Kecamatan

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tabel 4.1.
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE		TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029				
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp			
I	LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																
1	PENDIDIKAN																
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidik an	Indeks Distribusi Guru SD	Poin	0,24	0,32	48.773.000	0,60	49.748.460	1,29	50.743.429	2,70	51.758.298	3,10	52.793.464	3,10	Dinas Dikbud	
		Indeks Distribusi Guru SMP	Poin	0,25	0,26		0,38		0,71		1,38		1,55		1,55		
	Program Pengelolaa n Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,72	7,88	88.283.839.994	7,95	90.049.516.794	8,05	91.850.507.130	8,16	93.687.517.272	8,27	95.561.267.618	8,27	Dinas Dikbud	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,62		13,71		13,81		13,85		13,95		13,95		
	Program Pengemban gan Kurikulum	Persentase muatan kurikulum yang diterapkan	Persen		65,00	87.500.000	70,00	89.250.000	75,00	91.035.000	80,00	92.855.700	85,00	94.712.814	85	Dinas Dikbud	
2	KESEHATAN																
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes yang memenuhi standar pelayanan UKP dan UKM	Persen	100%	100%	79.416.705.416	100%	81.005.039.524	100%	82.593.373.633	100%	84.181.707.741	100%	85.770.041.849	100%	Dinkes	
	Program Pemberday aan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70%	80%	2.587.172.000	100%	2.638.915.440	100%	3.947.418.760	100%	4.941.732.110	100%	5.936.045.460	100%	Dinkes	
	Program Peningkata n Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi i (Tenaga Medis dan Para medis)	Persen	100%	100%	4.489.412.000	100%	4.579.200.240	100%	4.668.988.480	100%	4.758.776.720	100%	4.848.564.960	100%	Dinkes	



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasia n, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Rumah Tangga Pangan, yang memenuhi standar	Persen	50%	55%	25.819.400	60%	417.607.350	65%	809.395.300	70%	1.201.183.250	75%	1.592.971.200	75%	Dinkes
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase prasarana pemerinta han dan sarana umum dalam kondisi baik	Persen	73,08	73,08	-	74,36	3.745.000.000	75,64	3.819.900.000	76,92	3.896.298.000	78,21	3.974.223.960	78,21	Dinas PUPR
	Program Penyelengg aaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	52,43%	56,93%	3.025.437.400,00	61,43%	106.050.000.000,00	65,93%	106.050.000.000,00	70,43%	106.050.000.000,00	75,00%	106.050.000.000,00	75,00%	Dinas PUPR
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	57,47%	58,12%		58,77%		59,42%		60,06%		60,71%			
	Program Pengelolaa n Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	42,03%	42,53%	100.000.000	43,03%	7.500.000.000	43,53%	7.875.000.000	44,03%	8.268.750.000	44,53%	8.682.187.500,00	44,53%	Dinas PUPR
		Persentase panjang tebing sungai yang memiliki Bangunan Perkuatan Tebing	Persen	0,74%	0,78%		0,81%		0,84%		0,87%		0,90%			
	Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak	persen	92,17%	93,74%	14.334.569.000	95,30%	14.334.569.000	96,87%	15.051.297.450	98,43%	15.051.297.450	100,00%	15.803.862.323	100%	Dinas PUPR



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengelolaa n Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	persen	95,56%	97,94%	11.306.186.000	99,20%	11.532.309.720	100%	11.762.955.914	100%	11.998.215.033	100%	12.238.179.333	100%	Dinas PUPR
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	persen	2,08%	2,73%		3,38%		4,04%		4,69%		5,34%		5,34%	
	Program Pengembangan gan Sistem Dan Pengelolaa n Persampah an Regional	Persentase ketersedia an prasarana persampah an	persen	52,74%	55,71%	526.185.000	58,17%	34.363.512.400	60,68%	3.030.603.210	62,99%	2.500.000.000	65,63%	2.500.000.000	65,63%	Dinas PUPR
	Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Drainase	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	persen	48,79%	49,29%	1.300.000.000	49,77%	1.500.000.000	50,26%	1.500.000.000	50,75%	1.600.000.000	51,24%	1.600.000.000	51,24%	Dinas PUPR
	Program Pengemban gan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuha n pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	persen	17,39%	21,74%	50.200.000	26,09%	150.000.000	30,43%	157.500.000	34,78%	165.000.000	39,13%	172.500.000	39,13%	Dinas PUPR
	Program Penyelengg aaran Penataan Ruang	Persentase pemanfaat an ruang yang sudah dilaksanak an sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	52,66	54,24	350.000.000	58,04	367.500.000	62,10	385.000.000	68,31	402.500.000	75,14	420.000.000	75,14	Dinas PUPR
		Rasio bangunan ber IMB	Rasio	10,61%	11,18%		11,79%		12,39%		12,98%		13,56%		13,56%	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD	
				2024	2025		2026		2027		2028		2029				
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp			
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukima n Kumuh	Persentase rumah layak huni	persen	85,05%	86,06%	335.000.000	86,97%	672.000.000	87,64%	1.120.000.000	88,49%	1.400.000.000	89,38%	1.400.000.000	89,38%	Dinas Per kimta	
	Program kawasan permukima n	Luas kawasan kumuh kewenang an kabupaten yang terentaska n	persen	0,00 Ha	0,00 Ha	135.000.000	3,90 Ha	3.408.600.000	2,86 Ha	2.499.640.000	1,99 Ha	1.739.260.000	1,47 Ha	1.284.780.000	1,47	Dinas Per kimtan	
	Program Peningkata n Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumaha n formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	persen	59,60%	64,75%	25.000.000	70,51%	55.000.000	75,97%	57.750.000	80,74%	60.637.500	86,37%	63.250.000	86,37%	Dinas Per kimtan	
	Program Pengemban gan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	persen	0	100	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Per kimtan	
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	Program Peningkata n Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	150.000.000	100	153.000.000	100	156.060.000	100	159.181.200	100	162.364.824	100	Satpol PP	
	Program Penanggula nган Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,48	0,50	330.000.000	0,53	346.500.000	0,55	363.000.000	0,58	379.500.000	0,60	396.000.000	0,60	BPBD	
	Program Pencegaha n, Penanggula nган, Penyelamat an Kebakaran dan Penyelamat an Non Kebakaran	Persentase Penanggul angan bahaya bencana kebakaran dan Penyelama tan	Persen	100,00	100,00	2.181.890.000	100,00	2.225.527.800	100,00	2.270.038.356	100,00	2.315.439.123	100,00	2.361.747.906	100,00	Satpol PP	
6	SOSIAL																Satpol

No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE		TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029				
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp			
	PP																
	Program Pengelolaa n Taman Makam Pahlawan	Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahter aan sosial	Persen	100	100	73.000.000	100	74.460.000	100	75.949.200	100	77.468.184	100	79.017.548	100	Dinas Sosial	
	Program Pemberday aan Sosial	Persentase masyaraka t miskin potensi yang diberdayak an	Persen	21%	25%	157.995.000	25,25%	161.154.900	25,50%	164.377.998	25,75%	167.665.558	26%	171.018.869	26%	Dinas Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi social	Persen	36,05%	38%	464.000.000	38%	473.280.000	39%	482.745.600	39%	492.400.512	39%	502.248.522	39%	Dinas Sosial	
	Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial	Persentase masyaraka t miskin penerima penjaminan sosial	Persen	71%	72%	500.000.000	72%	200.000.000	73%	204.000.000	73%	208.080.000	73%	212.241.600	73%	Dinas Sosial	
	Program Penangana n Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100%	100%	220.000.000	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	156.060.000	100%	159.181.200	100%	Dinas Sosial	
11	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR																
7	KETENAGAKERJAAN																
	Pelatihan Kerja dan Produktifita s Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil (Orang)	Orang	964	1294	3.085.813.000	1624	3.240.103.650	1954	3.402.108.833	2284	3.572.214.274	2614	3.750.824.988	2614	Dinas Trans naker	
	Penempata n Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap (%)	Persen	45%	46%	357.500.000	47%	375.375.000	48%	394.143.750	49%	413.850.938	50%	434.543.484	50%	Dinas Trans naker	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASLINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengarusut aaman Gender dan Pemberday aan Perempuan	Persentase peningkata n peran perempuan dan pengarusut aaman peran gender	Persen	93,1	93,6	300.000.000	93,89	306.000.000	94,18	312.120.000	94,54	318.362.400	94,97	324.729.648	94,97	Dinas P2KBP 3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang membutuh kan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar	Persen	100	100	190.000.000	100	193.800.000	100	197.676.000	100	201.629.520	100	205.662.110	100	Dinas P2KB P3A
9	PANGAN															
	Program Pengelolaa n Sumberday a ekonomi untuk kedaulatan dan kemandiria n pangan	Persentase ketersedia an infrastruktur kemandiria n pangan (LPM)	Persen	63,00	65,00	300.000.000	67,50	300.000.000	70,00	300.000.000	72,50	300.000.000	75,00	300.000.000	75,000	Dinas Tanpa n
10	PERTANAHAN															
	Program Penatagun aan Tanah	Persentase aset tanah pemma yang sudah bersertifika t	Persen	66,67	77,78	176.446.800	80,46	179.975.736	100	183.575.251	100	187.246.756	100	190.991.691	100	Dinas Per kimtan
11	LINGKUNGAN HIDUP															
	Program Pengelolaa n Persampah an	Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaa n sampah	Persen	13,71%	56,30%	7.558.689.345	56,60%	7.662.688.000	58,60%	7.766.686.000	60,60%	7.870.685.000	62,60%	7.974.683.000	63%	Dinas LHK
	program pengendali an pencemara n dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	55,91	77,38	250.000.000	77,58	275.000.000	77,78	300.000.000	77,98	325.000.000	78,18	350.000.000	78,18	Dinas LHK
		Indeks kualitas udara	Indeks	89,96	92,16		92,26		92,36		92,46		92,56			
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	49,80	65,26		65,33		65,40		65,47		65,54			

No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengelolaa n Keanekarag aman Hayati (Kehati)	Indeks pengelolaa n keanekara gaman hayati	Indeks	N/A	0,54	1.124.493.150	0,54	1.224.493.000	0,55	1.324.492.000	0,55	1.424.492.000	0,55	1.524.492.000	0,55	Dinas LHK
	Program Pengendali an Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani	Persen	33,33	36,6	30.000.000	39,87	55.000.000	43,13	56.815.000	46,4	59.455.000	49,67	62.920.000	49,67	Dinas LHK
	Program Perencanaa n Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan an lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar	Persen	50	100	-	100	-	100	-	100	-	100	286.313.000	100	Dinas LHK
	Program Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindunga n Dan Pengelolaa n Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggun g jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujua n Lingkunga n dan Persetujua n Teknis	Persen	92,02	100	75.000.000	100	77.000.000	100	79.000.000	100	81.000.000	100	83.000.000	100	Dinas LHK
	Program Peningkata n Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga yang dibina dalam pengelolaa n lingkungan hidup	Persen	100	100	631.707.454	100	633.707.000	100	635.706.000	100	637.706.000	100	639.705.000	100	Dinas LHK
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pendaftaran n Penduduk	Persentase kepemilika n KTP elektronik	Persen	93,98	100	293.875.530	100	299.753.041	100	305.748.101	100	311.863.063	100	318.100.325	100	Dinas Dukca pil
		Persentase kepemilika n kartu keluarga	Persen	99,29	100		100		100		100		100		100	
		Persentase kepemilika n identitas kependudu kan digital (IKD)	Persen	1,26	5		10		15		20		25		25	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	Persen	96,94	100	362.778.400	100	370.033.968	100	377.434.647	100	384.983.340	100	392.683.007	100	Dinas Dukca pil
		Persentase kepemilika n akta kematian	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Program Pengelolaa n Informasi Administras i Kependudu kan	Indeks kepuasan pelayanan administras i kependudu kan dan pencatatan sipil	Poin	95,25	100	84.419.400	100	86.107.788	100	87.829.944	100	89.586.543	100	91.378.273	100	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	Program Peningkata n Kerja Sama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa	Persen	24,30%	25,80%	-	27,20%	85.755.600	28,66%	87.470.712	30,09%	89.220.126	31,53%	91.004.529	31,53%	Dinas PMD
	Program Administras i Pemerintah an Desa	Persentase Desa Maju	Persen	33,33%	36,81%	296.242.520	40,27%	302.167.370	43,75%	308.210.718	47,22%	314.374.932	50,69%	320.662.431	50,69%	Dinas PMD
	Program Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Persen	100%	100%	181.956.400	100%	185.595.528	100%	189.307.439	100%	193.093.587	100%	196.955.459	100%	Dinas PMD
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengendali an Penduduk	Persentase laju pertumbuh an penduduk	Persen	1,23%	1,22%	1.060.600.000	1,21%	1.081.812.000	1,20%	1.458.616.000	1,19%	1.746.522.000	1,18%	2.034.428.000	1,18%	Dinas P2KB P3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif	Persen	36,40%	41,81%	4.403.180.000	43,26%	4.491.243.600	47,35%	4.579.307.200	49,68%	4.667.370.800	53,18%	4.755.434.400	53,18%	Dinas P2KB P3A
15	PERHUBUNGAN															
	Program Penyeleng araan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana penyeleng garaan LLAJ dalam kondisi baik	persen	60,49%	60,99%	1.906.000.000	61,49%	1.944.120.000	61,99%	1.983.002.400	62,49%	2.022.662.448	62,99%	2.063.115.697	62,99%	Dishub
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	Program Pengelolaa n Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang cukup informatif dan komunikati f	Persen	96,42	96,42	365.250.260	96,42	372.555.265	96,42	380.006.371	100	387.606.498	100	395.358.628	100	Dinas Kominio
	Program Pengelolaa n Aplikasi Informatika	Persentase layanan administrsa si pemerinta han dan layanan publik berbasis digital yang telah transaksio nal	Persen	100%	100%	1.382.352.340	100%	1.520.587.000	100%	1.672.646.000	100%	1.839.910.000	100%	2.023.902.000	100%	Dinas Kominio
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH															
	Program Pemberday aan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKMM yang tumbuh dan berkembang g Usaha Baru (%)	Persen	5,00%	10,00%	1.500.000.000	15,00%	1.575.000.000	20,00%	1.653.750.000	25,00%	1.736.437.500	30,00%	1.823.259.375	30,00%	Dinas Prinda g Koperasi UKM
		Persentase UKMM yang tumbuh dan berkembang	Persen	2,00%	5,00%		10,00%		15,00%		20,00%		25,00%			



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
		g Mikro - Kecil (%)														
	Program Pengawasa n dan Pemeriksaa n Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	Persen	34,47	35,22	150.000.000	35,99	157.500.000	36,77	165.375.000	37,58	173.643.750	38,39	182.325.938	38,39	Dinas Prinda g Kopera si UKM
18	PENANAMAN MODAL															
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Poin	Baik	Sangat Baik	90.000.000	Sangat Baik	91.800.000	Sangat Baik	93.636.000	Sangat Baik	95.508.720	Sangat Baik	97.418.894	Sangat Baik	Dinas PM PTSP
	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (Perusahaa n)	Perusah aan	562	1020	500.000.000	1479	525.000.000	2145	551.250.000	3110	578.812.500	4510	607.753.125	4510	Dinas PM PTSP
	Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Rp.)	Rp	656.632.116.292	662.029.288.456	293.075.000	667.426.460.620	307.728.750	672.823.632.784	323.115.188	678.220.804.948	339.270.947	683.617.977.112	356.234.494	683.617.977.112,00	Dinas PM PTSP
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	Program Pengemban gan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	75	80	129.960.000	85	129.960.000	90	129.960.000	95	129.960.000	100	129.960.000	100,00	Dispop
		Jumlah Pemuda Wirausaha	Orang	35	40		45		50		55		60		60,00	Dispop
20	STATISTI K															
	Program Penyeleng araan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang valid	Persen	82,16	83	86.680.420	83,25	88.414.028	83,5	90.182.309	83,75	91.985.955	84	93.825.674	84	Dinas Komini o
21	PERSANDIAN															



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengelola n Aplikasi Informatika	Persentase layanan administrasi pemeritaha n dan layanan publik berbasis digital yang telah transaksi onal	Persen	100	100	1.382.352.340	100	1.409.999.387	100	1.438.199.375	100	1.466.963.362	100	1.496.302.629	100	Dinas Komini o
	Program Penyelengaraan Persandian Untuk Pengamana n Informasi	Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai	Persen	N/A		15.361.760		15.668.995		15.982.375		16.302.023		16.628.063	0	Dinas Komini o
2	KEBUDAYAAN															
2	Program Pelestarian dan pengelola n Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarika n dan dikelola	Persen	24,64	38,01	104.175.000	45,86	106.258.500	53,53	108.383.670	63,15	110.551.343	74,52	112.762.370	74,52	Dinas Dikbuc
	Program Pengelola n Permuseuman	Presentase benda pusaka dan alat kesenian tradisional yang di koleksi	Persen	N/A	10,00	99.918.200	16,00	101.916.564	22,00	103.954.895	28,00	106.033.993	34,00	108.154.673	34,00	Dinas Dikbuc
	Program Pengemban gan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persen	33,70	41,87	420.772.900	51,47	429.188.358	60,13	437.772.125	69,16	446.527.568	78,19	455.458.119	78,19	Dinas Dikbuc
	Program Pengemban gan Kebudayaan	Persentase Pengemban gan Pemajuan Kebudayaan	Persen	3,79	5,03	127.706.856	6,21	130.260.993	7,29	132.866.213	8,41	135.523.537	10,26	138.234.008	10,26	Dinas Dikbuc
2	PERPUSTAKAAN															
3	Program Pembinaan Perpustaka an	Persentase Layanan Pembinaan Perpustaka an	Persen	48,5	57,36	647.031.542	62,91	659.972.173	68,41	673.171.616	74,82	686.635.049	80,78	700.367.750	80,78	Dinas Perpust dan Arsip
2	KEARSIPAN															
4																



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator	SATUAN	BASLINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengelolaan Arsip	Predikat pengelolaan kearsipan	Predikat (Poin)	86	98	118.204.000	100	120.568.080	100	122.979.442	100	125.439.030	100	127.947.811	100	Dinas Perpus dan Arsip
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase OPD dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang telah menerapkan SIKD/SIKS	Persen	47,67	51,09	N/A	52,98	50.000.000	53,75	51.000.000	61,38	52.020.000	72,55	53.060.400	72,55	Dinas Perpus dan Arsip
II	URUSAN PILIHAN															
1	PARIWISATA															
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pameran/Even Promosi Wisata	Persen	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dipop
2	PERTANIAN															
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	Ton	231.097,04	231.812,74	5.686.298.000	232.528,44	5.970.612.900	233.244,14	6.269.143.545	233.959,84	6.582.600.722	234.675,54	6.911.730.758	234.675,54	Dinas Tanpa n
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	Ton	16.440,65	17.262,68		18.125,82		19.032,11		19.983,71		20.982,90		20.982,90	
		Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	Ton	172,83	181,47		190,55		200,07		210,08		220,58		220,58	
		Jumlah Produksi Buah-Buahan (Ton)	Ton	68.104,30	68.123,17		68.123,20		68.123,20		68.123,20		68.123			
		Jumlah Produksi Sayuran (Ton)	Ton	1.447,70	1.520,09		1.596,09		1.675,89		1.759,69		1.847,67		1.848	
		Jumlah produksi Kakao (Ton)	Ton	36.579,04	40.236,94		44.260,64		48.686,70		53.555,37		58.910,91		58.911	
		Jumlah produksi Kelapa (Ton)	Ton	20.099,12	21.104,08		22.159,28		23.267,24		24.430,61		25.652,14		25.652	
		Jumlah Produksi Kopi (Ton)	Ton	833,19	874,85		918,59		964,52		1.012,75		1.063,39		1.063	
		Jumlah Produksi Sapi Ekor)	Ekor	34.548	36.275		38.089		39.994		41.993		44.093		44.093	



No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator	SATUAN	BASLINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
		Jumlah Produksi Kambing (Ekor)	Ekor	94.531	99.258		104.220		109.431		114.903		120.648		120.648	
		Jumlah Produksi Unggas (Ekor)	Ekor	2.387.689	2.390.627		2.393.565		2.396.503		2.399.441		2.402.379		2.402.379	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	Persen	18%	25%	17.445.122.502	30%	18.317.378.627	35%	19.233.247.558	40%	20.194.909.936	50%	21.204.655.433	50%	Dinas Tanpa n
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	Persen	100%	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	551.250.000	100%	578.812.500	100%	607.753.125	100%	Dinas Tanpa n
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik (%)	Persen	75%	80%	9.176.745.000	85%	9.635.582.250	90%	10.117.361.363	95%	10.623.229.431	100%	11.154.390.902	100%	Dinas Tanpa n
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%)	Persen	32%	40%		50%		60%		70%		80%		80%	
3	PERDAGANGAN															
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Maju, Rapih, Sehat dan Aman (%)	Persen	18%	25%	2.783.115.000	30%	2.922.270.750	35%	3.068.384.288	40%	3.221.803.502	50%	3.382.893.677	50%	Dinas Prindang Koperasi UKM
4	PERINDUSTRIAN															
	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro (%)	Persen	2%	5%	2.384.958.000	10%	2.504.205.900	12%	2.629.416.195	15%	2.760.887.005	20%	2.898.931.355	20%	Dinas Prindang Koperasi UKM
5	TRANSMIGRASI															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN															



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengelolaa n Perikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton	21.608,49	29.387,55	1.823.720.000	39.967,06	1.914.906.000	54.355,21	2.010.651.300	73.923,08	2.111.183.865	100.535,39	2.216.743.058	100.535,39	Dinas Kelape r
	Program Pengelolaa n Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton	16.454,12	16.783,20	1.244.825.000	17.118,87	1.307.066.250	17.461,24	1.372.419.563	17.810,47	1.441.040.541	18.166,68	1.513.092.568	18.166,7	Dinas Kelape r
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuh an usaha pengolaha n dan pemasaran hasil perikanan	Persen	5%	10%	500.000.000	14%	525.000.000	20%	551.250.000	25%	578.812.500	30%	607.753.125	30%	Dinas Kelape r
I I I	FUNGSI PENUNJANG URUSAN															
1	PERENCANAAN															
	Program Perencanaa n Pengendali an Dan Evaluasi Pembangu nan Daerah	Persentase keselarasa n program antara RPD dengan RKPD	Persen	100	100	448.887.020	100	457.864.760	100	467.022.056	100	476.362.497	100	485.889.747	100	Balit bang ren
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaa n Pembangu nan Daerah	Persentase keselarasa n program/k egiatan OPD pada Bidang Infrastrukt ur dan pengemba ngan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	Persen	100	100	315.578.980	100	321.890.560	100	328.328.371	100	334.894.938	100	341.592.837	100	Balit bang ren
2	KEUANGAN															



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Pengelola an Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengangga ran yang disusun tepat waktu	Persen	66,67	77,78	1.919.565.840	83,33	1.957.957.157	86,1	1.997.116.300	88,87	2.037.058.626	91,64	2.077.799.798	91,64	Bakeu
		Persentase pencairan belanja	Persen	N/A	95		95		95		95		95		95	
		Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Program Pengelola an Barang Milik Daerah	Persentase pengelola an BMD sesuai Standar	Persen	100	100	374.999.560	100	382.499.551	100	390.149.542	100	397.952.533	100	405.911.584	100	Bakeu
	Program Pengelola an Pendapatan Daerah	Jumlah penerimaa n:				1.489.189.780		1.518.973.576		1.549.353.047		1.580.340.108		1.611.946.910	0	Ba penda
		- Pajak daerah	Rp	N/A	35.100.000.000		37.365.000.000		39.630.000.000		41.895.000.000		44.160.000.000		4416000000	
		- Retribusi Daerah	Rp	N/A	17.860.904.788		18.058.856.185		18.308.003.777		18.524.938.749		18.762.141.886		18762141886	
		Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
3	KEPEGAWAIAN															
	Program Kepegawai an Daerah	Indeks Penerapan Penilaian Merit Dalam Manajeme n ASN	Poin	0,293	0,3	2.076.495.000	0,35	2.118.024.900	0,4	2.160.385.398	0,45	2.203.593.106	0,5	2.247.664.968	0,5	BKPP
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															

No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASLINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program penelitian dan pengemban gan daerah	Persentase inovasi hasil pengkajian dan keltlbanga n	Persen	100	100	1.720.000.000	100	1.754.400.000	100	1.789.488.000	100	1.825.277.760	100	1.861.783.315	100	Balit bang ren
5	PENGAWASAN															
	Program Penyelengg araan Pengawasa n	Persentase perangkat daerah yang menerapka n SPIP	Persen	A	A	5.252.466.280	A	5.357.515.606	A	5.464.665.918	A	5.573.959.236	A	5.685.438.421	A	Inspek torat
	Program Perumusan kebijakan, Pendampin gan dan Asistensi	Persentase aparat pengawasa n internal pemerinta h yang kompeten	Persen	100	100	1.179.441.240	100	1.203.030.065	100	1.227.090.666	100	1.251.632.479	100	1.276.665.129	100	Inspek torat
6	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															
	Program Pemerintah an dan Kesejahtera an Rakyat	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Poin	Sangat Baik	Sangat Baik	16.484.481.300	Sangat Baik	16.814.170.926	Sangat Baik	17.150.454.345	Sangat Baik	17.493.463.431	Sangat Baik	17.843.332.700	Sangat Baik	Setda
		Persentase produk hukum yang harmonis	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Program Dukungan dan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu	Persen	100	100	14.200.443.400	100	14.484.452.268	100	14.774.141.313	100	15.069.624.140	100	15.371.016.622	100	Setwa n
	Program Peningkata n Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengemban gan Dan Etika Serta Budaya Politik	Indeks pemahama n politik masyaraka t	Poin	B/70	B/75	1.128.578.220	B/80	1.151.149.784	A/85	1.174.172.780	A/90	1.197.656.236	A/95	1.221.609.360	A/95	Badan Kesba ng Pol



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASLINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang tertangani	Persen	100	100	1.172.699.600	100	1.196.153.592	100	1.220.076.664	100	1.244.478.197	100	1.269.367.761	100	Badan Kesbang Pol
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Poin	B/70	B/75	542.829.920	B/80	553.686.518	A/85	564.760.249	A/90	576.055.454	A/95	587.576.563	A/95	Badan Kesbang Pol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan Pengawasan ormas	Persen	100	100	107.324.080	100	109.470.562	100	111.659.973	100	113.893.172	100	116.171.036	100	Badan Kesbang Pol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	Sangat Baik	Sangat Baik	31.773.600	Sangat Baik	32.409.072	Sangat Baik	33.057.253	Sangat Baik	33.718.399	Sangat Baik	33.718.399	Sangat Baik	Badan Kesbang Pol
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	Persen	NA	85	1.016.281.080	90	1.036.606.702	95	1.057.338.836	100	1.078.485.612	100	1.100.055.325	100	Setda
		Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan	Poin	100	100		100		100		100					



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
		kemasyara katan														
		Indeks kepuasan layanan kehumasa n dan keprotokol eran	Poin	100	100		100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Forum yang dibina dan dikembang kan secara ekonomi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100%	100%	31.773.600	100%	32.409.072	100%	33.057.253	100%	33.718.399	100%	34.392.766	100%	Badan Kesba ng Pol
7	KEWILAYAHAN															
	Program Penyelengg aaran Pemerintah an Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan layanan pemerinta han kecamatan	Poin	Sangat Baik	Sangat Baik	5.197.710.000	Sangat Baik	5.301.664.200	Sangat Baik	5.407.697.484	Sangat Baik	5.515.851.434	Sangat Baik	5.626.168.462	Sangat Baik	Kecam atan
8	PENUNJANG															
	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencana an perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	640.944.586.700	100	653.763.478.434	100	666.838.748.003	100	680.175.522.963	100	693.779.033.422	100	Seluru h OPD
		Persentase penyampai an laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100	



No	BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	Indikator	SATUA N	BASELINE	TARGET KINERJA										Kondisi Akhir Tahun 2029	OPD
				2024	2025		2026		2027		2028		2029			
					Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp	Target.	Rp		
		Persentase tertib ketatausah aan kantor	Persen	95	100		100		100		100		100		100	
	TOTAL				977.915.115.529		1.150.923.630.984		1.143.505.647.292		1.166.340.552.875		1.191.174.861.070			

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dimana tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah periode berikutnya (2030-2034).

Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator kinerja yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan target indikator per tahun mulai tahun 2025 sampai 2030, dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya dan tantangan pembangunan kedepan serta kemampuan keuangan daerah, sebagaimana termuat dalam tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Angka)	BB (72,33)	BB (73,02)	BB (75,18)	BB (77,45)	BB (79,45)	A (80,34)	A (82,48)
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,88	71,95	73,89	75,60	77,34	79,09	80,85
3.	PDRB Per Kapita	Juta Ru- piah	35,45	38,01	40,57	43,13	45,69	48,25	50,00
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,94	6,28	6,63	6,97	7,31	7,66	8,00
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,66	15,26	14,86	14,46	14,06	13,66	13,26
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,10	2,82	2,62	2,47	2,35	2,25	2,00
7.	Indeks Infrastruktur	Persen	71,25	72,51	73,75	74,93	76,04	77,28	77,75
8.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	#N/A	67,25	67,42	67,60	67,77	67,94	68,29
9.	Indeks Desa	Angka	#N/A	74,14	76,09	78,04	79,99	81,94	83,89
10.	Indeks Kualitas Ling- kungan Hidup (IKLH)	Angka	68,36	80,71	80,84	80,97	81,10	81,24	81,37
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca								
	-Kumulatif	Ton CO ₂ e	N/A	870,06	868,48	866,90	865,31	863,73	862,14
	-Tahunan	Ton CO ₂ e	N/A	434,64	433,85	433,05	432,26	431,47	430,67

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,87	76,33	76,90	77,57	78,37	79,06	79,75
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	#N/A	8,30	8,10	7,90	7,70	7,50	7,30
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ Kapita	161.714.985,48	170.798.168,20	179.881.350,92	188.964.533,64	198.047.716,36	207.130.899,09	216.214.081,81
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	92,17	93,74	95,30	96,87	98,43	100,00	100,00
5	Indeks Kualitaas Lingkungan Hidup	Angka	68,36	80,71	80,84	80,97	81,10	81,24	81,37
6	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,08	2,73	3,38	4,04	4,69	5,34	5,99
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	9.915.644	16.815.644	17.815.644	18.815.644	19.815.644	20.815.644	21.815.644
8	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	12,05	20,44	21,41	22,35	23,28	24,19	25,09
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co ² e	29,34	41,07	44,86	48,20	51,17	53,82	57,37
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	135,98	135,98	135,73	135,48	135,23	134,97	134,72
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,20	2,81	0,97	0,92	0,90	0,86	0,85
13	Rasio Penduduk	Persen	100,35	98,73	98,66	98,59	98,54	98,48	98,43
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km ²	237,00	242,00	246,00	248,00	250,00	252,00	254,00
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,94	6,28	6,63	6,97	7,31	7,66	8,00
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,66	15,26	14,86	14,46	14,06	13,66	13,26

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							13		
3	PDRB Perkapita	Rp. Juta	35,45	38,01	40,57	43,13	45,69	48,25	50,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,10	2,82	2,62	2,47	2,35	2,25	2,00
5	Indeks Gini	Angka	0,330*	0,320	0,310	0,300	0,290	0,280	0,270
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,88	71,95	73,89	75,60	77,34	79,09	80,85
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,08	71,37	71,67	71,95	72,23	72,59	72,85
8	<i>Indeks Keluarga Sehat</i>	<i>Angka</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	Prevalensi Stunting	Persen	31,50	27,49	25,06	22,63	20,20	17,77	15,34
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,72	7,88	7,95	8,05	8,25	8,31	8,40
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,62	13,87	14,06	14,21	14,39	14,57
12	- Angka Literasi	Persen	48,02	49,04	50,02	51,05	52,01	53,06	54,08
	- Angka Numerasi	Persen	18,64	19,89	21,04	22,31	23,08	24,01	25,40
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	34,25	36,68	36,71	40,43	43,90	51,87	61,12
14	<i>Indeks Literasi Digital</i>	<i>Angka</i>	-	-	-	-	-	-	-
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	29,05	49,05	59,00	69,00	79,00	89,00	99,00
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	#N/A	76,08	76,36	76,64	76,91	77,19	77,74
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	32,26	32,66	33,36	34,27	34,76	35,63	36,27
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka	67,23	72,23	77,22	82,21	87,21	92,20	97,19
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	#N/A	67,25	67,42	67,60	67,77	67,94	68,29
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,467	0,445	0,430	0,400	0,380	0,358	0,335
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,25	92,54	92,83	93,13	93,42	93,71	94,00
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	60,00	61,50	63,00	64,50	66,00	67,50	69,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Persen	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,31
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	16,00	16,92	17,78	18,57	19,31	20,00	20,65
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,17	12,35	13,14	13,89	14,59	15,26	15,90
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	-	-	-	-	-	-	-
5	Rasio Kewirausahaan	Persen	4,87	5,12	5,38	5,62	5,87	6,11	6,35
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,62	73,40	76,18	78,96	81,74	84,52	87,30
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,32	49,00	52,68	56,36	60,04	63,72	67,40
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	-	-	-	-	-	-	-
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	-	-	-	-	-	-	-
10	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	Persen	-	-	-	-	-	-	-
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	-	-	-	-	-	-
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Milyar Rp.	1,467	1,537	1,610	1,687	1,767	1,851	1,938
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-	-	-	-	-	-	-
14	Indeks Infrastruktur	Persen	71,25	72,51	73,75	74,93	76,04	77,28	77,75
15	Persentase rumah layak huni	Persen	85,05	86,06	86,97	87,64	88,49	89,38	90,15
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	22,92	25,00	26,39	27,78	29,17	30,56	31,94

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	-	-	-	-	-	-	-
18	Tingkat Inflasi	Persen	2,08	2,06	2,04	2,02	2,00	1,98	1,96
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,70	87,99	88,18	88,59	88,94	89,88	90,16
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,88	3,95	3,99	4,03	4,05	4,08	4,10
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,92	4,02	4,09	4,19	4,31	4,42	4,53
4	Indeks Integritas nasional	Angka	71,95	72,31	72,52	72,86	73,04	73,86	74,11
	- Indeks Survey Penilaian Integritas	Angka	71,77	72,31	72,91	73,15	73,47	73,86	74,24
	- Nilai MCP KPK	Angka	63,50	66,19	67,37	68,10	68,22	69,67	70,60
	- Indeks Maturitas SPIP	Angka	3,512	3,652	3,785	3,846	3,950	4,082	4,184
5	Persentase Penegakan Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	47,83	48,66	51,11	54,32	57,97	61,57	64,73
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	-	-	-	-	-	-	-
8	Indeks Rasa Aman	Angka	-	-	-	-	-	-	-
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	-	-	-	-	-	-	-
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,21	3,35	3,49	3,63	3,76	3,89	4,02

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1. URUSAN PENDIDIKAN									
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Persen	95,48	97,52	99,56	100	100	100	100
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Persen	95,50	95,74	95,99	96,23	96,47	96,72	96,96
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Persen	45,42	55,15	61,64	68,13	74,62	75,38	76,14
1.4	Skor Kemampuan Numerasi SD	Persen	46,60	49,50	52,40	55,30	58,20	61,10	64,00
1.5	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Persen	55,45	56,95	58,45	59,95	61,45	62,95	64,45
1.6	Skor Kemampuan Literasi SD	Persen	50,05	52,55	55,05	57,55	60,05	62,55	65,05
1.7	Skor Kemampuan Literasi SMP	Persen	59,30	60,40	61,50	62,60	63,70	64,80	65,90
1.8	Iklim Kebinekaan SD	Persen	70,64	71,64	72,64	73,64	74,64	75,64	76,64
1.9	Iklim Kebinekaan SMP	Persen	69,78	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	75,78
1.10	Iklim Keamanan SD	Persen	73,55	74,45	75,35	76,25	77,15	78,05	78,95
1.11	Iklim Keamanan SMP	Persen	69,04	70,54	72,04	73,54	75,04	76,54	78,04
1.12	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	59,88	68,48	69,23	69,98	70,73	71,48	72,23
1.13	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	30,34	34,97	42,41	52,34	64,76	79,65	94,55
1.14	Indeks Pemerataan Guru SD	Persen	0,24	0,32	0,60	1,29	2,70	3,10	3,61
1.15	Indeks Pemerataan Guru SMP	Persen	0,25	0,26	0,38	0,71	1,38	1,55	1,78
1.16	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD	Persen	26,7	33,18	39,04	55,20	55,90	57,59	60,98
1.17	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP	Persen	34,5	56,05	85,00	89,72	96,90	100	100
1.18	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	N/A	65	70	75	80	85	90
2. URUSAN KESEHATAN									
2.1	Angka kematian ibu	Kelahiran	102	87	85	83	73	72	68

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		hidup							
2.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita	Persen	31,5	27,497	25,066	22,635	20,204	17,773	15,342
2.3	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	69,46	77,25	85,03	86,03	87,03	88,03	94,46
2.4	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Persen	89	90	91,5	93	94,25	95,75	97,05
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
3.1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	52,43	53,01	55,19	57,02	59,07	61,14	62,74
3.2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	57,47	57,47	57,79	58,12	58,44	58,77	59,09
3.3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	42,03	42,53	43,03	43,53	44,03	44,53	45,03
3.4	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen	0,74	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	91,11	92,68	94,24	95,81	97,37	100,00	100,00
3.6	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hu-	Persen	95,56	97,94	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	nian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)								
3.7	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	0	0	7,16	14,32	21,48	28,64	35,80
3.8	Persentase cakupan drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	48,79	49,29	49,77	50,26	50,75	51,24	51,73
3.9	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Analis dan Operator	Persen	6,85	7,95	8,95	10,31	12,06	14,21	16,62
3.10	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persen	40	45,45	50	57,14	66,67	68,97	74,07
3.11	Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	52,66	54,24	58,04	62,10	68,31	75,14	81,14
3.12	Rasio bangunan ber IMB	Persen	10,61	11,18	11,79	12,39	12,98	13,56	14,14
3.13	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	Persen	73,08	73,08	74,36	75,64	76,92	78,21	79,5
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
4.1	Persentase rumah layak huni	Persen	85,05	86,06	86,97	87,64	88,49	89,38	90,15
4.2	Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	Hektar	0	0	9,49	6,96	4,84	3,58	3,60
4.3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi	Persen	59,60	64,75	70,51	75,97	80,74	86,37	91,71

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)								
4.4	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5.1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	84	87	87	100	100	100	100
5.4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0	0	20	60	100	100	100
5.5	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6. URUSAN SOSIAL									
6.1	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	N/A	70	70,25	70,50	70,75	71	71,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.2	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	N/A	70	70,25	70,50	70,75	71	71,25
6.3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	N/A	70	70,25	70,50	70,75	71	71,25
6.4	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	N/A	70	70,25	70,50	70,75	71	71,25
6.5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	N/A	70	70,25	70,50	70,75	71	71,25
6.6	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	N/A	71	73	73,25	73,50	73,75	74
6.7	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	N/A	71	73	73,25	73,50	73,75	74
6.8	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	36,05	38	38,25	38,50	38,75	39	39,25
6.9	Persentase gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	36,05	38	38,25	38,50	38,75	39	39,25
6.10	Persentase lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	36,05	38	38,25	38,50	38,75	39	39,25
6.11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	36,05	38	38,25	38,50	38,75	39	39,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.12	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	36,05	38	38,25	38,50	38,75	39	39,25
6.13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	N/A	2.47	2.53	2.59	2.66	2.74	2.81
6.14	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
6.15	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Persen	N/A	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10
6.16	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	N/A	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10
6.17	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Meniskinan	Persen	N/A	4,13	4,31	4,51	4,72	4,95	5,21
6.18	Persentase Penerima Manfaat yang meningkatkan kemandirian ekonomi	Persen	N/A	4,13	4,31	4,51	4,72	4,95	5,21
6.19	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.20	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
6.21	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Persen	N/A	50	50	50	50	50	50
6.22	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7. URUSAN TENAGA KERJA									
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	0	0	0	25	30	35	40
7.2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas	Persen	0	2,00	3,92	4,00	4,50	5,00	6,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang meningkat produktivitasnya								
7.3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	5,20	7,00	10,00	12,00	14,00	16,00	20,00
7.4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social	Orang	14.167	19.045	19.100	19.150	19.200	19.250	19.300
8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
8.1	Persentase Anggaran Response Gender	Persen	2,44	1,25	4,25	7,25	10,25	13,25	16,25
8.2	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	57,47	59,90	62,33	64,77	67,20	69,63	72,06
8.3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
8.4	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang bersprespektif gender dan hak anak sesuai standar	Persen	90	100	100	100	100	100	100
8.5	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi dan atau penyusunan kebijakan	Persen	90	100	100	100	100	100	100
8.6	Indeks Pemenuhan Hak Anak	indeks	N/A	72,71	77,2	82,19	87,18	92,17	97,16
8.7	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.8	indeks perlindungan khusus anak	Indeks	N/A	72,71	77,2	82,19	87,18	92,17	97,16

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9. URUSAN PANGAN									
9.1	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	2,38	3,19	3,80	4,41	5,02	5,63	6,24
9.2	Skor pola pangan harapan	Poin	88,50	91,32	92,95	94,59	96,22	97,85	99,49
9.3	Persentase darah rentan rawan pangan	Persen	2,99	1,50	1,00	0,50	0,30	0,10	0
9.4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	96	100	100	100	100	100	100
10. URUSAN PERTANAHAN									
10.1	Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat	Persen	53,32	53,80	54,29	54,77	55,26	55,74	56,23
10.2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		100	100	100	100	100	100	100
10.3	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100
10.4	Persentase kejelasan hak milik atas tanah		53,72	54,21	55,10	55,58	56,07	56,55	57,04
10.5	Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan		96,67	96,67	100	100	100	100	100
11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
11.1	Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaan sampah	Persen	13,71	56,30	56,60	58,60	60,60	62,60	64,60
11.2	Indeks kualitas air	Indeks	55,91	77,38	77,58	77,78	77,98	78,18	78,38
11.3	Indeks kualitas udara	Indeks	89,96	92,16	92,26	92,36	92,46	92,56	92,66
11.4	Persentase RTH	Indeks	13,10	13,10	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	33,33	36,6	39,87	43,13	46,4	49,67	52,94
11.6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	50	100	100	100	100	100	100
11.7	Persentase ketaatan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	92,02	100	100	100	100	100	100
11.8	Persentase Penyuluh dan Pengawas Lingkungan Hidup serta Pengendali Dampak Lingkungan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0	0	20	40	60	80	100
12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
12.1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	1,26	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
12.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	21,1	24,1	27,1	30,1	33,1	36,1	39
12.3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12.4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12.5	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	96,94	97,81	98,79	99,77	100	100	100
12.6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12.7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12.8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
13.1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	17,3	17,3	24,3	31,2	38,1	41,6	48,6

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	3,4	3,4	6,9	10,4	13,8	17,3	24
13.3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	16,6	16,6	33,3	53	66,6	83,3	100
13.4	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	17,3	17,3	24,3	31,2	38,1	41,6	48,6
13.5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	4,1	4,1	8,3	15,2	30,5	41,6	52
13.6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Persen	16,6	16,6	33,3	53	66,6	83,3	100
14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
14.1	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate)	Persen	6,84	8,84	10,84	12,84	14,84	16,84	18,84
14.2	Angka kelahiran Remaja umur 15 s.d 19 tahun (ASFR 15 s.d 19 tahun)	Persen	9,72	N/A	13,72	15,72	17,72	19,72	21,72
14.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	37,1	39,1	41,1	43,1	45,1	47,1	49,1
14.4	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	16,66	14,66	12,66	10,66	8,66	6,66	4,66
14.5	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	N/A	60	65	70	75	80	85
15. URUSAN PERHUBUNGAN									
15.1	Persentase sarana prasarana penyelenggaraan LLAJ dalam kondisi baik	Persen	60,49	60,99	61,49	61,99	62,49	62,99	63,50
16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
16.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kuitas informasi publik pemerintah daerah	Persen	80	80,25	80,50	80,75	81	81,25	81,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.2	Tingkat Kematangan Aspek Pemerintah Digital	Persen	Terstandar- isasi- Kolaborasi 3;4	Ter- standar- isasi- Ko- laborasi 3;4	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
17. KOPERASI, UKM									
17.1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	izin	5	167	5	5	5	5	5
17.2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	15,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17.3	Persentase koperasi aktif	Persen	34,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17.4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	16,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17.5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	14,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
17.6	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	0,45	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
17.7	Pertumbuhan wirausaha	Persen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
17.8	Propoprsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.9	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	NA	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
18. URUSAN PENANAMAN MODAL									
18.1	Realisasi total terhadap target investasi	Investor	398	90	91	92	93	94	95
18.2	Persentase peningkatan investor yang ber-investasi	Persen	35,33	35,40	35,45	35,50	35,55	35,60	35,65
18.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	99,22	100	100	100	100	100	100
18.4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18.5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18.6	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	Persen	0,00	60,00	65,00	70,00	75,00	78,00	80,00
19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
19.1	Rasio wirausaha pemuda	Persen	21,50	31,50	41,50	51,50	61,50	71,50	81,50
19.2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	Persen	1,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19.3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	11,00	11,00	13,00	15,00	18,00	21,00	24,00
20. URUSAN STATISTIK									
20.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,90	2,93	2,96	2,99	3,00	3,02	3,05
21. URUSAN PERSANDIAN									
21.1	Tingkat kematangan keamanan siber	Persen	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1
22. URUSAN KEBUDAYAAN									
22.1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	84,03	85,18	100	100	100	100	100
22.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	13,75	13,96	14,41	14,67	14,99	15,32	15,65
22.3	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	N/A	N/A	50	60	70	80	90
22.4	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	33,70	41,87	51,47	60,13	69,16	78,19	87,23
22.5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	15,00	16,60	27,35	41,32	60,29	84,66	100
23. URUSAN PERPUSTAKAAN									
23.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
24. URUSAN KEARSIPAN									
24.1	Tingkat ketersediaan arsip	Persen	500	500	550	600	650	700	750
24.2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	47,67	51,09	52,98	53,75	61,38	72,55	83,49

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
25.1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	30.048	30.950	31.879	32.835	33.820	34.830	35.870
25.2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	47.825	47.965	48.104	48.244	48.385	48.526	48.668
25.3	Luasan kawasan konservasi	Ha	33.880	33.880	33.880	33.880	33.880	33.880	33.880
25.4	Angka konsumsi ikan	Persen	71,10	71,80	72,20	73,00	73,50	74,10	74,70
26. URUSAN PARIWISATA									
26.1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	Persen	10,66	10,66	20,66	30,66	40,66	50,66	60,66
26.2	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
26.3	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	27,40	27,40	32,40	37,40	42,40	47,40	52,40

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
27. URUSAN PERTANIAN									
27.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Ton	-14,381	170,820	342.92 6,000	515.0 28,00 0	687.1 05,00 0	859.18 6,000	1.031.30 6,000
27.2	Peningkatan produksi hortikultura	Ton	753	2.427	3.059	3.692	4.324	4.957	5.589
27.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Ton	1.196	1.280	1.382	1.506	1.657	1.839	2.060
27.4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	13.504	13.504	13.504	13.50 4	13.50 4	13.504	13.504
27.5	Tingkat pengendalian penyakit hewan menu- lar strategis (PHMS)	Persen	77,00	80,21	95,25	100	100	100	100
27.6	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)	Persen	30	40	50	60	70	80	90
27.7	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	90	95	100	100	100	100	100
27.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	90	95	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
27.9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	89	90	92	95	97	99	100
27.10	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	0	0	60	70	80	90	100
27.11	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	5,39	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	16,77
28. URUSAN PERDAGANGAN									
28.1	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	97,92	100	100	100	100	100	100
28.2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	0	31,21	32,15	33,11	34,10	35,13	36,18
28.3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	4,26	5,33	6,66	8,32	10,40	13,00	16,25
28.4	Nilai ekspor barang	US\$	N/A	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	4.000.000
28.5	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	48,00	50	60	70	80	90	100
28.6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	N/A	60	70	80	85	90	90
29.URUSAN PERINDUSTRIAN									
29.1	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	0,92	0,95	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29.2	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen		60	70	80	85	90	95
29.3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Informasi	26	168	35	50	50	50	50
30. URUSAN PERDAGANGAN									
30.1	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	97,92	100	100	100	100	100	100
30.2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	0	0	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
30.3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	4,26	6	6	6	6	6	6
30.4	Nilai ekspor barang	US\$	NA	0	0	0	0	0	0
30.5	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	48,0	50	60	70	80	90	100
30.6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	NA	0	0	0	0	0	0
31. URUSAN PERINDUSTRIAN									
31.1	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	0	0	0,95	0,98	0,92	0,95	0,1
31.2	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	0	0	0	0	0	442	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
31.3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Informasi	0	200	150	46	80	60	30
32. URUSAN TRANSMIGRASI									
32.1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	16,13	18,00	20,00	20,00	22,00	22,00	25,00
32.2	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	13,66	15,00	15,00	17,00	17,00	20,00	20,00
32.3	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	22,75	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	35,00
33. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
33.1	Indeks Kematangan Organisasi	Persen	29	29	31	33	35	37	37
33.2	Efektivitas Kinerja Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
33.3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
33.4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	80	80	80	80	80	80	80
33.5	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
33.6	Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Indeks	98	100	100	100	100	100	100
33.7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Indeks	Cukup Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
34. UNSUR SEKRETARIAT DPRD									
34.1	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100
34.2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100
34.3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
35. URUSAN PERENCANAAN									
35.1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
35.2	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
35.3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	67	100	100	100	100	100	100
35.4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
35.5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
36. UNSUR KEUANGAN									
36.1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	37,27	35	32	30	30	30	30
36.2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	NA	40	40	40	40	40	40
36.3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	NA	85	88	90	92	93	94

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
36.4	Persentase penurunan SILPA	Persen	51,25	23,42	24,5	28,19	29	31	33
36.5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
36.6	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	-0,66	1	1,1	2,75	3,2	4,3	5,6
36.7	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	28,25%	29%	30%	30%	30%	30%	30%
36.8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36.9	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37. UNSUR KEPEGAWAIAN									
37.1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	63	65	70	75	80	83	85
37.2	Persentase Pengembangan Karier ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	93,89	94	95	95	95	95	95
37.3	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	17,91	18	20	25	30	33	35
37.4	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	Persen	77	80	85	85	90	90	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
38. UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
38.1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	30	55	50	60	70	80	85
38.2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	95	95	95	95	95	95	95
38.3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	35	40	45	50	60	65	70
38.4	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	20	30	35	40	50	60	80
39. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
39.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
39.2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
39.3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
39.4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
40. UNSUR PENGAWASAN									
40.1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	75	75	75	75	80	80	80
40.2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	N/A	51,45	57,75	64,31	70,54	76,87	83,20
40.3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
41. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
41.1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
41.2	Persentase Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
41.3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
41.4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
41.5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100



PENUTUP

BAB

5

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 memberikan panduan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun. Agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu diatur kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Periode 2025-2030 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, dan berkewajiban menyebarluaskan atau mempublikasikan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bertugas melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
3. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mengawal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
4. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Seluruh perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;

6. Penyusunan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2029 wajib berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
7. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka perlu dilakukan pengendalian risiko strategis pemerintah daerah untuk menunjang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
8. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

5.2. Manajemen Risiko

Dalam rangka menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek daerah kepada Bupati.

a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, sinkronisasi regulasi serta pewujudan cita-cita dalam RPJPD kepada dokumen perencanaan turunannya serta meningkatkan kualitas desain program prioritas pembangunan daerah. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah yang meliputi: 1)RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 2)Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 3)Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek meliputi : 1)RKPD Kabupaten Polewali Mandar dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten

Polewali Mandar; 2) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 3) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pada jangka menengah dan jangka pendek, meliputi : 1) Pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah; 2) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; 3) Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.

5.3. Perubahan RPJMD

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Terjadi perubahan yang mendasar, meliputi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
4. Perubahan terhadap target kinerja tahunan RPJMD dapat dilakukan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.4 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Periode 2025-2029. Tahun 2030 merupakan tahun transisi kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2029.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan dan sekaligus mengisi kekosongan hukum, maka penyusunan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 telah disediakan target kinerja daerah dan program perangkat daerah mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030. Namun demikian kinerja tahun 2030 menjadi tanggung jawab kepala daerah periode selanjutnya. RKPD masa transisi (tahun 2030) tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya yaitu RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2030-2034.